



PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH RPJPD 2025 - 2045



VISI
Kabupaten Maluku Tenggara
Maju, Inklusif, Berbudaya dan Berkelanjutan



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran stretegi.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Pasal 2

RPJPD merupakan :

- a. Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- b. Dokumen rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan keterpaduan keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan Masyarakat yang berkeadilan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Maluku dan RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045.

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJPD menjadi pedoman perumusan materi visi dan misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi empat tahapan periode.
- (3) Tujuan penetapan RPJPD adalah untuk :
 - a. mendukung koordinasi dan partisipasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar ruang dan antar waktu serta antar fungsi pemerintahan antar pusat dan daerah;

- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan penanganan pelaksanaan dan pengawasan; dan
- d. menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II RPJPD

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Bappelitbangda Menyusun RPJPD.
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. bab III Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. bab IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. bab VI Penutup.
- (3) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJPD.
- (2) Dalam hal pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappelitbangda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 13 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 11 Juli 2025

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

BERNARDUS RETTOB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,
PROVINSI MALUKU : (2/24/2025)

Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DEBBIE P. J. BUNGA, SH

The image shows an official circular stamp of the Regional Secretariat of Maluku Tenggara. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA" around the top edge and "SEKRETARIAT DAERAH MALUKU TENGGARA" around the bottom edge. In the center, there is a shield-shaped emblem with a bird and a star. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembangunan daerah Provinsi Maluku serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan bagi pelaksanaan pembangunan. Penentuan arah pembangunan sebagai pedoman, akan menjamin terwujudnya sinkronisasi serta konsistensi pencapaian tujuan sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat.

RPJPD yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, adalah pedoman pelaksanaan pembangunan jangka panjang di daerah. RPJPD memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah.

RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045 merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. RPJPD memberikan penjabaran tentang tujuan dibentuknya Kabupaten Maluku Tenggara dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan.

Substansi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2045 meliputi gambaran umum kondisi daerah, tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana, pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi daerah, serta arah kebijakan dan sasaran pokok yang memuat setidaknya kerangka kerja pembangunan perlima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.

RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara merupakan acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki kurun waktu 5 tahunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian maka

pembangunan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara hingga tahun 2045 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi serta Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 262

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	5
1.4. Maksud dan Tujuan	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	11
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	11
2.1.1. Aspek Geografis	11
2.1.1.1. Letak dan Luas Wilayah	11
2.1.1.2. Wilayah Administratif	14
2.1.1.3. Topografi	16
2.1.1.4. Geologi	16
2.1.1.5. Hidrologi	17
2.1.1.6. Klimatologi	18
2.1.1.7. Penggunaan Lahan	19
2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana	20
2.1.1.9. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	21
2.1.2. Aspek Demografis	40
2.1.2.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk	40
2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	42
2.1.2.3. Persebaran Penduduk	42
2.1.2.4. Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	43
2.1.2.5. Rasio Ketergantungan Penduduk	44
2.1.2.6. Keberadaan Masyarakat Adat Kei	45
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	47
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	47
2.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	47

2.2.1.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	56
2.2.1.3.	Tingkat Kemiskinan	58
2.2.1.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	62
2.2.1.5.	Laju Inflasi	65
2.2.1.6.	Indeks Gini	68
2.2.2.	Kesejahteraan Sosial Budaya	69
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Gender	69
2.2.2.2.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	69
2.2.2.3.	Prevalensi Stunting	70
2.3.	Aspek Daya Saing	71
2.3.1.	Daya Saing Ekonomi Daerah	71
2.3.1.1.	Potensi Sumber Daya Ekonomi Daerah	71
2.3.1.2.	Produk Domestik Regional Bruto	77
2.3.1.3.	PDRB Perkapita	78
2.4.	Evaluasi Hasil RPJPD 2005 – 2025	80
2.4.1.	Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025	80
2.4.2.	Sasaran dan Arah Pembangunan 2005-2025	81
2.4.3.	Evaluasi Capaian RPJPD 2005-2025	93
2.4.3.1.	Realisasi Indikator Makro Pembangunan Daerah	93
2.4.3.2.	Realisasi Indikator Sasaran Pembangunan RPJPD 2005-2025	93
2.5.	Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik	98
2.5.1.	Proyeksi Kependudukan	98
2.5.1.1.	Jumlah dan Distribusi Penduduk	99
2.5.1.2.	Kepadatan Penduduk	100
2.5.1.3.	Struktur Kependudukan	101
2.5.2.	Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik	102
2.5.2.1.	Perumahan	102
2.5.2.2.	Akses Air Minum Layak	103
2.5.2.3.	Listrik	105
2.5.2.4.	Akses Telekomunikasi	106
2.5.2.5.	Aksesibilitas dan Konektivitas	106
2.5.2.6.	Proyeksi Kebutuhan Pangan Jangka Panjang	108
2.6.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	110
2.6.1.	Kebijakan Pengembangan Wilayah	110
2.6.2.	Rencana Struktur Ruang	111

2.6.3. Rencana Pola Ruang	116
2.6.4. Kawasan Strategis	117
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	119
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	119
3.1.1. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	121
3.1.1.1. Kesejahteraan Ekonomi	121
3.1.1.2. Kesejahteraan Sosial Budaya	122
3.1.2. Permasalahan Aspek Daya Saing	122
3.1.2.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	122
3.1.2.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia	123
3.1.2.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah	124
3.1.2.4. Daya Saing Iklim Investasi	125
3.1.3. Aspek Pelayanan Umum sesuai Urusan dan Bidang Urusan Pemerintahan	125
3.1.4. Permasalahan Daerah Jangka Panjang sesuai Analisa dalam KLHS	140
3.2. Isu Strategis Daerah	141
3.2.1. Isu Strategis Nasional	146
3.2.2. Isu Strategis Provinsi Maluku	146
3.2.3. Isu Strategis Kabupaten Maluku Tenggara	148
3.2.4. Isu Strategis KLHS Kabupaten Maluku Tenggara	152
3.2.5. Rekomendasi Arah Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara sesuai KLHS	155
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	163
4.1. Visi	163
4.2. Sasaran Visi	164
4.3. Misi	169
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	171
5.1. Arah Kebijakan	171
5.2. Sasaran Pokok	173
5.2.1. Arah Pembangunan Daerah	174
5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi	175
5.2.3. Indikator Utama Pembangunan	194
BAB VI PENUTUP	199
6.1. Kaidah Pelaksanaan dan Pembiayaan Pembangunan	199
6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan	199
6.1.2. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	199
6.1.3. Manajemen Resiko	200

6.2.	Mekanisme Perubahan	200
6.3.	Kerja Sama Wajib Pemerintah Daerah	200
6.4.	Komunikasi Publik	201
6.4.1.	Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Publik	202
6.4.2.	Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Non Publik	202
6.4.3.	Manajemen Investasi	202

DAFTAR TABEL

2.1.	Perkembangan Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara	10
2.2.	Nama Pulau di Kabupaten Maluku Tenggara	11
2.3.	Jarak Tempu Ibu Kota Kecamatan Ke Ibu Kota Kabupaten	14
2.4.	Sungai dan Letaknya di Kabupaten Maluku Tenggara.....	16
2.5.	Kondisi Klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara	18
2.6.	Jumlah Lahan yang Tersedia dan Aktifitas Penggunaanya	18
2.7.	Tingkat Rentan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	25
2.8.	Pengelolaan Persampahan	29
2.9.	Alih Fungsi Lahan Tahun 2011-2023	30
2.10.	Sebaran Bentang Alam dan Ekoregion di Kabupaten Maluku Tenggara	33
2.11.	Capaian Indikator TPB.....	34
2.12.	Kondisi Kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023	40
2.13.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara	41
2.14.	Ratio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023	44
2.15.	Ratschaap Kabupaten Maluku Tenggara	44
2.16.	Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023.....	47
2.17.	Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019-2023	48
2.18.	Perbandingan Capaian RLS Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019-2023	49
2.19.	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019-2023	51
2.20.	Perbandingan Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Nasinal Tahun 2019-2023	52
2.21.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2023	56
2.22.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Maluku Tenggara Menurut Kecamatan	58
2.23.	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023	60
2.24.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023	61
2.25.	Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Jenis Barang/Jasa Penyumbang Inflasi Terbesar Menurut Bulan Tahun 2022.....	63
2.26.	Potensi Wilayah Sektor Perikanan dan Lokasi Wilayah Sektor Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara	68
2.27.	Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2024	69
2.28.	Potensi Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara	69
2.29.	Produksi Tanaman Pangan Utama Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2023 ...	72
2.30.	Pendapatan Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023	75

2.31.	Proyeksi Penduduk Jangka Panjang Kabupaten Maluku Tenggara	93
2.32.	Proyeksi Jumlah dan Distribusi Penduduk Maluku Tenggara Menurut Kecamatan	94
2.33.	Proyeksi Kepadatan Penduduk Maluku Tenggara menurut Kecamatan	95
2.34.	Proyeksi Struktur Kependudukan Menurut Kelompok Umur	96
2.35.	Proyeksi Ratio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara Tahu 2025-2045	97
2.36.	Proyeksi dan Analisis Kepemilikan Serta Kondisi Perumahan Warga	98
2.37.	Proyeksi Kebutuhan Rumah Masyarakat Periode Jangka Panjang 2025-2045	98
2.38.	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Jangka Panjang di Kabupaten Maluku Tenggara	99
2.39.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Layak Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045	100
2.40.	Status Daya Dukungan Air Bersih di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045..	100
2.41.	Kebutuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Akseibilitas dan Konektivitas dengan Lokasinya	102
2.42.	Proyeksi Status Daya Dukung Pangan Jangka Panjang, 2025-2045	104
2.43.	Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	105
2.44.	Rencana Struktur Ruang	106
2.45.	Rencana Pengembangan Kawasan Strategis	111
2.46.	Lokus Pengembangan Nilai Budaya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	112
3.1.	Megatren Global, Isu Strategis Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Tahun 2025-2029	136
3.2.	Rekomendasi Arah Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara sesuai KLHS	148
4.1.	Sasaran Visi, Indikator dan Target 2045	190
5.1.	Hubungan Sasaran Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045 dengan Sasaran Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045	195
5.2.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045	197
5.3.	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045	199
5.4.	Pelaksanaan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Tahapan RPJPD Tahun 2025-2045	214
5.5.	Indikator Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045	221

DAFTAR GAMBAR

1.1.	Keterhubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	6
2.1.	Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)	12
2.2.	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia	13
2.3.	Luas Wilayah Administrasi per Kecamatan	13
2.4.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Maluku Tenggara	14
2.5.	Peta Topografi Kabupaten Maluku Tenggara	15
2.6.	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Maluku Tenggara	19
2.7.	Kondisi Daya Dukung Air Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045	23
2.8.	Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Maluku Tenggara 2025-2045	23
2.9.	Peta Kerentanan Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara	26
2.10.	Fungsi dan Pemanfaatan Hutan menurut Kecamatan	27
2.11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	29
2.12.	Uraian Komponen Jasa Lingkungan Berdasarkan Tipe Manfaat	34
2.13.	Jumlah Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2007-2023	40
2.14.	Persebaran Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023	42
2.15.	Penduduk Maluku Tenggara Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2023	42
2.16.	Ratio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara 2012-2023	43
2.17.	Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010-2023	46
2.18.	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023	47
2.19.	Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010-2023	48
2.20.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023	49
2.21.	Perkembangan RLS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010-2023	50
2.22.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023	50
2.23.	Perkembangan HLS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010-2023	51
2.24.	Pengeluaran Riil Perkapita (PRP) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023	52
2.25.	Perkembangan Angka Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010-2023	52
2.26.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2023	53
2.27.	Pertumbuhan Rata-rata Lapangan Usaha PDRB atas ADKH Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010-2023	54
2.28.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara 2005-2023	55

2.29.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014-2023.....	57
2.30.	Peta Persebaran Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Maluku Tenggara 2023	59
2.31.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2006-2023	60
2.32.	Perbandingan TPT Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019-2022	61
2.33.	Laju Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009-2023	62
2.34.	Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019-2023	63
2.35.	Indeks Gini Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2023	65
2.36.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010-2022	66
2.37.	Prevalensi Stunting di Kabupaten Maluku Tenggara 2019-2024	67
2.38.	Areal Pengembangan Rumput Laut Kabupaten Maluku Tenggara	69
2.39.	Peta Lokasi Pengembangan Kawasan Strategis Ngjar Varat Kabupaten Maluku Tenggara	70
2.40.	PHH dan RCP Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2023	71
2.41.	PDRB ADHK, PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010-2022.....	74
2.42.	PDRB Perkapita ADHK dan ADHB (Rp.Juta) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010-2023	75
2.43.	Persebaran Penduduk Maluku Tenggara menurut Kecamatan	94
2.44.	Struktur Penduduk dalam Piramida Penduduk	96
2.45.	Peta Pola Ruang Kabupaten Maluku Tenggara	111
5.1.	Tahapan Pelaksanaan RPJPD 2025-2045	192
5.2.	Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.....	193

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai amanat Pembukaan Undang–Undang Dasar Tahun 1945, maka pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sebagai suatu kesatuan, yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip–prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Lebih lanjut dalam rangka pembangunan daerah, Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 mengamanatkan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud berupa rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perencanaan pembangunan daerah untuk jangka Menengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu tahunan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 264 Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014, Ayat (3) menyebutkan RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara periode sebelumnya adalah RPJPD Tahun 2005–2025, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009.

RPJPD 2005–2025 berakhir pada tahun 2025. Untuk itu, sesuai amanat Peraturan Perundang–undangan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyusun RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2045.

Urgensi penyusunan RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2045 merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan, menyediakan peta jalan pembangunan Maluku Tenggara 20 tahun ke depan, serta sekaligus menyelaraskan agenda pembangunan pemerintah daerah dengan agenda pembangunan pemerintah yang merupakan suatu kesatuan, dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJPD 2025–2045 merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pada 4 (empat) periode pembangunan jangka menengah.

RPJPD 2025–2045 juga disusun dalam kaitan dengan pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045. Terhadap upaya mendorong pertumbuhan menuju Indonesia Emas Tahun 2045, maka

RPJPD 2025–2045 diarahkan guna ikut berkontribusi dalam rangka akselerasi pembangunan dan pertumbuhan di daerah, yang secara akumulatif memajukan pembangunan nasional.

Area Transformasi Indonesia yang menjadi arah pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025–2045, yang meliputi: 1) Transformasi Sosial; 2) Transformasi Ekonomi; 3) Transformasi tata Kelola; 4) Supremasi Hukum dan Stabilitas; 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; 6) Pembangunan Wilayah merata dan berkeadilan; 7) sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan; serta 8) kesinambungan pembangunan, menjadi pedoman perumusan kebijakan tahapan pembangunan daerah dalam 4 (empat) periode jangka menengah, yang dilaksanakan dalam periode pembangunan jangka panjang 2025–2045.

Perumusan kebijakan pembangunan dalam tahapan 4 (empat) periode jangka menengah sebagaimana dimaksud, sekaligus menegaskan urgensi lainnya dari penyusunan RPJPD. Sesuai amanat Pasal 265 Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Setiap calon kepala daerah yang berkontestasi pada 4 (empat) periode Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), masing-masing pada periode 2025–2029; 2030–2034; 2035–2039; dan 2040–2045, wajib merumuskan Visi dan Misi–nya merujuk pada RPJPD 2025–2045.

Terhadap uraian dan urgensi RPJPD yang disebutkan, maka RPJPD 2025–2045 akan memainkan peranan penting dalam kerangka integrasi kebijakan pusat dan daerah, serta menjamin konsistensi, keselarsan dan keberlanjutan pembangunan dalam periode 20 Tahun ke depan. Aspek-aspek kebijakan yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) area Transformasi Indonesia secara rinci diuraikan menjadi arah kebijakan di tingkat Kabupaten Maluku Tenggara.

Subtansi pokok RPJPD yang meliputi, Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan, dirumuskan berdasar pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD periode sebelumnya, identifikasi permasalahan pembangunan, kajian lingkungan hidup strategis, proyeksi indikator makro, keuangan dan kependudukan, serta aspek perubahan lingkungan strategis global, nasional, regional dan lokal yang diprediksi terjadi selama periode 2025 sampai 2045.

Analisis dan kajian lingkungan hidup strategis mengarahkan RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2025–2045 untuk sebesar–besarnya mampu memberikan arah yang jelas terhadap cita-cita pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Termasuk pula melalui perencanaan jangka panjang ini, maka kontribusi dan dukungan Kabupaten Maluku Tenggara menjadi nyata menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2025–2045 disusun berdasarkan.

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 140).
30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratchap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D); dan
32. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 256).

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

RPJPD memiliki keterhubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat Daerah maupun dokumen perencanaan nasional. RPJPD menjadi pedoman umum dalam perumusan RPJPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Di level daerah, RPJPD berhubungan dengan dokumen perencanaan seperti RTRW, KLHS, RPPLH, Hasil evaluasi periode sebelumnya, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Keterhubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya diuraikan sebagai berikut:

1. RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara dengan RPJPD

RPJPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, substansi yang dipedomani mencakup penyelarasan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah dengan nasional. Dengan demikian, RPJPD sekaligus berfungsi untuk menjabarkan lebih detail rencana pembangunan jangka panjang tingkat nasional, disesuaikan dengan kondisi, potensi, karakteristik dan kebutuhan spesifik daerah. Sehingga dengan adanya RPJPD yang selaras dengan RPJPD, maka pembangunan daerah diarahkan untuk berkontribusi secara efektif dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

2. RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara dengan RTRW

RPJPD disusun berpedoman pada RTRW, substansi yang dipedomani mencakup penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Rencana pembangunan yang dituangkan dalam RPJPD berpedoman pada kebijakan tata ruang yang ada di dalam RTRW. Sehingga dalam keterkaitan dengan penyusunan RPJPD, RTRW menjadi arah pemanfaatan ruang sesuai Pola dan Struktur Ruang di daerah. Demikian

halnya, program strategis pengembangan wilayah di dalam RTRW menjadi referensi perumusan kebijakan kewilayahan di dalam RPJPD.

3. RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara dengan RPJPD Provinsi Maluku

Secara hierakis, RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara berada di bawah RPJPD Provinsi Maluku. Hal ini berarti, RPJPD kabupaten Maluku Tenggara disusun harus selaras dengan RPJPD Provinsi Maluku. Keselarasan dimaksud antara lain memastikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku. Secara akumulatif Kabupaten Maluku Tenggara bersama kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Maluku diarahkan untuk berkontribusi bagi pencapaian target–target strategis Provinsi Maluku.

4. RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara dengan KLHS

RPJPD disusun dengan memperhatikan KLHS. Di mana KLHS merupakan instrumen yang digunakan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJPD. KLHS membantu memastikan bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah mempertimbangkan, memperhatikan dan mengakomodir isu serta potensi dampak pembangunan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

5. RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Hasil Evaluasi RPJPD periode sebelumnya

Penyusunan RPJPD memperhatikan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya. Hal ini penting dan strategis dalam kerangka mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan RPJPD periode sebelumnya. Hasil evaluasi memberikan landasan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan RPJPD periode berikutnya.

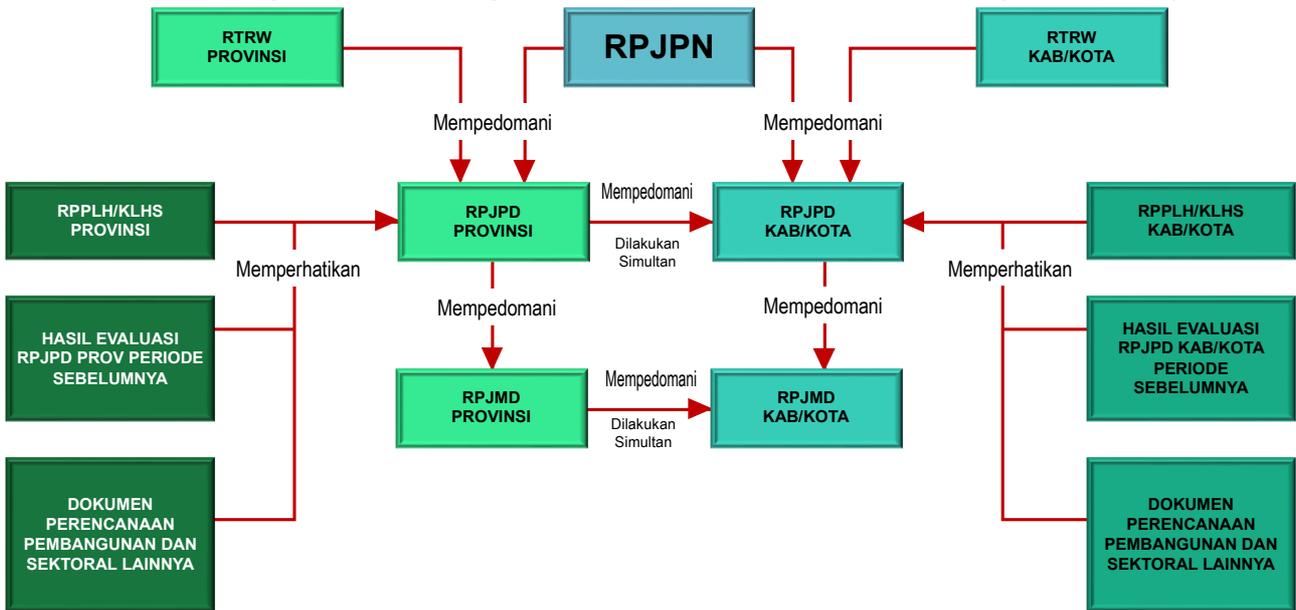
6. RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara dengan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara

RPJPD sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Secara substantif, keterkaitan RPJPD dengan RPJMD adalah menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah. Dengan demikian, RPJMD menjadi penjabaran dari RPJPD, dengan memuat prioritas pembangunan daerah yang lebih detail dalam jangka waktu lima tahunan, untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang yang tertuang di dalam RPJPD.

Keterkaitan RPJPD dengan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana diuraikan di atas, tergambar pada gambar berikut.

Gambar 1.1.

Keterhubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber: Instruksi Mendagri Nomor: 1 Tahun 2024.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2045 dimaksudkan sebagai arah pembangunan daerah dalam periode 20 tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2045.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD 2025–2045 adalah:

1. menjadi acuan dan pedoman dalam upaya pencapaian Visi Jangka Panjang Kabupaten Maluku Tenggara, melalui sinergi dan partisipasi multipihak, guna tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
2. menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah, dalam empat periode jangka menengah yaitu 2025–2029; 2030–2034; 2035–2039; dan 2040–2045;
3. menjamin terciptanya integrasi, keselarasan, dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Indonesia Emas Tahun 2045.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2045 disusun dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran umum materi RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, meliputi:

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum
- 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2045
- 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
- 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, yaitu:

3.1. Permasalahan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

3.2. Isu Strategis Daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu–isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menguraikan keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang:

4.1. Visi

Menyajikan uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah di Tahun 2045

4.2. Misi

Misi dituangkan dalam paparan secara sistematis dan penjelasan yang memadai. Misi merupakan rumusan tentang bagaimana Visi diwujudkan. Olehnya itu Misi harus mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan Visi. Misi disusun dengan lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode.

1.1. Arah Kebijakan

Merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahunan dalam rangka pencapaian visi jangka panjang (20 tahun):

1.1.1. Arah Kebijakan periode 2025 – 2029

1.1.2. Arah Kebijakan periode 2030 – 2034

1.1.3. Arah Kebijakan periode 2035 – 2039

1.1.4. Arah Kebijakan periode 2040 – 2045

1.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Aspek Geografis

2.1.1.1. Letak dan Luas Wilayah

Secara Astronomis, Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada posisi kordinat $5^{\circ} 12' 19,427''$ - $6^{\circ} 06' 18,275''$ Lintang Selatan dan $132^{\circ} 21' 39,082''$ - $133^{\circ} 15' 31,442''$ Bujur Timur. Luas Wilayah Maluku Tenggara sesuai Data BPS yang dirincikan menurut kecamatan tahun 2023 sebesar 1.031,81 km². Sedangkan menurut RTRW, Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 100.858 hektare atau seluas 1008,58 Km².

Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sudah mengalami beberapa kali penyesuaian. Luas Awal Kabupaten Maluku Tenggara pada saat terbentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1953 yaitu seluas 1.848.575,8 km². Penyesuaian terhadap luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara diakibatkan adanya pemekaran daerah otonom baru serta perubahan kebijakan pemerintah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Perkembangan Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 1958 s.d Saat Ini

No	Uraian	Luas Wilayah	Tahun	Keterangan
1	Saat Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara	1.848.575,8 km ²	1958	Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 23 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
2	Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat	119.880 km ²	1999-2003	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
3	Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru	34.821km ²	2003-2007	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru
4	Pembentukan Kota Tual	4.212,51 km ²	2007-2014	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual
5	Perubahan Kebijakan Pemerintah (laut adalah kewenangan Provinsi)	1.031,81km ²	2019 – saat ini	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 thn 2017 tentang kode dan data wilayah pemerintahan tahun 2019

Kabupaten Maluku Tenggara adalah daerah berciri kepulauan. Terletak pada gugusan Kepulauan Kei, dengan jumlah pulau sebanyak 75 pulau. Dari jumlah pulau tersebut, 12 pulau di antaranya dihuni secara tetap, dan 63 pulau sampai saat ini tidak berpenghuni, hanya sebagai tempat mencari menjalankan usaha. Dua pulau terbesar yang sekaligus menjadi pusat kegiatan masyarakat adalah

Pulau Kei Besar dan pulau Kei kecil. Sebagai daerah kepulauan Maluku Tenggara memiliki garis pantai yang panjang mencapai 632,15 km.

Tabel 2.2
Nama Pulau di Kabupaten Maluku Tenggara

No	Nama Pulau	Keterangan	No	Nama Pulau	Keterangan
1	Pulau Akran	Tidak Berpenghuni	39	Pulau Nuhu Yuthu	Berpenghuni/PPKT
2	Pulau Amut	Tidak Berpenghuni	40	Pulau Nura	Tidak Berpenghuni
3	Pulau Anan	Tidak Berpenghuni	41	Pulau Ohoiew	Tidak Berpenghuni
4	Pulau Aran Kot	Tidak Berpenghuni	42	Pulau Ohoitir	Berpenghuni
5	Pulau Aran Laai	Tidak Berpenghuni	43	Pulau Ohoiwa	Berpenghuni
6	Pulau Daar	Tidak Berpenghuni	44	Pulau Sawer	Tidak Berpenghuni
7	Pulau Dianpulau	Berpenghuni	45	Pulau Silaar	Tidak Berpenghuni
8	Pulau Ditanloy	Tidak Berpenghuni	46	Pulau Tangwain	Tidak Berpenghuni
9	Pulau Duvin	Tidak Berpenghuni	47	Pulau Tanimbar Kei	Berpenghuni
10	Pulau Er	Tidak Berpenghuni	48	Pulau Tarwa	Berpenghuni
11	Pulau Far	Tidak Berpenghuni	49	Pulau Ur	Berpenghuni
12	Pulau Hoat	Tidak Berpenghuni	50	Pulau Varkukur	Tidak Berpenghuni
13	Pulau Ivat	Tidak Berpenghuni	51	Pulau Vathabo	Tidak Berpenghuni
14	Pulau Karodi	Tidak Berpenghuni	52	Pulau Vatkaba	Tidak Berpenghuni
15	Pulau Kei Kecil	Berpenghuni	53	Pulau Vatkan	Tidak Berpenghuni
16	Pulau Labulin	Tidak Berpenghuni	54	Pulau Vatmanir	Tidak Berpenghuni
17	Pulau Lasmanuk	Tidak Berpenghuni	55	Pulau Vatnam	Tidak Berpenghuni
18	Pulau Lea	Tidak Berpenghuni	56	Pulau Vatnesor	Tidak Berpenghuni
19	Pulau Lesmanuk	Tidak Berpenghuni	57	Pulau Vatngaruw	Tidak Berpenghuni
20	Pulau Lik	Berpenghuni	58	Pulau Vatngerit	Tidak Berpenghuni
21	Pulau Lor An Ret	Tidak Berpenghuni	59	Pulau Vatniv	Tidak Berpenghuni
22	Pulau Manir	Berpenghuni	60	Pulau Vatroaohoi	Tidak Berpenghuni
23	Pulau Mardoksarwak	Tidak Berpenghuni	61	Pulau Vatsau	Tidak Berpenghuni
24	Pulau Masular	Tidak Berpenghuni	62	Pulau Vatslom	Tidak Berpenghuni
25	Pulau Meuhu	Tidak Berpenghuni	63	Pulau Vatvangam	Tidak Berpenghuni
26	Pulau Nai	Tidak Berpenghuni	64	Pulau Vatvyah	Tidak Berpenghuni
27	Pulau Nasular	Tidak Berpenghuni	65	Pulau Vatwihian	Tidak Berpenghuni
28	Pulau Ngaf	Tidak Berpenghuni	66	Pulau Vaut Lelen	Tidak Berpenghuni
29	Pulau Ngirit	Tidak Berpenghuni	67	Pulau Vaut Vihian Koit	Tidak Berpenghuni
30	Pulau Ngiru	Tidak Berpenghuni	68	Pulau Vaut Vihian Laai	Tidak Berpenghuni
31	Pulau Ngodan	Tidak Berpenghuni	69	Pulau Waha	Tidak Berpenghuni
32	Pulau Nura	Tidak Berpenghuni	70	Pulau War	Tidak Berpenghuni

No	Nama Pulau	Keterangan	No	Nama Pulau	Keterangan
33	Pulau Nuhuru	Tidak Berpenghuni	71	Pulau Warbal	Berpenghuni
34	Pulau Nuhu Sau	Tidak Berpenghuni	72	Pulau Warhu	Tidak Berpenghuni
35	Pulau Nuhuta	Tidak Berpenghuni	73	Pulau Watlus	Tidak Berpenghuni
36	Pulau Nuhutuwau	Tidak Berpenghuni	74	Pulau Watokmas	Tidak Berpenghuni
37	Pulau Nuhu Yananhu	Berpenghuni	75	Pulau Witir	Tidak Berpenghuni
38	Pulau Nuhuyanko	Tidak Berpenghuni			

Sumber: Perda RTRW Kab. Maluku Tenggara, 2024

Secara geografis, Kabupaten Maluku Tenggara berbatasan dengan:

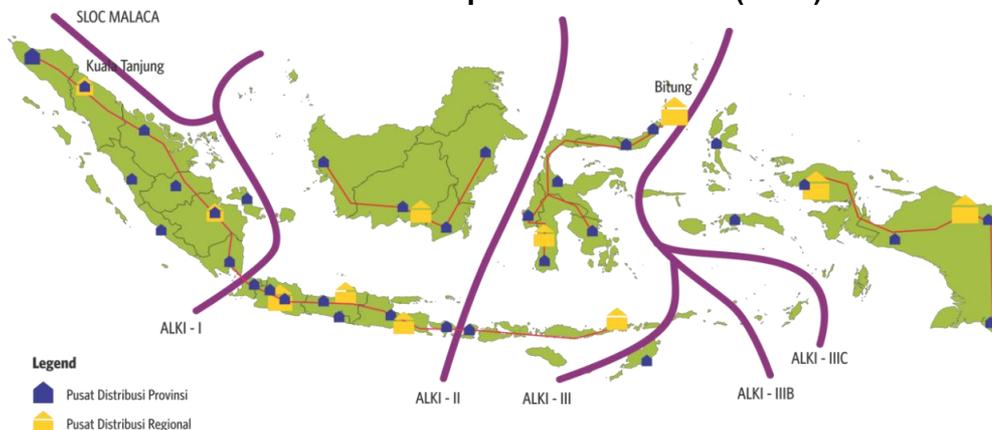
- Sebelah Utara : Kota Tual dan Laut Arafura
- Sebelah Selatan : Laut Arafura dan Kepulauan Tanimbar
- Sebelah Timur : Laut Arafura
- Sebelah Barat : Laut Banda

Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada posisi yang cukup strategis, diapit oleh dua lautan besar, yakni Laut Banda dan Laut Arafura. Posisi ini memperkuat aspek geopolitik dan geoekonomi Kabupaten Maluku Tenggara.

Posisi Geopolitik Maluku Tenggara adalah wilayah perbatasan negara dan merupakan jalur transportasi internasional. Posisi Kabupaten Maluku Tenggara sebagai wilayah perbatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan di Provinsi Maluku. Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara (P3GN) terletak di sebelah selatan Pulau Kei Besar, tepatnya di Tanjung Weduar, di Ohoi Weduar Fer. Termasuk Pulau Kei Besar (Nuhu Yut) yang ditetapkan sebagai Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pulau-pulau Kecil Terluar.

Posisi Maluku Tenggara sebagai jalur transportasi internasional diakui sebagaimana penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Maluku Tenggara dilintasi ALKI III.C yang merupakan adaptasi dari ketetapan jalur transportasi internasional *Sea Lane Communication (SLoC)*, meliputi Samudera Hindia – Laut Arafura – Laut Banda – Laut Seram – Laut Maluku – Samudera Pasifik.

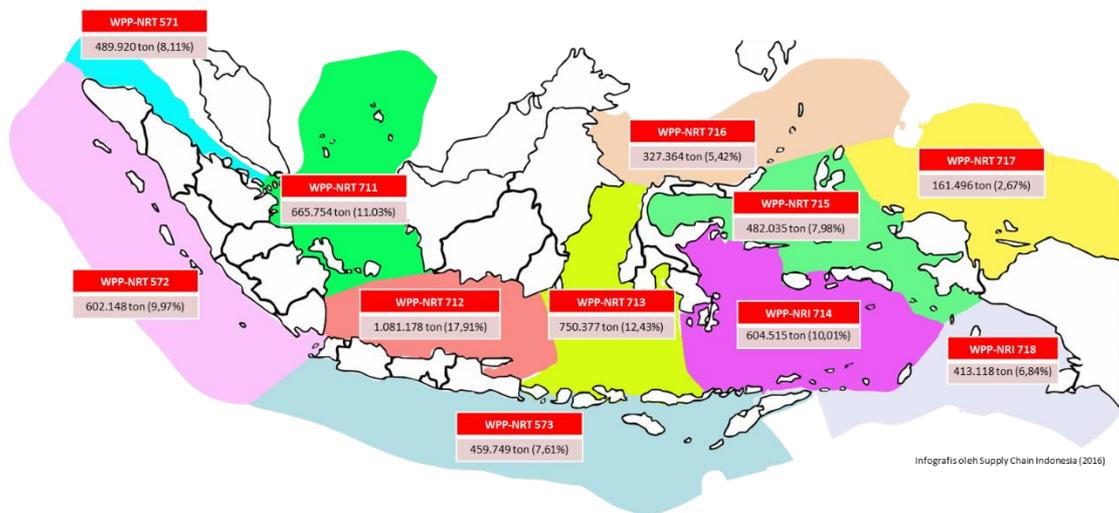
Gambar 2.1
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



Sumber: Indonesia Global Maritime Forum

Posisi Geoekonomi Maluku Tenggara berkaitan dengan wilayah pengelolaan potensi perikanan. Maluku Tenggara menjadi titik persimpangan 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan, (WPP), yaitu WPP 714 Laut Seram, WPP 715 Laut Banda dan WPP 718 di Laut Arafura.

Gambar 2.2
Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia



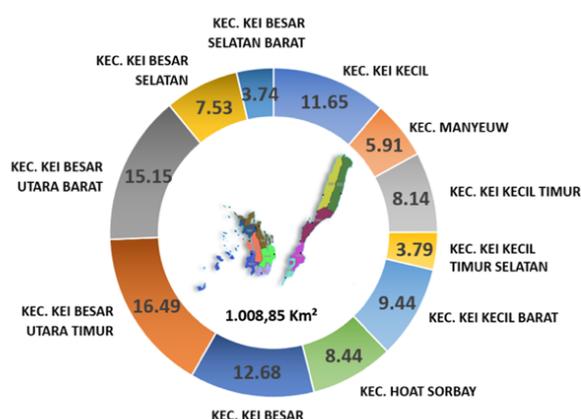
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap di Laut menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)

2.1.1.2. Wilayah Administratif

Secara Administratif, Kabupaten Maluku Tenggara terbagi atas 11 kecamatan, 190 Ohoi/Desa dan 1 Kelurahan. Kecamatan dengan luas wilayah administrasi terbesar adalah Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebesar 16,49 persen dari total luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah administrasi terkecil adalah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, dengan porsi sebesar 3,74 persen.

Gambar 2.3
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Maluku Tenggara per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persen
1	Kei Kecil	117.476	11,65
2	Manyeuw	59.651	5,91
3	Kei Kecil Timur	82.053	8,14
4	Kei Kecil Timur Selatan	38.193	3,79
5	Kei Kecil Barat	95.245	9,44
6	Hoat Sorbay	85.078	8,44
7	Kei Besar	127.902	12,68
8	Kei Besar Utara Timur	166.269	16,49
9	Kei Besar Utara Barat	152.798	15,15
10	Kei Besar Selatan	75.920	7,53
11	Kei Besar Selatan Barat	37.737	3,74
TOTAL		1.008,58	100



Sumber: Perda RTRW Kab. Maluku Tenggara, 2024–2043

Kecamatan dengan jumlah ohoi terbanyak adalah Kecamatan Kei Besar sebanyak 37 ohoi, diikuti Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebanyak 30 ohoi. Kecamatan dengan jumlah ohoi paling sedikit adalah Kecamatan Manyeuw, sebanyak 9 Ohoi.

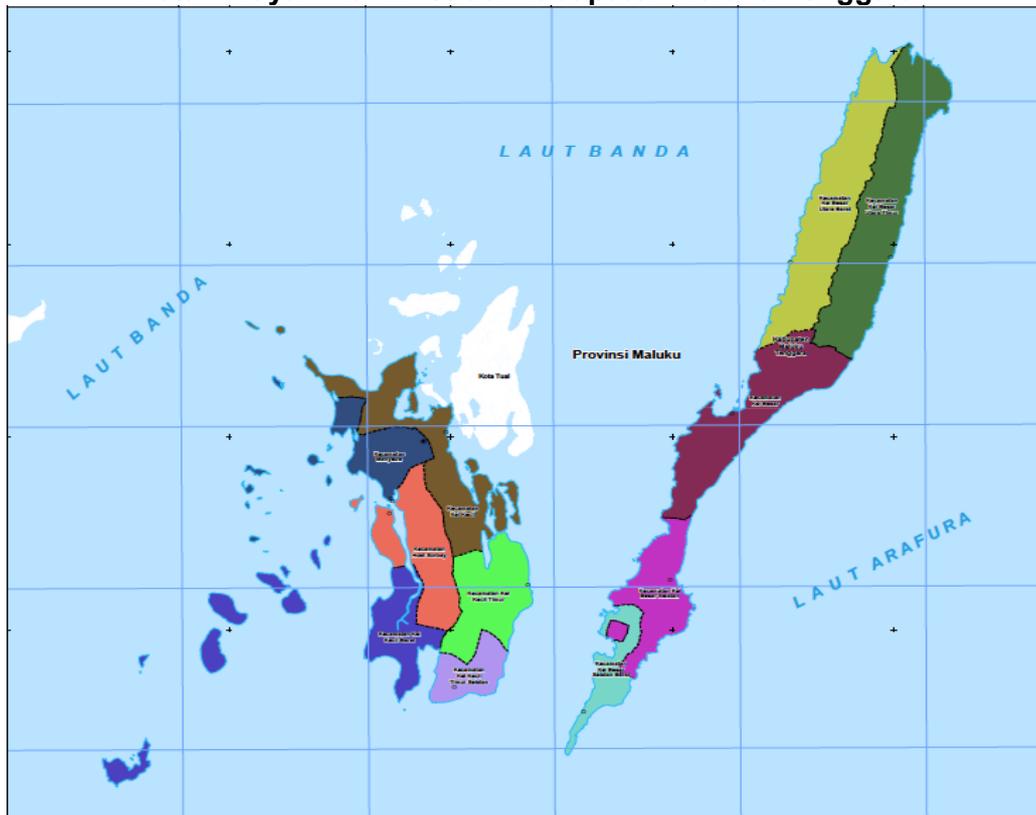
Di daratan Pulau Kei Besar terdapat 115 Ohoi, di daratan Pulau Kei Kecil terdapat 72 ohoi, dan 3 ohoi lainnya terletak di pulau-pulau kecil di sebelah barat Pulau Kei Kecil. Dalam hal rentang kendali, Kecamatan Kei Besar Utara timur adalah kecamatan dengan jarak tempuh paling jauh ke ibukota Kabupaten Maluku Tenggara. Jarak tempuh Ibukota kecamatan menuju ke ibukota Kabupaen Maluku Tenggara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Jarak Tempu Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten

NO.	KECAMATAN	IBU KOTA	JUMLAH OHOI	JARAK TEMPUH KE LANGGUR
1	Kei Kecil	Langgur	15	0,00
2	Kei Kecil Timur	Rumat	18	24,35
3	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Ternate	11	41,62
4	Kei Kecil Barat	Ohoira	10	24,99
5	Hoat Sorbay	Tetoat	13	12,85
6	Manyeuw	Rumadian	9	11,12
7	Kei Besar	Elat	37	38,44
8	Kei Besar Utara Timur	Hollat	30	69,58
9	Kei Besar Utara Barat	Uwat	25	63,32
10	Kei Besar Selatan	Weduar	10	40,50
11	Kei Besar Selatan Barat	Rahangiar	13	43,91

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Gambar 2.4
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Maluku Tenggara

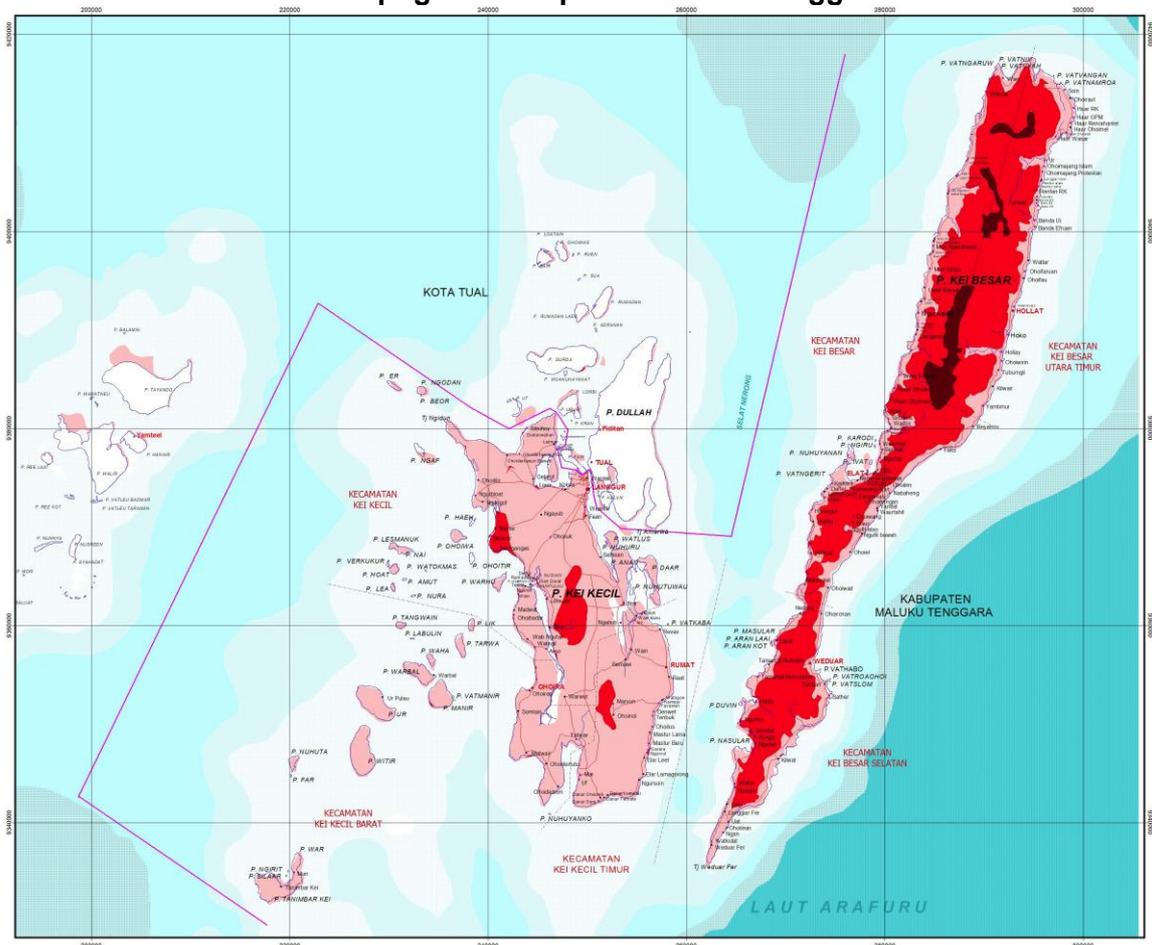


Sumber: Perda RTRW Kab. Maluku Tenggara, 2024

2.1.1.3. Topografi

Topografi antara Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil relatif berbeda. Topografi Pulau Kei Kecil cenderung datar dan landai dengan ketinggian berkisar 0 s.d 100 M di atas permukaan laut. Terdapat beberapa bukit rendah di bagian tengah dan bagian utara pulau dengan ketinggian mencapai 115 M. Kemiringan daratan Pulau Kei Kecil berkisar 0 – 25 derajat dengan kategori landai. Adapun topografi Pulau Kei Besar adalah daerah berbukit dan bergunung yang membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500–800 M. Puncak tertinggi adalah Gunung Dab, sedangkan dataran rendah hanya merupakan jalur sempit sepanjang pesisir pantai, dengan jarak rata-rata dari pantai berkisar 100 meter. Kemiringan daratan Pulau Kei Besar dikategorikan curam dan sangat curam dengan tingkat kemiringan mencapai kisaran 15–45 derajat dan lebih dari 45 derajat pada beberapa titik.

Gambar 2.5
Peta Topografi Kabupaten Maluku Tenggara



Sumber: Perda RTRW Kab. Maluku Tenggara, 2024

2.1.1.4. Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Indonesia (1965) Pulau/Kepulauan Kei memiliki Karakteristik geologi yang terbentuk atau tersusun dari jenis tanah Podzolik, Rensina dan Lithosol. Jenis batuan di Kepulauan Kei meliputi Aluvium Undak, Terumbu Coral, Seklis Habluk, Paleogen dan Ulagan Paleozoikum.

Struktur dan tipologi daerah Maluku Tenggara terbagi atas tiga jenis, yaitu Dataran Pantai, yang merupakan ruang sempit di sepanjang pesisir, dengan luasan kurang lebih 1 persen dari total luas

daratan; perbukitan struktural, secara umum di Pulau Kei Kecil bagian selatan dan barat, dengan luasan 44 persen dari luas daratan, serta perbukitan karst, yang terbentang di Pulau Kei Besar dan sebagian kecil dari bagian utara pulau Kei Kecil dengan luasan mencapai 55 persen dari luas daratan.

2.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang tersebar baik di Pulau Kei Besar maupun Kei Kecil. Pulau Kei Besar dengan karakteristiknya, memiliki cukup banyak sumber mata air. Secara khusus di bagian tengah dan selatan pulau Kei Besar, serta beberapa titik di bagian utara.

Di Pulau Kei Kecil, sumber mata air terbesar adalah Sungai Nen Mas II di Kecamatan Hoat Sorbay. Sungai Nen Mas IL adalah sumber utama air bersih yang melayani sebagian besar wilayah daratan Pulau Kei Kecil. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Evav Sejahtera Maluku Tenggara dalam melayani kebutuhan air bersih di wilayah Kota Langgur, juga memanfaatkan sumber air Nen Mas IL.

Tabel 2.4
Sungai dan Letaknya di Kabupaten Maluku Tenggara

No	Nama Sungai	Letak	Kecamatan
1	Nen Mas II	Evu	Hoat Sorbay
2	Hoar Ten	Yatwav	Kei Kecil Barat
3	Hoar Marfun	Marfun	Kei Kecil Timur Selatan
4	Hoar Manyeuw Berkat	Semawi	Kei Kecil Timur
5	Hoar Rahareng	Rahareng Atas	Kei Besar
6	Hoar Elralang	Elralang	Kei Besar
7	Hoar Tamangil	Tamangil Nuhuten	Kei Besar Selatan
8	Hoar Wear Saran	Weduar	Kei Besar Selatan
9	Hoar Aur	Ad Weraur	Kei Besar Utara Barat
10	Hoor Laai	Yerikho	Kei Besar Utara Barat
11	Hoar Vanyabeb	Dangarat	Kei Besar Utara Barat
12	Hoar Bo (Hoar Ker)	Mun Ohoitadiun	Kei Besar Utara Barat
13	Hoar Sel	Mun Ohoitadiun	Kei Besar Utara Barat
14	Hoar Na	Mun Ohoitadiun	Kei Besar Utara Barat
15	Wear Tiv	Mun Ohoitadiun	Kei Besar Utara Barat
16	Hoar Mun Kahar	Mun Kahar	Kei Besar Utara Barat
17	Hoar Sikmatan	Uwat Air	Kei Besar Utara Barat
18	Hoar Matan Niyan	Uwat Air	Kei Besar Utara Barat
19	Hoar Nahak Ohoi	Laar	Kei Besar Utara Barat
20	Hoar Lim	Wear Fravav	Kei Besar Utara Barat
21	Hoar Namun	Ohoiraut	Kei Besar Utara Timur
22	Hoar Famdada	Ohoiraut	Kei Besar Utara Timur

No	Nama Sungai	Letak	Kecamatan
23	Hoar Laai	Ohoiraut	Kei Besar Utara Timur
24	Hoar Lamud	Ohoiraut	Kei Besar Utara Timur
25	Hoar Mas	Ur	Kei Besar Utara Timur
26	Hoar Vuvu	Langgiar Haar	Kei Besar Utara Timur
27	Hoar Matan	Holat Solair	Kei Besar Utara Timur
28	Hoar Raituar	Yamtimur	Kei Besar Utara Timur
29	Hoar Kok	Hoko	Kei Besar Utara Timur
30	Hoar Kilwaer	Kilwaer	Kei Besar Utara Timur
31	Hoar Holaay	Holaay	Kei Besar Utara Timur

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025

2.1.1.6. Klimatologi

Iklim di kawasan Kabupaten Maluku Tenggara dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura, dan Samudra Indonesia serta dibayangi Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di bagian Selatan sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan. Keadaan musim di Kabupaten Maluku Tenggara adalah.

- Musim Timur atau musim kemarau berlangsung dari Bulan April-Oktober.
- Musim Barat atau musim hujan berlangsung berlangsung dari Bulan Oktober–Februari dengan intensitas tertinggi pada Bulan Desember dan Februari.
- Musim Pancaroba berlangsung dalam Bulan Maret / April dan Oktober / November.

Angin kencang bertiup pada Bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora. Kondisi angin di Kabupaten Maluku Tenggara adalah.

- Bulan April-Oktober bertiup Angin Timur Tenggara.
- Bulan April-September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91 persen dimana dominasi angin Tenggara sebesar 61 persen.
- Bulan Oktober–Maret bertiup Angin Barat Laut sebanyak 50 persen dimana dominasi angin Barat Laut sebesar 28 persen.

Curah Hujan antara 2.000-3.000 mm per tahun terdapat di Pulau Kei Kecil sedangkan di Pulau Kei Besar curah hujannya diatas 3.000 mm pertahun. Tahun 2011 Curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 3.121 mm per tahun atau rata-rata 260,1 mm per bulan, dengan jumlah hari hujan sebanyak 211 hari atau rata-rata 17,58 hari hujan per bulan.

Rata-rata kondisi klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1991 s.d 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.5
Kondisi Klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara

NO.	URAIAN	SATUAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Rata-rata Temperatur	Derajat Celsius (0C)	27,00	27,00	27,00	27,00	26,90	26,10	25,50	25,30	25,90	26,80	27,40	27,30
		Derajat Farenheit (0F)	80,70	80,60	80,60	80,60	80,40	78,90	77,90	77,60	78,70	80,20	81,30	81,10
2	Temperatur Terendah	Derajat Celsius (0C)	25,90	25,90	25,80	25,80	25,90	25,30	24,90	24,70	25,20	25,80	26,10	26,00
		Derajat Farenheit (0F)	78,60	78,60	78,40	78,50	78,60	77,60	76,80	76,50	77,30	78,40	79,00	78,80
3	Temperatur Tertinggi	Derajat Celsius (0C)	27,90	27,90	27,90	28,00	27,70	26,70	26,10	26,00	26,70	27,80	28,40	28,30
		Derajat Farenheit (0F)	82,30	82,20	82,30	82,40	81,80	80,10	78,90	78,80	80,10	82,00	83,10	82,90
4	Curah Hujan (Presipitasi)	Milimeter (mm)	286,00	253,00	246,00	236,00	215,00	169,00	82,00	46,00	47,00	72,00	99,00	233,00
5	Tingkat Kelembapan Udara	Persen (%)	83,00	83,00	82,00	82,00	81,00	82,00	82,00	81,00	81,00	80,00	80,00	82,00
6	Hari Hujan	Hari (Hr)	20,00	18,00	19,00	18,00	18,00	15,00	10,00	7,00	8,00	11,00	13,00	19,00
7	Rata-rata Cahaya Matahari	Jam	8,60	8,70	8,60	8,40	8,40	8,20	8,30	8,50	8,90	9,00	9,20	8,70

Sumber: www.en.climate-data.org (diolah)

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023–2043 memberikan gambaran alokasi penggunaan lahan yang terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Alokasi dimaksud meliputi ruang darat, pesisir dan juga laut. Total lahan tersedia untuk berbagai aktivitas penggunaan lahan adalah 100.858,37 Ha, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Lahan yang Tersedia dan Aktifitas Penggunaanya
Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023–2044

No.	Kawasan	Darat	Pesisir dan Laut	Jumlah
1	Kawasan Lindung	24.518,94	3.801,94	28.320,89
	1.1. Badan air	-	34,81	34,81
	1.2. Kawasan Perlindungan Setempat	-	3.262,16	3.262,16
	1.3. Cagar Alam	18.011,56	-	18.011,56
	1.4. Kawasan Ekosistem Mangrove	-	499,60	499,60
	1.5. Kawasan Hutan Lindung	6.326,73	-	6.326,73
	1.6. Kawasan Hutan Adat	180,66	-	180,66
	1.7. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	5,38	5,38
2	Kawasan Budidaya	72.537,48	-	72.537,48
	2.1. Hutan Produksi Tetap	5.292,70	-	5.292,70
	2.2. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	17.307,34	-	17.307,34
	2.3. Kawasan Holtikultura	7.813,28	-	7.813,28
	2.4. Kawasan Pariwisata	10,38	-	10,38
	2.5. Kawasan Perikanan Tangkap	4,63	-	4,63
	2.6. Kawasan Perkebunan	31.531,24	-	31.531,24
	2.7. Kawasan Permukiman Desa	1.727,54	-	1.727,54
	2.8. Kawasan Permukiman Perkotaan	5.836,12	-	5.836,12
	2.9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	117,47	-	117,47
	2.10. Kawasan Peruntukan Industri	23,42	-	23,42

No.	Kawasan	Daratan	Pesisir dan Laut	Jumlah
	2.11. Kawasan Tanaman Pangan	2.634,79	-	2.634,79
	2.12. Kawasan Transportasi	238,58	-	238,58
Total		97.056,43	3.801,94	100.858,37

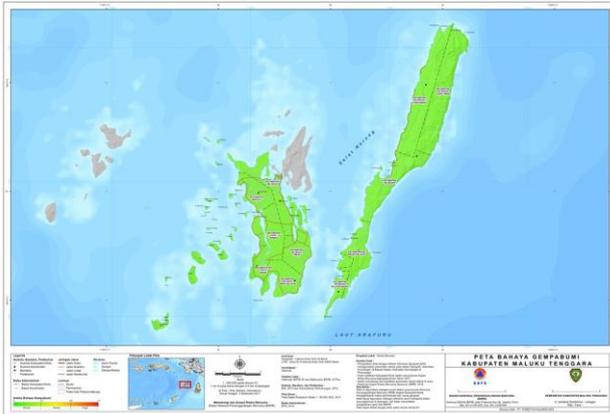
Sumber: Perda RTRW Kab. Maluku Tenggara, 2024

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

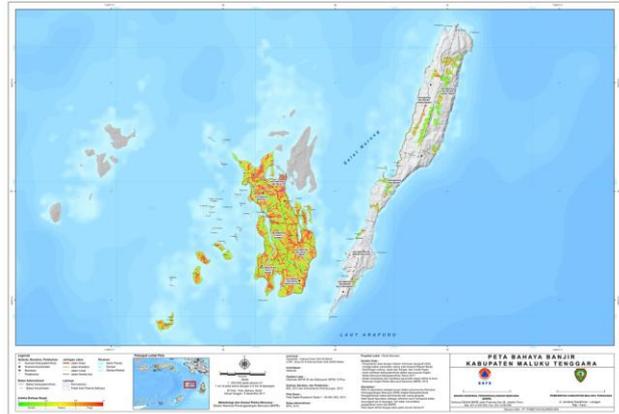
Deskripsi karakteristik wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023-2043 sesuai kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis, maka dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana, sebagaimana termuat dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu: Gempa Bumi dan Tsunami; Banjir Rob dan Abrasi Pantai; Tanah Longsor; Kebakaran; Cuaca Ekstrim; dan Kekeringan.

Peta Kawasan rawan bencana sebagaimana disebutkan di atas sebagai berikut.

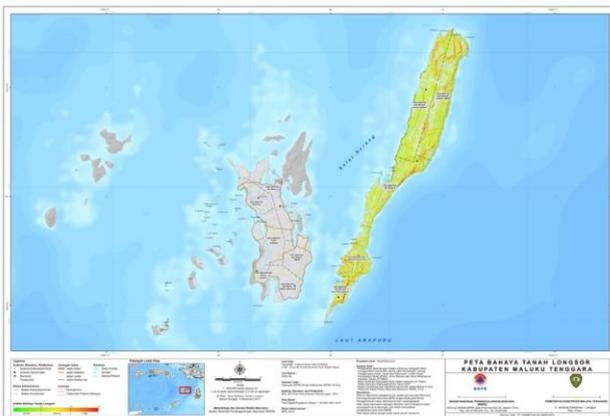
Gambar 2.6
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Maluku Tenggara



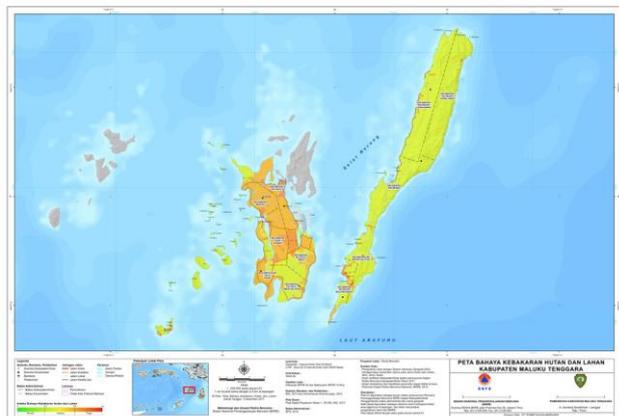
Wilayah Rawan Gempa Bumi dan Tsunami



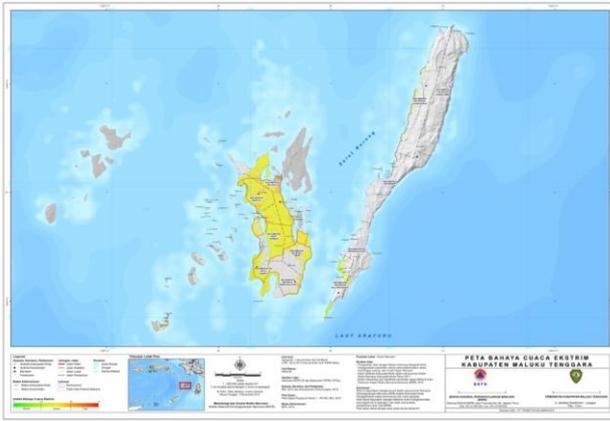
Wilayah Rawan Banjir Rob dan Abrasi Pantai



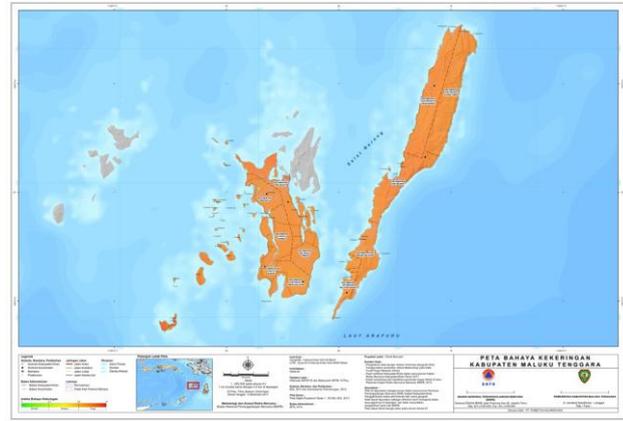
Wilayah Rawan Tanah Longsor



Wilayah Rawan Kebakaran



Wilayah Rawan Cuaca Ekstrem



Wilayah Rawan Kekeringan

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Maluku Tenggara, Tahun 2023

2.1.1.9. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15, ayat (3), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan KRP;
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip – prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pada Pasal 13 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69 Tahun 2017, Pasal 23 Ayat (4), analisis materi muatan KRP dikaji dengan paling sedikit 6 (enam) muatan, yaitu:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Bisa diukur dalam bermacam variabel yang mencerminkan jasa dan produk dari ekosistem, misalnya daya dukung tanah/kemampuan lahan, air, habitat spesies, dan lain

sebagainya. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain adalah mengukur kinerja jasa lingkungan, mengukur populasi optimal yang dapat didukung, maupun mengukur tingkat kerentanan, kerawanan dan kerusakan. Teknik-teknik perhitungan dan penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat mengikuti ketentuan yang ada atau metodologi yang telah diakui secara ilmiah. Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media (air, tanah, udara) ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan dapat berupa kombinasi antara beban pencemaran dengan kemampuan media mempertahankan fungsinya sejalan dengan masuknya pencemaran tersebut.

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Teknik analisis mengikuti ketentuan yang telah tersedia (misalnya Pedoman Dampak Penting) dan metodologi yang diakui secara ilmiah (misalnya metodologi Environmental Risk Assessment).

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem

Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama didalamnya adalah yaitu:

- a. Layanan/fungsi penyedia (provisioning services): Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air dll.
- b. Layanan/fungsi pengatur (regulating services): Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengatur iklim dll.
- c. Layanan/fungsi budaya (cultural services): Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- d. Layanan/fungsi pendukung kehidupan (supporting services): Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsian.

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Dilakukan dengan cara:

- a. Mengukur kesesuaian antar tingkat kebutuhan dan ketersediaannya;
- b. Mengukur cadangan yang tersedia, tingkat pemanfaatannya yang tidak menggerus cadangan, serta perkiraan proyeksi penyediaan untuk kebutuhan di masa mendatang; dan
- c. Mengukur dengan nilai dan distribusi manfaat dari sumber daya alam tersebut secara ekonomi

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Mengkaji kerentanan dan risiko perubahan iklim sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Menyusun pilihan adaptasi perubahan iklim
- c. Menentukan prioritas pilihan adaptasi perubahan iklim

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Mengkaji pemanfaatann dan pengawetan spesies/jenis tumbuhan dan satwa, yang meliputi:
 - Penetapan dan penggolongan yang dilindungi atau tidak dilindungi
 - Pengelolaan tumbuhan dan satwa serta habitatnya
 - Pemeliharaan dan pengembangbiakan
 - Pendayagunaan jenis atau bagian–bagian dari tumbuhan dan satwa liarnya
 - Tingkat keragaman hayati dan keseimbangannya
- b. Mengkaji ekosistem, yang meliputi:
 - Interaksi jenis tumbuhan dan satwa
 - Potensi jasa yang diberikan dalam konteks daya dukung dan daya tampung
- c. Mengkaji genetik, yang meliputi:
 - Keberlanjutan sumber daya genetik
 - Keberlanjutan populasi jenis tumbuhan dan satwa

2.1.1.9.1 Enam Muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Analisis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

1) Status Daya Dukung Air

Hasil analisis ketersediaan air dan kebutuhan air menunjukkan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara masih memiliki cadangan dan ketersediaan air yang mencukupi secara umum hingga tahun 2045. Beberapa kecamatan memiliki kebutuhan air yang lebih besar dibandingkan daerah lain, hal ini dikarenakan perbedaan kepadatan penduduk antar wilayah. Kecamatan yang memiliki kebutuhan air terbanyak adalah Kecamatan Kei Kecil dengan kebutuhan air domestik dan lahan mencapai 55.526.129 m³ per tahun. Kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi karena ketersediaan airnya masih lebih besar yaitu sebesar 130.941.905 m³ per tahun atau dengan sisa ketersediaan air sebesar 75.415.776 M³ per tahun.

Kecamatan dengan tingkat sisa/surplus ketersediaan air terbesar adalah Kecamatan Kei Besar Utara Barat dengan jumlah 117.027.071 M³ per tahun, diikuti Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebesar 116.608.536 M³ per tahun. Kecamatan dengan sisa/surplus ketersediaan air paling kecil adalah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat dengan jumlah 25.660.624 m³ per tahun.

Perbandingan antara jumlah penduduk, total kebutuhan air, jumlah ketersediaan air dan tingkat ketahanan (sisa/surplus) ketersediaan air menurut kecamatan disajikan pada gambar berikut.

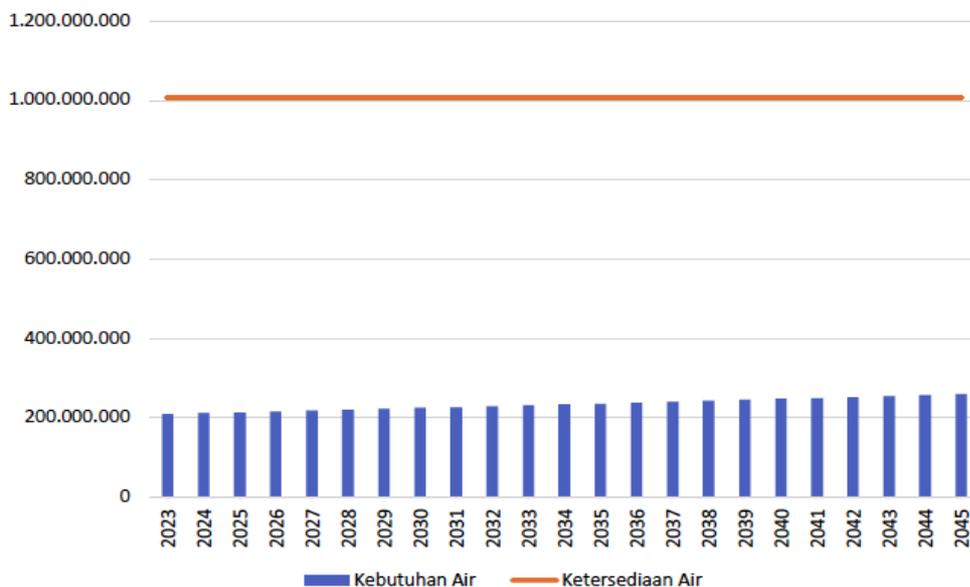
Gambar 2.7
Kondisi Daya Dukung Air Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2025–2045



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Maluku Tenggara 2025-2045

Dari sisi proyeksi Daya Dukung Air, analisis berdasarkan data eksisting tahun 2023-2024 menunjukkan Daya Dukung air di Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan Tahun 2045 masih berada di kategori aman. Tingkat ketersediaan masih cukup tinggi dibandingkan tingkat kebutuhan.

Gambar 2.8
Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Maluku Tenggara 2025–2045



Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045

Di Kabupaten Maluku Tenggara, yang terdiri dari berbagai pulau dan kepulauan, permasalahan utama terkait air adalah distribusi yang tidak merata antarpulau. Kondisi geografis kepulauan menciptakan tantangan tersendiri dalam memastikan pasokan air bersih yang cukup dan berkualitas di setiap wilayah. Pulau-pulau yang lebih terpencil atau terpencil mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber air yang memadai,

sementara pulau–pulau utama atau lebih besar mungkin lebih mudah dalam hal akses air bersih.

Faktor lain yang mempengaruhi distribusi air adalah infrastruktur transportasi air yang terbatas antar–pulau, seperti kapal pengangkut air atau pipa distribusi yang memadai. Selain itu, keberlanjutan pasokan air juga dipengaruhi oleh kondisi alam yang rentan terhadap perubahan iklim dan musim kering.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan upaya serius dalam meningkatkan infrastruktur air di seluruh kepulauan, termasuk pengembangan sistem distribusi air yang efisien dan berkelanjutan. Manajemen sumber daya air yang baik dan inklusif juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat di setiap pulau dapat terpenuhi secara adil dan berkesinambungan.

2) Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian

Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan lahan sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, diperoleh nilai ketersediaan lahan (SL) sebesar 39.089 Ha dan nilai kebutuhan lahan (DL) sebesar 53.764Ha. Perbandingan antara kedua nilai tersebut menghasilkan nilai Daya Dukung Lahan Pertanian (DDLDP) di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 0,73.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa daya dukung lahan pertanian Kabupaten Maluku Tenggara masuk dalam kategori daya dukung pangan telah terlampaui. Kategori telah terlampaui ini disebabkan oleh kurang maksimalnya nilai produktivitas di berbagai komoditas.

Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara, langkah-langkah strategis yang dapat diambil mencakup pengembangan infrastruktur irigasi yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung pertanian, serta penerapan teknologi pertanian modern seperti penggunaan irigasi dan teknologi informasi untuk monitoring tanaman yang tepat sesuai dengan musim dan harga pasar.

Selain itu, perlunya pelatihan dan edukasi bagi petani dalam praktik–praktik pertanian yang berkelanjutan seperti pengelolaan tanah yang baik dan pemupukan organik. Di sektor kehutanan, pentingnya menerapkan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mengendalikan illegal logging untuk menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Sedangkan di sektor perikanan, diperlukan manajemen perikanan yang berkelanjutan dengan penetapan zona penangkapan yang tepat dan pengembangan budidaya perikanan sebagai alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya perikanan alamiah. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta juga penting dalam mendukung investasi serta pendidikan masyarakat mengenai pentingnya praktik berkelanjutan dalam sektor-sektor ini. Dengan demikian, diharapkan upaya ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sambil menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Maluku Tenggara.

2. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Kajian kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan data SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) menunjukkan bahwa mayoritas wilayah

(95,05%) berada dalam kategori cukup rentan. Artinya, wilayah ini memiliki tingkat kerentanan moderat terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan perubahan pola curah hujan. Secara spesifik data dan analisis kerentanan dapat dilihat pada tabel di bawah.

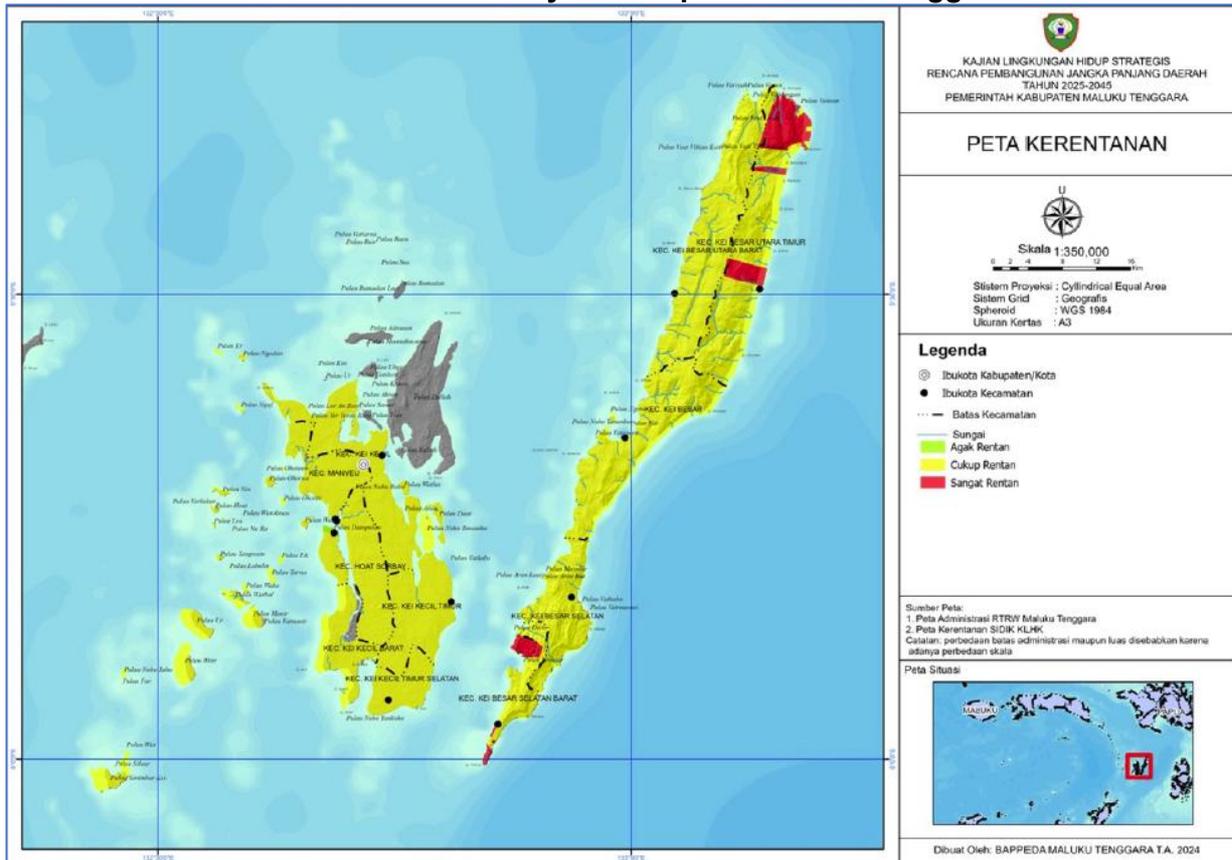
Tabel 2.7
Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim

KECAMATAN	TIDAK RENTAN		CUKUP RENTAN		SANGAT RENTAN	
	HA	%	HA	%	HA	%
Kei Kecil	0,00	0,00%	11.326,90	11,40%	0,00	0,00%
Kei Kecil Timur	0,00	0,00%	7.959,50	8,01%	0,00	0,00%
Kei Kecil Timur Selatan	0,00	0,00%	3.706,70	3,73%	0,00	0,00%
Kei Kecil Barat	0,00	0,00%	8.345,10	8,40%	0,00	0,00%
Hoat Sorbay	110,80	0,11%	8.051,70	8,10%	0,00	0,00%
Menyeuw	0,00	0,00%	5.761,30	5,80%	0,00	0,00%
Kei Besar	0,00	0,00%	12.368,60	12,45%	0,00	0,00%
Kei Besar Utara Timur	0,00	0,00%	12.198,80	12,28%	3.846,30	3,87%
Kei Besar Utara Barat	0,00	0,00%	14.549,00	14,64%	111,90	0,11%
Kei Besar Selatan	0,00	0,00%	6.967,30	7,01%	387,60	0,39%
Kei Besar Selatan Barat	0,00	0,00%	3.193,20	3,21%	461,20	0,46%
JUMLAH	110,80	0,11%	94.428,10	95,05%	4.807,00	4,84%

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Maluku Tenggara 2025–2045

Meskipun hanya sebagian kecil (4,84%) lahan yang tergolong sangat rentan, namun perlu menjadi perhatian khusus karena wilayah ini akan mengalami dampak paling parah dari perubahan iklim. Lahan sangat rentan ini terkonsentrasi di beberapa kecamatan, yaitu Kei Besar Selatan, Kei Besar Selatan Barat, dan Kei Besar Utara Timur.

Gambar 2.9
Peta Kerentanan Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Maluku Tenggara 2025-2045

Sementara itu, hanya 0,11% lahan yang tergolong tidak rentan, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Maluku Tenggara memiliki tingkat kerentanan tertentu terhadap perubahan iklim. Perbedaan tingkat kerentanan antar kecamatan juga perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kecamatan-kecamatan yang memiliki lahan sangat rentan perlu menjadi prioritas dalam upaya mitigasi dan adaptasi, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, pengembangan sistem peringatan dini, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.

Secara keseluruhan, data SIDIK ini memberikan gambaran mengenai kerentanan wilayah Maluku Tenggara terhadap perubahan iklim. Informasi ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim.

3. Potensi Sumberdaya Alam

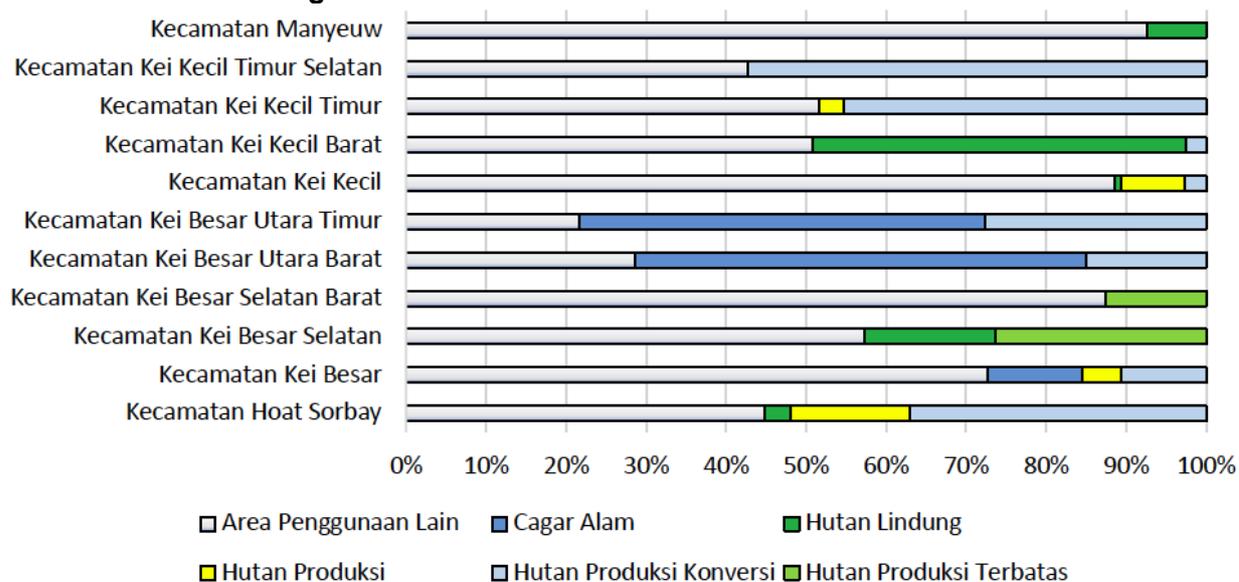
Kabupaten Maluku Tenggara, dengan hamparan laut dan gugusan pulau yang luas, menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Potensi sumber daya alam di wilayah ini meliputi perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan. Kekayaan alam ini menawarkan peluang besar untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah, Maluku Tenggara juga menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaannya. Salah satu tantangan utama adalah menjaga

kelestarian alam dan lingkungan. Aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan, seperti penangkapan ikan berlebihan, pencemaran laut, dan perusakan hutan, dapat mengancam kelestarian sumber daya alam dan ekosistem di wilayah ini.

Pengembangan ekonomi di Maluku Tenggara harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, partisipasi aktif dari semua pihak, dan penegakan hukum yang tegas, Maluku Tenggara dapat menjadi wilayah yang maju dan sejahtera tanpa mengorbankan kekayaan alamnya.

Gambar 2.10
Fungsi dan Pemanfaatan Hutan menurut Kecamatan



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Maluku Tenggara 2025-2045

Dalam hal pemanfaatan fungsi kawasan hutan, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki distribusi lahan yang beragam, mencakup area penggunaan lain (APL), cagar alam, hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kawasan APL memiliki porsi paling luas di Kabupaten Maluku Tenggara. Potensi APL yang cukup luas ini memungkinkan pembangunan wilayah secara keseluruhan, baik dari sisi ekonomi maupun rencana kawasan strategis.

Secara keseluruhan, pemanfaatan lahan di Maluku Tenggara perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Potensi sektor kehutanan, pertanian, dan pariwisata dapat dioptimalkan dengan strategi pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan.

4. Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Pemahaman tentang dampak dan risiko lingkungan hidup penting untuk pengelolaan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Upaya mitigasi dan adaptasi perlu dilakukan untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif pada lingkungan, serta mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait. Ini melibatkan penerapan kebijakan, regulasi, teknologi, dan praktik yang ramah lingkungan, serta kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam kajian ini, dampak dan risiko lingkungan

yang dianalisis adalah dari segi indeks kualitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, dan alih fungsi lahan.

i. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

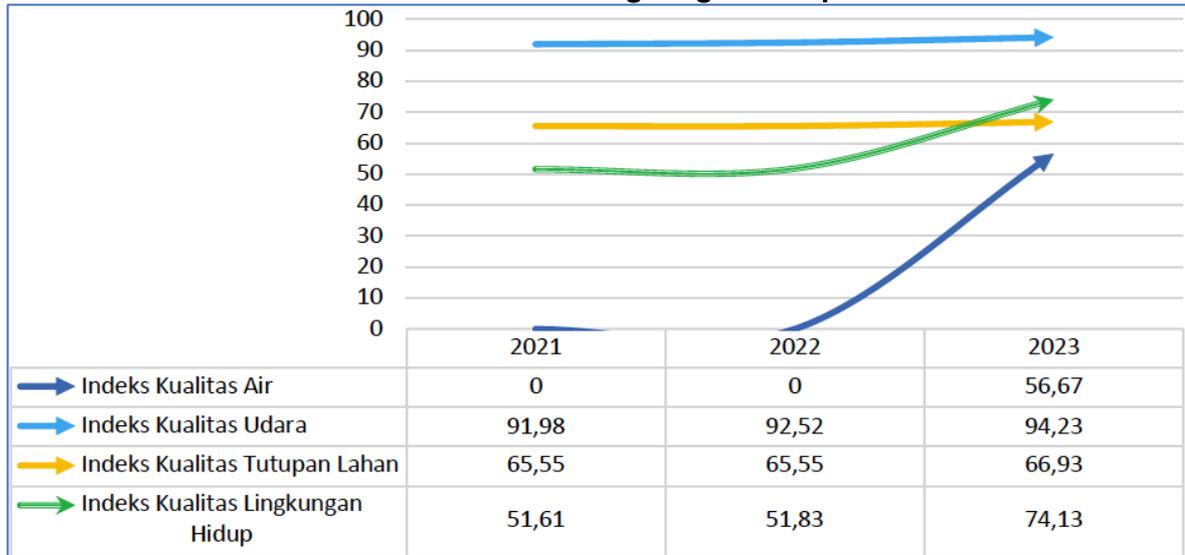
Tujuan dari IKLH adalah untuk membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam memantau, mengevaluasi, dan mengelola kebijakan lingkungan hidup secara lebih efektif. Dengan mengukur dan memantau IKLH secara berkala, dapat diidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau perhatian khusus dalam upaya melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Dengan demikian, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup bukan hanya menjadi alat untuk mengukur kualitas lingkungan, tetapi juga menjadi dasar untuk merancang kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup baik di tingkat lokal maupun global.

Berdasarkan data yang tersedia, terlihat perbaikan yang signifikan dalam beberapa aspek kualitas lingkungan hidup.

- Indeks Kualitas Air, yang mencatatkan tidak ada data pada tahun 2021 dan 2022, menunjukkan peningkatan yang drastis menjadi 56,67 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam pengelolaan sumber daya air dan upaya mitigasi terhadap polusi air di wilayah tersebut.
- Indeks Kualitas Udara juga menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, naik dari 91,98 pada tahun 2021 menjadi 94,23 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian polusi udara, yang dapat berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan juga menunjukkan peningkatan yang cukup kecil, dari 65,55 pada tahun 2021 menjadi 66,93 pada tahun 2023. Meskipun peningkatannya tidak signifikan, hal ini menunjukkan upaya untuk mempertahankan kondisi tutupan lahan yang relatif stabil di tengah tekanan dari perubahan penggunaan lahan dan aktivitas manusia.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 51,61 pada tahun 2021 menjadi 74,13 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan keseluruhan upaya dan kebijakan yang diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Maluku Tenggara.

Gambar 2.11
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Maluku Tenggara 2025-2045

Namun demikian, meskipun terdapat perbaikan yang signifikan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti degradasi hutan, pengelolaan air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa peningkatan kualitas lingkungan hidup ini dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi wilayah tersebut. Termasuk pengelolaan wilayah teluk hoat sorbay, yang rentan mengalami degradasi karena terganggunya sirkulasi.

2) Pengelolaan Persampahan

Salah satu permasalahan yang timbul dari meningkatnya aktivitas pembangunan adalah masalah persampahan. Pengelolaan sampah menjadi isu aktual dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian.

Pada tahun 2022, potensi timbulan sampah di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 18.349,86 ton. Angka ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk dikalikan dengan faktor estimasi timbulan per Kapita. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti migrasi penduduk, perubahan pola hidup, dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Tabel 2.8
Pengelolaan Persampahan

TAHUN	TIMBUNAN SAMPAH	PENGURANGAN SAMPAH		PENANGANAN SAMPAH		SAMPAH TERKELOLA		% SAMPAH TIDAK TERKELOLA
		TON	%	TON	%	TON	%	
2020	18.592,88	3.188,88	17,15%	4.015,00	21,59%	7.203,88	38,75%	61,25%
2021	17.740,61	1.721,58	9,70%	4.380,00	24,69%	6.101,58	34,39%	65,61%
2022	18.349,86	1.020,00	5,56%	8.060,00	43,92%	9.080,00	49,48%	50,52%
2023		167,97	-	15.869,00	-	16.036,97	-	-

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Maluku Tenggara 2025-2045

Secara umum sampah yang tidak terkelola di Kabupaten Maluku Tenggara masih kurang dari setengah dari timbulan yang ada, sehingga perlu strategi dan upaya khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Maluku Tenggara adalah:

- Meningkatkan program-program pengurangan sampah, seperti pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan daur ulang sampah.
- Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sampah sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA), dan bank sampah.
- Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

3) Alih Fungsi Lahan

Alih Fungsi Lahan menjadi salah satu permasalahan serius di Kabupaten Maluku Tenggara. Analisis terhadap data yang tersedia pada periode tahun 2011 s.d 2019 menunjukkan kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan.

Tabel 2.9
Alih Fungsi Lahan Tahun 2011 – 2023

PENUTUP LAHAN	LUAS TAHUN 2011	LUAS TAHUN 2019	LUAS TAHUN 2023
Bandara/Pelabuhan	0,00	79,95	102,97
Belukar	9.521,13	8.941,16	8.509,37
Belukar Rawa	41,59	46,32	46,82
Hutan Lahan Kering Sekunder	42.879,77	42.912,64	44.840,87
Hutan Mangrove Primer	241,82	127,26	145,95
Hutan Mangrove Sekunder	1.281,46	1.507,84	1.730,81
Pemukiman	1.550,50	1.980,48	2.701,30
Pertanian Lahan Kering	18.576,24	332,59	341,23
Pertanian Lahan Kering Campur	30.619,42	43.176,18	43.238,77
Savana/Padang rumput	89,52	119,02	105,74
Tanah Terbuka	14,69	1.011,81	112,71

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Maluku Tenggara 2025-2045

Data menunjukkan, alih fungsi lahan di Maluku Tenggara mengalami tren yang mengkhawatirkan. Dari tahun 2011 ke 2019, luas hutan berubah dari 42.879,77 hektar menjadi 42.912,64 hektar. Meskipun terlihat kecil dan tidak banyak berubah, perubahan ini perlu diwaspadai karena dapat berakibat pada berbagai dampak lingkungan hidup. Sementara itu, luas pemukiman mengalami peningkatan dari 1.550,50 hektar menjadi 1.980,48 hektar. Peningkatan ini menunjukkan ekspansi wilayah pemukiman yang dapat berakibat pada hilangnya habitat flora dan fauna, serta peningkatan emisi gas rumah kaca.

Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada luas pertanian lahan kering, dari 18.576,24 hektar menjadi 332,59 hektar. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi perkebunan atau pemukiman, atau karena faktor lain seperti degradasi lahan. Hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan pertanian lahan kering campur semak yang mencapai luasan 43.176,18 ha. Perubahan ini disebabkan karena tidak diolahnya lahan pertanian lahan kering yang sehingga pada tahun 2019 klasifikasi tutupan lahannya berubah menjadi bercampur semak.

Di sisi lain, luas tanah terbuka mengalami peningkatan yang signifikan dari 14,69 hektar menjadi 1.011,81 hektar. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan kegiatan penambangan, perkebunan, atau deforestasi. Perubahan penggunaan lahan ini, terutama penurunan luas hutan dan peningkatan luas pemukiman dan tanah terbuka, dapat menimbulkan berbagai dampak dan risiko lingkungan hidup, seperti penurunan keanekaragaman hayati, degradasi lahan, perubahan iklim, dan peningkatan risiko bencana alam.

Sementara itu pada tahun 2023, terjadi peningkatan pada luasan hutan lahan kering sekunder yang cukup signifikan yaitu seluas 44.840,87 ha. Hal ini menunjukkan adalah penutupan vegetasi yang lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Upaya mitigasi perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Memperkuat perencanaan tata ruang dan kebijakan pengelolaan lahan menjadi kunci utama. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan dampak negatif alih fungsi lahan perlu digalakkan. Pengembangan alternatif ekonomi ramah lingkungan, seperti ekowisata, agrowisata, dan ekonomi kreatif, perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam yang dapat menyebabkan alih fungsi lahan. Penerapan teknologi pengelolaan lahan ramah lingkungan, seperti agroforestri dan permakultur, dapat membantu menjaga kesuburan tanah, meningkatkan produktivitas lahan, dan meminimalkan dampak negatif alih fungsi lahan.

Menyelamatkan Maluku Tenggara dari jerat alih fungsi lahan membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Hanya dengan upaya kolektif dan berkelanjutan, keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan hidup di Maluku Tenggara dapat terwujud.

5. Potensi dan Tantangan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Maluku Tenggara

Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada posisi strategis zona transisi Wallacea, antara fauna Asia dan Australia, menjadikannya rumah bagi flora dan fauna yang unik dan beragam. Hutan hujan tropis yang mendominasi wilayah ini adalah habitat bagi berbagai spesies pohon bernilai tinggi seperti meranti, matoa, dan kayu besi, serta tanaman endemik seperti pala dan cengkeh yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Total dari Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi adalah 904 jenis, terdiri atas 787 jenis satwa dan 117 jenis tumbuhan. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Permen LHK Nomor 20, 92, dan 106 tahun 2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi.

Perlindungan ini penting karena TSL merupakan bagian dari ekosistem yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Kehilangan TSL dapat mengganggu kestabilan ekosistem, terutama jenis-jenis yang sering diperdagangkan. Kepunahan TSL bersifat permanen dan tidak

dapat dipulihkan. Beberapa contoh satwa yang dilindungi di Kepulauan Kei antara lain paus, lumba-lumba, dugong/duyung, kangguru, kusu, burung maleo, semua jenis burung paru bengkok (kakatua, perkici, kasturi, nuri), penyu, buaya, biawak, ketam kenari (nama lokal: kartuham), triton trompet (nama lokal: lilir), dan kima (nama lokal: hanoat). Pemerintah daerah melalui BKSDA Tual secara aktif melakukan sosialisasi dan penyadartahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan TSL. Tindakan hukum akan diambil terhadap pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Keindahan bawah laut Maluku Tenggara juga beragam. Hamparan terumbu karang yang luas dan beragam menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan karang, moluska, krustasea, dan biota laut lainnya.

Keberagaman hayati laut ini tidak hanya memiliki nilai ekologis yang penting, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan. Perairan Maluku Tenggara juga menjadi jalur migrasi bagi mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, dan dugong, yang menambah nilai penting wilayah ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, terdapat juga kawasan mangrove di Maluku Tenggara.

Ekosistem mangrove di Maluku Tenggara merupakan bagian penting dari keanekaragaman hayati wilayah tersebut. Hutan mangrove tersebar di sepanjang pesisir dan pulau-pulau kecil, memberikan perlindungan alami terhadap erosi pantai dan menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna.

Salah satu kawasan mangrove yang terkenal adalah Hoat Tamngil di Desa Rumadian, Kecamatan Manyeuw, yang telah dikembangkan menjadi ekowisata mangrove. Hutan mangrove ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, menyediakan sumber makanan bagi masyarakat, serta menjadi tempat berkembang biak bagi ikan, udang, dan kepiting. Namun, ekosistem mangrove di Maluku Tenggara juga menghadapi ancaman seperti penebangan liar dan konversi lahan untuk keperluan lain.

Upaya menjaga ekosistem keanekaragaman hayati perlu untuk ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya hayati yang tidak ramah lingkungan dan cenderung destruktif. Kinerja pengawasan serta penyadaran masyarakat perlu didorong lebih optimal, termasuk pelibatan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah ohoi/desa serta masyarakat hukum adat yang aktif mengawasi wilayah adatnya.

Keanekaragaman hayati di Maluku Tenggara juga sangat dipengaruhi oleh ekoregion berupa bentang alam dan tipe vegetasi alami. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki dominasi vegetasi hutan batugamping pamah (61,03%) yang sebagian besar tumbuh di perbukitan solusional karst (37,82%). Kondisi unik ini menciptakan ekosistem khas yang menjadi habitat bagi beragam flora dan fauna yang beradaptasi dengan lingkungan berbatu kapur. Selain itu, meskipun hanya mencakup sebagian kecil wilayah (1,15%), keberadaan vegetasi mangrove di dataran fluviomarin bermaterial aluvium menunjukkan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir Maluku Tenggara. Secara keseluruhan, kombinasi antara tipe vegetasi alami dan bentang alam yang beragam berkontribusi pada kekayaan hayati di Maluku Tenggara. Sebaran bentang alam dan ekoregion di Maluku Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Sebaran Bentang Alam dan Ekoregion di Maluku Tenggara

URAIAN	LUAS (HA)	%
TIPE VEGETASI ALAMI		
• Vegetasi hutan batu gamping pamah	55.732,70	61,03%
• Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	34.531,00	37,82%
• Vegetasi mangrove	1.049,50	1,15%
TIPE BENTANG ALAM		
• Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	1.049,50	1,15%
• Dataran organik koral bermaterial batuan sedimen karbonat	50.180,30	54,95%
• Dataran solusional karst berombak bergelombang bermaterial batuan karbonat	5.552,50	6,08%
• Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	34.531,00	37,82%

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Maluku Tenggara 2025-2045

6. Kondisi Jasa Ekosistem/Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka membantu memelihara dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan (Sriyanto, 2007).

Fungsi layanan ekosistem antara satu dan lainnya memberikan manfaat kepada lingkungan untuk manusia dan keberlangsungan kehidupan yang di antaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, pendukung proses alam, dan pelestarian nilai budaya. Klasifikasi jasa lingkungan berdasarkan tipe manfaat kehidupan bagi manusia yaitu:

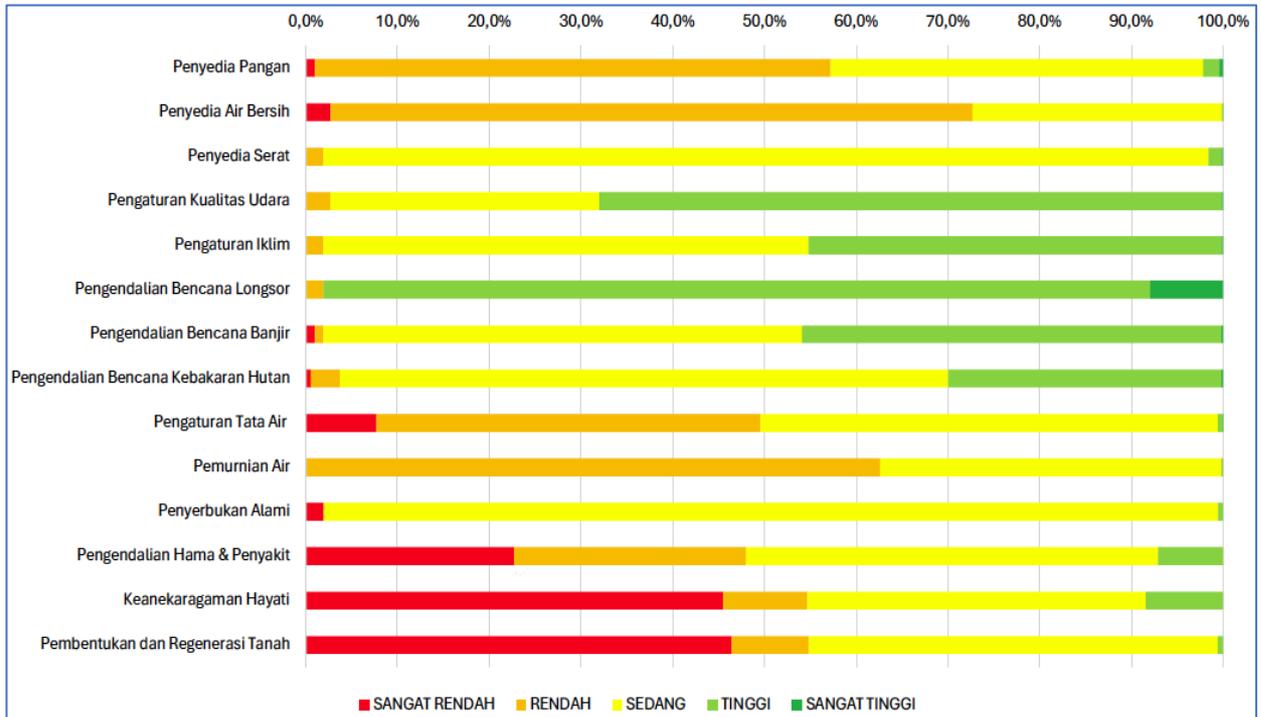
- 1) **Jasa Lingkungan Penyedia (Provisioning)**
Produk yang diperoleh dari layanan ekosistem penyediaan seperti; Penyediaan pangan, Penyediaan air, Penyediaan bahan bakar dan material lain serta Penyediaan sumberdaya genetik.
- 2) **Jasa Lingkungan Pengaturan (Regulating)**
Manfaat yang diperoleh dari pengaturan proses layanan ekosistem; Pengaturan kualitas udara, Pengaturan iklim, Pencegahan dan Perlindungan terhadap bencana alam (banjir, longsor, kebakaran, dan tsunami), Pengaturan air, Pemurnian air dan pengolahan limbah, Pengaturan penyerbukan alami, Pengendalian Hama.
- 3) **Jasa Lingkungan Budaya (Cultural)**
Manfaat nonmaterial yang diperoleh dari ekosistem; Budaya estetika: apresiasi pemandangan alam, Budaya rekreasi: peluang untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, Budaya warisan budaya dan Identitas: rasa tempat dan milik.

4) Jasa Lingkungan Pendukung (Supporting)

Layanan yang diperlukan untuk produksi semua layanan ekosistem lainnya; Habitat dan Keanekaragaman hayati, Pembentukan dan regenerasi tanah, Produksi primer, dan Siklus hara.

Analisis terhadap uraian komponen jasa lingkungan berdasarkan tipe manfaat menunjukkan hasil sebagai berikut:

Gambar 2.12
Uraian Komponen Jasa Lingkungan Berdasarkan Tipe Manfaat



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Maluku Tenggara 2025-2045

2.1.1.9.2 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Penilaian dan analisis capaian indikator TPB di Kabupaten Maluku Tenggara terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu:

1. sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional (SS);
2. sudah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional (SB);
3. belum dilaksanakan dan belum mencapai indikator nasional (BB); dan
4. tidak ada data (TAD).

Gambaran secara umum capaian indikator TPB di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut.

Tabel 2.11
Capaian Indikator TPB

NOMOR	URAIAN	SS	SB	BB	TAD
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	8	12	0	3
TPB 2	Tanpa Kelaparan	3	5	0	3
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	12	15	0	7
TPB 4	Pendidikan Berkualitas	4	5	0	4
TPB 5	Kesetaraan Gender	4	9	0	1

NOMOR	URAIAN	SS	SB	BB	TAD
TPB 6	Air Bersih	4	6	0	5
TPB 7	Energi Bersih dan Terjangkau	BUKAN KEWENANGAN			
TPB 8	Pertumbuhan Ekonomi	7	5	0	5
TPB 9	Inovasi Industri Infrastruktur	3	6	0	2
TPB 10	Berkurangnya Kesenjangan	4	1	0	2
TPB 11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	5	2	0	1
TPB 12	Produksi Berkelanjutan	2	1	0	2
TPB 13	Perubahan Iklim	1	1	0	0
TPB 14	Ekosistem Lautan	BUKAN KEWENANGAN			
TPB 15	Ekosistem Daratan	0	3	0	0
TPB 16	Perdamaian dan Keadilan	5	11	0	3
TPB 17	Kemitraan Berkelanjutan	4	4	2	4
JUMLAH		66	86	2	42

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Maluku Tenggara 2025-2045

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki kewenangan 196 indikator dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan untuk kabupaten. Hal tersebut dikarenakan beberapa indikator merupakan indikator khusus, indikator yang tidak sesuai kewenangan dan indikator yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

Secara umum Kabupaten Maluku Tenggara belum cukup memuaskan dalam pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Jika dilihat dari persentase capaian TPB untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target hanya mencapai porsi sebesar 34 persen. Atau terpenuhi 66 indikator dari total 196 indikator.

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Maluku Tenggara ke depan adalah indikator yang memiliki capaian belum mencapai target dan indikator yang tidak ada data, yang memiliki persentase sebanyak 44 persen (86 indikator) dan 21 persen (42 indikator) yang diharapkan indikator tersebut dapat mencapai target nasional dan dapat disediakan pada tahun-tahun mendatang.

a. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Dari keseluruhan indikator TPB untuk Kabupaten Maluku Tenggara yang berjumlah 196 indikator, indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional berjumlah 66 indikator (34%), hal tersebut menandakan Kabupaten Maluku Tenggara belum cukup baik dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam penentuan capaian indikator dilakukan dengan cara melakukan penyandingan capaian baseline data tahun terakhir dengan target Perpres 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

b. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Dari keseluruhan indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Tenggara yang berjumlah 196 indikator, indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional berjumlah 86 indikator (44%).

c. Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Dari keseluruhan indikator TPB kewenangan Kabupaten Maluku Tenggara yang berjumlah 196 indikator, terdapat indikator yang kondisinya masih dalam tahap wacana sehingga capaian dari

indikator tersebut belum dilaksanakan dan belum mencapai target. Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 2 indikator (1%). Indikator tersebut berada di TPB-17, yaitu: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan, dengan sub indikatornya:

- i. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- ii. Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

d. Indikator yang Belum Mempunyai Data

Dari keseluruhan indikator TPB kewenangan Kabupaten Maluku Tenggara yang berjumlah 196 indikator, indikator yang belum mempunyai data berjumlah 42 indikator (21 %). Paling banyak adalah indikator pada TPB-3 sebanyak 7 indikator. Indikator TPB yang belum mempunyai data ini juga menjadi salah satu prioritas dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJPD dua puluh tahun ke depan.

2.1.1.9.3 Kesimpulan dan Rekomendasi KLHS RPJPD Tahun 2025–2045

1. Kesimpulan Penilaian Jasa Ekosistem

Secara operasional, penghitungan dan penentuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup ekoregion Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan dengan pendekatan konsep jasa lingkungan berdasarkan fungsi-fungsi ekosistem. Asumsi dasar adalah semakin tinggi fungsi layanan ekosistem terhadap jasa lingkungan suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan di antara keduanya, serta semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Keterbatasan ketersediaan data serta batasan operasional perhitungan menggunakan tiga (3) bahan input utama yaitu bentang lahan, vegetasi alami dan penutupan lahan menjadi latar belakang sehingga terdapat dua puluh (20) fungsi jasa ekosistem yang berada dalam tiga (3) layanan jasa lingkungan yang dapat diukur kemampuan daya dukung dan daya tampungnya.

2. Rumusan Skenario TPB

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah; 1) Kondisi Geografis, Demografis serta Keuangan Daerah, 2) Kondisi Pencapaian TPB berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, 3) Kondisi DDDTLH Jasa Ekosistem dan 6 muatan kajian KLHS di Kabupaten Maluku Tenggara, 4) Potensi, daya saing dan inovasi daerah.

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan analisis, penilaian dan kesepakatan seluruh Stakeholder, disepakati 7 (tujuh) isu utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara yaitu:

- 1) Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
- 2) Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
- 3) Kemiskinan dan Pengangguran
- 4) Keterbatasan Aksesibilitas serta Sarana dan Prasarana
- 5) Rendahnya Produktifitas Ekonomi

- 6) Belum Optimalnya Tata Kelola dan Penegakan Hukum

3. Rekomendasi KLHS RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045

Beberapa rekomendasi yang dapat dihasilkan dalam KLHS RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025–2045 dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan penyusunan RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2045. Alternatif skenario pembangunan berkelanjutan untuk 20 tahun ke depan sebagai berikut.

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan meliputi:

1) Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Arahan Visi yang didorong untuk menangani isu ini adalah penguatan aspek keamanan, dengan arahan misi meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

2) Kerawanan Bencana dan Perubahan Iklim

Arahan Visi yang didorong untuk menangani isu ini adalah penguatan aspek berkelanjutan, dengan arahan misi melindungi masyarakat dari bencana dan perubahan iklim.

3) Fasilitas dan infrastruktur wilayah kurang memadai

Arahan Visi yang didorong untuk menangani isu ini adalah penguatan aspek keadilan, dengan arahan misi pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah secara adil dan merata.

4) Rendahnya Kualitas SDM

Arahan Visi yang didorong untuk menangani isu ini adalah penguatan aspek maju, dengan arahan misi meningkatkan kualitas SDM.

5) Kerentanan & kerawanan pangan

Arahan Visi yang didorong untuk menangani isu ini adalah penguatan aspek sejahtera, dengan arahan misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan.

6) Belum optimalnya pengelolaan ekonomi wilayah

Arahan Visi yang didorong untuk menangani isu ini adalah penguatan aspek berdaya saing tinggi, dengan arahan misi Meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis sumberdaya wilayah

7) Kemiskinan dan pengangguran

Arahan Visi yang didorong untuk menangani isu ini adalah penguatan aspek sejahtera, dengan arahan misi Meningkatkan kesejahteraan untuk pengentasan kemiskinan.

Rekomendasi dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai berikut:

1) Proyeksi capaian TPB dibandingkan dengan target di RPJMN tahun 2024 dan target pencapaian TPB tahun 2030. Hasil perbandingan memperlihatkan:

- (1) TPB sudah pada posisi dipertahankan jika proyeksi pertumbuhan target TPB sama atau lebih besar dari target RPJMN dan target 2030.

- (2) TPB membutuhkan upaya tambahan jika proyeksi pertumbuhan target TPB lebih kecil dari target RPJMN dan target 2030.
- (3) Target skenario tanpa upaya tambahan diambil dari hasil proyeksi capaian TPB
- (4) Target skenario dengan upaya tambahan memperhatikan potensi keuangan daerah, dukungan mitra, DDDTLH Jasa Ekosistem serta Kajian 6 muatan KLHS.

2) Indikator Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional

Indikator dengan pertimbangan ini bisa dilaksanakan pada RPJPD Tahun 2025-2045 dengan upaya-upaya tambahan. Upaya tambahan diperlukan agar target nasional bisa tercapai pada akhir masa perencanaan. Upaya-upaya tambahan yang dilakukan tetap harus mempertimbangkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan (DDDTLH).

3) Indikator yang mempunyai keterkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan melalui uji publik-1. Indikator dengan pertimbangan ini dapat dilaksanakan pada RPJPD 2025-2045 dengan upaya tambahan, namun perlu mempertimbangkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

4) Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) jasa ekosistem serta 6 muatan kajian KLHS yang terkait dengan TPB.

Indikator yang terkait dengan kondisi DDDTLH difokuskan pada kriteria DDDTLH yang sudah melampaui kemampuan DDDTLH-nya serta mempunyai keterkaitan dengan 6 muatan KLHS. Tujuannya adalah agar supaya kemampuan DDDTLH menjadi lebih baik pada akhir masa perencanaan. Keterkaitan antara indikator TPB dengan DDDTLH dan 6 muatan KLHS dilakukan secara partisipatif dengan mempertimbangkan kondisi DDDTLH dan 6 muatan yang telah dibahas pada Bab III. Terkait dengan DDDTLH, tim KLHS telah melakukan proyeksi terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan air bersih dan kebutuhan pangan sampai dengan tahun 2045 di Kabupaten Maluku Tenggara serta telah diperinci per kecamatan. Dengan mengetahui proyeksi DDDTLH sampai dengan akhir periode perencanaan (tahun 2045) dapat ditentukan pilihan skenario yang paling sesuai.

2.1.2. Aspek Demografis

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Terakhir sensus penduduk dilaksanakan Tahun 2020, sehingga data penduduk tahun 2020 sudah menggunakan data hasil sensus. Untuk data penduduk selain pada tahun sensus, sumber data kependudukan adalah hasil proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS.

Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi

penduduk Kabupaten Maluku Tenggara 2010–2019 menggunakan data dasar penduduk hasil Sensus Penduduk Tahun 2010.

Selain menggunakan data BPS, uraian aspek kependudukan juga menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Dukcapil. Basis data perhitungan jumlah penduduk menurut Dinas Dukcapil adalah penduduk terdaftar sesuai Kartu Keluarga.

Basis Data yang berbeda antara BPS dan Dinas Dukcapil menyebabkan jumlah penduduk menurut kedua instansi tersebut berbeda. BPS menghitung seluruh penduduk yang secara fisik tinggal di Maluku Tenggara selama 6 bulan terakhir dan/atau belum mencapai 6 bulan tetapi berniat tinggal untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan. Sedangkan Dinas Dukcapil menghitung seluruh penduduk terdaftar, baik yang berdomisili di wilayah Maluku Tenggara, maupun yang sementara waktu berdomisili di luar wilayah Maluku Tenggara (contoh: anak kuliah, dan pekerja di luar daerah).

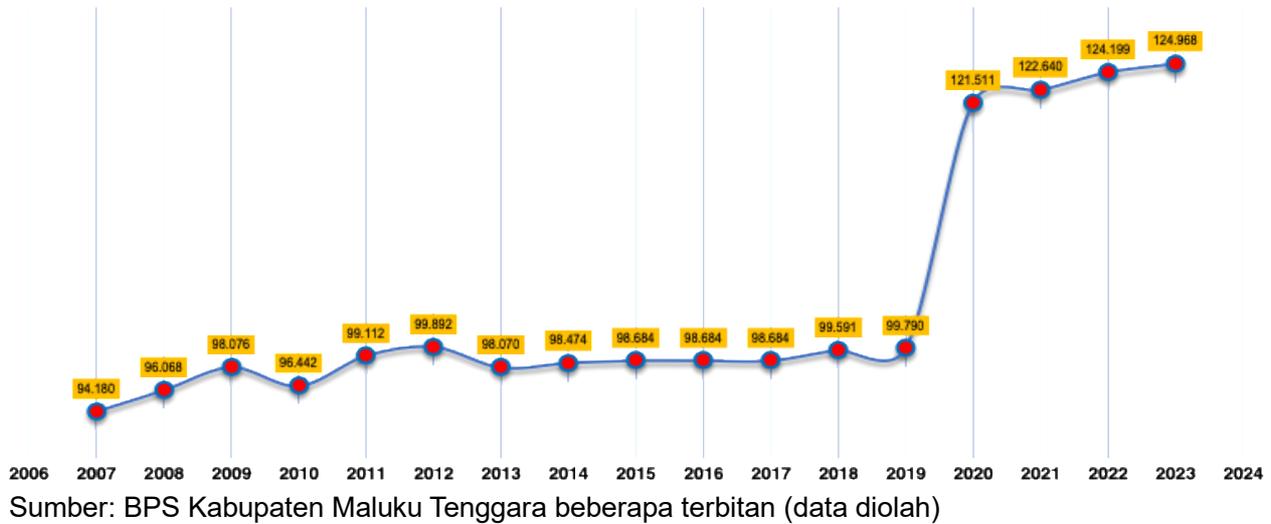
2.1.2.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara selama periode pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025, menunjukkan tren meningkat. Tahun 2007 pasca pemekaran Kota Tual, proyeksi penduduk Maluku Tenggara sesuai data BPS sebesar 94.180 jiwa meningkat menjadi 124.968 jiwa pada tahun 2023. Terjadi penambahan sebanyak 30.788 jiwa.

Dalam periode jangka panjang 2005–2025 terjadi 2 (dua) kali penyesuaian tahun dasar perhitungan penduduk. Hal ini semata–mata untuk menyesuaikan dengan hasil sensus penduduk yang dilaksanakan pada Tahun 2010 dan Tahun 2020. Data penduduk pada tahun–tahun selain tahun sensus menggunakan data proyeksi dan/atau survey penduduk antarsensus.

Penyesuaian sesuai data sensus Tahun 2010 menunjukkan penurunan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 96.442 jiwa dibanding proyeksi tahun 2009 yang tercatat sebanyak 98.076 jiwa. Penyesuaian data sensus tahun 2020 menunjukkan kenaikan jumlah penduduk dari 99.790 jiwa pada Tahun 2019, naik menjadi 121.511 pada Tahun 2023. Tren perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2007 sampai 2023 menurut BPS, sebagai berikut.

Gambar 2.13
Jumlah Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2007–2023



Jumlah dan komposisi penduduk Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.

- d. Sesuai data BPS jumlah penduduk Maluku Tenggara Tahun 2019 sebanyak 99.790 jiwa meningkat menjadi 124.968 jiwa pada tahun 2023. Tingkat kepadatan dari 97 jiwa per kilometer pada tahun 2019 menjadi 121 jiwa per kilometer pada tahun 2023. Perbandingan jumlah penduduk laki–laki dan perempuan yang digambarkan dengan Nilai Sex Ratio menunjukkan tahun 2019 sebesar 97 dan tahun 2023 naik menjadi 99. Nilai sex ratio sebesar 99 pada tahun 2023 bermakna, dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat 99 penduduk laki–laki, atau dengan kata lain, jumlah penduduk Maluku Tenggara lebih banyak berjenis kelami perempuan dibanding laki–laki.
- e. Sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Maluku Tenggara Tahun 2019 sebanyak 127.334 jiwa meningkat menjadi 129.257 jiwa pada tahun 2023. Tingkat kepadatan dari 123 jiwa per kilometer pada tahun 2019 naik menjadi 125 jiwa per kilometer pada tahun 2023. Perbandingan jumlah penduduk laki–laki dan perempuan yang digambarkan dengan Nilai Sex Ratio menunjukkan nilai yang sama pada tahun 2019 maupun 2023 yaitu sebesar 98. Nilai sex ratio sebesar 98 pada tahun 2023 bermakna, dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat 98 penduduk laki–laki, atau dengan kata lain, jumlah penduduk Maluku Tenggara lebih banyak berjenis kelamin perempuan dibanding laki–laki.

Tabel 2.12
Kondisi Kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2019–2023

Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
	BPS	Capil								
Jumlah Penduduk (Jiwa)	99.790	127.345	121.511	127.843	122.640	128.101	124.199	128.305	124.968	129.257
Luas Wilayah (km ²)	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81
Kepadatan Penduduk (Jw/km)	97	123	118	124	119	124	120	124	121	125
Sex Ratio	97	98	99	96	101	98	99	98	99	98

Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
	BPS	Capil								
• Laki-Laki	49.032	63.107	60.488	62.643	61.403	63.389	61.780	63.595	62.255	64.137
• Perempuan	50.758	64.238	61.023	65.200	61.015	64.712	62.419	64.720	62.713	65.120

Sumber: BPS Maluku Tenggara, beberapa terbitan (data diolah)

2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Menurut BPS, laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Maluku Tenggara tahun 2020 s.d 2022 sebesar 1,87 persen. Dengan rincian tahunan sebagai berikut:

Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Keterangan
2020	121.511	2,26%	• Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2019 (Mei) dibandingkan dengan penduduk tahun 2020 (September)
2021	23.418	2,10%	• Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2021 (Juni)
2022	124.199	1,26%	• Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2021 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2022 (Juni)
2023	124.968	1,02%	• Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2022 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2023 (Juni)

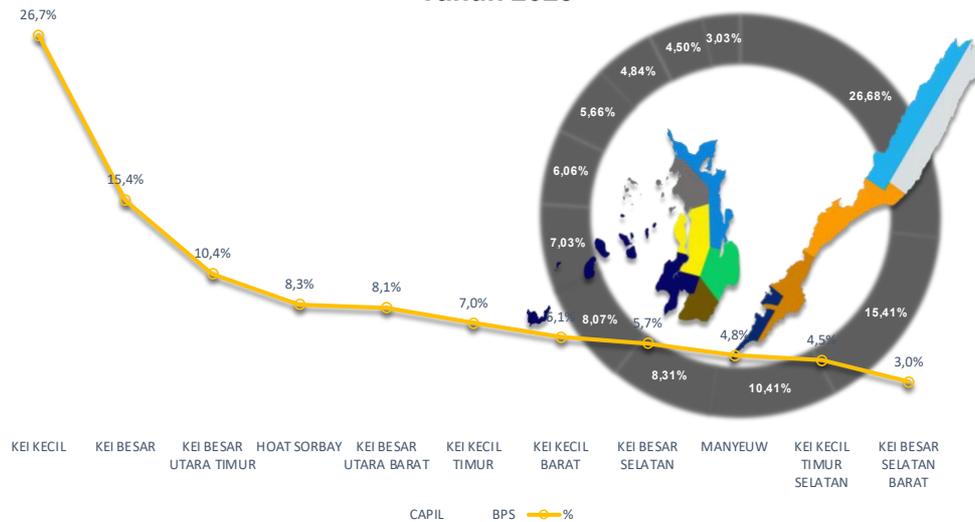
Sumber: BPS Maluku Tenggara, beberapa terbitan (data diolah)

2.1.2.3. Persebaran Penduduk

Persebaran Penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara relatif tidak merata, baik dalam lingkup kecamatan, maupun dalam lingkup perbandingan antar pulau (Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar). Pulau Kei Kecil didiami sekitar 57,43 persen penduduk Maluku Tenggara. Pulau Kei Besar didiami 42,57 persen penduduk.

Kecamatan yang paling banyak didiami penduduk adalah kecamatan Kei Kecil. Penduduk yang mendiami Kecamatan Kei Kecil, sebesar 26,7 persen dari total penduduk Maluku Tenggara. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat adalah kecamatan yang didiami penduduk paling sedikit, yaitu sebesar 3,00 persen dari total jumlah penduduk.

Gambar 2.14
Persebaran Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2023



Sumber: BPS Maluku Tenggara tahun 2024 (data diolah)

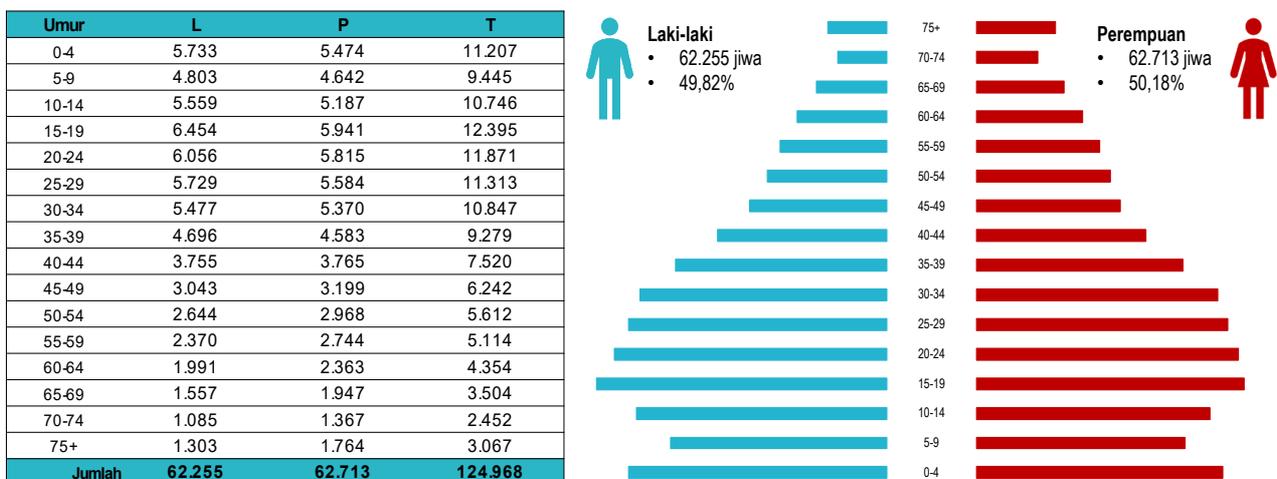
2.1.2.4. Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umum menunjukkan bahwa Tahun 2023 kelompok umur yang paling dominan adalah pada rentang 10 s.d 34 tahun. Penduduk yang berada di rentang umur tersebut mencapai 57.172 jiwa, atau sebesar 45,75 persen dari total penduduk.

Perbandingan yang sama juga terjadi pada kelompok umur sesuai jenis kelamin. Pada jenis kelamin laki-laki, jumlah penduduk pada kelompok umur 10 s.d 34 tahun mencapai 33.971 jiwa, atau sebesar 54,57 persen. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan kelompok umur 10 s.d 34 berjumlah 32.480 jiwa atau mencapai 51,79 persen.

Gambar berikut menampilkan data penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur beserta piramida penduduk Maluku Tenggara Tahun 2023.

Gambar 2.15
Penduduk Maluku Tenggara
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2023



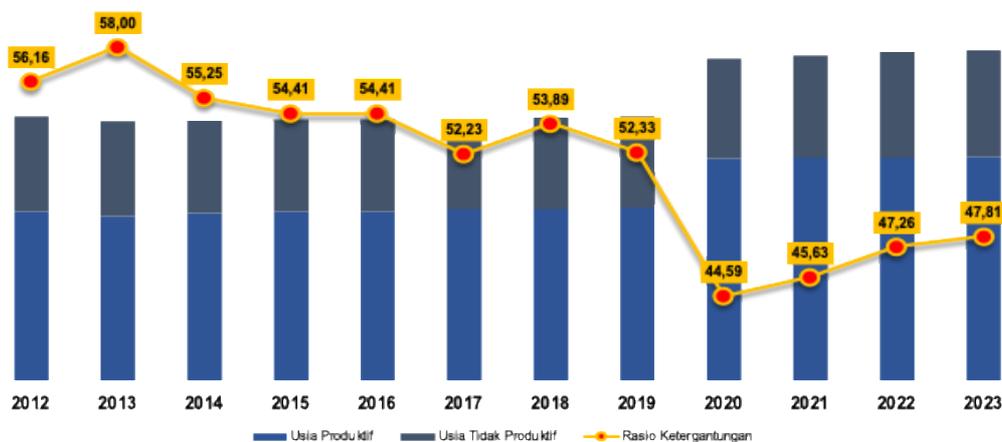
Sumber: BPS Maluku Tenggara 2024(data diolah)

2.1.2.5. Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan (RK) adalah suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk usia tidak produktif (1-14 tahun dan >65 tahun). Dari hasil perhitungan, diperoleh persentase penduduk non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk produktif.

Secara teori, Jika suatu daerah memiliki angka ketergantungan yang tinggi, maka potensi pertumbuhan ekonominya tidak akan terlalu tinggi. Sedangkan, jika rasio ketergantungan suatu wilayah tergolong rendah, maka potensi pertumbuhannya besar karena banyak terdapat masyarakat usia produktif. RK Kabupaten Maluku Tenggara dalam Periode 2012–2023 sebagai berikut.

Gambar 2.16
Rasio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara
2012 – 2023



Sumber: BPS Maluku Tenggara, beberapa terbitan (data diolah)

RK Kabupaten Maluku Tenggara dalam Periode 2012–2023 menunjukkan tren fluktuatif. Data RK dengan menggunakan tahun dasar 2010 menunjukkan rata–rata RK di atas 50 persen. Tren menurun dimulai dari Tahun 2013 sebesar 58 persen, turun menjadi 52,33 persen di tahun 2019. Mulai Tahun 2020 dengan diterbitkannya hasil Sensus penduduk tahun 2020, maka perhitungan RK juga mengalami penyesuaian. Tren RK dalam periode 2020 s.d 2023 menunjukkan tren kenaikan. Tahun 2020 RK sebesar 44,59 persen naik menjadi 47,81 persen di Tahun 2023. Tren kenaikan ini sekaligus menunjukkan kecenderungan Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah mulai bergeser dari periode bonus demografi.

Tahun 2023 RK Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 47,81 persen, dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 84.547 jiwa berbanding jumlah penduduk usia tidak produktif sebanyak 40.421 jiwa. RK sebesar 47,81 persen bermakna setiap 100 orang penduduk produktif di Maluku Tenggara menanggung beban 48 orang penduduk tidak produktif.

Tabel 2.14
Ratio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (Jiwa)	Rasio Ketergantungan
1	Jumlah Penduduk Usia Belum Produktif (0-14 th)	31.398	37,14
2	Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 th)	84.547	47,81
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (> 65 th)	9.023	10,67

Sumber: BPS Maluku Tenggara Tahun 2024 (data diolah)

RK Penduduk Usia Muda Tahun 2023 Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 37,14 persen. Hal ini bermakna, setiap 100 orang penduduk produktif di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 harus menanggung bebam 37 orang penduduk usia muda yang belum produktif (usia di bawah 15 tahun). RK Penduduk Usia Tua Tahun 2023 Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 10,67 persen. Hal ini bermakna, setiap 100 orang penduduk produktif di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 harus menanggung bebam 11 orang penduduk usia tua yang tidak lagi produktif (usia lebih dari 65 tahun).

2.1.2.6. Keberadaan Masyarakat Adat Kei

Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara masih memegang teguh hukum adat yang berlaku di Tanah Kei yang dikenal dengan Hukum Larwul Ngabal. Jauh sebelum lahir Hukum Positif di Negara Indonesia yang dikenal dengan Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Hukum Adat Larwul Ngabal telah ada dalam mengatur perikehidupan masyarakat Etnis Kei.

Hukum Adat Larwul Ngabal mengatur tentang pemerintahan adat, hak ulayat adat, Batas Tanah, Pergaulan lawan jenis, pelestarian lingkungan hidup dan menjaga batas laut dan darat serta perkawinan dan lain-lain (Bat-batang Fit Roa-Fit Nangan (J.P. Rahail, 95)). Hukum adat Larwul Ngaba; sekaligus menandai eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat kei.

Dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan, 192 ohoi pada 11 kecamatan tersebut di atas, adalah penjelmaan dari 86 Ohoi La'ay (Desa Induk) dan 106 Ohoi Soa (dusun) yang berada di bawah kekuasaan adat 22 Ratschaap dan dipimpin oleh Rat/Raja. 22 Ratschaap ini tersebar di Pulau Kei Besar, Pulau Kei Kecil, Pulau Dullah, Pulau Kur, dan Pulau Tam. 16 Ratschaap diantaranya berada di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.15
Ratschaap / Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei

No	Rumpun	Ratschaap/ Pemerintahan Adat	Gelar Rat/Raja	Pusat Pemerintahan Adat	Letak Rastchaap pada Wilayah Adm. PEMDA	Keterangan
1	UR SIU	1 DANAR	FAMUR DANAR	DANAR	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		2 WAIN	NEN DIT SAKMAS	WAIN	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		3 NUH FIT	MANTILUR KISUWAIT	SOMLAIN	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		4 MAUR	BARVAV	WATLAAR	Kab. Malra	Pulau Kei Besar

No	Rumpun	Ratschaap/ Pemerintahan Adat	Gelar Rat/Raja	Pusat Pemerintahan Adat	Letak Rastchaap pada Wilayah Adm. PEMDA	Keterangan
		5 UTAN TEL TIMUR	SIRSOMAS	OHOITAHIT	Kota Tual	Pulau Dullah
		6 UTAN TEL VARAT	BALDU	DESA DULLAH	Kota Tual	Pulau Dullah
		7 MATWAIR	MAGRIB	MATWAIR	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		8 MER OHOINEAN	KAIT EL	OHOINANGAN	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		9 KILMAS	SUNGLAIT	KAMEAR	Kota Tual	Pulau Kur
		10 MEU UMFIT	YAM TEL	YAMTEL	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
2	LOR LIM	1. TUBAV YAMLIM	BOMAV	VEER	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		2. LO-OHOITEL	IHIBES	NERONG	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		3. UB OHOI FAAK	EL RALANG, WEER, MAAR, UAT	BERGANTIAN EL RALANG, WEER, MAAR, UAT	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		4. LOR TEL VARAT	YARBADANG	TETOAT	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		5. OHOILIM NANGAN	MANYEU	RUMADIAN	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		6. OHOILIM TAHIT	YAB	FAAN	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		7. TUAL	TUVLE	TUAL	Kota Tual	Pulau Dullah
		8. RUMAT	SONGLI	RUMAT	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		9. IBRA IVIT	KIRKES	IBRA	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		10. KILSOIN	SINGRA	KILSOIN	Kota Tual	Pulau Mangur
3	LOR LABAY	1 WERKA	WERKA	WERKA	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		2 TAM	TAM	TAM	Kota Tual	Pulau Tam
		3 OHOIDER BAWAH	OHOIDER BAWAH	OHOIDER BAWAH	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil

Sumber: Dewan Adat Kepulauan Kei

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Bagian ini menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara dari sudut pandangan perekonomian. Indikator strategis perekonomian daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat diuraikan sebagai berikut.

2.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

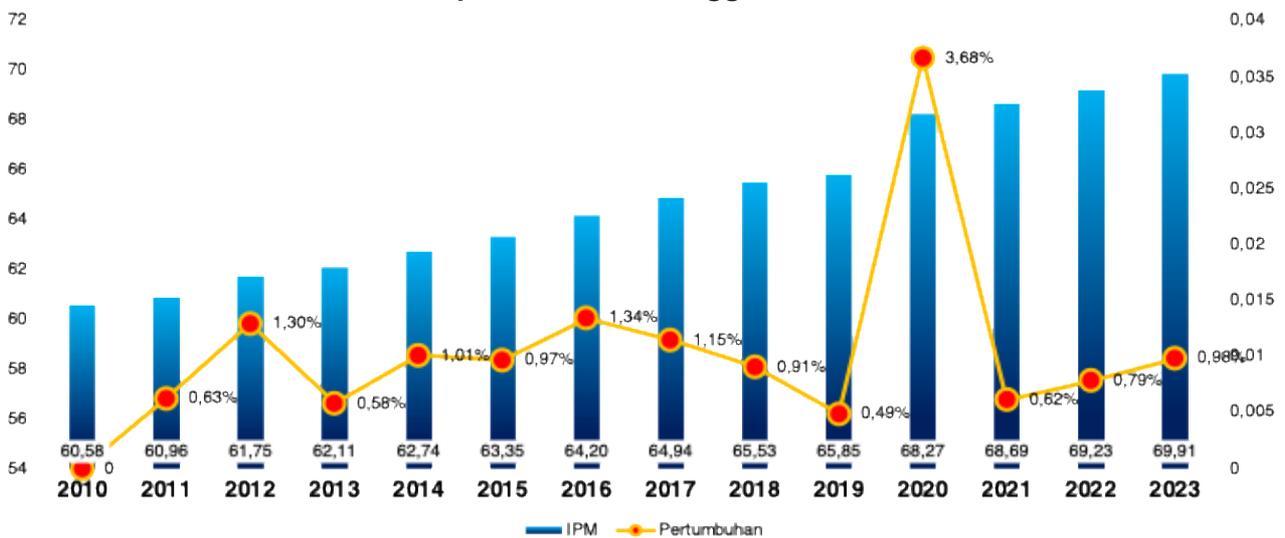
IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Semakin tinggi nilai IPM, maka kesejahteraan semakin baik.

Nilai IPM diperoleh sebagai kumulatif dari perhitungan dimensi pembentuknya. Dimensi IPM terdiri dari Dimensi Pendidikan yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), Dimensi Kesehatan diukur dengan Usia Harapan Hidup (UHH), serta dimensi standar hidup layak (ekonomi) diukur dengan pengeluaran Riil Per Kapita (PrP).

Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode pembangunan jangka panjang 2005-2025 menunjukkan tren meningkat. Terhitung mulai Tahun 2010, setelah perhitungan IPM Maluku Tenggara dilakukan terpisah dengan Kota Tual, maka pergerakan IPM setiap tahun menunjukkan tren kenaikan.

Tahun 2010 IPM Kabupaten Maluku Tenggara berada di angka 60,58 meningkat menjadi 69,23 pada tahun 2022 dan meningkat pada tahun 2023 mencapai angka 69,91.

Gambar 2.17
Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

IPM Maluku Tenggara dalam kurun waktu 2010 s.d 2023 menunjukkan pergerakan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun konsisten mengalami kenaikan, namun dari sisi pertumbuhan, selama kurun waktu 2010 s.d 2023, tren pertumbuhan IPM Maluku Tenggara

cenderung berfluktuasi. Tahun 2016 s.d Tahun 2019 kecenderungan pertumbuhan IPM mengalami perlambatan. Percepatan pertumbuhan IPM terjadi pada tahun 2020 s.d 2023.

Kondisi IPM Kabupaten Maluku Tenggara dalam empat tahun terakhir dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.16
Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019–2023

URAIAN INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
☑ Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,50	9,73	9,76	9,78	9,79
☑ Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,63	12,81	12,82	12,89	12,90
☑ Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	64,95	70,08	70,14	70,43	70,71
☑ Pengeluaran Riil Per Kapita (PRP)	Rp(000)	7.625	7.545	7.580	7.795	8.174
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	INDEKS	65,85	68,57	68,69	69,23	69,91

Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Kebijakan untuk pembangunan sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi perlu ditingkatkan guna mendorong peningkatan dan percepatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dimensi–dimensi Komponen IPM, yang terdiri dari usia harapan hidup untuk dimensi kesehatan, rata–rata lama sekolah dan harapan lama sekolah untuk pendidikan dan pengeluaran riil per Kapita untuk dimensi standar hidup layak (ekonomi), yang diuraikan sebagai berikut:

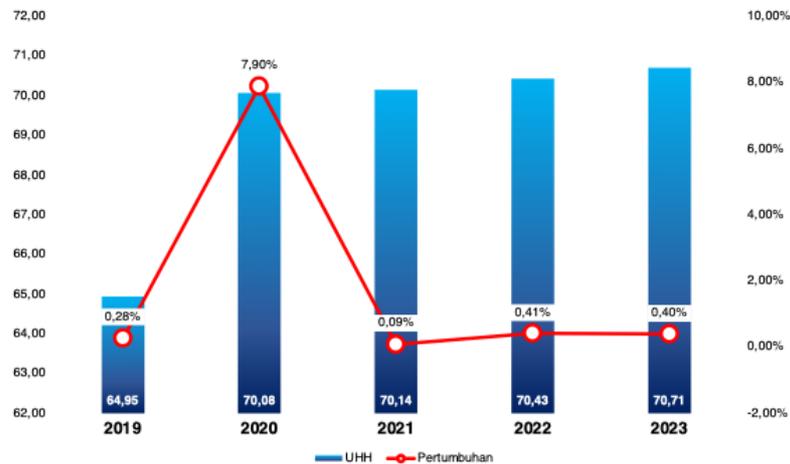
1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi, dengan pola kematian yang dianggap tidak berubah. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

UHH Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 sebesar 70,43 Tahun, meningkat pada tahun 2023 menjadi 70.71 tahun. Ini bermakna, penduduk Maluku Tenggara yang lahir pada tahun 2023, setidaknya akan mampu menjalani hidup sampai dengan rata–rata 70,71 tahun.

UHH Kabupaten Maluku Tenggara dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Hal ini mengandung arti, bahwa derajat Kesehatan masyarakat di Maluku Tenggara semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Gambar 2.18
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2019–2023



Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Indikator UHH Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 masih berada di bawah UHH Nasional, namun lebih tinggi dibanding UHH Provinsi Maluku. Perbandingan antar kabupaten dan kota di Provinsi Maluku menunjukkan UHH Kabupaten Maluku Tenggara berada di Posisi ke-6 tertinggi di antara 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Selengkapnya sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.17
Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019–2023

UHH	2019	2020	2021	2022	2023
☑ Maluku Tenggara	64,95	65,07	65,14	65,46	65,78
☑ Maluku	65,82	70,08	70,14	70,43	70,71
☑ Indonesia	71,34	73,37	73,46	73,60	73,93

Tahun 2023 Kabupaten Maluku Tenggara di peringkat ke 6 dari 11 Kab/Kota di Maluku

Sumber: BPS beberapa Terbitan (data diolah)

Tabel 2.18
Peringkat Usia Harapan Hidup (UHH) 11 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku
Tahun 2023

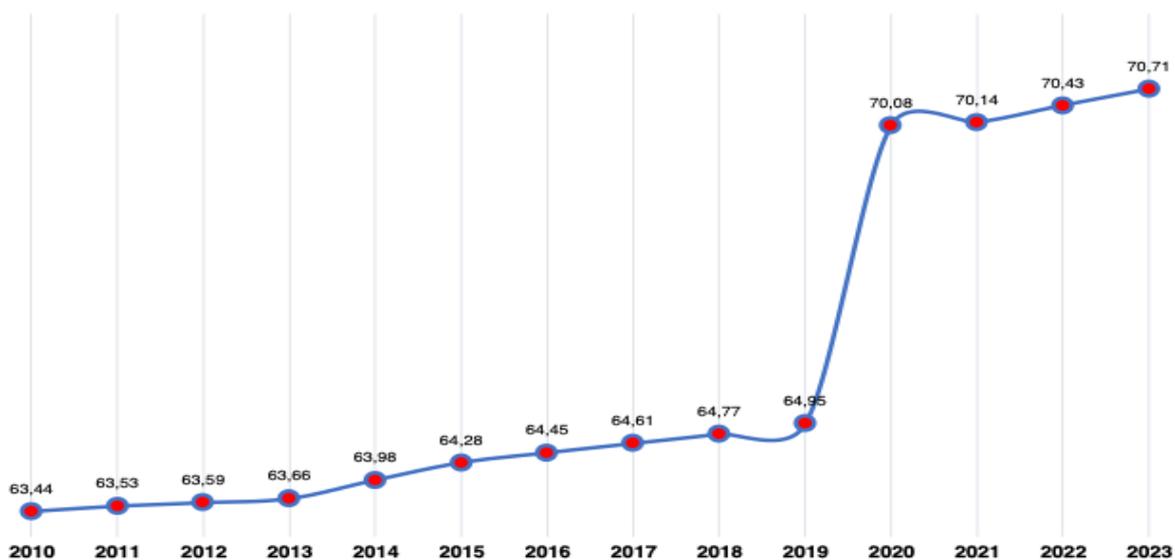
Peringkat	Kabupaten/Kota	UHH 2023
1	Ambon	72,86
2	Tual	71,32
3	Seram Bagian Barat	70,88
4	Maluku Tengah	70,83
5	Maluku Tenggara	70,71
6	Kepulauan Aru	70,27
7	Kepulauan Tanimbar	70,19
8	Buru	70,19
9	Buru Selatan	70,11
10	Maluku Barat Daya	69,30

Peringkat	Kabupaten/Kota	UHH 2023
11	Seram Bagian Timur	68,33

Sumber: BPS Provinsi Maluku 2024 (data diolah)

Perkembangan angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2010–2023 sebagai berikut.

Gambar 2.19
Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010–2023



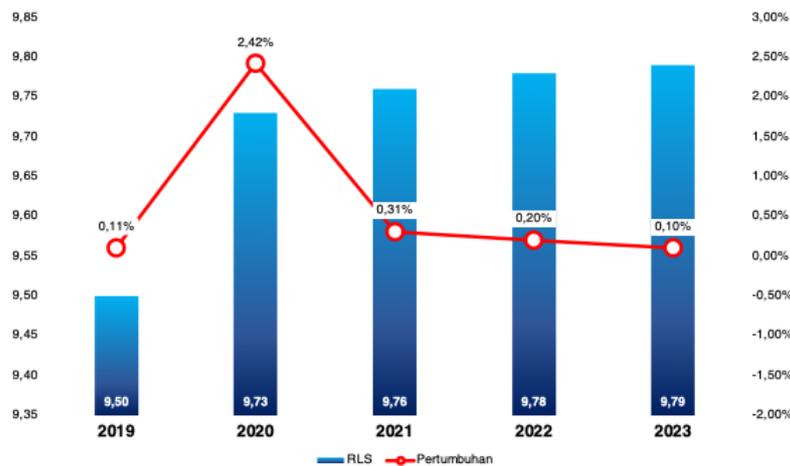
Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Selama periode tahun 2010 sampai 2023 Indikator komposit IPM Usia Harapan Hidup (UHH) mengalami tren meningkat. Tahun 2010 UHH sebesar 63,44 tahun meningkat menjadi 65,78 tahun pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara dari dimensi kesehatan yang semakin meningkat. UHH juga menunjukkan keberhasilan peningkatan pelayanan kesehatan yang tergambar dari usia rata–rata penduduk Maluku Tenggara yang semakin panjang dari waktu ke waktu.

2. Rata–rata Lama Sekolah (RLS)

Rata–rata Lama Sekolah (RLS) adalah salah satu indikator pembentuk nilai IPM dari Dimensi Pengetahuan atau Pendidikan. RLS diukur dengan satuan Tahun. RLS dimaknai sebagai Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 sebesar 9,78 tahun, meningkat pada Tahun 2023 menjadi 9,79 tahun. Ini bermakna, bahwa Tahun 2023, Rata-rata penduduk Maluku Tenggara yang berusia lebih dari 25 tahun ke atas, telah mampu mengenyam pendidikan formal selama 9,79 tahun, atau pada tingkatan SMA Kelas 1.

Gambar 2.20
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2019–2023



Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Indikator RLS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 masih berada di bawah RLS Provinsi Maluku, berjarak 0,41 poin. Namun dibandingkan dengan RLS Nasional, Maluku Tenggara masih lebih tinggi, dengan berjarak 1,02 poin. Selengkapnya tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.19
Perbandingan Capaian RLS Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Nasional
Tahun 2019–2023

RLS	2019	2020	2021	2022	2023
Maluku Tenggara	9,50	9,73	9,76	9,78	9,79
Maluku	9,81	9,93	10,03	10,19	10,20
Indonesia	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Tahun 2023 Kabupaten Maluku Tenggara di peringkat ke 4 dari 11 Kab/Kota di Maluku

Sumber: BPS beberapa Terbitan (data diolah)

Tabel 2.20
Peringkat Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 11 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku
Tahun 2023

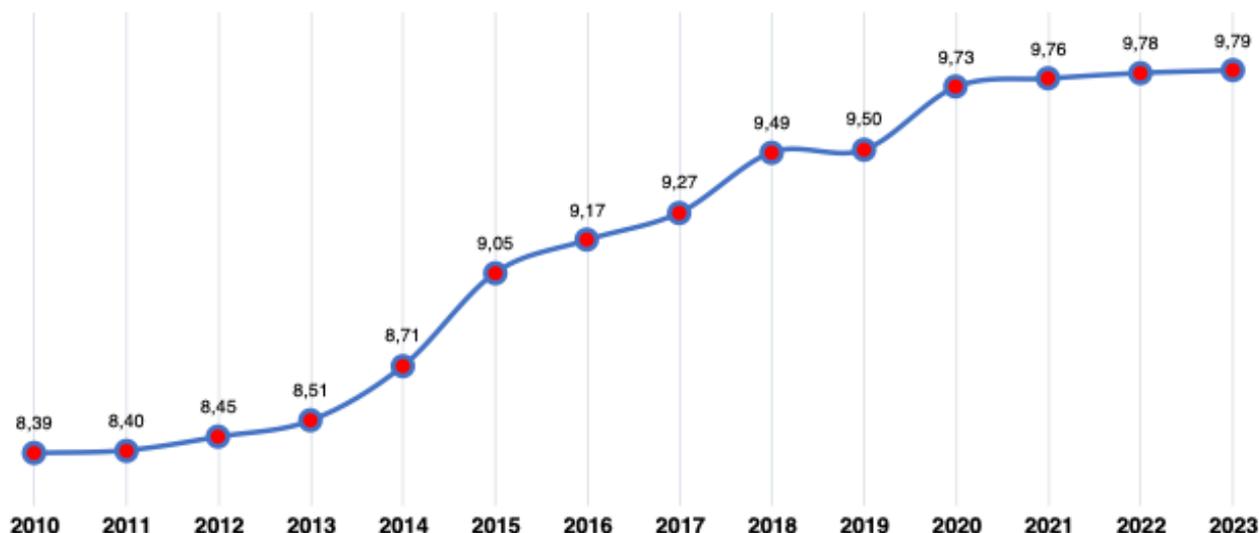
Kabupaten/Kota	RLS	
	Peringkat	Nilai
☑ Kota Ambon	1	12.22
☑ Kota Tual	2	10.66
☑ Kepulauan Tanimbar	3	9.91
☑ Maluku Tenggara	4	9.79
☑ Maluku Tengah	5	9.78
☑ Seram Bagian Barat	6	9.35
☑ Buru	7	9.01
☑ Kepulauan Aru	8	8.97

Kabupaten/Kota	RLS	
	Peringkat	Nilai
<input checked="" type="checkbox"/> Maluku Barat Daya	9	8.92
<input checked="" type="checkbox"/> Seram Bagian Timur	10	8.82
<input checked="" type="checkbox"/> Buru Selatan	11	8.23

Sumber: BPS Provinsi Maluku 2024 (data diolah)

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2010–2023 sebagai berikut.

Gambar 2.21
Perkembangan RLS Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2010–2023



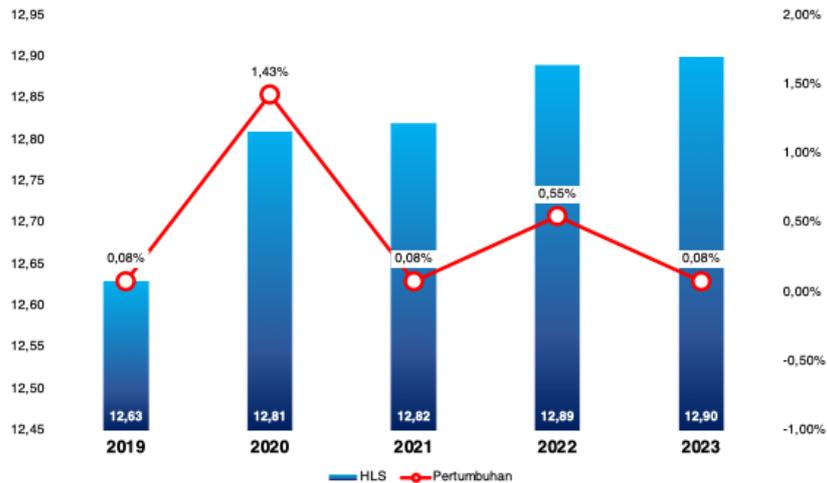
Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

3. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah salah satu indikator pembentuk nilai IPM dari Dimensi Pengetahuan atau Pendidikan. HLS dimaknai sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Tahun 2022 HLS Maluku Tenggara sebesar 12,89 tahun meningkat menjadi 12,90 Tahun di 2023, artinya dengan kondisi tahun 2023, setiap anak Maluku Tenggara yang lahir pada Tahun 2023 diharapkan akan mampu merasakan pendidikan formal sampai dengan 12,90 tahun, atau pada tingkatan semester 2 di bangku kuliah.

Gambar 2.22
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Indikator HLS Kabupaten Maluku Tenggara masih berada di bawah Provinsi Maluku dan Nasional. Kabupaten Maluku Tenggara berjarak 1,18 poin dibanding HLS Provinsi Maluku dan 0,25 poin perbandingan dengan HLS Nasional tahun 2023. Terjadi kecenderungan HLS Provinsi Maluku dan HLS Nasional meningkat lebih cepat dibanding HLS Maluku Tenggara.

Tabel 2.22
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019-2023

HLS	2019	2020	2021	2022	2023
☑ Maluku Tenggara	12,63	12,81	12,82	12,89	12,90
☑ Maluku	13,94	13,96	13,97	14,00	14,08
☑ Indonesia	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15

Tahun 2023 Kabupaten Maluku Tenggara di peringkat ke 5 dari 11 Kab/Kota di Maluku

Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2010-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.23
Peringkat Harapan Lama Sekolah (HLS) 11 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku
Tahun 2023

Kabupaten/Kota	HLS	
	Peringkat	Nilai
☑ Kepulauan Tanimbar	1	12.33
☑ Kepulauan Aru	2	12.36
☑ Maluku Barat Daya	3	12.70
☑ Buru Selatan	4	12.84
☑ Maluku Tenggara	5	12.90
☑ Seram Bagian Timur	6	12.91
☑ Buru	7	13.23

Kabupaten/Kota	HLS	
	Peringkat	Nilai
<input checked="" type="checkbox"/> Seram Bagian Barat	8	13.69
<input checked="" type="checkbox"/> Kota Tual	9	14.01
<input checked="" type="checkbox"/> Maluku Tengah	10	14.37
<input checked="" type="checkbox"/> Kota Ambon	11	16.07

Sumber: BPS Provinsi Maluku 2024 (data diolah)

Gambar 2.23
Perkembangan HLS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010-2023



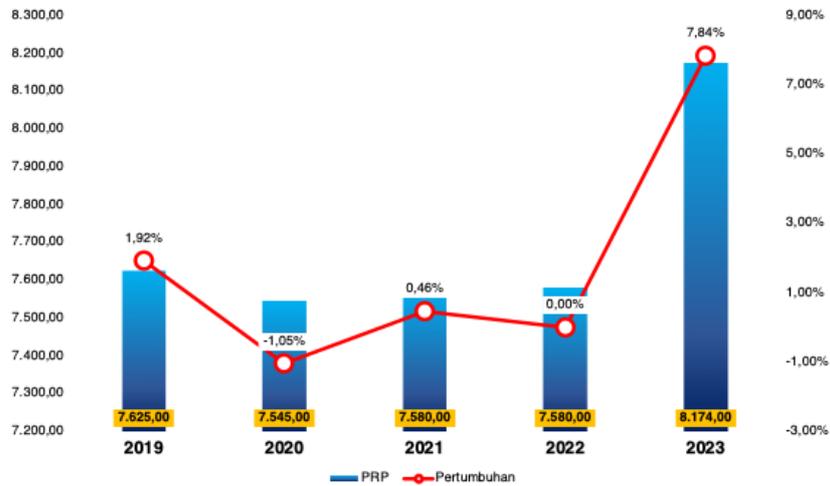
Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

4. Pengeluaran Riil Per Kapita

Pengeluaran Riil Per Kapita (PRP) merupakan besaran biaya untuk konsumsi setiap penduduk Indonesia yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. PRP menggunakan satuan nilai uang untuk periode 1 (satu) tahun. PRP merupakan indikator yang merepresentasikan dimensi standar hidup layak dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

PRP Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2022 sebesar Rp7.795.000, meningkat dibanding PRP Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp7.580.000. Tahun 2023 PRP Maluku Tenggara meningkat menjadi Rp8.174.000. Dengan nilai PRP sebesar Rp8.174.000 diasumsikan bahwa setiap penduduk Maluku Tenggara setiap tahunnya harus mengeluarkan biaya konsumsi sebesar Rp8.174.000 atau Rp681.167 per bulan.

Gambar 2.24
Pengeluaran Riil Per Kapita (PRP) Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

PRP Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 sebesar Rp8.174.000, masih berada di bawah PRP Provinsi Maluku sebesar Rp9.278.000 dan PRP Nasional sebesar Rp11.899.000. Perbandingan PRP Kabupaten Maluku Tenggara dengan PRP provinsi Maluku dan Nasional disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.24
Perbandingan Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2019-2023

PrP	2019	2020	2021	2022	2023
<input checked="" type="checkbox"/> Maluku Tenggara	7.625	7.545	7.580	7.795	8.174
<input checked="" type="checkbox"/> Maluku	8.887	8.732	8.770	8.876	9.278
<input checked="" type="checkbox"/> Indonesia	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899

Tahun 2023 Kabupaten Maluku Tenggara di peringkat ke 6 dari 11 Kab/Kota di Maluku
Sumber: BPS beberapa Terbitan (data diolah)

Tabel 2.25
Peringkat Pengeluaran Riil Per Kapita 11 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2023

Kabupaten/Kota	PrP	
	Peringkat	Nilai
<input checked="" type="checkbox"/> Kota Ambon	1	14.692
<input checked="" type="checkbox"/> Buru	2	10.879
<input checked="" type="checkbox"/> Maluku Tengah	3	10.788
<input checked="" type="checkbox"/> Seram Bagian Timur	4	10.020
<input checked="" type="checkbox"/> Seram Bagian Barat	5	9.324
<input checked="" type="checkbox"/> Maluku Tenggara	6	8.174
<input checked="" type="checkbox"/> Kepulauan Aru	7	8.133
<input checked="" type="checkbox"/> Buru Selatan	8	8.108
<input checked="" type="checkbox"/> Kota Tual	9	7.825

Kabupaten/Kota	PrP	
	Peringkat	Nilai
<input checked="" type="checkbox"/> Maluku Barat Daya	10	7.223
<input checked="" type="checkbox"/> Kepulauan Tanimbar	11	6.722

Sumber: BPS Provinsi Maluku 2024 (data diolah)

Perkembangan angka Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2010-2023 sebagai berikut.

Gambar 2.25
Perkembangan Angka Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010–2023



Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Daerah adalah faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Jumlah nilai tambah produksi dan peningkatannya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Nilai tambah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Jumlah nilai tambah produksi dijabarkan ke dalam nilai uang yang dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. PDRB dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu PRDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini Laju PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan umum stabil pada kisaran 5,12 persen. Capaian tertinggi pertumbuhan ekonomi Maluku Tenggara sebesar 7,23 persen pada tahun 2012. Terjadi Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2020 sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2005–2023 sebesar 5,08 persen.

Gambar 2.26
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2005–2023



Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

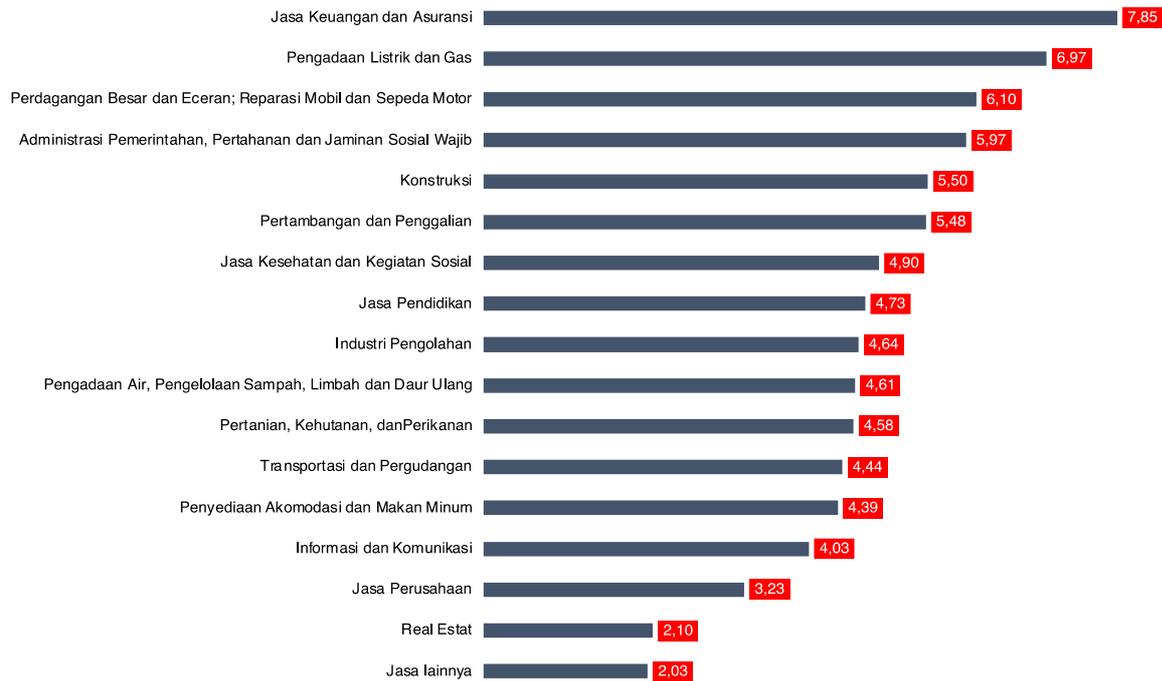
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara mengalami kontraksi pada tahun 2020. Dampak Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tumbuh negatif atau berkontraksi sebesar -0,22 persen. Setelah tahun 2020, Pertumbuhan Ekonomi berangsur membaik. Tahun 2021 sebesar 3,42 persen dan naik menjadi 5,65 persen di Tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023 menjadi 4,84 persen.

Sektor dominan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 adalah, Industri Pengolahan sebesar 9,67 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,65 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,47 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,26 persen dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,04 persen.

Sektor lapangan usaha yang mampu mencapai pertumbuhan rata-rata di atas 5 persen dalam periode tahun 2010 s.d 2023 diuraikan sebagai berikut, Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 5,48 persen, Konstruksi tumbuh sebesar 5,50 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 5,97 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 6,10 persen, Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 6,97 persen, serta yang tertinggi adalah lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 7,85 persen.

Pertumbuhan rata-rata lapangan usaha PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) periode tahun 2010 s.d 2023 disajikan sebagai berikut.

Gambar 2.27
Pertumbuhan Rata-rata Lapangan Usaha PDRB atas ADKH Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

2.2.1.3. Tingkat Kemiskinan

1. Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan

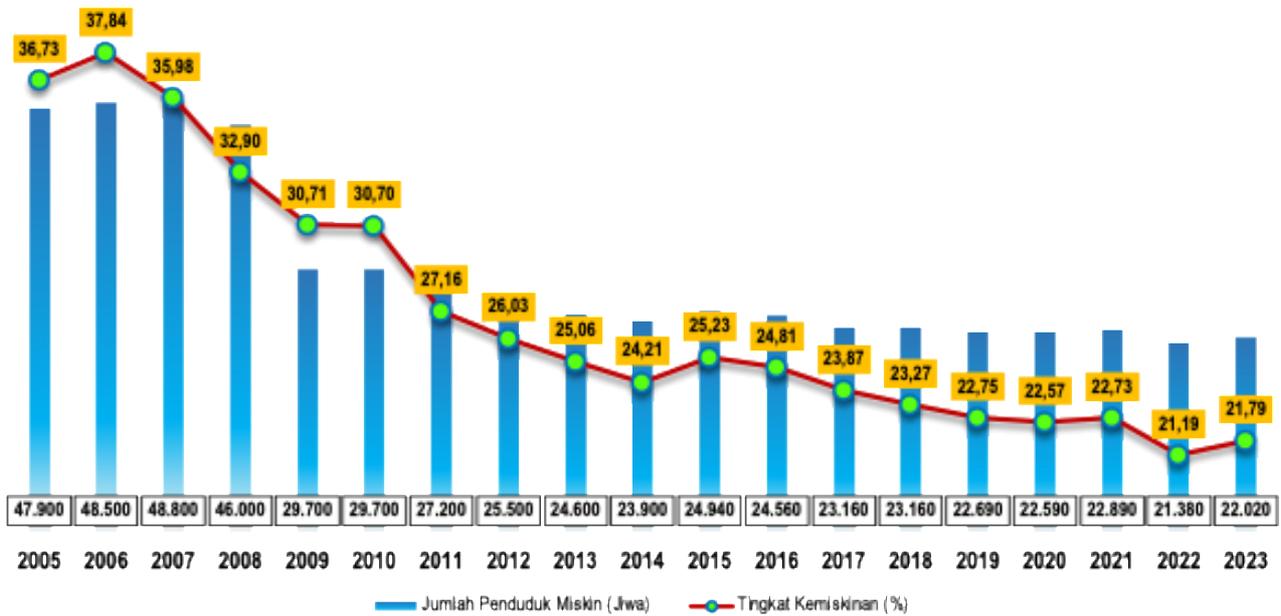
Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan Penduduk Miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (pendekatan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya atau dalam konteks perhitungan menurut BPS, Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per Kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Adapun garis kemiskinan adalah suatu ukuran nilai uang yang ditetapkan melalui perhitungan sebagai jumlah minimum pengeluaran uang oleh individu dalam rumah tangga untuk mencapai standar hidup yang layak. Dengan posisi garis kemiskinan, maka setiap individu yang pengeluaran tiap bulannya kurang atau di bawah dari nilai Garis Kemiskinan, dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sebaliknya individu yang memiliki pengeluaran minimal setara atau lebih besar dari nilai garis kemiskinan berada dalam kategori tidak miskin dan mampu mencapai standar hidup layak.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara selama periode pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 menunjukkan tren menurun. Tahun 2005 Tingkat Kemiskinan Maluku Tenggara sebesar 36,73 persen, mampu ditekan turun menjadi 21,19 persen di tahun 2022.

Trend ini menunjukkan bahwa selama periode 2005 s.d 2022, jumlah penduduk miskin yang berhasil dinetaskan dari kemiskinan sebanyak 25.880 jiwa. Tahun 2005 jumlah penduduk yang termasuk kategori miskin sebanyak 47.900 jiwa, mampu diturunkan menjadi 22.020 jiwa di tahun 2023.

Gambar 2.28
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2005–2023



Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Gambaran kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara empat tahun terakhir menunjukkan tren semakin menurun. Jumlah penduduk miskin juga menurun, dari 22.690 jiwa di tahun 2019 turun menjadi 22.020 jiwa di tahun 2023.

Berdasarkan garis kemiskinan BPS Tahun 2022 sebesar Rp595.041, BPS menghitung angka penduduk yang dikategorikan miskin di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2022 sebanyak 21.380 jiwa atau sebesar 21,19 persen. Perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2005–2023, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005–2023

TAHUN	GARIS KEMISKINAN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	TINGKAT KEMISKINAN
2005	Rp.140.241,00	47.900 Jiwa	36,73 %
2006	Rp.173.298,00	48.500 Jiwa	37,84 %
2007	Rp.174.889,00	48.800 Jiwa	35,98 %
2008	Rp.199.218,00	46.000 Jiwa	32,90 %
2009	Rp.204.461,00	29.700 Jiwa	30,71 %
2010	Rp.232.085,00	29.700 Jiwa	30,70 %
2011	Rp.240.267,00	27.200 Jiwa	27,16 %
2012	Rp.264.629,00	25.500 Jiwa	26,03 %
2013	Rp.292.513,00	24.600 Jiwa	25,06 %
2014	Rp.299.603,00	23.900 Jiwa	24,21 %
2015	Rp.331.518,00	24.940 Jiwa	25,23 %
2016	Rp.350.661,00	24.560 Jiwa	24,81 %

TAHUN	GARIS KEMISKINAN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	TINGKAT KEMISKINAN
2017	Rp.373.386,00	23.160 Jiwa	23,87 %
2018	Rp.436.927,00	23.160 Jiwa	23,27 %
2019	Rp.464.649,00	22.690 Jiwa	22,75 %
2020	Rp.517.821,00	22.590 Jiwa	22,57 %
2021	Rp.549.047,00	22.890 Jiwa	22,73 %
2022	Rp.595.041,00	21.380 Jiwa	21,19 %
2023	Rp.669.140,00	22.020 Jiwa	21,79 %

Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan Garis Kemiskinan (GK) Maluku Tenggara terus meningkat selama periode tahun 2005–2023. Rata–rata pertumbuhan Nilai Garis Kemiskinan di Maluku Tenggara pada periode tersebut sebesar 9,21 persen.

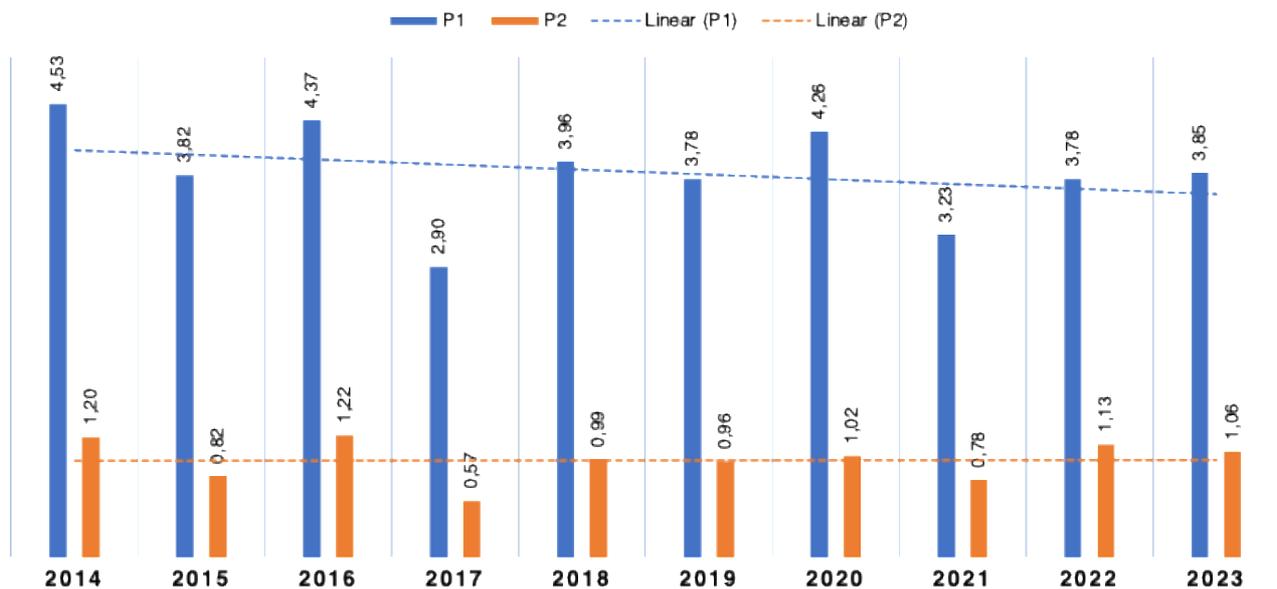
Analisis asosiasi menunjukkan bahwa dalam periode 2005 s.d 2023 terjadi hubungan asosiasi negative antara garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pada Nilai Garis Kemiskinan tidak berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan. Bahkan pada periode tersebut, nilai garis kemiskinan yang semakin tinggi berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan yang semakin turun. Pergerakan menurunnya angka kemiskinan pada periode tahun 2005 s.d 2023 berkaitan dengan meningkatnya pelayanan pengentasan kemiskinan. Cakupan pelayanan dasar sosial dan ekonomi sangat berkaitan dengan turunnya angka kemiskinan.

Di samping itu, cakupan perlindungan dan jaminan sosial dari waktu ke waktu semakin diperluas. Tahun 2022 Cakupan pelayanan bagi PMKS di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami kenaikan sebesar 21.534 jiwa. Tahun 2021 sebanyak 63.707 jiwa meningkat menjadi 85.241 pada tahun 2022. Perlu dicatat bahwa pelayanan PMKS tidak hanya dalam kaitan dengan mengentaskan penduduk miskin, namun juga sebagai upaya menjaga agar warga yang rentan atau hampir miskin tidak terjerebab ke dalam jurang kemiskinan.

3) Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun yang penting juga untuk ditelaah dan didalami adalah permasalahan Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2). Kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata–rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai P1, menunjukkan semakin jauh pendapatan penduduk miskin dari GK, sebaliknya semakin kecil nilai P1, semakin dekat pendapatan masyarakat dengan GK. Sedangkan Keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin senjang pendapatan antara penduduk miskin. Berikut ditunjukkan kondisi kedalaman dan keparahan kemiskinan (P1 dan P2) tahun 2014–2023.

Gambar 2.29
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Maluku Tenggara, Tahun 2014–2023



Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Nilai P1 kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2014–2023 menunjukkan kondisi fluktuatif dengan tren kecenderungan menurun. Tahun 2014 nilai P1 sebesar 4,53 persen, turun menjadi 3,85 persen tahun 2023. Tren nilai P1 yang semakin menurun mengindikasikan rata–rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati Garis Kemiskinan. Hal ini bermakna, terjadi kecenderungan tingkat pengeluaran penduduk miskin yang berangsur semakin dekat untuk keluar dari jurang kemiskinan.

Nilai P2 dalam periode yang sama menunjukkan pergerakan flutuatif, dengan kecenderungan stagnan. Tahun 2014 Nilai P2 sebesar 1,20 persen turun menjadi 1,06 persen di Tahun 2023. Hal ini menunjukkan tingkat kesenjangan rata–rata pengeluaran antara penduduk miskin dan penduduk bukan miskin di Kabupaten Maluku Tenggara relatif sama dalam periode 2014 s.d 2023.

4) Kemiskinan Ekstrim

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 22 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan suatu era baru yang lebih agresif dalam upaya menekan angka kemiskinan. Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan Ekstrem sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses terhadap informasi. Secara global, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai hidup dengan pendapatan kurang dari USD 1.90 per hari berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity).

Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan secara terpadu melalui satu data pensasaran penduduk miskin ekstrem. Melalui surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam melakukan intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Data P3KE memuat data masyarakat berdasarkan nama dan alamat yang sudah diverifikasi, dan di-*cross check* dengan berbagai sumber data yang sudah ada, seperti BPS, BKKBN, dan data kependudukan Kemendagri. Data P3KE disediakan dalam hitungan desil (1/10), sehingga diasumsikan penduduk miskin ekstrim adalah penduduk dengan tingkat pendapatan yang berada pada 10 persen terbawah dari seluruh penduduk.

Jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2022 tercatat sebanyak 5.226 orang atau 5,18 persen dari total penduduk, berhasil diturunkan menjadi 3.330 jiwa atau sebesar 3,29 persen pada Tahun 2023. Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Maluku Tenggara dan perbandingannya dengan Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Maluku disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Maluku
menurut Kabupaten / Kota Tahun 2021 - 2023

No	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TAHUN		
		2021	2022	2023
	Prov. Maluku	80.630	65.850	47.670
1	Kepulauan Tanimbar	11.905	7.475	3.190
2	Maluku Tenggara	3.480	5.226	3.330
3	Maluku Tengah	21.191	11.635	12.660
4	Buru	9.264	10.522	6.460
5	Kepulauan Aru	4.999	1.940	4.920
6	Seram Bagian Barat	9.751	16.533	9.410
7	Seram Bagian Timur	3.616	4.129	2.540
8	Maluku Barat Daya	6.881	2.502	2.260
9	Buru Selatan	1.968	1.562	1.040
10	Kota Ambon	3.272	0.000	0.000
11	Kota Tual	4.305	4.322	1.870

Sumber: Data P3KE, Kemenko PMK

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan adalah salah satu aspek penting dalam kajian ekonomi pembangunan. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan didefinisikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, atau sebagainya.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yakni angkatan kerja (usia produktif) dan bukan angkatan kerja (bukan usia produktif). Angkatan Kerja yang tidak bekerja

dan/atau belum memperoleh pekerjaan serta yang berkeinginan untuk bekerja disebut pengangguran. Lebih lanjut dalam kajian statistik, pengangguran di suatu wilayah pada rentang waktu tertentu dikenal dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka selama periode pembangunan tahun 2005–2025 menunjukkan trens fluktuatif, dengan kecenderungan turun selama periode 20 tahun. TPT mencapai 8,97 persen pada tahun 2006 dan turun menjadi 5,73 persen tahun 2023.

Gambar 2.30
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2006–2023



Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.28
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2019–2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Usia Kerja	Jiwa	65,507.00	70,796.00	71.304,00	71.768,00	93.785,00
2	Angkatan Kerja	Jiwa	39,267.00	46,185.00	46.046,00	44.551,00	57.560,00
3	Bekerja	Jiwa	38,254.00	43,897.00	43.715,00	41.994,00	54.259,00
4	Pengangguran (2-3)	Jiwa	1,013,00	2,288.00	2.331,00	2.557,00	3.301,00
5	Bukan Angkatan Kerja (1-2)	Jiwa	26,240.00	24,611.00	25.258,00	27.217,00	36.225,00
6	TPT (4/2)		2,45%	4,95%	5,06%	5,74%	5,73%

Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, yaitu penduduk yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan/atau mereka yang sementara mencari pekerjaan. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja. Dengan demikian, TPT menunjukkan gap antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia pada satu periode tertentu di wilayah tertentu.

Di Kabupaten Maluku Tenggara, pada Tahun 2023 Jumlah angkatan kerja sebanyak 57.560 orang, angkatan kerja yang bekerja sebanyak 54.259 orang, sedangkan yang tidak bekerja sebanyak 3.301 orang. Sehingga TPT di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 sebesar 5,73 persen.

TPT Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 sebesar 5,73 persen mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 5,74 persen. Penurunan ini dipicu oleh jumlah penduduk yang bekerja bertambah dari 41.994 orang pada tahun 2022 naik menjadi 54.259 orang di tahun 2023. Atau terdapat 12.265 orang yang terserap pasar kerja di tahun 2023. Meskipun demikian, dari sisi jumlah penduduk menganggur menunjukkan kenaikan, dari 2.557 jiwa pada tahun 2022 meningkat menjadi 3.301 jiwa pada Tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan TPT belum mencerminkan kondisi keberhasilan dalam menurunkan jumlah pengangguran.

Gambaran kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 menurut perbandingan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut.

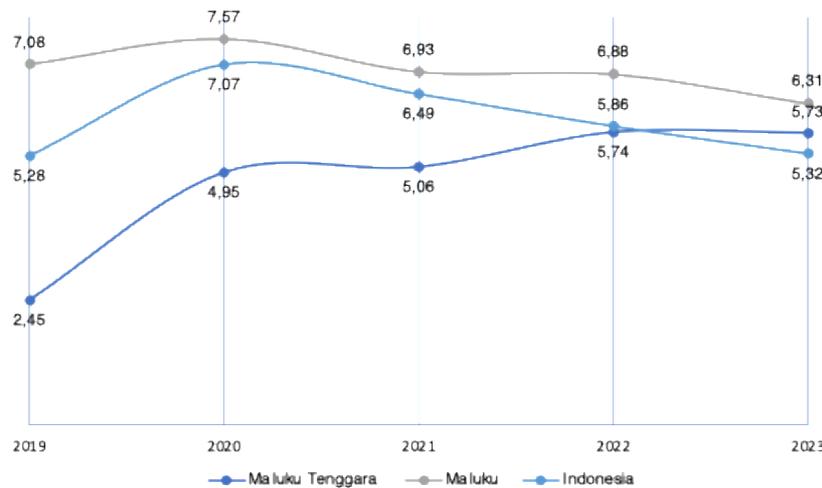
Tabel 2.29
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023

URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	
Penduduk Usia Kerja	46.269	47.516	93.785
Angkatan Kerja	33.531	24.029	57.560
<input checked="" type="checkbox"/> Bekerja	31.473	22.786	54.259
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Bekerja	2.058	1.243	3.301
Bukan Angkatan Kerja	12.738	23.487	36.225
<input checked="" type="checkbox"/> Sekolah	4.605	5.134	9.739
<input checked="" type="checkbox"/> Mengurus Rumah Tangga	2.402	15.343	17.745
<input checked="" type="checkbox"/> Lainnya	5.731	3.010	8.741

Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 sebesar 5,73 persen, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku dan Nasional, menunjukkan bahwa TPT Kabupaten Maluku Tenggara lebih rendah dibanding TPT Provinsi namun masih lebih tinggi dibanding TPT Nasional. Selengkapnya sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.31
Perbandingan TPT Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Nasional
Tahun 2019–2022



Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

2.2.1.5. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Secara umum Inflasi terjadi sebagai akibat dari, 1) Tarikan Permintaan dan 2) Dorongan Penawaran. Permintaan yang tinggi melebihi penawaran (pasokan) akan mengakibatkan harga naik. Hal ini umumnya terjadi pada bulan-bulan dimana terdapat hari besar keagamaan.

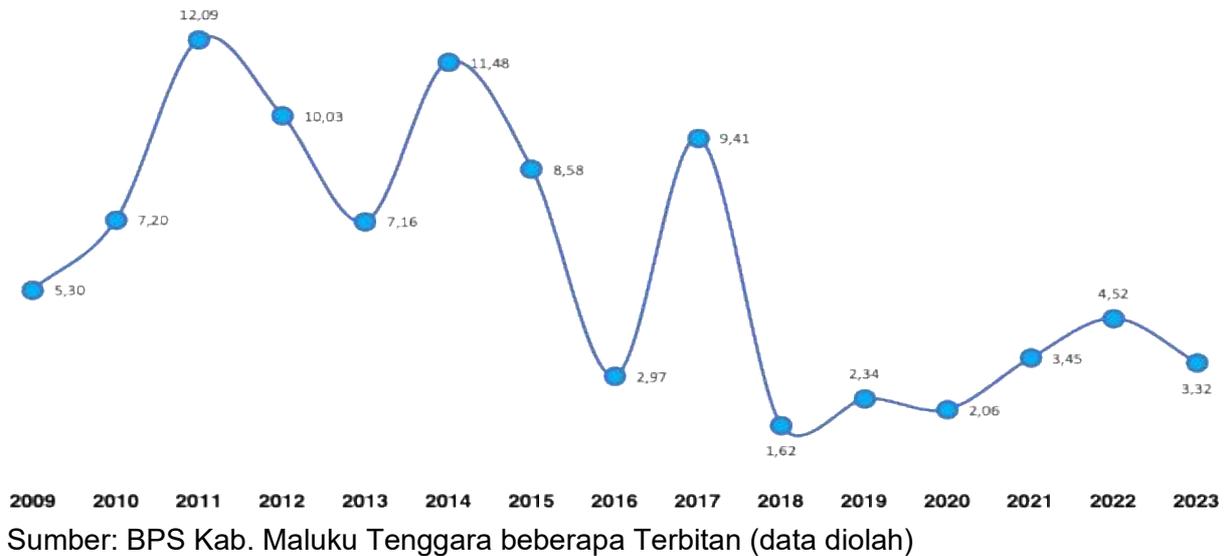
Adapun dorongan penawaran secara umum terjadi karena pasokan barang berkurang. Mengakibatkan jumlah permintaan yang normal tidak terpenuhi. Hal ini umumnya terjadi pada kondisi, bencana alam, krisis sosial/ekonomi, kegagalan produksi dan wabah penyakit.

Inflasi harus terjaga dan stabil dalam posisi yang rendah, baik dalam perhitungan tahun ke tahun, maupun dalam perhitungan bulanan. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Inflasi yang tinggi dan terjadi terus menerus akan menurunkan daya beli masyarakat. Ini mempengaruhi produksi dan produktivitas usaha, yang selanjutnya akan berdampak pada melambatnya kinerja perekonomian. Dampak langsung dari inflasi yang terus-menerus adalah pengusaha melakukan efisiensi, yaitu menurunkan volume produksi, yang berpengaruh pada pengurangan jumlah pekerja.

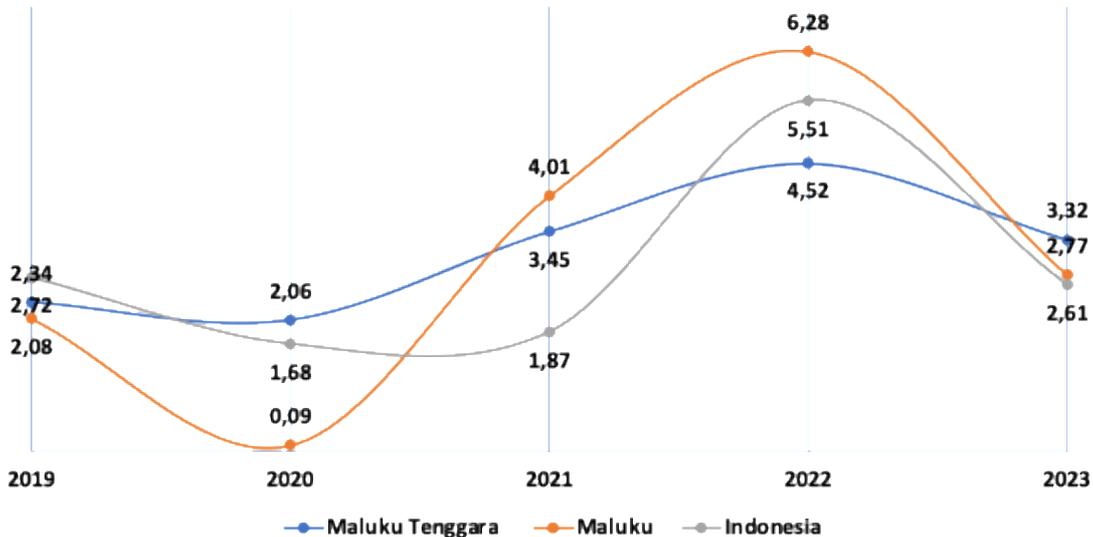
Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara dihitung dengan sampel hitung Kota Tual. Selama periode pembangunan jangka panjang 2005–2025, laju inflasi di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren fluktuatif. Inflasi Maluku Tenggara mengalami capaian tertinggi mencapai 12,09 persen di Tahun 2011 dan mencapai inflasi terendah 1,62 persen di Tahun 2018. Terhitung sejak Tahun 2018, Inflasi Maluku Tenggara meskipun mengalami tren meningkat, namun secara konsisten tetap terjaga di bawah 5 (lima) persen.

Gambar 2.32
Laju Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2009–2023



Gambaran laju inflasi dalam empat tahun terakhir (2019–2023), disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.33
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Tahun 2023 dalam perhitungan tahun ke tahun (yoy), Laju Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 3,32 persen, mengalami penurunan dibanding Tahun 2022 sebesar 4,52 persen. Adapun laju inflasi Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 3,32 persen, masih lebih tinggi dibanding inflasi Provinsi Maluku sebesar 2,77 persen dan inflasi nasional 2,61 persen.

Dalam tahun 2023, jenis barang dan jasa yang paling dominan menyumbang inflasi antara lain: bahan pangan (ikan dan sayur), harga tiket angkutan udara, rokok, bahan bangunan, pakaian Wanita, dan BBM.

Upaya mendorong peningkatan produksi, pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok, menjadi strategi utama menjawab ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan sebagai komponen terbesar penyebab inflasi di Maluku Tenggara. Selengkapnya, barang dan jasa penyumbang inflasi terbesar tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Jenis Barang/Jasa Penyumbang Inflasi Terbesar Menurut Bulan Tahun 2022

BULAN	IHK	PENYUMBANG TERBESAR
Januari	110,56	ikan kembung/lema, Ikan baronang, bahan bakar rumah tangga, tukang bukan mandor, telur ayam ras, enbal gepe, biaya pulsa ponsel, daun singkong, daging ayam ras dan talas.
Februari	109,32	ikan layang/momar, ikan kembung/lema, angkutan udara, ikan tongkol/komu, kangkung, ikan baronang, telur ayam ras, minyak goreng air kemasan dan daun singkong.
Maret	109,02	ikan baronang, angkutan udara, ikan laying/momar, ikan tongkol/komu, ikan kakap merah, telur ayam ras, ikan kembung/lema, sawi hijau, ketimun dan teh.
April	110,92	angkutan udara, ikan teri, minyak goreng, spring bed, ikan tongkol/komu, rokok kretek filter, bayam, kangkung, semen dan terong.
Mei	112,27	angkutan udara, ikan layang/momar, lemari pakaian, kangkung, ikan teri, telur ayam ras, ikan kakap merah, biaya pulsa ponsel, ikan kembung/lema dan nasi dengan lauk.
Juni	113	ikan tongkol/komu, ikan layang, ikan teri, kontrak rumah, bawang merah, ikan kakap putih, tomat, telur ayam ras, ikan bakar dan baju muslim Wanita.
Juli	114,88	ikan tongkol/komu, ikan kakap putih, angkutan udara, bawang merah, nasi dengan lauk, cabai rawit, ikan baronang, kue kering berminyak, ikan kembung/lema dan ikan selar
Agustus	113,84	ikan tongkol/komu, ikan layang/momar, ikan kakap putih/sakuda, minyak goreng, ikan kembung/lema, kangkung, tomat, sawi hijau, bawang putih dan ikan baronag.
September	115	bensin, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, nasi dengan lauk, angkutan dalam kota, ikan teri, daging ayam ras, ikan baronang, pepaya, dan kangkung.
Oktober	113,45	ikan tongkol, ikan layang, bahan bakar rumah tangga, ikan baronang, bawang merah, ikan kembung, telur ayam ras, daging ayam ras, ikan bubara, dan minyak goreng.

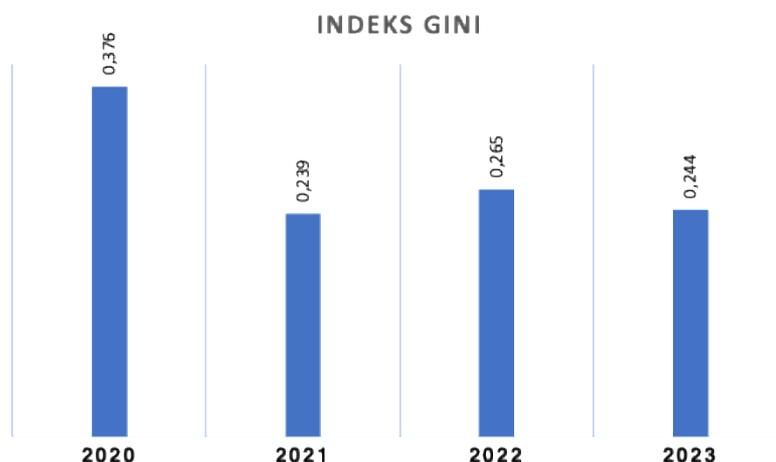
BULAN	IHK	PENYUMBANG TERBESAR
November	114,4	ikan tongkol, ikan layang, nasi dengan lauk, ikan selar, gado-gado, kangkung, rokok kretek filter, sawi hijau, tomat, kopi bubuk.
Desember	115,33	Angkutan Udara, Bensin, Ikan Teri, Nasi Dengan Lauk, dan Enbal Gepe.

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2023

2.2.1.6. Indeks Gini

Indeks Gini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan yang menggambarkan perbedaan pendapatan masyarakat antarkelompok pendapatan di masyarakat. Pengukuran Indeks Gini menggunakan alat analisis Curva Lorenz. Hasil perhitungan Indeks Gini Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-2022 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.34
Indeks Gini Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Berdasarkan hasil penghitungan menunjukkan angka Indeks Gini Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 sebesar 0,3609 lebih rendah dibanding tahun 2021 sebesar 0,3640. Penurunan ini menunjukkan adanya distribusi pendapatan penduduk yang semakin membaik.

Angka Indeks Gini ini juga menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Maluku Tenggara berada pada kategori ketimpangan menengah/moderat. Kondisi ini diperkuat dengan hasil analisis Kurva Lorenz, di mana pada tahun 2022 terdapat 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah, hanya menerima 15,45 persen dari total pendapatan, selanjutnya 40 persen penduduk yang berpendapatan menengah menerima sekitar 44,80 persen dari total pendapatan dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi (kaya) mendapatkan sekitar 39,75 persen dari total pendapatan.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

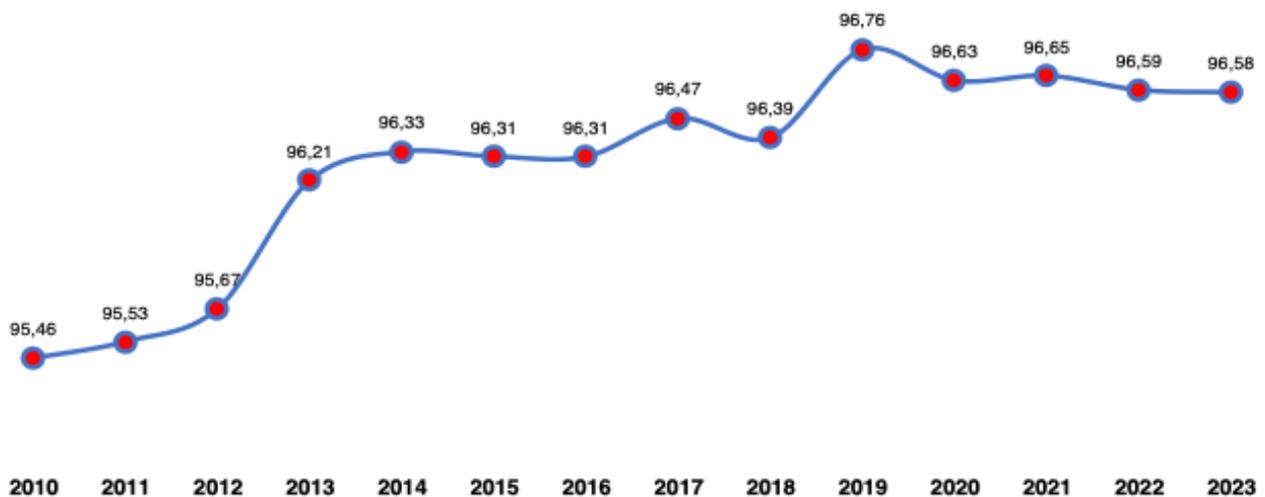
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan yang dihitung dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Komponen penghitungan IPG adalah Angka harapan hidup, harapan pendidikan, dan indeks distribusi pendapatan. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

IPG Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 menunjukkan tren meningkat. IPG Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 sebesar 95,46 persen, meningkat menjadi 96,58 persen pada tahun 2023.

Gambar 2.35
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2010–2023



Sumber: BPS Provinsi Maluku (data diolah)

2.2.2.2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Upaya untuk mendorong peningkatan pelayanan kesehatan baik masyarakat maupun perorangan salah satunya melalui pencegahan dan pengendalian penyakit.

a. Penyakit Menular dengan prioritas:

- HIV–AIDS, dengan rata–rata persentase kematian sebesar 4,2 persen;
- TBC, dengan rata–rata persentase kematian sebesar 2,8 persen;
- Malaria, dengan rata–rata persentase kematian sebesar 2,2 persen;
- Hepatitis, dengan rata–rata persentase kematian sebesar 2,3 persen, serta
- NTDs

b. Penyakit Tidak Menular dengan prioritas:

- Diabetes Melitus, dengan rata–rata persentase kematian sebesar 1,6 persen.

- Hipertensi, dengan rata-rata persentase kematian sebesar 0,15 persen.
- Gangguan jantung,
- Stroke, dengan rata-rata persentase kematian sebesar 21 persen;
- Kanker
- asma dengan rata-rata persentase kematian sebesar 0,19 persen;
- PPOK, dengan rata-rata persentase kematian sebesar 2,7 persen

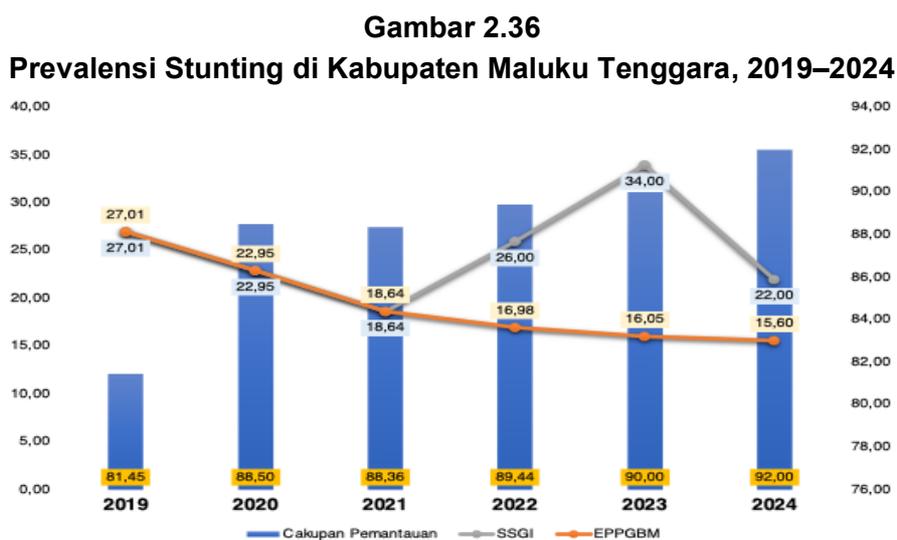
2.2.2.3. Prevalensi Stunting

Penurunan stunting menjadi salah satu prioritas daerah dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya penurunan stunting dilaksanakan secara terintegrasi melalui koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). TPPS dibentuk sejak pemberlakuan Perpres Nomor 72 Tahun 2021. TPPS berkedudukan dari tingkat Kabupaten hingga desa, yang dikoordinasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Intervensi untuk percepatan penurunan stunting dilaksanakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu 1) Intervensi Gizi Spesifik yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan, serta 2) Intervensi gizi sensitif, yaitu intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

Pengukuran Prevalensi Stunting dilaksanakan dalam 2 (dua) sumber data, yaitu: 1) Data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dan Data Status Gizi Indonesia (SGI). Data e-PPGBM merupakan data dinamis yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang diinput setiap bulan oleh Pengelola Gizi di tiap-tiap Puskesmas. Sedangkan SGI diperoleh dari hasil Survei SGI yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 tahun.

Karena model pengumpulan dan pengolahan data yang berbeda mengakibatkan hasil pengukuran juga berbeda. Prevalensi Stunting Kabupaten Maluku Tenggara menurut Data e-PPGBM tahun 2023 sebesar 16,05 persen, sedangkan menurut data SGI sebesar 34,00 persen. Tren prevalensi stunting Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 – 2024 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Data e-PPGBM dan SSGI, Kemenkes (diolah)

2.3. ASPEK DAYA SAING

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Potensi Sumber Daya Ekonomi Daerah

Kabupaten Maluku Tenggara yang terletak pada gugusan Kepulauan Kei, adalah daerah berciri kepulauan. Sesuai kondisi dan karakteristik, maka potensi sumber daya alam di Kabupaten Maluku Tenggara antara lain perikanan, pariwisata, pertanian dan perkebunan.

a. Perikanan

Sebagai daerah berciri kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi besar di sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Sub Sektor perikanan juga menjadi salah satu sub sektor yang berkontribusi paling besar untuk perekonomian daerah.

Sektor Perikanan memiliki potensi yang sangat besar. Maluku Tenggara terletak di persimpangan 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP-714 Laut seram, WPP-715 Laut Banda dan WPP-718 Laut Arafura. Total potensi lestari perikanan di Maluku Tenggara sebesar 1.499.668 Ton/Tahun mencapai 12,49 persen, dari potensi nasional.

Tabel 2.31
Potensi Wilayah Sektor Perikanan dan Lokasi Wilayah Sektor Perikanan
Kabupaten Maluku Tenggara

WPP	POTENSI WPP	LOKASI WPP
• WPP-714 :	604.515 Ton/Tahun	Laut Seram – Selat Tomini
• WPP-715 :	482.035 Ton/Tahun	Laut Banda
• WPP-718 :	413.118 Ton/Tahun	Laut Arafura
TOTAL	1.499.668 Ton/Tahun	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara

Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah berciri kepulauan memiliki potensi besar di sektor perikanan budidaya. Perairan dangkal yang mendapatkan intensitas cahaya matahari setiap tahun menjadikan wilayah perairan Maluku Tenggara menjadi habitat yang sangat baik untuk perikanan budidaya.

Komoditi utama perikanan Budidaya di Kabupaten Maluku Tenggara adalah Rumput Laut. Total areal potensial budidaya rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara seluas 8.662,23 ha. Areal termanfaatkan seluas 1.380,62 Ha, sehingga areal yang siap untuk dikembangkan seluas 7.281,61Ha. Areal budidaya rumput laut, yang siap dikembangkan mencakup: Klaster Teluk Sathean, Ibra, Ngabub; Klaster Teluk Kolser, Letman, Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun; Klaster Warbal, Ur Pulau dan Tanimbar Kei; Klaster Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat; Klaster Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab; Klaster Teluk Hoat Sorbay; Klaster Perairan Pulau Pulau Sepuluh; Klaster Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer; Klaster Teluk Nerong, Larat, Tamangil; Klaster Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar dan Klaster Teluk Ohoiraut, Wair.

Jumlah Pembudidaya rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 2.398 orang, yang terdiri dari pembudiaya berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 1.562 orang (65,14%) dan Perempuan sebanyak 836 orang (34,86%).

Jumlah kelompok pembudidaya aktif di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebanyak 799 RTP. Meningkat dari tahun 2020 sebanyak 87 KUB dan tahun 2021 sebanyak 114 KUB.

Pengembangan perikanan budidaya khususnya rumput laut di Maluku Tenggara mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Terbaru pada Tahun 2022 diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2022 tentang Kampung Perikanan Budidaya, menetapkan Maluku Tenggara sebagai sentra pengembangan rumput laut di Provinsi Maluku.

Hal ini dipertegas dengan penetapan Maluku Tenggara sebagai lokus pilot project hilirisasi rumput laut, sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Kabinet Terbatas, tanggal 23 Juni 2023 di Istana Negara. Gambaran potensi Kawasan pengembangan rumput laut di Maluku Tenggara sebagai berikut.

Tabel 2.32
Luas Lahan Untuk Usaha Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Maluku Tenggara
Menurut Klaster dan Kecamatan

Kawasan/Klaster	Luas (ha)	Kondisi Lahan (ha)			Keterangan
		Dimanfaatkan	Belum Dimanfaatkan		
			Luas	%	
(1) Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub	503.1	96.41	406.69	80.84	Kecamatan Kei Kecil
(2) Kawasan Teluk Malinga, Letman, Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun	1,681.02	134.97	1,546.05	91.97	Kecamatan Kei Kecil
(3) Kawasan Warbal, Ur Pulau dan Tanimbar kei	2,860.02	410.49	2,449.53	85.65	Kecamatan Kei Kecil Barat
(4) Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat	396.01	18.99	377.02	95.20	Kecamatan Kei Kecil Timur
(5) Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Madwaer, Ohoira, Wab	303	2.92	300.08	99.04	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Hoat sorbay
(6) Kawasan Teluk Hoat Sorbay	543.01	543	0.01	0	Kecamatan Hoat Sorbay
(7) Kawasan Perairan Pulau-pulau Sepuluh (Hoat, Nai, Tarwa, Ohoiwa, Manir)	1,447.01	125.63	1,321.38	91.32	Kecamatan Manyeuw
(8) Kawasan Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdun Soinrat, Bombay, Weer	233.02	11.69	221.33	94.98	Kecamatan Kei Besar
(9) Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil	140.01	16.07	123.94	88.52	Kecamatan Kei Besar Selatan

Kawasan/Klaster	Luas (ha)	Kondisi Lahan (ha)			Keterangan
		Dimanfaatkan	Belum Dimanfaatkan		
			Luas	%	
(10) Kawasan Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar	462.02	16.07	445.95	96.52	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
(11) Klaster Teluk Ohoiraut, Wair	94.01	4.38	89.63	95.34	Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei besar Utara Barat
Total Areal Budidaya Rumput Laut	8,662.23	1,380.62	7,281.61	84.06	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, 2024

Dari sisi produksi, total produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya (baik ikan maupun non ikan) terus meningkat dari waktu ke waktu.

Tabel 2.33
Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
• Perikanan Tangkap	94.907,20	96.332,16	97.101,34	97.538,30	103.059,00
• Perikanan Budidaya	24.161,67	31.447,37	34.414,29	40.670,70	46.788,86

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

b. Pariwisata

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor prioritas dan unggulan di Kabupaten Maluku Tenggara. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Kondisi geografis sebagai daerah berciri kepulauan, memberikan keunggulan komparatif berupa potensi pariwisata bahari. Dengan total Panjang garis pantai mencapai lebih dari 632 km, Obyek dan Daya tarik wisata bahari di Kabupaten Maluku Tenggara tercatat sebanyak 36 buah.

Selain itu terdapat pula Obyek dan Daya Tarik Wisata lainnya seperti wisata alam, air terjun, budaya dan religi, sehingga total Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 76 obyek. Jenis pariwisata yang dikembangkan antara lain: wisata bahari, wisata alam dan air terjun, wisata religi dan wisata budaya.

Tabel 2.34
Potensi Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara

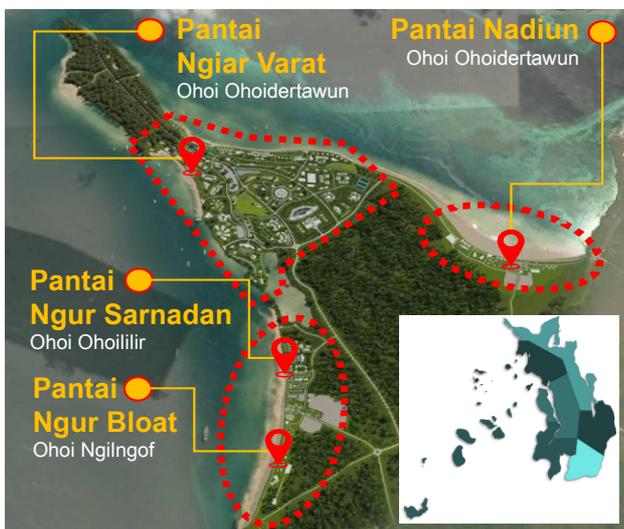
NO.	JENIS OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA	P.KEI KECIL	P.KEI BESAR	JUMLAH
1	Bahari (Pantai, Bawah Laut dan Mangrove)	24	12	36
2	Sejarah dan Budaya	10	8	18
3	Religi	8	2	10

NO.	JENIS OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA	P.KEI KECIL	P.KEI BESAR	JUMLAH
4	Alam–Air Terjun	5	7	12
JUMLAH		47	29	76

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara, 2024

Sejak Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mengembangkan 1 (satu) Kawasan pariwisata yang terintegrasi di antara 3 (tiga) destinasi Eksisting di sekitar, yaitu Wisata Pantai Famur Ngiar Varat. Wisata pantai Famur Ngiar Varat dibangun sebagai Destinasi Baru yang menghubungkan Destinasi Ohoidertawun–Ohoililir dan Ngurbloat secara terintegrasi. Konsep pengembangan Kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.37
Peta Lokasi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Ngiar Varat Kabupaten Maluku Tenggara



PROSPEK PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NGIAR VARAT

- ❖ Kondisi lokasi baru, alami, asri dan lestari;
- ❖ Diapit oleh 3 (tiga) Destinasi Eksisting yang sudah maju
- ❖ Akses dan Jarak tempuh memadai:
 - ✓ Langgur: 16Km
 - ✓ Ohoidertawun: 6Km
 - ✓ Ngurbloat: 14Km
 - ✓ Ohoililir: 14Km
- ❖ Amenitas Wisata Mudah dan Terjangkau

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara, 2024

Selain kendala pada aspek ketersediaan sarana dan prasarana, salah satu permasalahan yang masih perlu ditangani adalah aspek promosi. Untuk memperkenalkan potensi pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara, maka dilaksanakan agenda promosi pariwisata yang diagendakan setiap tahun yaitu, Festival Pesona Meti Kei, Hari Nen Dit Sakmas dan perhelatan *Rally Yacht Wonderful Sail to Indonesia*.

c. Pertanian

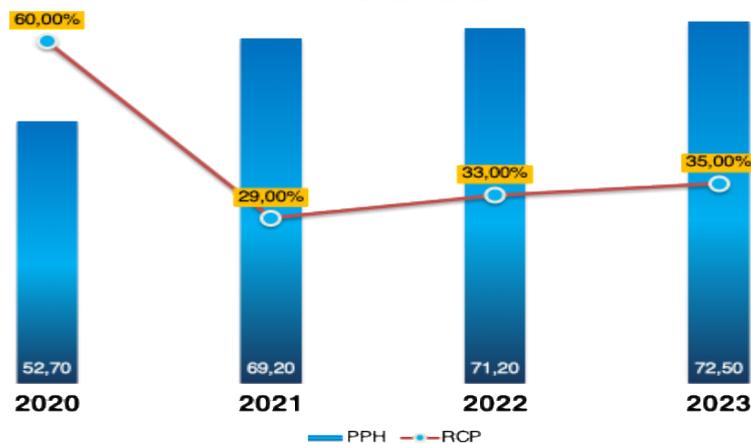
Pengembangan tanaman pangan dilaksanakan guna mendorong penguatan ketahanan pangan bagi masyarakat. Secara global indikator ketahanan pangan diukur melalui 4 (empat) aspek, yaitu: 1) Aspek Ketersediaan; 2) Aspek Keterjangkauan; 3) Aspek Mutu/Kualitas; dan 4) Aspek Keamanan Pangan.

Dalam rangka menjawab keempat aspek ketahanan pangan, maka dilakukan pengukuran secara komprehensif terhadap dua indikator kinerja kunci (IKU), yaitu Pola Pangan Harapan (PPH) serta Rasio Cadangan Pangan (RCP).

PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi. PPH mengukur keterpenuhan kebutuhan energi masyarakat yang diperoleh dari pangan utama berupa kebutuhan karbohidrat, protein dan lemak. PPH membagi kebutuhan jenis dan kualitas pangan yang berasal dari: padi-padian, umbi-umbian, panhan hewani, minyak dan lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

PPH menjawab indikator kualitas dan keamanan pangan. Sedangkan Indikator Ketersediaan dan Keterjangkauan dijawab oleh Indikator RCP. RCP menggambarkan aspek produksi pangan yang tersedia dan terdistribusi, mudah dan terjangkau bagi masyarakat. RCP Juga menggambarkan aspek pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, yang pada mekanisme pasar sangat berdampak pada nilai inflasi. PPH dan RCP Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020–2023 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.38
PPH dan RCP Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020–2023



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara beberapa terbitan

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada indikator PPH terjadi peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini bermakna, kadar kecukupan kalori masyarakat Maluku Tenggara selama periode 2020–2023 terus meningkat. Meskipun belum mencapai angka ideal 100, namun dengan adanya kenaikan ini, maka diasumsikan aspek kebutuhan pangan masyarakat dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan sudah semakin tercukupi.

Berbeda dengan indikator PPH, Indikator RCP menunjukkan tren menurun pada tahun 2020-2021, dan mengalami kenaikan (meskipun tidak signifikan) pada tahun 2022 dan 2023. Angka RCP yang hanya sebesar 35 persen pada tahun 2023, menunjukkan bahwa aspek ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan tidak merata terpenuhi sepanjang tahun. Pada masa–masa tertentu (biasanya di kondisi cuaca ekstrem), kebutuhan pangan masyarakat sulit terpenuhi oleh pasar yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga.

Indikator RCP yang juga menggambarkan aspek ketersediaan dan keterjangkauan sangat berkaitan dengan pengelolaan pertanian tanaman pangan dari sisi produksi. Produksi tanaman pangan utama yang diamati adalah tanaman hortikultura, padi, jagung dan ubi kayu. Pada periode pengamatan, tahun 2020 s.d 2023, produksi tanaman pangan utama sebagai berikut.

- komponen tanaman hortikultura menunjukkan adanya pergerakan produksi yang fluktuatif. Kisaran pertumbuhan produksi tanaman hortikultura sebesar 2,8 s.d 3,10 persen/tahun.

- Produksi padi pada periode pengamatan juga menunjukkan tren produksi yang fluktuatif. Tahun 2020 berada di angka 319 ton, turun menjadi hanya 150 ton pada tahun 2021 dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 352,5 ton. Tahun 2023 dengan data yang ada, produksi padi menunjukkan penurunan menjadi hanya sebesar 35 ton.
- Produksi jagung juga mengalami pergerakan produksi yang fluktuatif. Tahun 2020 mencapai angka 486 ton, turun menjadi hanya 385 ton pada 2021, namun mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi 1,206 ton, dan meningkat menjadi 2.502 ton pada Tahun 2023.
- Produksi Ubi Kayu, juga mengalami tren fluktuatif pada periode 2020-2022. Tahun 2020 mencapai angka produksi 6.000 ton, turun menjadi 4.236 ton pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 6.864 pada tahun 2022. Tahun 2023 produksi Ubi Kayu mampu meningkat mencapai 6.924 ton.

Gambaran produksi tanaman pangan utama di Kabupaten Maluku Tenggara pada periode 2020-2022, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Produksi Tanaman Pangan Utama Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020–2023

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	2,80	3,10	2,80	2,60
2	Produksi Padi	Ton	319,00	150,00	352,50	35,00
3	Produksi Jagung	Ton	486,00	385,00	1.206,00	2.502,00
4	Produksi Ubi Kayu	Ton	6.000,00	4.236,00	6.864,00	6.924,00
5	Produksi Kelapa	Ton	11.149,88	11.080,20	18.454,00	18.459,00

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, 2024

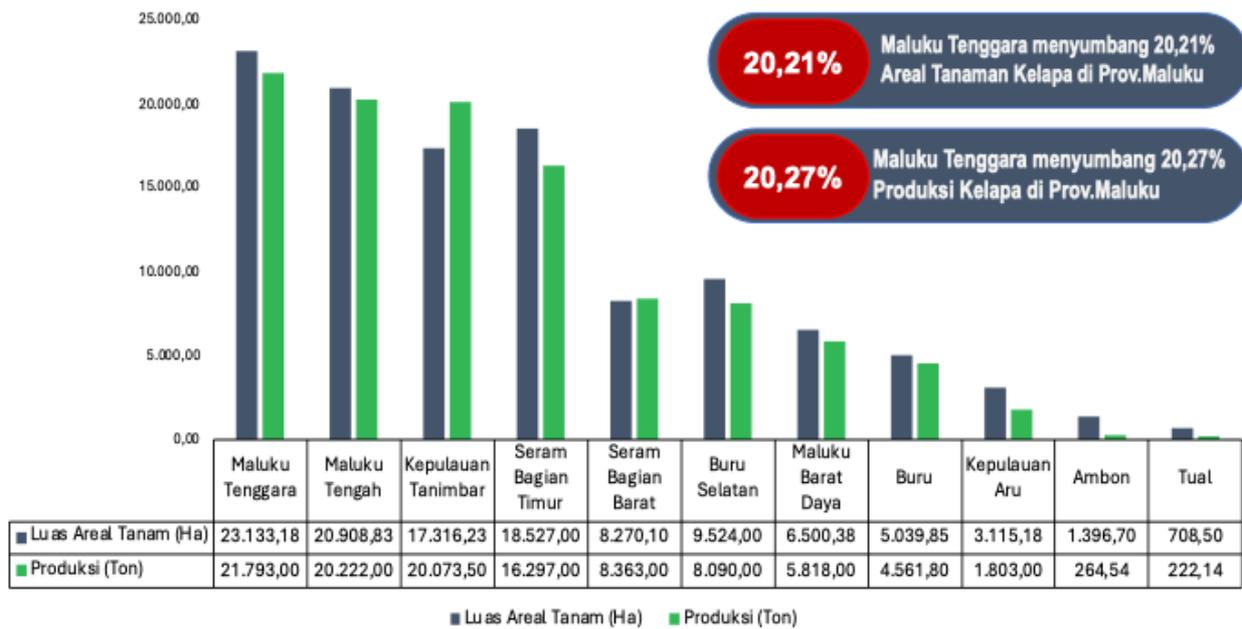
d. Perkebunan

Komoditi unggulan tanaman perkebunan di Kabupaten Maluku Tenggara adalah kelapa. Pulau Kei Besar adalah lokasi penghasil kelapa terbesar di Kabupaten Maluku Tenggara. Gambaran pengelolaan komoditi perkebunan kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut.

1. Komoditas Kelapa sudah dikembangkan di Pulau Kei Besar sejak tahun 1950–an;
2. Olahan Komoditi kelapa dikerjakan oleh warga di hampir seluruh wilayah Pulau Kei Besar;
3. Produk Turunan yang diusahakan warga antara lain:
 - 1) Kopra
 - 2) Minyak Kelapa
 - 3) Gula Semut
4. Produk Kopra adalah yang paling banyak diusahakan warga, dan mampu mendorong perekonomian;
5. Sejak Tahun 2021 dengan beroperasinya Tol Laut di Pelabuhan Elat, Kecamatan Kei Besar, maka harga Kopra meningkat tajam mencapai lebih dari 100 persen;

Pengelolaan tanaman perkebunan kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 merupakan yang tertinggi di Provinsi Maluku. Areal Tanaman Kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara berkontribusi sebesar 20,21 persen dari seluruh areal tanaman kelapa di Provinsi Maluku. Produksi

Kepala Maluku Tenggara berkontribusi 20,27 persen (Tertinggi di Maluku), dari total Produksi Kelapa Provinsi Maluku.



Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Salah satu indikator penting pengelolaan potensi perkebunan di Kabupaten Maluku Tenggara adalah Jumlah Produksi Kelapa. Tahun 2022, total produksi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 18.454,5 Ton. Produksi Tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang tercatat sebanyak 11.080,20 ton, namun masih berada di bawah capaian produksi tahun 2020 sebesar 19.445 Ton. Upaya mendorong peningkatan produksi kelapa melalui, peremajaan tanaman kelapa, serta mendorong pembangunan industri pengolahan kelapa.

2.3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan.

Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan;

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.

PDRB Kabupaten Maluku Tenggara selama periode pembangunan jangka panjang tahun 2005 s.d 2025 menunjukkan tren meningkat. PDRB Atas Dasar Berlaku tahun 2012 sebesar Rp1.569.023.280.000 meningkat menjadi Rp3.784.950.000.000 pada tahun 2022. PDRB Atas Dasar Konstan tahun 2012 sebesar Rp1.323.969.140.000 meningkat menjadi Rp1.148.920.000.000 pada tahun 2022.

Gambar 2.39
PDRB ADHK, PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010–2022



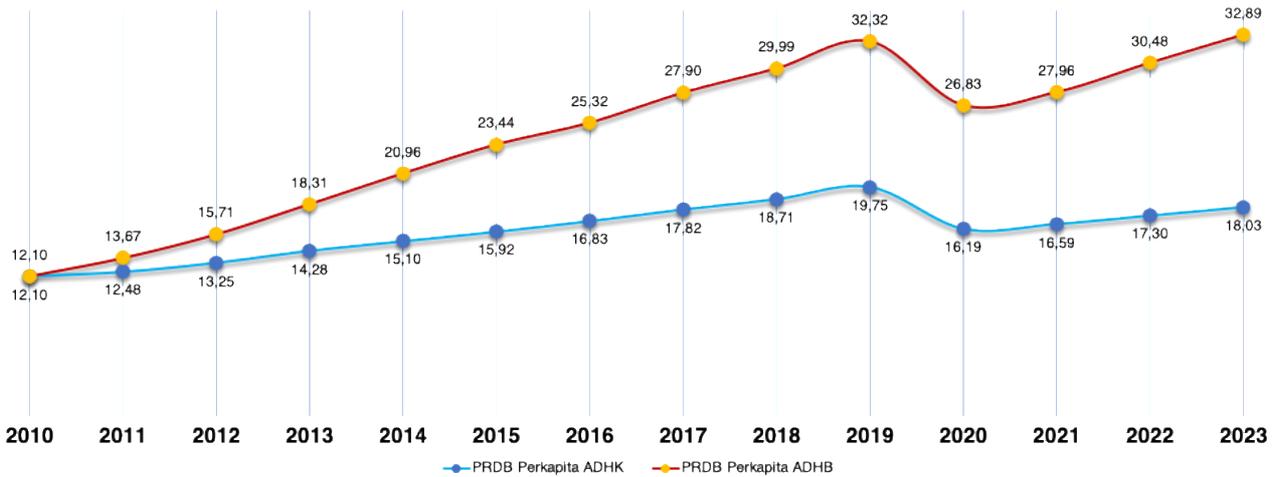
Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

2.3.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB Per Kapita menjadi proksi terhadap pendapatan per Kapita masyarakat. PDRB Per Kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB Per Kapita, maka asumsinya tingkat kesejahteraan semakin baik. Nilai PDRB Perkapita dihitung dalam satuan waktu tahunan.

PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara selama periode pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025, menunjukkan tren meningkat. Tahun 2012 PDRB Per Kapita ADHB sebesar Rp15.710.000 meningkat menjadi Rp32.890.000 pada tahun 2023. Sedangkan PDRB Per Kapita ADHK tahun 2012 sebesar Rp12.250.000 meningkat menjadi Rp18.030.000 pada tahun 2023.

Gambar 2.40
PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB (Rp.Juta)
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012–2023



Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Dalam periode 2019–2023, PDRB Per Kapita ADHB maupun ADHK menunjukkan tren meningkat dari waktu ke waktu. Khusus pada PDRB Per Kapita ADHB yang menjadi ukuran pendapatan masyarakat pada tahun berkenaan mengalami kenaikan, dari Rp32.374.177 pada Tahun 2019 menjadi Rp32.893.197 pada Tahun 2023. Komponen dan perhitungan PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019–2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2019–2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB	3.230.619.160.000	3.260.401.000.000	3.428.436.780.000	3.784.960.000.000	4.110.597.050.000
PDRB ADHK	1.971.225.730.000	1.966.826.720.000	2.034.005.550.000	2.148.920.000.000	2.252.969.000.000
Jumlah Penduduk	99.790	121.511	123.418	124.199	124.968
PDRB Perkapita ADHB	32.374.177	26.832.147	27.779.066	30.474.964	32.893.197
PDRB Perkapita ADHK	19.753.740	16.186.409	16.480.623	17.302.233	18.028.367

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Nilai PDRB Per Kapita yang menurun pada Tahun 2020 disebabkan oleh koreksi jumlah penduduk sesuai hasil Sensus Penduduk Tahun 2020. Angka pembagi (Jumlah Penduduk) yang semula menggunakan tahun dasar 2010 (jumlah penduduk di bawah 100.000) berubah menggunakan tahun dasar 2020 (jumlah penduduk lebih dari 120.000).

2.4. EVALUASI HASIL RPJPD 2005–2025

Evaluasi hasil RPJPD 2005–2025 menjadi gambaran konkret kinerja pembangunan jangka panjang pada periode sebelumnya. RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2005–2025, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009.

RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2005–2025 menjadi pedoman penyusunan RPJMD 2004–2009, 2009–2013, 2013–2018 dan 2018–2023. Capaian kinerja hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2005–2025, diuraikan sebagai berikut.

2.4.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025

Visi Pembangunan jangka panjang Kabupaten Maluku Tenggara yang tertuang didalam RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2005–2025 adalah:

“Terwujudnya Maluku Tenggara yang Maju, Adil dan Demokratis dalam masyarakat yang Religius Kultural”

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi yaitu:

Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Bertaqwa, dan Berbudaya.

Misi ini memperkuat jati diri dan karakter sebagai masyarakat yang religius kultural melalui pendidikan dan pembinaan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama dalam interaksi sosial yang harmonis, menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memantapkan ketahanan bangsa, memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan dalam masyarakat yang religius kultural.

Misi 2. Mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang berkualitas

Mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain, dengan mengutamakan pembangunan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, dan trampil melalui peningkatan pelayanan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; meningkatkan kualitas dan relevansi ketenagakerjaan, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi; dan pemberdayaan masyarakat termasuk gender.

Misi 3. Mewujudkan perekonomian Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan yang tangguh dan berdaya saing.

Memperkuat perekonomian daerah yang berbasis kelautan/perikanan dan pertanian menuju keunggulan kompetitif berbasis teknologi inovatif dan berdaya saing dengan membangun sistem produksi, distribusi, pelayanan jasa, membangun jejaring antar wilayah, dan meningkatkan kapasitas infrastruktur ekonomi yang maju.

Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Meningkatkan pembangunan daerah yang merata dan berwawasan lingkungan, untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi, meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah yang optimal dan handal, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender

Misi 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum.

Membangun dan memperkuat peran dan partisipasi politik rakyat, menegakkan supermasi hukum, reformasi hukum dan regulasi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam

mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; memperkuat kualitas kemampuan otonomi; dan meningkatkan profesionalisme aparaturnya daerah serta kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi misi tersebut di atas, sasaran, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka Panjang daerah tahun 2005–2025 sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran RPD dijabarkan dalam Matriks berikut.

2.4.2. Sasaran dan Arah Pembangunan 2005–2025

Uraian terhadap Visi beserta 5 (lima) Misi tersebut di atas, terdistribusi ke dalam 30 sasaran pembangunan dan 59 arah pembangunan. Penjabaran Visi dan Misi ke dalam sasaran dan arah pembangunan periode 2005–2025 disajikan pada Tabel berikut:

Visi, Misi, Sasaran dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Berdasarkan RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005–2025

Sasaran Pembangunan	Arah Pembangunan
Misi 1: 1. Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Bertaqwa, dan Berbudaya	
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan pembinaan kerohanian dalam rangka mewujudkan ciri, watak dan perilaku masyarakat Maluku Tenggara yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, menghargai pluralitas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebersamaan, dan perdamaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Disamping itu, pembangunan agama juga diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan hektarrmoni sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan budaya diarahkan untuk pengembangan suatu tatanan masyarakat Maluku Tenggara yang menghargai dan melestarikan identitas dan kearifan nilai budaya lokal sebagai bagian integral dari kepribadian nasional, serta memiliki kemampuan beradaptasi dan merespons setiap perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan informasi.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan bidang sosial budaya juga diarahkan untuk memantapkan dan terus meningkatkan peran institusi agama, institusi sosial dan kebudayaan masyarakat secara intensif dan simultan, serta memantapkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal yang mengakomodir prinsip keadilan dan demokrasi sebagai modal sosial (social capital) yang kontributif bagi pembangunan daerah. • Budaya inovatif yang berorientasi iptek perlu dikembangkan agar masyarakat Maluku Tenggara menguasai iptek serta mampu berjaya dalam persaingan nasional maupun global melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, serta masyarakat yang cerdas, kritis dan kreatif.

Sasaran Pembangunan	Arah Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan kesenian daerah diarahkan untuk meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional daerah sebagai bagian dari jati diri masyarakat Maluku Tenggara dan sekaligus sebagai aset budaya lokal dalam rangka pengembangan pariwisata daerah.
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dapat menangkal munculnya paham-paham separatisme atau munculnya organisasi-organisasi yang bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan moral kebangsaan diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara dalam rangka menangkal segala bentuk ancaman, hambatan dan tantangan di daerah, sehingga terwujudnya ketahanan bangsa dan kehidupan berbangsa/bernegara yang mantap dan berkelanjutan
<ul style="list-style-type: none"> Semakin kondusifnya kehidupan sosial karena adanya kesadaran setiap individu warga Kabupaten Maluku Tenggara untuk hidup secara aman dan damai dalam sebuah harmoni sosial yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pemberantasan penyakit masyarakat seperti minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, dan lain-lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku
<p>Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Maluku Tenggara yang berkualitas</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan, yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 85 persen, dan peningkatan indeks pembangunan gender 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan kualitas sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Maluku Tenggara yang maju dan berdaya saing. Pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan kualitas manusia Maluku Tenggara yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan yang ditunjukkan dengan tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebesar 100 persen, SMP/MTS sebesar 98 persen, SMA/SMK/MA sebesar 95 persen, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 98 persen, SMP/MTS sebesar 95 persen, SMA/SMK/MA sebesar 88 persen, tersedianya sarana prasarana pendidikan yang memadai, terwujudnya peningkatan kuantitas, kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan manajemen pendidikan yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan karakteristik daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara diarahkan kepada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa ruang belajar yang memadai, peningkatan kualitas, kompetensi dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan manajemen pendidikan yang berkualitas, perluasan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan, penyediaan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah serta turut mendorong penyediaan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas Penerapan iptek diarahkan pada penyediaan sistem informasi dan teknologi terutama untuk mendukung upaya pembangunan di sektor kelautan/perikanan dan pertanian, serta sektor lainnya antara lain sektor pariwisata, transportasi, energi, telekomunikasi, industri, pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, upaya pengembangan SDM Iptek diarahkan pada peningkatan anggaran riset dan kebijakan riset yang dibutuhkan antara lain dalam bentuk kerja sama dengan perguruan tinggi, berbagai lembaga penelitian dan dunia usaha pada tingkat daerah, nasional maupun internasional

Sasaran Pembangunan	Arah Pembangunan
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang ditunjukkan dengan tercapainya Angka Hektarrapan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara 82,9 Tahun, Angka Kematian Bayi sebesar 5 per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu Melahirkan 10 per 100.000 kelahiran hidup, prevalensi gizi buruk 1 Persen, hilangnya prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), menurunnya prevalensi penyakit menular, tersedianya sarana prasarana dan alat kesehatan, serta terwujudnya peningkatan kuantitas, kualitas dan distribusi tenaga medis dan para medis yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan karakteristik daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan bidang kesehatan diarahkan pada penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas melalui : peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap orang, peningkatan kualitas gizi penduduk terutama bayi, balita, ibu hektarmil, perempuan dewasa dan manusia lanjut usia (Manula); penyediaan dan peningkatan tenaga medis dan paramedis yang menunjang baik dari segi jumlah, mutu dan penyebaran; peningkatan dan pengembangan kesehatan dasar yang lebih bermutu; peningkatan kapasitas sarana prasarana dan peralatan kesehatan; penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan asuransi kesehatan bagi keluarga miskin; pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; serta pengembangan layanan rumah sakit rujukan yang memadai dan berkualitas. Sedangkan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah diarahkan untuk menjadi pusat rujukan yang profesional, dengan kualitas layanan yang memadai.
<ul style="list-style-type: none"> Terjaminnya pelayanan sosial para penyandang masalah sosial seperti anak-anak terlantar, fakir miskin, penyandang cacat, dan orang tua jompo 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui penguatan peran lembaga sosial lokal, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial
<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas serta jumlah keluarga sejahtera yang semakin meningkat dan memenuhi norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, serta terwujudnya satu keluarga satu sarjana 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan termasuk keterlibatan dalam partai politik, peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan diberbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak Pembangunan bidang keluarga berencana diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas; pengendalian laju pertumbuhan penduduk; serta menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Pembangunan bidang kependudukan dalam rangka pengendalian dan penataan penyebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan/pulau melalui pemerataan pembangunan ekonomi daerah dengan memperhatikan kondisi karakteristik wilayah serta pembangunan berkelanjutan.
<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya lapangan pekerjaan yang luas dan beragam dengan angka pengangguran tidak lebih dari 6 Persen, tercapainya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, serta sistem gaji/tunjangan yang sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan sebanyak- banyaknya lapangan kerja terutama pada sektor-sektor primer seperti kelautan/ perikanan dan sektor lainnya; meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja; penerapan upah minimum regional (UMR); hubungan industrial yang harmonis antara tenaga kerja dan perusahaan; keselamatan kerja yang memadai; serta terwujudnya proses penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan yang memuaskan semua pihak. Selain itu untuk meningkatkan produktifitas kerja maka diharapkan peningkatan komposisi pendidikan angkatan kerja serta peningkatan mutu dan ketrampilan melalui kualifikasi

Sasaran Pembangunan	Arah Pembangunan
	<p>pendidikan/pelatihan angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan kualitas pembinaan generasi muda, peningkatan prestasi olah raga di tingkat regional dan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kepemudaan diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya dan kesadaran politik generasi muda serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan, solidaritas dan karakter kebangsaan (nation building)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan olahraga dalam rangka meningkatkan budaya dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana olahraga serta penyelenggaraan event – event olahraga minat, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.
<p>Misi 3: Mewujudkan Perekonomian Maluku Tenggara sebagai Daerah Kepulauan yang Tangguh dan Berdaya saing</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah di atas 10 persen per tahun dengan berbasis kelautan/perikanan dan pertanian yang terpadu, berkualitas, berkesinambungan dan didukung oleh teknologi inovasi sehingga pendapatan percapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan yang setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang telah maju 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan bidang perekonomian diarahkan pada perubahan perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi keunggulan kompetitif berbasis teknologi inovasi dengan pemanfaatan sumber daya keulauan yang tersedia dan memiliki potensi ekonomis yang tinggi seperti kelautan dan perikanan, perkebunan keulauan, dan pariwisata • Peningkatan laju pertumbuhan perekonomian sebesar 10 persen per tahun melalui penyediaan sarana dan prasarana ekonomi (produksi, distribusi dan pemasaran) yang terintegrasi, peningkatan produksi, penciptaan iklim investasi yang kondusif, dan peningkatan ekspor komoditas unggulan. Untuk maksud tersebut diperlukan dukungan politik (political will) dan kebijakan dari unsur pimpinan daerah (Pemerintah daerah dan DPRD) dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) antara lain melalui kebijakan regulasi, standarisasi dan pengendalian kualitas
<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif sebagai daerah keulauan. Sektor kelautan/perikanan, pertanian dan pariwisata mejadi basis aktivitas ekonomi daerah yang dikelola secara efisien dan optimal sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas sebagai motor penggerak perekonomian, serta sektor jasa yang peranannya semakin meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing. Selain itu memberikan peluang berusaha bagi masyarakat antarpelaku ekonomi kecil, mikro, menengah dan besar melalui pendekatan sistem kemitraan yang mengarah pada peningkatan peranan industri pengolahan dan jasa yang berbasis 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan struktur perekonomian dengan mendorong sektor kelautan/perikanan, perkebunan keulauan dan pariwisata sebagai motor penggerak yang didukung oleh sektor pertanian dan sektor lainnya yang menghasilkan produk-produk secara efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan yang efektif agar terwujudnya ketahanan ekonomi daerah yang tangguh

Sasaran Pembangunan	Arah Pembangunan
kelautan/perikanan dan pertanian dengan pengelolaan agribisnis yang tangguh.	
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya peningkatan peran Kelembagaan ekonomi yang efektif didukung oleh sistem keuangan (bank dan non bank), infrastruktur ekonomi yang memadai, pelaksanaan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, terbukanya akses masyarakat terhadap penyediaan modal (kredit) bagi usaha kecil dan menengah, dan meningkatnya nilai tambah yang dinikmati oleh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka upaya peningkatan perekonomian daerah maka lembaga- lembaga keuangan perlu didorong agar memiliki kemampuan optimal untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah yang berkualitas dan memiliki daya tahan terhadap gejolak krisis, dan memberikan kontribusi dalam pendanaan pembangunan daerah. Dengan berperannya lembaga-lembaga keuangan maka semakin beragam pula alternatif dan jenis pendanaan pembangunan, sehingga akan terjadi beragam jenis investasi dan komoditi ekspor yang dapat menumbuhkembangkan sektor riil sebagai kekuatan ekonomi daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya ekspor komoditi unggulan yaitu perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan bidang kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan konsumsi pasar lokal, nasional dan internasional melalui peningkatan sarana dan prasarana; pengembangan perikanan tangkap dan budidaya dengan tetap menjaga potensi lestari; peningkatan kuantitas dan kualitas SDM; dan pemanfaatan teknologi tepat guna bidang kelautan dan perikanan. Selain itu pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya pengurangan dampak illegal fishing dan pengrusakan ekosistem laut dan pesisir dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pembangunan, pengelolaan dan pengawasan bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak adat dan kearifan lokal
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya peningkatan produksi pertanian yang ditandai dengan meningkatnya hasil usaha pertanian, peternakan dan perkebunan masyarakat yang berorientasi pada daya saing melalui pengembangan sentra- sentra komoditas unggulan, pengembangan dan penerapan teknologi pra dan pasca panen, serta pengembangan areal pertanian, perkebunan, hortikultura unggulan spesifik lokal dan peningkatan populasi ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan bidang pertanian tanaman pangan diarahkan pada pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan lokal melalui penerapan teknologi tepat guna; peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani; revitalisasi sistem penyuluhan pertanian; penyediaan benih bermutu dan agro input lainnya yang sesuai dengan kondisi daerah untuk meningkatkan usaha tani pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu untuk mengurangi tekanan dan ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap beras perlu ditingkatkan diversifikasi pola pangan yang berbasis pada komoditas pangan lokal • Pembangunan bidang perkebunan diarahkan pada peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas perkebunan kepulauan melalui peremajaan dan perluasan areal perkebunan; peningkatan kapasitas sistem penyuluhan; perbaikan sistem perbenihan; penanggulangan hama/penyakit tanaman perkebunan; mengubah kebiasaan masyarakat dari sistem meramu menjadi sistem pertanian produktif; memberikan kemudahan permodalan bagi usaha di bidang perkebunan; dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Sasaran Pembangunan	Arah Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan bidang hortikultura diarahkan pada peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas hortikultura khususnya buah-buahan, sayur- sayuran, tanaman hias dan fitofarmaka (tanaman obat) melalui perbaikan teknik budidaya; perbaikan sistem perbenihannya; penanggulangan hama/penyakit tanaman hortikultura; kemudahan permodalan bagi usaha di bidang hortikultura; dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan Pembangunan peternakan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan protein hewani lokal melalui peningkatan populasi ternak; perbaikan sistem perbibitan ternak; perbaikan kelembagaan kesehatan hewan; revitalisasi sistem penyuluhan di bidang peternakan; penerapan teknologi pengolahan pakan ternak bersumber dari bahan lokal; integrasi horizontal usaha perkebunan dan peternakan; dan kemudahan permodalan bagi usaha di bidang peternakan
<ul style="list-style-type: none"> Terkelolanya potensi pariwisata (budaya, alam dan bahari) secara berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan wisata alam dan bahari yang berwawasan lingkungan, meningkatnya jumlah event dan paket wisata, bertambahnya obyek dan daerah tujuan wisata baru, meningkatnya kuantitas dan kualitas sumberdaya pengelola wisata, meningkatnya sarana prasarana pendukung pariwisata, serta meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara 100.000 orang dan wisatawan manca negara 5.000 orang pada tahun 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan bidang pariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Maluku Tenggara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi daerah sebagai wilayah wisata bahari secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya lokal. Kondisi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara instansi dan pelaku industri pariwisata dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata; pengembangan objek; peningkatan akses menuju objek, event dan paket wisata; sosialisasi dalam rangka menumbuhkan apresiasi dan sadar wisata bagi masyarakat; dan menyiapkan sumber daya manusia yang profesional di bidang pariwisata
<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya prasarana dan sarana ekonomi perdagangan dan jasa yang memadai untuk mempercepat proses produksi, distribusi, promosi, dan pemasaran hasil-hasil komoditas unggulan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan bidang perindustrian diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri yang berbasis sumber daya lokal (agroindustri berbasis kelautan/ perikanan dan pertanian) dan industri lainnya melalui perluasan/pengutuhan skala usaha; kemudahan akses pelaku terhadap modal, teknologi, pasar; dan peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pelaku usaha di bidang perindustrian Pembangunan bidang perdagangan diarahkan pada terwujudnya sistem perdagangan antarpulau yang efisien dan efektif melalui peningkatan kapasitas infrastruktur perdagangan, pemerataan pengembangan sentra- sentra perdagangan, penataan regulasi dan deregulasi di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, terjaminnya ketersediaan bahan pokok lainnya dengan harga yang terjangkau; serta terjaminnya pengembangan ekspor komoditas unggulan daerah yang berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya koperasi, usaha kecil dan mikro serta industri kecil, menengah yang tangguh dan berdaya saing sebagai soko guru perekonomian lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan bidang koperasi didorong untuk mengembangkan sektor unggulan di daerah sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata sebagai soko guru pembangunan ekonomi daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat

Sasaran Pembangunan	Arah Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi pilihan yang strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha. Sehubungan dengan itu pembangunan usaha mikro, kecil dan Menengah diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin inovatif dan berdaya saing. Kondisi itu dicapai melalui peningkatan kompetensi, perkuatan kewirausahaan dan produktifitas yang didukung dengan peningkatan akses pasar, pemanfaatan teknologi inovasi serta pengembangan wirausaha baru.
Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan	
<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pembangunan yang merata ke seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, yang diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, berkurangnya kesenjangan antarwilayah, meningkatnya keterkaitan wilayah perdesaan dan perkotaan, serta meningkatnya akses dan keterkaitan antar pulau- pulau kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dilaks akan untuk mewujudkan keseimbangan antara pembangunan wilayah perkotaan, perdesaan dan pulau- pulau kecil. Pembangunan perkotaan diarahkan sebagai simpul koleksi, distribusi komoditas unggulan, pusat pelayanan jasa dan perdagangan serta penyediaan pelayanan sarana prasarana dasar perkotaan. Pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan sentra-sentra produksi kelautan/perikanan dan pertanian, dan pelayanan sarana prasarana dasar sekaligus sebagai wilayah penyangga (hinterland) bagi daerah perkotaan. Sedangkan pembangunan pulau-pulau kecil diarahkan pada pengembangan sentra-sentra kelautan/perikanan (tangkap dan budidaya), perkebunan kepulauan dan pariwisata.
<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya sistem dan jaringan infrastruktur daerah yang dapat menjangkau seluruh wilayah Maluku Tenggara dengan dukungan jaringan sarana prasarana perhubungan dan transportasi antarpulau yang memadai, handal, dan terintegrasi satu sama lain 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan pada peningkatan kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk membuka aksesibilitas perhubungan serta mengurangi tingkat keterisolasian dan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan ruas-ruas jalan baru dan jembatan di pedesaan dan pulau-pulau kecil yang selama ini belum terjangkau; peningkatan kapasitas dan pemeliharaan sarana prasarana jalan dan jembatan; pembangunan dan pemeliharaan dermaga, pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan rakyat; pembangunan lapangan terbang yang representatif untuk mendukung terintegrasinya sistem perhubungan antarmoda Pembangunan bidang perhubungan diarahkan memberikan kemudahan aksesibilitas orang, barang dan jasa dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara maupun ke luar wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan demikian berarti memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi seperti itu dapat dicapai melalui pengembangan sistem transportasi lokal yang efisien, efektif, handal dan terintegrasi antar moda perhubungan laut, darat dan udara beserta infratrukturnya; meningkatkan peran kerja sama pemerintah dan swasta dalam pelayanan transportasi publik; serta penciptaan iklim kompetitif yang sehat di bidang transportasi.

Sasaran Pembangunan	Arah Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="699 206 1433 600">• Peningkatan sistem hubungan interkoneksi antarkota Kecamatan dan pusat kabupaten maupun dengan kota Provinsi melalui pengembangan jaringan transportasi darat prioritas utama yaitu pengembangan jaringan jalan antarkecamatan serta antar ibukota Kecamatan dengan ibukota Kabupaten. Hal yang sama juga dilakukan melalui pemangunan jaringan moda transportasi laut dan penyeberangan yang cepat dan lancar dari dan ke pulau Kei Besar. Pembangunan moda transportasi yang aman dan lancar yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, lintas kabupaten/kota, kabupaten dengan pusat-pusat pelayanan di kecamatan dan desa-desa terpencil harus menjadi bagian penting pembangunan infrastruktur wilayah <li data-bbox="699 609 1433 792">• Pembangunan bidang komunikasi dan informatika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi melalui penyediaan jangkauan dan kualitas pelayanan pos diseluruh kecamatan dan perluasan jaringan telematika (telepon, penyiaran, fasilitas internet dan lain-lain) untuk diakses oleh masyarakat <li data-bbox="699 801 1433 1169">• Pembangunan sarana parasarana energi dan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untuk meningkatkan akses dan pelayanan konsumen terhadap energi melalui pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah secara memadai, pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik memberikan peluang bagi investasi swasta, terutama untuk wilayah non komersial. Pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik yang baru bersumber dari tenaga surya dan angin terutama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan ketenagalistrikan di wilayah perdesaan terpencil dan pulau-pulau kecil. <li data-bbox="699 1178 1433 1393">• Pembangunan sumberdaya air diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan sarana dan parasaran sumberdaya air bersih terutama di wilayah perkotaan dan perdesaan di pulau-pulau kecil; penyediaan air baku bagi kebutuhan sektor terkait seperti pertanian, industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa lainnya; termasuk peningkatan kemampuan manajerial Perusahaan Daerah Air Minum <li data-bbox="699 1402 1433 1585">• Pembangunan bidang kehutanan diarahkan pada upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, konservasi dan pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan lainnya, mengurangi luas areal lahan kritis serta mencegah dan memberantas penebangan liar (illegal cutting) <li data-bbox="699 1594 1433 1944">• Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup senantiasa harus diupayakan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan menjadi syarat utama yang diimplemetasikan ke dalam kebijakan pembangunan. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta partisipasi dan kearifan budaya lokal, sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan

Sasaran Pembangunan	Arah Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana tata ruang wilayah digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pengaturan Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Tata Ruang Nasional yang meliputi Kawasan Andalan yakni terdiri dari Tahapan Pengembangan Rehabilitasi Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan, Tahapan Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian, Tahap Pengembangan Kawasan Andalan Kehutanan, Tahap Pengembangan Kawasan Andalan Perkebunan, Tahap Pengembangan Kawasan Andalan Industri Pengolahan Kawasan Lindung yang terdiri dari Kawasan Lindung Tahapan Pengembangan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Masbait dan Kawasan Lindung Tahapan Pengembangan Cagar Alam Daab; serta Kawasan Pengembangan Air dan Sungai yakni Kepulauan Kei - Aru termasuk dalam Kawasan Tahapan Pengembangan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, kualitas rencana tata ruang, dan efektifitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan Maluku Tenggara yang asri dan lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara seimbang sekaligus untuk melestarikan sumber daya hutan, bertambahnya luas daerah tangkapan air, meningkatnya luas lahan produksi dan berkurangnya luas lahan kritis dari 67.371,70 hektar menjadi hanya 5.000 hektar 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan perkotaan dilaksanakan terutama dalam rangka pengembangan sistem jaringan sarana prasarana perkotaan yang meliputi upaya untuk (a) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan seperti jalan kota, air bersih, persampahan, drainase, air limbah, listrik dan telekomunikasi secara terpadu dalam rangka pemantapan fungsi kota; (b) menjamin keberlanjutan pelayanan sarana prasarana kota sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduk kota; dan (c) mempertahankan kualitas lingkungan kota dari pencemaran, untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang asri. Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana perkotaan perlu didukung melalui pengembangan kerja sama dengan pihak swasta pengelolaan sarana prasarana perkotaan perlu didukung melalui pengembangan kerja sama dengan pihak swasta layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas; penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan dunia usaha. Untuk memenuhi kebutuhan lahan permukiman di wilayah perkotaan dilakukan melalui pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) maupun Lingkungan Siap Bangun (Lisiba)
<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya angka kerusakan lingkungan dan ekosistem laut dan pesisir, berkurangnya intensitas bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia, serta berkurangnya risiko dan dampak kerusakan akibat bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> Secara geografis Maluku Tenggara berada di wilayah yang rawan bencana yaitu pada wilayah pertemuan 3 lempeng tektonik. Oleh karena itu perlu dikembangkan kemampuan dan penerapan sistem mitigasi bencana; peningkatan sumberdaya manusia di bidang mitigasi bencana; sosialisasi dan desiminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat; identifikasi

Sasaran Pembangunan	Arah Pembangunan
	dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini.
<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya proporsi penduduk miskin di bawah 10 persen melalui peningkatan kualitas program dan volume kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat, pemberian perlindungan dan perhatian yang lebih besar untuk kelompok masyarakat di wilayah perdesaan, penguatan kelembagaan masyarakat perdesaan dan penguatan pemerintahan desa.
<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan dan meningkatnya aksesibilitas pelayanan kebutuhan dasar antara penduduk perkotaan, pedesaan dan pulau-pulau kecil yang terpencil 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka pembangunan berkeadilan dan penanggulangan kemiskinan, perlu perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah rawan bencana. Pengentasan Kemiskinan dilakukan melalui sistem perlindungan dan jaminan sosial dengan memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Disamping itu perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas keluarga miskin untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi riil.
<p>Misi 5: Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pendidikan politik rakyat, yang tercermin oleh peningkatan peran, partisipasi politik rakyat, serta terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan politik diarahkan pada perwujudan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka pembentukan kemandirian dan kedewasaan politik; penataan proses politik melalui peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik dalam rekrutmen para pejabat politik dan pejabat publik; pengembangan budaya politik melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis dan upaya mewujudkan wacana dialog mengenai pentingnya memelihara persatuan; serta pengembangan pendidikan politik rakyat
<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya penegakan supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia serta tertatanya sistem regulasi daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, akomodatif dan partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi melalui peningkatan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam proses pengambilan keputusan dan sosialisasi peraturan perundangan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi harus didukung oleh pelayanan bantuan hukum dengan biaya yang terjangkau, profesionalisme aparat penegak hukum dan proses hukum yang tidak berbelit serta penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sumberdaya aparatur diarahkan pada restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi kelembagaan aparatur di daerah; peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur; peningkatan kualitas pelayanan publik; penerapan teknologi informasi; dan perlu adanya merit sistem yang adil Pembangunan otonomi daerah diarahkan pada penguatan kelembagaan pemerintahan daerah; pengembangan hubungan kemitraan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) yang lebih harmonis; serta penyelenggaraan urusan pemerintahan baik

Sasaran Pembangunan	Arah Pembangunan
	<p>urusan wajib maupun urusan pilahan yang lebih efektif, efisien, dan proporsional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pemerintahan desa diarahkan pada penguatan dan pemberdayaan organisasi perangkat pemerintahan desa melalui kerangka regulasi daerah yang mencakup fungsionalisasi lembaga adat dalam pemerintahan desa, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam desa, serta sistem dan prosedur penyelesaian sengketa adat; penataan administrasi pemerintahan desa; peningkatan kemampuan aparat pemerintahan desa; dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa. • Kependudukan dan catatan sipil diarahkan pada penerapan sistem informasi manajemen kependudukan dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan menjamin kepastian status, hak dan kewajiban setiap warga. • Pembangunan bidang pertanahan dilaksanakan dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien dan efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hektark atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Untuk menyempurnakan penegakan produk hukum pertanahan di daerah perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kedudukan hukum positif dan hukum adat dalam konteks kepemilikan hektark adat dan penyelesaian sengketa tanah dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat (hak ulayat), serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan. Selain itu perlu dilakukan tertib administrasi dan penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah.
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah, dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp. 100 miliar melalui kebijakan-kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan sehingga tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah pada pemerintah menjadi hanya sekitar 80 persen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Kebijakan intensifikasi diarahkan melalui optimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang tersedia serta dengan prinsip berkelanjutan. Kebijakan ekstensifikasi dan diversifikasi diarahkan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru tanpa memberatkan pelaku usaha dan menghambat aliran investasi. • Perbaikan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kebijakan regulasi dan pengelolaan sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatannya dalam rangka perwujudan good governance.
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang berkualitas, yang berorientasi pada kemudahan rantai birokrasi, cepat, tepat, efektif, transparan dan terjangkau 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pembangunan diarahkan untuk merumuskan arah, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di semua bidang/sector melalui peningkatan koordinasi antarbidang/sector dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan • Pengawasan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pengawasan internal Pemerintah Daerah, peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional, serta peningkatan kualitas dan

Sasaran Pembangunan	Arah Pembangunan
	<p>efektivitas pengawasan melekat dalam sistem pengendalian manajerial internal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pelayanan publik diarahkan pada terwujudnya sistem pelayanan publik yang mencerminkan prinsip-prinsip kemudahan, transparan, cepat, murah, manusiawi dan berkualitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan dan penerapan sistem pelayanan publik satu atap (one stop services); • Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pelayanan publik, serta kerangka regulasi daerah yang mendukung. • Statistik daerah diarahkan untuk membangun sistem penyediaan, penyajian data dan informasi yang akurat dan mutakhir serta mudah diakses oleh masyarakat dan bermanfaat bagi informasi serta acuan perencanaan pembangunan daerah.

2.4.3. Evaluasi Capaian RPJPD 2005-2025

2.4.3.1. Realisasi Indikator Makro Pembangunan Daerah

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja			
			2010	2015	2020	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	60,58	63,35	66,20	70,58
2	Tingkat Kemiskinan	%	30,70	25,23	22,57	21,22
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,10	5,64	-0,22	5,44
4	Laju Inflasi	%	7,20	8,58	2,06	0,16
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,57	4,66	4,95	5,68
6	Indeks Ketimpangan	%	0,42	0,33	0,29	0,24

2.4.3.2. Realisasi Indikator Sasaran Pembangunan RPJPD 2005-2025

Misi	Sasaran Pembangunan	Indikator	BaseLine	Capaian Kinerja			
				2008	2013	2018	2023
1. Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Bertaqwa, dan Berbudaya	1) Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan pembinaan kerohanian	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	n/a	n/a	n/a	n/a	80
	2) Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki kemampuan beradaptasi dan merespons perubahan lingkungan sosial lokal, nasional dan global dengan mempertahankan identitas dan kearifan nilai budaya lokal	Indeks Pelestarian Budaya Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	80
	3) Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	4) Semakin kondusifnya kehidupan sosial karena adanya kesadaran setiap individu warga Kabupaten Maluku Tenggara untuk hidup secara	Persentase sengketa adat terselesaikan	n/a	n/a	n/a	100	80

Misi	Sasaran Pembangunan	Indikator	BaseLine	Capaian Kinerja			
				2008	2013	2018	2023
	aman dan damai dalam sebuah harmoni sosial yang berkualitas						
2. Mewujudkan Masyarakat Maluku Tenggara yang berkualitas	1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan, yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 85 persen, dan peningkatan indeks pembangunan gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,10	71,45	62,11	65,53	69,91
	2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	n/a	n/a	11,93	12,61	12,90
		Rata-Rata Lama Sekolah	n/a	n/a	8,51	9,27	9,79
		APS SD	n/a	n/a	n/a	n/a	91,77
		APS SMP	n/a	n/a	n/a	n/a	77,15
	3) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup	n/a	n/a	11,93	12,61	70,71
		AKI	n/a	n/a	n/a	n/a	1
		AKB	n/a	n/a	n/a	n/a	23
	4) Terjaminnya pelayanan sosial para penyandang masalah sosial seperti anak-anak terlantar, fakir miskin, penyandang cacat, dan orang tua jompo	Cakupan Pelayanan Jaminan Sosial PMKS	n/a	n/a	100	97,14	85,22
	5) Tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas serta jumlah keluarga sejahtera yang semakin meningkat	Laju Pertumbuhan Penduduk	n/a	1,67	1,82	2,26	1,02
		Persentase penduduk di Keluarga Sejahtera	n/a	69,30	77,32	77,31	78,78
	6) Tersedianya lapangan pekerjaan yang luas dan beragam, tercapainya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, serta sistem gaji/tunjangan yang sesuai	Tingkat Pengangguran Terbuka	n/a	7,80	6,18	2,66	5,68
		7) Tercapainya peningkatan kualitas pembinaan generasi muda, peningkatan prestasi olah raga di tingkat regional dan nasional	Persentase Organisasi Pemuda Terfasilitasi	n/a	n/a	63	10
	Jumlah Perolehan Medali pada Evant Olahraga Multicabang Tingkat Regional dan Nasional		n/a	n/a	6	10	n/a
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	n/a	4,62	5,78	5,96	4,84

Misi	Sasaran Pembangunan	Indikator	BaseLine	Capaian Kinerja			
				2008	2013	2018	2023
3. Mewujudkan Perekonomian Maluku Tenggara sebagai Daerah Kepulauan yang Tangguh dan Berdaya saing	1) Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah di atas 10 persen per tahun dengan berbasis kelautan/perikanan dan pertanian yang terpadu, berkualitas, berkesinambungan dan didukung oleh teknologi inovasi sehingga pendapatan percapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan yang setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang telah maju	PDRB Per Kapita	n/a	n/a	18,31	29,99	32,89
		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	n/a	42,91	35,34	29,54	30,81
	2) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif sebagai daerah kepulauan.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	n/a	n/a	61,99	94,4	97,53
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	n/a	n/a	53,77	16,87	46,78
		Jumlah Produksi Pertanian	n/a	n/a	3.780	n/a	9.461
	3) Terwujudnya peningkatan peran Kelembagaan ekonomi yang efektif didukung oleh sistem keuangan (bank dan non bank), infrastruktur ekonomi yang memadai, pelaksanaan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, terbukanya akses masyarakat terhadap penyediaan modal (kredit) bagi usaha kecil dan menengah, dan meningkatnya nilai tambah yang dinikmati oleh masyarakat.	Jumlah UMKM Berakses Modal Perbankan	n/a	n/a	8	75	n/a
		Persentase Koperasi Aktif	n/a	n/a	75,21	84,72	84,45
	4) Meningkatnya ekspor komoditi unggulan yaitu perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi.	Jumlah Ekspor Hasil Perikanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	5) Terwujudnya peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP)	n/a	n/a	n/a	n/a	97,47
		Jumlah Produksi Perkebunan	n/a	n/a	n/a	n/a	18.459
	6) Terkelolanya potensi pariwisata (budaya, alam dan bahari) secara berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Obyek Wisata	n/a	n/a	18	24	76
		Jumlah Kunjungan Wisata	n/a	n/a	43.045	130.212	129.300
	7) Tersedianya prasarana dan sarana ekonomi perdagangan dan jasa yang memadai untuk mempercepat proses produksi, distribusi,	Jumlah Pasar	2	2	2	2	2

Misi	Sasaran Pembangunan	Indikator	BaseLine	Capaian Kinerja			
				2008	2013	2018	2023
	promosi, dan pemasaran hasil-hasil komoditas unggulan daerah.						
	8) Terwujudnya koperasi, usaha kecil dan mikro serta industri kecil, menengah yang tangguh dan berdaya saing sebagai soko guru perekonomian lokal	Jumlah Koperasi Sehat	n/a	n/a	40	34	n/a
		Jumlah UMKM	n/a	n/a	4.280	7.897	n/a
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan	1) Tingkat pembangunan yang merata ke seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, yang diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, berkurangnya kesenjangan antarwilayah,	Indeks Wiliamson	n/a	0,50	0,29	0,29	0,29
	2) Terbangunnya sistem dan jaringan infrastruktur daerah yang dapat menjangkau seluruh wilayah Maluku Tenggara dengan dukungan jaringan sarana prasarana perhubungan dan transportasi	Panjang Jalan Kabupaten	620	620	800	800	740
		Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	n/a	n/a	25,00	64,85	43,38
		Jumlah Dermaga Penyeberangan	n/a	3	3	3	3
	3) Mewujudkan Maluku Tenggara yang asri dan lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara seimbang.	Luas Areal Tangkapan Air	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	n/a	n/a	7,94	7,94	n/a
	4) Menurunnya angka kerusakan lingkungan dan ekosistem laut dan pesisir, berkurangnya intensitas bencana alam	Indeks Risiko Bencana	n/a	n/a	n/a	145,19	94,26
5) Menurunnya proporsi penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	36,73	32,90	25,06	23,27	21,79	
6) Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan	Indeks Gini	n/a	n/a	n/a	n/a	0,244	
5. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum	1) Meningkatkan kualitas pendidikan politik rakyat, yang tercermin oleh peningkatan peran, partisipasi politik rakyat, serta terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	2) Tercapainya penegakan supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang	n.a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Misi	Sasaran Pembangunan	Indikator	BaseLine	Capaian Kinerja			
				2008	2013	2018	2023
	bersumber pada Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia						
	3) Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang berkualitas	n.a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	4) Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah, dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah PAD (Rp.milyar)	n/a	n/a	n/a	n/a	73,72
	5) Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang berkualitas, yang berorientasi pada kemudahan rantai birokrasi, cepat, tepat, efektif, transparan dan terjangkau	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

2.5. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Analisis tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik merupakan gambaran dinamika dan perkembangan kependudukan yang menjadi tujuan

2.5.1. Proyeksi Kependudukan

Berdasarkan data seri kependudukan sesuai publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta diperbarui dengan hasil sensus penduduk tahun 2020, maka BPS melakukan proyeksi penduduk jangka panjang. Proyeksi penduduk adalah aspek penting dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan.

Penduduk adalah obyek dan sekaligus subyek pembangunan. Pembangunan dilakukan untuk kesejahteraan penduduk, tetapi di sisi lainnya, penduduk adalah modal penggerak pembangunan itu sendiri.

Proyeksi penduduk jangka panjang oleh BPS menggunakan tahun dasar sensus 2020. Sesuai hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 124.199 jiwa. Proyeksi menunjukkan terjadinya kenaikan dengan laju pertumbuhan sebesar 0,93 persen pada periode 2020–2021 dan 1,27 persen pada periode 2021–2022.

Berdasarkan tren pertumbuhan yang ada, maka Proyeksi Penduduk Jangka Panjang Kabupaten Maluku Tenggara 2025–2045 sebagai berikut:

Tabel 2.37
Proyeksi Penduduk Jangka Panjang
Kabupaten Maluku Tenggara

URAIAN	2025	2030	2035	2040**	2045**
Jumlah Penduduk	127.502	133.762	139.502	145.698	151.719
• Laki-laki	63.546	66.728	69.657	72.807	75.873
• Perempuan	63.956	67.034	69.845	72.891	75.846

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara

**Angka Sangat Sementara

Data proyeksi penduduk jangka panjang di atas melahirkan beberapa asumsi antara lain: Data menunjukkan bahwa dengan tren pertumbuhan yang tetap maka kenaikan jumlah penduduk akan terus terjadi. Dibandingkan dengan posisi tahun 2020, maka pada tahun 2025 terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 3.303 jiwa. Selanjutnya, penambahan jumlah penduduk mencapai 9.563 jiwa pada tahun 2030, 15.303 jiwa pada tahun 2035, 21.499 jiwa pada tahun 2040 dan 27.519 pada tahun 2045.

Dari sisi komposisi, diproyeksikan akan terjadi perubahan pada perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Pada periode 2025 s.d 2040, tren komposisi penduduk masih tetap sama, yaitu jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Perubahan baru terjadi pada periode 2040-2045, dimana terjadi tren penduduk laki-laki (50,01 Persen) lebih banyak dibanding penduduk perempuan (49,99 persen). Hal ini sekaligus menjelaskan tentang rata-rata pertumbuhan penduduk laki-laki (0,89 persen) lebih cepat dibanding rata-rata pertumbuhan penduduk perempuan (0,86 persen).

2.5.1.1. Jumlah dan Distribusi Penduduk

Dengan menggunakan analisis tren persebaran yang ada saat ini, maka proyeksi sebaran penduduk jangka panjang menurut kecamatan sebagai berikut.

Tabel 2.38
Proyeksi Jumlah dan Distribusi Penduduk Maluku Tenggara Menurut Kecamatan

Kecamatan	Tahun				
	2025	2030	2035	2040**	2045**
• Kei Kecil	35.474	37.216	38.813	40.537	42.212
• Kei Kecil Barat	8.054	8.449	8.812	9.203	9.583
• Kei Kecil Timur	8.620	9.044	9.432	9.851	10.258
• Hoat Sorbay	10.851	11.384	11.872	12.400	12.912
• Manyeuw	6.451	6.768	7.058	7.372	7.676
• Kei Kecil Timur Selatan	6.043	6.339	6.611	6.905	7.190
• Kei Besar	19.666	20.632	21.517	22.473	23.402
• Kei Besar Utara Timur	11.673	12.247	12.772	13.339	13.891
• Kei Besar Selatan	7.329	7.689	8.019	8.375	8.721
• Kei Besar Utara Barat	9.571	10.041	10.472	10.937	11.389
• Kei Besar Selatan Barat	3.770	3.955	4.124	4.308	4.486
MALUKU TENGGARA	127.502	133.762	139.502	145.698	151.719

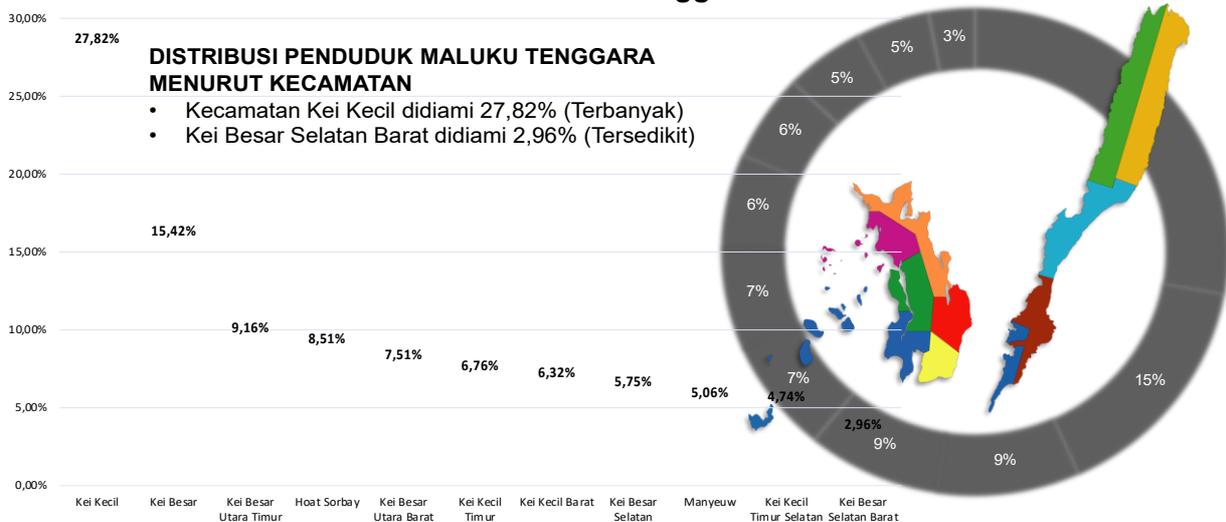
Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara

**Angka Sangat Sementara

Proyeksi sebaran penduduk jangka panjang menunjukkan bahwa dengan tren sebaran yang sama, maka pada periode tahun 2025 sampai tahun 2045, masih terjadi sebaran penduduk yang tidak merata, baik perbandingan antarpulau maupun antarkecamatan. Pulau Kei Kecil akan menampung 59,21 persen penduduk, sedangkan Pulau Kei Besar 40,79 persen.

Kecamatan Kei Kecil menjadi kecamatan dengan penduduk terbanyak mencapai 27,82 persen. Sedangkan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat didiami penduduk sebesar 2,96 persen, atau yang paling sedikit.

Gambar 2.41
Persebaran Penduduk Maluku Tenggara menurut Kecamatan



Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara (data diolah)

Gambaran proyeksi sebaran penduduk ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan pembangunan wilayah sangat penting untuk dilakukan. Upaya mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru, simpul konektivitas dan simpul ekonomi di kecamatan menjadi syarat penting bagi terwujudnya pemerataan pembangunan yang berimplikasi pada meratanya distribusi penduduk.

2.5.1.2. Kepadatan Penduduk

Berdasarkan proyeksi sebaran penduduk, maka dilakukan analisis kepadatan penduduk menurut kecamatan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.39
Proyeksi Kepadatan Penduduk Maluku Tenggara menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
		2025	2030	2035	2040**	2045**
• Kei Kecil	109,27	325	341	355	371	386
• Kei Kecil Barat	95,76	84	88	92	96	100
• Kei Kecil Timur	68,26	126	132	138	144	150
• Hoat Sorbay	82,28	132	138	144	151	157
• Manyeuw	61,93	104	109	114	119	124
• Kei Kecil Timur Selatan	55,48	109	114	119	124	130
• Kei Besar	112,97	174	183	190	199	207
• Kei Besar Utara Timur	167,09	70	73	76	80	83
• Kei Besar Selatan	78,33	94	98	102	107	111
• Kei Besar Utara Barat	157,81	61	64	66	69	72
• Kei Besar Selatan Barat	42,13	89	94	98	102	106
MALUKU TENGGARA	1031,31	124	130	135	141	147

Tahun 2022 kepadatan penduduk Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 120 jiwa per kilometer persegi. Proyeksi kepadatan penduduk jangka panjang menunjukkan, Tahun 2035 kepadatan penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara naik menjadi 135 jiwa per kilometer persegi. Dan selanjutnya proyeksi angka sementara untuk tahun 2045, kepadatan penduduk Maluku Tenggara mencapai 147 jiwa/Km². Terjadi kenaikan sebesar 27 jiwa dibanding tahun 2022.

Estimasi terhadap kenaikan kepadatan penduduk juga terjadi di seluruh kecamatan. Di Kecamatan Kei Kecil tahun 2022 kepadatan penduduk sebesar 316 jiwa per kilometer persegi, diproyeksikan naik menjadi 355 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2035 dan 386 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2045. Kenaikan mencapai 70 jiwa jiwa per kilometer persegi.

Kepadatan penduduk yang meningkat akan memberi dampak terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Analisis terhadap aspek daya dukung dan daya tampung menjadi substansi penting dalam setiap perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan wilayah dan pembangunan ekonomi. Analisis secara mendalam terhadap aspek ini dilakukan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

2.5.1.3. Struktur Kependudukan

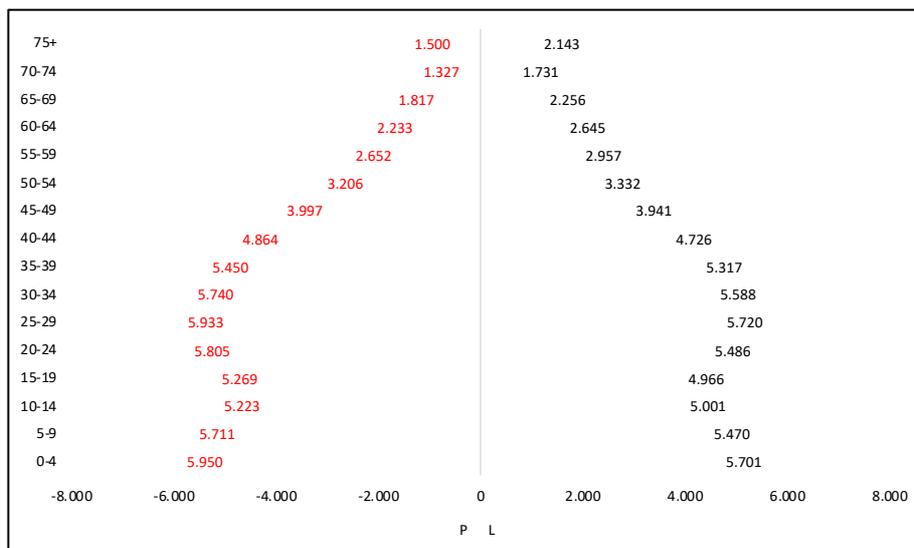
Dari aspek struktur penduduk, perbandingan antarkelompok umur proyeksi jangka panjang, sampai dengan tahun 2035, sebagai berikut:

Tabel 2.40
Proyeksi Struktur Kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara
Menurut kelompok Umur

URAIAN	PROYEKSI										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-4	11.569	11.635	11.684	11.720	11.741	11.745	11.728	11.689	11.633	11.556	11.463
5-9	9.937	10.335	10.741	11.102	11.375	11.467	11.531	11.585	11.620	11.643	11.648
10-14	9.865	9.588	9.423	9.398	9.532	9.889	10.287	10.692	11.051	11.323	11.415
15-19	11.989	11.605	11.137	10.627	10.152	9.759	9.485	9.318	9.298	9.432	9.789
20-24	12.098	12.147	12.157	12.104	11.960	11.706	11.329	10.873	10.377	9.918	9.529
25-29	11.291	11.362	11.481	11.625	11.755	11.846	11.896	11.903	11.854	11.710	11.464
30-34	11.171	11.235	11.231	11.195	11.165	11.174	11.237	11.355	11.500	11.628	11.716
35-39	9.910	10.198	10.466	10.698	10.886	11.021	11.088	11.083	11.046	11.015	11.025
40-44	8.095	8.412	8.738	9.068	9.388	9.686	9.973	10.235	10.465	10.651	10.782
45-49	6.615	6.828	7.056	7.306	7.575	7.872	8.179	8.503	8.823	9.135	9.429
50-54	5.698	5.794	5.922	6.075	6.257	6.444	6.655	6.878	7.123	7.388	7.682
55-59	5.306	5.351	5.380	5.394	5.419	5.480	5.574	5.699	5.854	6.032	6.215
60-64	4.460	4.549	4.661	4.778	4.886	4.968	5.016	5.042	5.062	5.091	5.149
65-69	3.741	3.817	3.862	3.899	3.943	4.007	4.095	4.201	4.316	4.420	4.495
70-74	2.578	2.680	2.803	2.925	3.042	3.136	3.204	3.250	3.286	3.331	3.396
75+	3.179	3.238	3.303	3.375	3.464	3.562	3.690	3.830	3.988	4.145	4.305
TOTAL	127.502	128.774	130.045	131.289	132.540	133.762	134.967	136.136	137.296	138.418	139.502

Berdasarkan data proyeksi menurut kelompok umur di atas, maka gambaran struktur penduduk dalam piramida penduduk sebagai berikut.

Gambar 2.42
Proyeksi Struktur Penduduk 2025–2035 dalam Piramida Penduduk



Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara beberapa Terbitan (data diolah)

Rata-rata jumlah penduduk menurut kelompok umur berdasarkan hasil proyeksi menunjukkan, sampai dengan tahun 2035, penduduk pada kelompok usia muda dan usia produktif sangat mendominasi struktur penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara. Analisis proyeksi rasio ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2045, sebagai berikut.

Tabel 2.41
Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2025-2045

URAIAN	2025	2030	2035	2040	2045
• Rasio Ketergantungan (RK)	47,17	48,70	50,36	49,54	50,11
• RK Penduduk Belum Produktif	36,21	36,80	37,21	37,20	37,61
• RK Penduduk Tdiak Lagi Produktif	10,96	11,90	13,15	12,34	12,50

Hasil perhitungan Rasio Ketergantungan menunjukkan bahwa rasio ketergantungan paling rendah terjadi pada periode 2025 sampai dengan mendekati tahun 2030. Hal ini dapat memberikan makna bahwa pada periode tersebut, puncak bonus demografi terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari sisi Rasio Ketergantungan, dengan besaran Nilai Rasio sebesar 47,17 persen, maka dalam seluruh populasi penduduk Maluku Tenggara, setiap 100 orang penduduk produktif, “hanya” menanggung beban 47 orang penduduk tidak produktif.

Pada periode selanjutnya, dimulai dari tahun 2030 sampai dengan tahun 2045, terlihat tren Rasio Ketergantungan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan periode Bonus Demografi di Maluku Tenggara akan memasuki transisi akhir dimulai pada periode 2030.

Hal ini juga dapat dilihat dari tren naiknya rasio ketergantungan penduduk usia lanjut (penduduk yang tidak lagi produktif, 65 Tahun ke atas). Tahun 2025 berada di angka 10,96, selanjutnya mengalami tren meningkat mulai tahun 2030 sebesar 11,90, tahun 2035 sebesar 13,15, tahun 2040 sebesar 12,34 dan tahun 2045 sebesar 12,50. Melihat tren penuaan penduduk yang terjadi, maka kebijakan strategis pelayanan jaminan kesehatan serta pelayanan kesehatan lansia menjadi isu yang perlu diperhatikan.

2.5.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik

Terhadap kondisi demografi dan proyeksi penduduk jangka panjang yang diuraikan di atas, maka perlu diproyeksikan pula kebutuhan sarana dan prasarana publik yang menjadi dasar untuk penentuan target kinerja pelayanan publik dalam periode jangka panjang 2025–2045.

2.5.2.1. Perumahan

Sesuai data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022, jumlah kepala keluarga di Kabupaten Maluku Tenggara total sebanyak 25.633 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 16.772 kepala keluarga atau sebesar 65,43 persen memiliki rumah sendiri. Sisanya, 8.861 kepala keluarga belum memiliki rumah sendiri, hidup menumpang, kontrak, kost, dll. Lebih lanjut ditemukan pula fakta bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara masih terdapat 15.473 atau sebesar 60,37 kepala keluarga yang tinggal di rumah dengan kategori tidak layak huni.

Tabel 2.42

Proyeksi dan Analisis Kepemilikan Serta Kondisi Perumahan Warga

URAIAN	2022	PROYEKSI				
		2025	2030	2035	2040	2045
• Jumlah KK	25.633	28.334	29.725	31.000	32.858	33.994
• Tambahan KK Baru	0	2.701	1.391	1.276	1.858	1.136
• KK Tidak Punya Rumah	8.861	11.562	12.953	14.228	16.086	17.222
• KK Rumah Tidak Layak	15.473	17.103	17.943	18.713	19.835	20.520

Berdasarkan proyeksi dan analisis kepemilikan serta kondisi perumahan warga, maka diperoleh angka estimasi kebutuhan rumah masyarakat dalam periode jangka panjang 2025–2045, sebagai berikut:

Tabel 2.43

Proyeksi Kebutuhan Rumah Masyarakat Periode Jangka Panjang 2025-2045

URAIAN	SATUAN	PROYEKSI KEBUTUHAN				
		2025	2030	2035	2040	2045
• Pembangunan Baru	Unit	11.562	12.953	14.228	16.086	17.222
• Rehabilitasi/Peningkatan Kualitas	Unit	17.103	17.943	18.713	19.835	20.520

2.5.2.2. Akses Air Minum Layak

Berdasarkan proyeksi penduduk jangka panjang, dapat dianalisis kebutuhan air bersih masyarakat. Perhitungan dengan menggunakan standar nasional Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Republik Indonesia yaitu 150 liter/orang/hari.

Tabel 2.44

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Jangka Panjang di Kabupaten Maluku Tenggara

Kecamatan	Proyeksi									
	2025		2030		2035		2040**		2045**	
	Jlh. Pddk	Kebutuhan	Jlh. Pddk	Kebutuhan	Jlh. Pddk	Kebutuhan	Jlh. Pddk	Kebutuhan	Jlh. Pddk	Kebutuhan
1	2	3 = 2x150 Liter/org/hr	4	5=4x150 Liter/org/hr	6	7=5x150 Liter/org/hr	7	8=7x150 Liter/org/hr	9	10=9x150 Liter/org/hr
• Kei Kecil	35.474	5.321.100	37.216	5.582.400	38.813	5.821.950	40.537	6.080.550	42.212	6.331.800
• Kei Kecil Barat	8.054	1.208.100	8.449	1.267.350	8.812	1.321.800	9.203	1.380.450	9.583	1.437.450
• Kei Kecil Timur	8.620	1.293.000	9.044	1.356.600	9.432	1.414.800	9.851	1.477.650	10.258	1.538.700
• Hoat Sorbay	10.851	1.627.650	11.384	1.707.600	11.872	1.780.800	12.400	1.860.000	12.912	1.936.800
• Manyeuw	6.451	967.650	6.768	1.015.200	7.058	1.058.700	7.372	1.105.800	7.676	1.151.400
• Kei Kecil Timur Selatan	6.043	906.450	6.339	950.850	6.611	991.650	6.905	1.035.750	7.190	1.078.500
• Kei Besar	19.666	2.949.900	20.632	3.094.800	21.517	3.227.550	22.473	3.370.950	23.402	3.510.300
• Kei Besar Utara Timur	11.673	1.750.950	12.247	1.837.050	12.772	1.915.800	13.339	2.000.850	13.891	2.083.650
• Kei Besar Selatan	7.329	1.099.350	7.689	1.153.350	8.019	1.202.850	8.375	1.256.250	8.721	1.308.150
• Kei Besar Utara Barat	9.571	1.435.650	10.041	1.506.150	10.472	1.570.800	10.937	1.640.550	11.389	1.708.350
• Kei Besar Selatan Barat	3.770	565.500	3.955	593.250	4.124	618.600	4.308	646.200	4.486	672.900
Total Kebutuhan Air Bersih Domestik (Liter/Hari)		19.125.300		20.064.600		20.925.300		21.855.000		22.758.000
Total Kebutuhan Air Bersih Domestik (M3/Hari)		19.125		20.065		20.925		21.855		22.758

Sumber: Perda RTRW Kab. Maluku Tenggara Tahun 2024-2043

Tahun 2022 sesuai data Regsosek, keluarga dengan akses air minum layak di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 14.469 KK, atau sebesar 56,45 persen dari total kepala keluarga. Masih terdapat 11.164 Kepala Keluarga atau sebanyak kurang lebih 44.000 jiwa masyarakat yang belum berakses air minum layak.

Perhitungan proyeksi penduduk, dalam kaitan dengan kebutuhan pelayanan air minum layak diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.45
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Layak Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2025–2045

Uraian	2022	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
• Jumlah KK	25.633	28.334	29.725	31.000	32.858	33.994
• KK Tidak Berakses Air Layak	11.164	12.340	12.946	13.502	14.311	14.806

Dengan menggunakan data eksisting tahun 2023, maka jika tren penyediaan akses air minum tidak berubah, maka kebutuhan penyediaan air minum layak untuk intervensi menurut jumlah kepala keluarga tahun 2025–2045 sebagai berikut: Tahun 2025 sebanyak 12.340 KK, Tahun 2030 sebanyak 12.946 KK, Tahun 2035 sebanyak 13.502 KK, Tahun 2040 sebanyak 14.311 KK dan Tahun 2045 sebanyak 14.806 KK.

Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Maluku Tenggara bertujuan untuk memberikan dasar yang solid bagi perencanaan pengelolaan sumber daya air, termasuk upaya konservasi, pengembangan infrastruktur air bersih, dan kebijakan air yang berkelanjutan. Upaya percepatan penyediaan dan perluasan cakupan pelayanan air minum perlu untuk ditingkatkan. Alokasi anggaran untuk pembangunan, perluasan, dan termasuk pemeliharaan serta peremajaan jaringan air minum harus menjadi prioritas dalam tahap pertama RPJPD dalam rangka penguatan landasan transformasi.

Analisa ketersediaan air jangka panjang sesuai Kajian Lingkungan hidup strategis RPJPD 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 2.46
Status Daya Dukungan Air Bersih di Kabupaten Maluku Tenggara 2025–2045

URAIAN	SATUAN	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	M3/Tahun	361.774.296	384.766.200	409.221.072	435.231.576	462.893.184
Proyeksi Ketersediaan	M3/Tahun	614.675.750	614.675.750	614.675.750	614.675.750	614.675.750
Status Daya Dukung Air Bersih	M3/Tahun	252.901.454	229.909.550	205.454.678	179.444.174	151.782.566

2.5.2.3. Listrik

Pelayanan listrik rumah tangga yang disediakan oleh PT.PLN di Kabupaten Maluku Tenggara sudah mencakup 21.132 KK atau sebesar 82,44 persen dari total KK. Pelayanan yang belum mencapai 100 persen, lebih banyak disebabkan oleh kesulitan akses dan keterbatasan infrastruktur. Sampai dengan tahun 2022, wilayah yang belum terlayani listrik PLN secara optimal adalah sebagian wilayah di Pulau Kei Besar dan Pulau-pulau Kecil di Kecamatan Kei Kecil Barat.

Kebijakan strategis yang didorong untuk peningkatan dan perluasan pelayanan listrik rumah tangga adalah pemanfaatan energi alternatif. Sumber daya panas matahari maupun angin yang bertuip

sepanjang tahun dapat menjadi alternatif penyediaan energi listrik bagi rumah tangga, khususnya untuk wilayah pulau-pulau kecil.

Cakupan pelayanan listrik yang sudah mencapai 82,44 persen hanya menyisakan surplus daya yang kecil. Sehingga untuk pengembangan daerah, dengan memproyeksikan kenaikan jumlah penduduk, termasuk upaya pengembangan ekonomi melalui kebijakan hilirisasi maupun industrialisasi, maka kebutuhan untuk peningkatan pelayanan dan ketersediaan daya listrik menjadi urgensi tersendiri.

2.5.2.4. Akses Telekomunikasi

Kinerja perluasan cakupan layanan telekomunikasi berbasis data, menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari sisi pelayanan Kawasan, cakupan pelayanan tahun 2022 sudah mencapai 154 desa atau sebesar 81,05 persen dari total 190 desa. Meskipun demikian, dari sisi keluarga pengguna atau keluarga yang berkases internet angka cakupan baru mencapai 43,01 persen.

Uraian di atas menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong perluasan cakupan pelayanan di Kawasan perlu dilakukan, tetapi hal itu harus didukung dengan peningkatan taraf hidup, dan ekonomi masyarakat. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, akan berdampak pada meningkatnya pemanfaatan atau akses terhadap infrastruktur jaringan yang sudah mencapai cakupan yang luas.

2.5.2.5. Aksesibilitas dan Konektivitas

Ciri Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan, menyaratkan tersedianya aksesibilitass dan konektivitas yang memadai sebagai modal utama pertumbuhan. Upaya mendorong peningkatan aksesibilitas dan konektivitas dilakukan dengan penguatan sistem jaringan transportasi.

Sistem jaringan transportasi utama di Kabupaten Maluku Tenggara dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Diuraikan sebagai berikut:

a. Jaringan Transportasi Darat

Jaringan transportasi darat melayani pegerakkan orang dan barang baik di lingkup internal wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, maupun pelayanan antarkabupaten/Kota dengan Kota Tual. Jaringan transportasi darat sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kapasitas sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan di wilayah Kepulauan Kei Kecil secara umum cukup memadai menghubungkan ibukota kabupaten (Langgur) dengan ibukota-ibukota kecamatan serta antar ibukota kecamatan dengan pusat-pusat desa. Jaringan jalan di Kepulauan Kei Besar relatif terbatas dan kurang memadai, baik secara kuantitas, kualitas maupun kapasitas. Hal ini disebabkan kondisi topografi Pulau Kei Besar yang berbukit serta kondisi perekonomian dan penyebaran penduduk yang relatif tiadk merata.

b. Jaringan Transportasi Laut

Jaringan transportasi laut menghubungkan Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Keci, Pulau Kei Besar dengan Pulau Dullah (Kota Tual), serta Pulau Kei Kecil dengan pulau-pulau kecil di pesisir barat. Prasarana transportasi laut merupakan prasarana vital di Kabupaten Maluku Tenggara. Prasarana yang ada saat ini terdiri dari:

- Pelabuhan pengumpan Elat;
- Pelabuhan khusus perusahaan swasta, yaitu 2 unit;

- Pelabuhan berskala lokal yang berjumlah 5 (lima) unit dan dipergunakan untuk kegiatan bongkar-muat penumpang dan barang;
- Pelabuhan navigasi di Danar (Uf).

c. Jaringan Transportasi Udara

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki keterkaitan erat dengan Kota Ambon dan beberapa kota di Papua dan Papua Barat, yakni Timika, Kaimana dan Sorong. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara turut dipengaruhi oleh mobilitas orang dan barang dari daerah- daerah tersebut. Transportasi udara di Kabupaten Maluku Tenggara didukung oleh Bandar Udara Karel Satsuitubun yang terletak di Langgur. Bandara ini melayani lalu lintas angkutan udara di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.

Dalam rangka mendorong meningkatnya pelayanan transportasi dalam rangka meningkatkan aksesibilita dan konaktivitas, maka proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi diuraikan sebagai berikut:

Untuk pelayanan di Pulau Kei Besar, jumlah penduduk yang mendiami Pulau Kei Besar pada Tahun 2022 sebanyak 50.381 jiwa, atau sebesar 40,82 persen dari total penduduk Kabupaten Maluku Tenggara. Proyeksi jangka panjang penduduk menunjukkan, dengan tren persebaran yang sama, maka di tahun 2025 jumlah penduduk yang mendiami Pulau Kei Besar akan meningkat menjadi 52.046 jiwa, selanjutnya naik menjadi 54.602 jiwa pada tahun 2030, dan naik menjadi 56.945 jiwa pada tahun 2035.

Kebutuhan untuk peningkatan sarana dan prasarana aksesibilitas dan konektivitas diuraikan dalam indikasi program/paket kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.47
Kebutuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aksesibilitas dan Konektivitas
Dengan Lokasinya

Nomor	Program/ Kegiatan	Lokasi
PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI		
1	SISTEM TRANSPORTAI DARAT	
1.1	Pembangunan Jalan	
	• Pembangunan Jalan Ruas Wair-Soin	Pulau Kei Besar
	• Pembangunan Jalan Tamangil - Feer	Pulau Kei Besar
1.2	Peningkatan Jalan	Pulau Kei Kecil
	• Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Elat -Wair	Pulau Kei Besar
	• Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Elat-Holat-Soin	Pulau Kei Besar
	• Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Elat-Weduar	Pulau Kei Besar
	• Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Weduar-Weduar	Pulau Kei Besar
	• Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Langgur-Ibra	Pulau Kei Kecil
	• Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Langgur-Ibra- Rumaat	Pulau Kei Kecil
	• Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Langgur-Debut- Ohoira	Pulau Kei Kecil
	• Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Ibra-Letvuan	Pulau Kei Kecil
	• Peningkatan Jaringan Jalan Ruas Langgur- Ngurbloat	Pulau Kei Kecil
	• Peningkatan Jaringan Jalan Lingkar Pulau	Pulau Kei Kecil
	• Pembangunan Jembatan Pulau -Pulau Kecil-Pulau Kei	Pulau Kei Kecil

Nomor	Program/ Kegiatan	Lokasi
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Jalan antardesa 	Pulau Kei Kecil
1.3	Pembangunan Terminal	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Terinal Tipe C Langgur 	Langgur
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Terinal Tipe C Elat 	Elat
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Sub Terminal 	Danar, Tetoat, Uwat, Langgiar Fer, Rumadian
1.4	Pengembangan Dermaga Penyeberangan	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dermaga Penyeberangan Rumaat-Tamangil 	Rumat dan Tamangil
2	SISTEM TRANSPORTASI LAUT	
2.1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Elat; Faan dan Ohoiraut
2.2	Peningkatan Pelabuhan Local elat Menjadi Pelabuhan Regional	Elat
2.3	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Elat, Larat, Holat, Wakol, Weduar, Ohoiraut, Danar, Tanimbar Kei dan Ur Pulau
2.4	Peningkatan Sarana-Prasarana Pelabuhan	
2.5	Pengembangan Dermaga/tambatan perahu	
3	PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI UDARA	
3.1	Peningkatan Status Bandara Baru Karel Sadsuitubun menjadi Bandar Udara Pengumpul Tersier	Langgur
3.2	Penyusunan aturan Zonasi Kawasan sekitar Bandara	Langgur

Sumber: RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2043

2.5.2.6. Proyeksi Kebutuhan Pangan Jangka Panjang Kabupaten Maluku Tenggara

Proyeksi Kebutuhan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara adalah analisis mendalam yang menggambarkan perkiraan konsumsi pangan dalam kurun waktu tertentu di masa mendatang. Proyeksi ini melibatkan evaluasi pertumbuhan populasi, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh.

Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, proyeksi ini mungkin mencakup estimasi pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan gaya hidup, dan perkiraan tingkat konsumsi pangan per Kapita. Analisis juga dapat mempertimbangkan dampak perubahan iklim, perubahan teknologi pertanian, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi produksi pangan lokal.

Proyeksi ini bertujuan untuk memberikan pandangan holistik terhadap kebutuhan pangan di Kabupaten Maluku Tenggara. Memberikan dasar bagi perencanaan kebijakan pangan, serta mendukung upaya untuk mencapai ketahanan pangan dan keberlanjutan di masa depan.

Berdasarkan hasil perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan, terdapat indikasi bahwa daya dukung pangan di Kabupaten Maluku Tenggara sudah terlampaui. Fenomena ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang cepat, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan perubahan iklim yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian.

Dampak dari terlampaunya daya dukung pangan dapat termanifestasi dalam peningkatan impor pangan, penurunan ketersediaan pangan lokal, dan potensi ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya strategis dalam pengelolaan sumber daya pangan dan implementasi kebijakan yang mendukung pertanian lokal untuk memastikan ketahanan pangan

yang berkelanjutan di masa depan. Evaluasi dan perencanaan lebih lanjut diperlukan untuk menangani tantangan ini dan mengarahkan Kabupaten Maluku Tenggara menuju sistem pangan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah, untuk menghitung ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan data total produksi aktual setempat dari setiap komoditas di suatu wilayah, dengan menggunakan nilai dari PDRB tahun 2023 sebesar Rp1.266.479.420.000.

Nilai tersebut merupakan gambaran dari produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan menggunakan data tersebut, maka daya dukung lahan pertanian berdasarkan ketersediaan lahan seluas 39.089 ha dan kebutuhan riil lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluas 53.764,1 ha, sehingga daya dukung pangan adalah sebesar 0,73 (terlampaui).

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa daya dukung lahan pertanian Kabupaten Maluku Tenggara masuk dalam kategori daya dukung pangan telah terlampaui. Kategori telah terlampaui ini disebabkan oleh kurang maksimalnya nilai produktivitas di berbagai komoditas.

Tabel 2.48
Proyeksi Status Daya Dukung Pangan Jangka Panjang, 2025-2045

URAIAN	SATUAN	2025	2030	2035	2040	2045
Ketersediaan Pangan	KKal/Tahun	73.157.595.158	73.157.595.158	73.157.595.158	73.157.595.158	73.157.595.158
Kebutuhan Pangan	KKal/Tahun	101.104.835.750	107.530.368.750	114.364.756.500	121.633.895.750	129.364.468.000
Daya Dukung Pangan	KKal/Tahun	-27.947.240.592	-34.372.773.592	-41.207.161.342	-48.476.300.592	-56.206.872.842
Status Daya Dukung Pangan	Kategori	TERLAMPAUI	TERLAMPAUI	TERLAMPAUI	TERLAMPAUI	TERLAMPAUI

Sumber: KLHS RPJPD 2025–2045

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Maluku Tenggara mengalami defisit penyediaan pangan sebesar 27,947,240,592 kkal pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 56,206,872,842 kkal pada tahun 2045. Data juga menunjukkan hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami permasalahan dari aspek daya dukung pangan, kecuali Kecamatan Kei Kecil Barat.

Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2045 dengan mempertimbangkan isu pembangunan berkelanjutan strategis, proyeksi capaian TPB serta kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) perlu menjadi perhatian serius.

2.6. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan berkeadilan, maka RPJPD disusun berpedoman pada RTRW, sesuai Pasal 263 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini dilakukan guna mewujudkan sinkronisasi antara arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang RPJPD, dengan kebijakan pemanfaatan ruang dalam RTRW. Analisis terhadap pengembangan pusat pertumbuhan wilayah meliputi:

2.6.1. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah sesuai arahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023–2043 mencakup Pengembangan potensi perikanan, pariwisata dan pertanian, Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar pulau dan antar kawasan, Peningkatan konektivitas antar kawasan dan antar pulau, Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa, Pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana, Pemantapan fungsi perkotaan sesuai dengan struktur dan hirarkinya serta Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian sumberdaya alam. Kebijakan pengembangan wilayah dan strategi pencapaian untuk periode pembangunan jangka panjang 2025–2045 Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut:

Tabel 2.49
Kebijakan Pengembangan Wilayah

No	Kebijakan	Strategi
1	perlindungan sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat	1) menjaga kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam 2) melestarikan situs warisan budaya
2	pengembangan potensi perikanan, pariwisata dan pertanian	3) mengembangkan kawasan perikanan terpadu berbasis pulau mandiri dan kota pantai 4) mengembangkan kawasan pariwisata terpadu 5) mengembangkan kawasan pertanian dan perkebunan berkelanjutan untuk mendukung kemandirian pangan
3	pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar pulau dan antar kawasan	6) meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 7) meningkatkan penyediaan infrastruktur telekomunikasi di setiap Ohoi dengan penerapan program Ohoi digital 8) meningkatkan pelayanan dasar masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur air bersih dan sanitasi pada wilayah Daerah khususnya pada wilayah terpencil 9) meningkatkan luasan cakupan pelayanan jaringan energi di seluruh wilayah dan memanfaatkan energi terbarukan 10) meningkatkan sarana prasarana sosial ekonomi di pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan hirarki pelayanannya
4	peningkatan konektivitas antar kawasan dan antar pulau	11) meningkatkan konektivitas melalui penyediaan transportasi darat dan laut yang menghubungkan antar pulau dan antar Kawasan 12) mengembangkan simpul-simpul konektivitas untuk mendorong pusat pertumbuhan baru
5	pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana	13) menetapkan potensi zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana 14) menetapkan sistem penanganan bencana

No	Kebijakan	Strategi
6	pemantapan fungsi perkotaan sesuai dengan struktur dan hirarkinya	15) memantapkan dan mengembangkan potensi perkotaan Langgur sebagai ibukota kabupaten 16) mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan agar lebih efektif dalam melayani pengembangan wilayah sekitarnya 17) mengembangkan pusat kegiatan baru untuk menunjang pemerataan pengembangan wilayah 18) menetapkan fungsi kawasan perkotaan sesuai dengan pelayanannya 19) menetapkan kegiatan utama pada pusat-pusat kegiatan agar masing – masing dapat berkembang sesuai potensinya 20) meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan Ohoi sekitarnya untuk mendukung percepatan pertumbuhan wilayah 21) meningkatkan potensi kawasan perdesaan sebagai sentra produksi unggulan
7	pelestarian, pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan berbasis kearifan lokal	22) memantapkan kawasan yang berfungsi lindung 23) menetapkan kawasan strategis yang berfungsi lindung 24) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan 25) mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sumber daya alam

Sumber: Perda RTRW Kab. Maluku Tenggara Tahun 2024-2043

2.6.2. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang adalah rencana tentang bagaimana wilayah dihubungkan satu sama lain melalui jaringan jalan, pelabuhan, bandara, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air. Struktur ruang mengatur pusat-pusat kegiatan dan jaringan penghubungnya agar aktivitas masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan bisa berjalan lancar.

Secara lengkap diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.50
Rencana Struktur Ruang

Sruktur Ruang	Desa / Kecamatan	Keterangan
1. Sistem Pusat Permukiman		
1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	(1) Langgur, Kec. Kei Kecil (2) Elat, Kec. Kei Besar	kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan
2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	(1) Debut, Kecamatan Manyeuw; (2) Hollat, Kecamatan Kei Besar Utara Timur; (3) Ohoira Kecamatan Kei Kecil Barat; (4) Rumaat, Kecamatan Kei Kecil Timur; dan Weduar di Kecamatan Kei Besar Selatan.	pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.

Struktur Ruang	Desa / Kecamatan	Keterangan
3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	(1) Banda Ely, Kecamatan Kei Besar Utara Timur; (2) Dinar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan; (3) Larat, Kecamatan Kei Besar Selatan; Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat; (4) Ngilingof, Kecamatan Manyeuw; (5) Ohoi Ad, Kecamatan Kei Besar Utara Barat; (6) Ohoidertutu, Kecamatan Kei Kecil Barat; (7) Ohoiraut, Kecamatan Kei Besar Utara Timur; (8) Uwat, Kecamatan Kei Besar Utara Barat; (9) Wab, Kecamatan Hoat Sorbay; (10) Waurtahait, Kecamatan Kei Besar; dan (11) Weduar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat	pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.
2. Sistem Jaringan Transportasi		
1) Sistem Jaringan Jalan	.1.1. Jalan Umum: <ul style="list-style-type: none"> • Jalan Kolektor Primer • Jalan Lokal • Jalan Lingkungan 	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Jalan di Seluruh Kecamatan (pasal 11 Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2024
	.1.2. Terminal Penumpang <ul style="list-style-type: none"> • Terminal tipe C di Langgur, Kec. Kei Kecil • Terminal tipe C di Elat, Kec. Kei Besar 	
	.1.3. Jembatan <ul style="list-style-type: none"> • Pada ruas jalan yang telah ditetapkan 	
3. Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyebrangan		
1) Pelabuhan Penyeberangan	(1) Pelabuhan Penyebrangan kelas II: <ul style="list-style-type: none"> • Elat Kec. Kei besar dan • Faan Kec. Kei Kecil 	
	(2) Pelabuhan Penyebrangan kelas III: <ul style="list-style-type: none"> • Holat Kec. Kei Besar Utara Timur • Ohoiraut, Kec. Kei Besar Utara Timur 	
4. Sistem Jaringan Transportasi laut		
1) Pelabuhan Pengumpan		
5.2. Pelabuhan Pengumpan Regional	(1) Elat, Kec. Kei Besar	

Struktur Ruang	Desa / Kecamatan	Keterangan
5.3. Pelabuhan Pengumpan Lokal	(1) Banda Eli, Kec. Kei Besar Utara Timur (2) Holat, Kec. Kei Besar Utara Timur (3) Langgiar, Kec. Kei Besar Selatan Barat (4) Mun, Kec. Kei Besar Utara Barat Ohoiel, Kec. Kei Besar (5) Ohoiraut, Kec. Kei Besar Utara Timur (6) Sathean, Kec. Kei Kecil (7) Uf Maar/Danar Kec. Kei Kecil Timur Selatan (8) Ur Pulau, Kec. Kei Kecil Barat (9) Weduar, Kec. Kei Besar Selatan	
2) Pelabuhan Perikanan		
a. Pelabuhan Perikanan Pantai	(1) Uf, Kec. Kei Kecil Timur Selatan	
b. Pangkalan Pendaratan Ikan	(1) Elat, di Kec. Kei Besar; (2) Ohoi Faan Sathean, Kec. Kei Kecil; (3) Selayar Kec. Manyeuw; dan (4) Weduar, Kec. Kei Besar Selatan.	
3) Bandara		
a. Bandara Umum	bandar udara pengumpan yaitu Bandar Udara Karel Sadsuitubun di Kecamatan Kei Kecil.	
b. Bandara Khusus	Pangkalan Angkatan Udara Dominicus Dumatubun di Kecamatan Kei Kecil.	
5. Sistem Jaringan Energi		
1) pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	.1. PLTD Elat di Kecamatan Kei Besar; .2. PLTD Langgur di Kecamatan Kei Kecil; .3. PLTD Rerean di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat; .4. PLTD Tanimbar Kei di Kecamatan Kei Kecil Barat; .5. PLTD Ur Pulau di Kecamatan Kei Kecil Barat; dan .6. PLTD Warbal di Kecamatan Kei Kecil Barat.	
2) pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Elat di Kecamatan Kei Besar	
3) pembangkit listrik lainnya berupa PLTBio	PLTBio di Kec. Manyeuw	
4) Jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM	Seluruh Kecamatan	
6. Sistem Jaringan Telekomunikasi		
1) Jaringan Tetap		
a. Intracity	Kec. Kei Kecil	
b. STO	Kec. Kei Kecil	

Sruktur Ruang	Desa / Kecamatan	Keterangan
2) Jaringan Bergerak		
a. Satelit	Seluruh Kecamatan	
b. Seluler	Seluruh Kecamatan	
c. Teristerial	Seluruh Kecamatan	
7. Sistem Jaringan Sumber daya Air		
Jaringan Irigasi		
1) Jaringan Irigasi Primer	(1) Daerah Irigasi Debut melintas di Kecamatan Manyeuw	
2) Jaringan Irigasi Sekunder	(2) Daerah Irigasi Debut melintas di Kecamatan Manyeuw	
3) Jaringan Irigas Air Tanah	(3) Kec. Hoat Sorbay Kec. Kei Kecil; Kec. Kei Kecil Barat; Kec. Kei Kecil Timur; Kec. Kei Kecil Timur Selatan; dan Kec.Manyeuw	
4) Bangunan sumber daya air	(4) Di seluruh Kecamatan	
8. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya		
1) SPAM	(1) IPA SPAM Ibu Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur di Banda Ely; (2) IPA SPAM Ibu Kota Kecamatan Kei Kecil Timur di Rumaat; (3) IPA SPAM Kawasan Kumuh Kawasan Oho iso di Kecamatan Kei Kecil Timur; (4) IPA SPAM Kawasan Kumuh Kawasan Ohoiwatsin di Kecamatan Kei Besar Utara Barat; (5) IPA SPAM Kawasan Rawan Air Desa Samawi di Kecamatan Kei Kecil Timur; (6) IPA SPAM Kawasan Rawan Air Ohoi Danar di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan; (7) IPA Tamangil di Kecamatan Kei Besar Selatan; (8) SPAM Elat di Kecamatan Kei Besar; (9) SPAM Ibu Kota Kecamatan Hoat Sorbay di Evu; dan (10) SPAM Ngilingof di Kecamatan Manyeuw	
2) SPAL	SPAL terpusat Kecamatan Kei Kecil	
3) Sistem Pengolahan Limbah B3	(1) Klinik Dr. Share di Kecamatan Kei Besar; (2) Rumah Sakit di Kecamatan Kei Kecil; dan (3) limbah B3 lainnya di Kecamatan Kei Kecil Timur.	

Struktur Ruang	Desa / Kecamatan	Keterangan
4) Sistem Jaringan Persampahan	TPS3R (1) Debut Kecamatan Manyeuw; (2) Elat, Kecamatan Kei Besar; (3) Embun, di Kecamatan Kei Kecil; (4) Ibra di Kecamatan Kei Kecil; (5) KSM Berkah di Kecamatan Kei Kecil; (6) KSM Kolser di Kecamatan Kei Kecil; (7) KSM Wear Nal di Kecamatan Kei Kecil; (8) Letman di Kecamatan Kei Kecil; (9) Ngayub di Kecamatan Manyeuw; (10) Ngilngof di Kecamatan Manyeuw; (11) Ohoidertawun Bawah di Kecamatan Kei Kecil; (12) Ohoijang Watdek di Kecamatan Kei Kecil; (13) Ohoililir di Kecamatan Manyeuw; (14) Ohoiluk di Kecamatan Manyeuw; (15) Ohoira di Kecamatan Kei Kecil Barat; (16) Perumnas di Kecamatan Kei Kecil; (17) Perumnas 1 di Kecamatan Kei Kecil; (18) Rejeki di Kecamatan Kei Kecil; (19) TPS3R Rumadian di Kecamatan Manyeuw; (20) Sathean di Kecamatan Kei Kecil; dan (21) Watvahan di Kecamatan Kei Kecil.	
	TPA Iso di Kec. Kei Kecil Timur	
	TPST Kec. Kei Kecil Timur	
5) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana di Seluruh Kecamatan	
6) Sistem Drainase		
a. Sistem Drainase Primer	(1) kecamatan Hoat Sorbay; (2) kecamatan Kei Besar; (3) kecamatan Kei Kecil; dan (4) kecamatan Manyeuw.	
b. Sistem Drainase Sekunder	(1) kecamatan Hoat Sorbay; (2) kecamatan Kei Besar; (3) kecamatan Kei Kecil; dan (4) kecamatan Manyeuw	

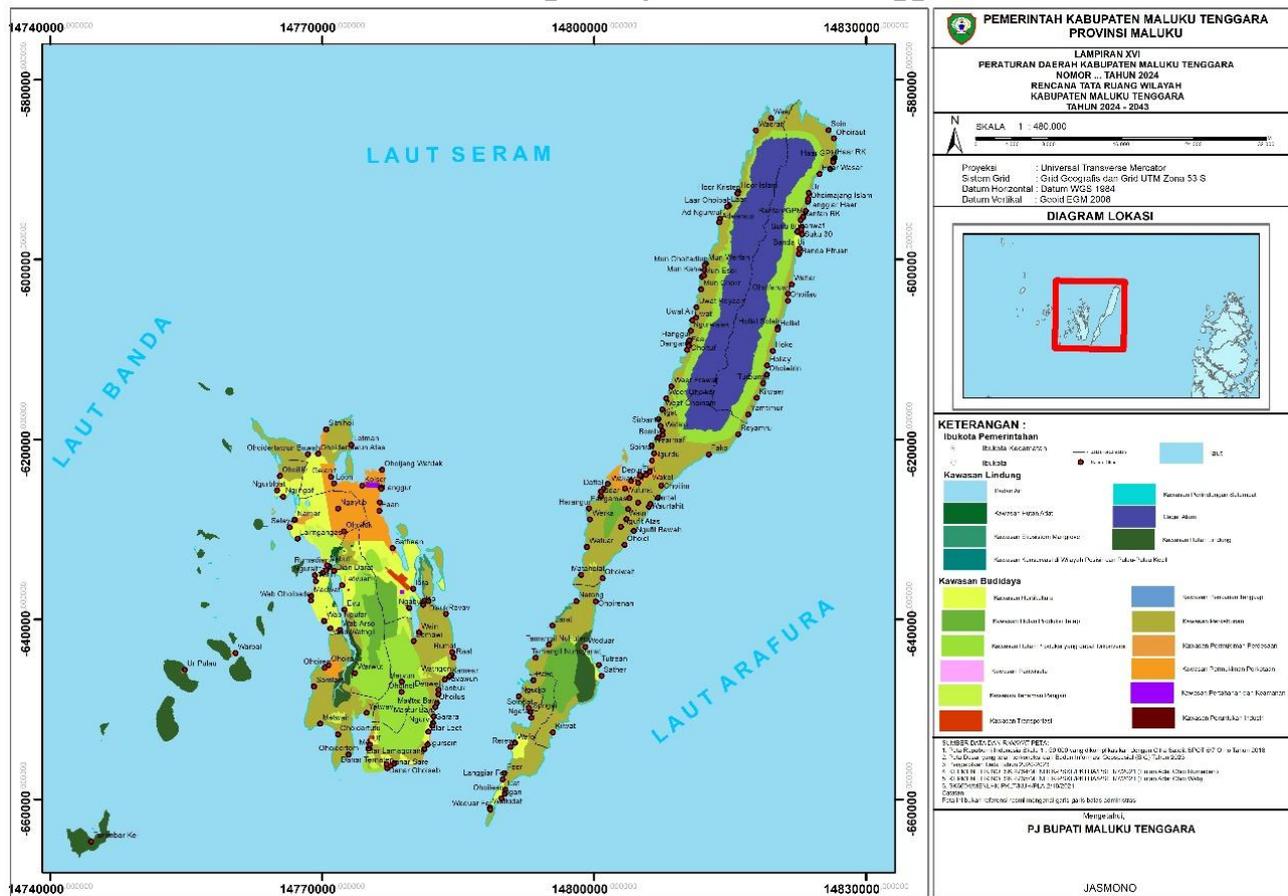
Sruktur Ruang	Desa / Kecamatan	Keterangan
c. Sistem Drainase Tersier	(1) kecamatan Hoat Sorbay; (2) kecamatan Kei Besar; (3) kecamatan Kei Besar Selatan; (4) kecamatan Kei Besar Selatan Barat; (5) kecamatan Kei Kecil; (6) kecamatan Kei Kecil Barat; (7) kecamatan Kei Kecil Timur; (8) kecamatan Kei Kecil Timur Selatan; dan (9) kecamatan Manyeuw	

Sumber: Perda RTRW Kab. Maluku Tenggara Tahun 2024-2043

2.6.3. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang dalam kebijakan jangka panjang daerah dimaksudkan untuk memastikan setiap rencana pembangunan sesuai dengan fungsi pemanfaatan ruang wilayah yang telah ditetapkan. Secara lengkap arahan fungsi pemanfaatan ruang di Kabupaten Maluku Tenggara dalam 20 tahun ke depan tergambar dalam peta pola ruang

Gambar 2.43
Peta Pola Ruang Kabupaten Maluku Tenggara



Sumber: Perda RTRW Kab. Maluku Tenggara Tahun 2024-2043

2.6.4. Kawasan Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2043, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten yakni:

Tabel 2.51
Rencana Pengembangan Kawasan Strategis

No	Jenis Kawasan Strategis	Lokus
1	Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi	<p>5.3.6.1. Kawasan Perikanan Terpadu Uf di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan; kawasan Perkotaan Elat di Kecamatan Kei Besar;</p> <p>5.3.6.2. Kawasan Pertumbuhan Pariwisata Ngiarwarat di Kecamatan Kei Kecil, dan Kecamatan Manyeuw; dan</p> <p>5.3.6.3. Kawasan Waterfront City di Kecamatan Hoat Sorbay, Kecamatan Kei Kecil, dan Kecamatan Manyeuw</p>
2	Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya	<p>1) kawasan Masyarakat Hutan Adat Ohoi Rumadian di Kecamatan Hoat Sorbay, dan Kecamatan Manyeuw; dan</p> <p>2) Kawasan Masyarakat Hutan Adat Ohoi Wab di Kecamatan Hoat Sorbay</p>
3	Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan	<p>1) Kawasan Danau Ablel di Kecamatan Kei Kecil, dan Kecamatan Manyeuw;</p> <p>2) Kawasan Mata Air Evu di Kecamatan Hoat Sorbay; dan</p> <p>3) Kawasan Resapan Air Ohoi Tenbuk di Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan</p>

Sumber: Perda RTRW Kab. Maluku Tenggara Tahun 2024-2043

Selain dari kebijakan pengembangan wilayah yang diuraikan di atas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2024, dalam periode pembangunan jangka panjang daerah 2025–2049, kebijakan pengembangan wilayah dengan fokus pengembangan nilai budaya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kei, mencakup:

Tabel 2.52
Lokus Pengembangan Nilai Budaya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

No.	Fokus	Lokus
1.	Pengembangan Nilai Budaya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kei	<p>1) Siran Siryen, di Kec.Kei Kecil Timur Selatan</p> <p>2) Ohoi Rat (Ohoi tempat kedudukan Raja)</p>

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Gambaran kondisi Kabupaten Maluku Tenggara yang diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih terdapat persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dan ditangani pada masa mendatang. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional.

Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan tidak terprediksi dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini kemudian dapat menjadi tantangan sekaligus peluang dalam perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara dua puluh tahun ke depan.

Perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk masa mendatang akan sangat ditentukan oleh kemampuan merumuskan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi. Dari gambaran kondisi daerah pada bab sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan dinamika regional maupun nasional, maka dapat dianalisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Maluku Tenggara untuk selanjutnya menjadi referensi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan diatasi 20 tahun ke depan.

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini, dengan yang diharapkan/direncanakan ataupun kondisi ideal sesuai perkembangan kondisi lingkungan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2005 – 2022 yang disajikan pada Bab 2, maka identifikasi permasalahan pokok sebagai berikut.

(1) Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Hal ini ditandai dengan rendahnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, rasio lulusan yang masih didominasi jenjang SD (30,96%) dan SMA (36,23%), serta rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja (43,42%) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif tinggi (5,73%) dengan kecenderungan meningkat sejak tahun 2020.

(2) Rendahnya akselerasi pertumbuhan, serta distribusi ekonomi yang tidak merata

Hal ini ditandai dengan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (Tahun 2023: 4,48%, lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi Maluku Tenggara selama 20 tahun yang berkisar 5,08%), daya saing ekonomi relatif rendah karena aktivitas ekonomi belum memiliki nilai tambah yang optimal, disebabkan kurangnya investasi.

(3) Belum optimalnya kinerja tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik

Hal ini ditandai dengan beberapa capaian kinerja yang tergolong rendah, antara lain: kepatuhan standar pelayanan publik sebesar 60,80 dengan kategori C, pada Zona Kuning dengan Kualitas Sedang, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 62,75 pada kategori B, Indeks Reformasi Birokrasi baru mencapai angka 42,39, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebesar 2,42 dengan Kategori Rendah, Indeks Daya Saing Daerah sebesar 2,98, 6. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 1,94 dengan kategori Cukup, serta Indeks Inovasi Daerah sebesar 17,72 dengan predikat Kurang Inovatif.

(4) Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu ditingkatkan

Sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), secara keseluruhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 51.61 poin pada tahun 2021 menjadi 74,13 poin tahun 2023. Hal ini menunjukkan keseluruhan upaya dan kebijakan yang diimplementasikan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup. Namun demikian masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi seperti degradasi hutan, pengelolaan air yang lebih baik dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk pengelolaan lahan pertanian yang perlu dioptimalkan karena dikategorikan sudah melampaui daya dukung dan daya tampung.

(5) Stabilitas politik dan keamanan yang cenderung menurun.

Hal ini ditandai dengan tingginya angka kriminalitas (554 kasus dalam empat tahun terakhir), di mana 63,54 persen kasus kriminal terjadi di wilayah kerja Polsek Kei Kecil yang membawahi 3 (tiga) kecamatan di sekitar wilayah Ibu Kota Langgur.

(6) Rendahnya ketahanan sosial dan budaya yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hal ini ditandai dengan tergerusnya nilai-nilai budaya masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Tergambar dari Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2023 sebesar 21,79 persen masih lebih tinggi dibanding Kemiskinan Maluku (16,42%) dan Nasional (9,36%). Tingkat Kemiskinan Maluku Tenggara pada Tahun 2023 berada pada urutan ke-5 tertinggi di Provinsi Maluku dan masih lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku.

(7) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur

Hal ini ditandai dengan masih terbatasnya kapasitas infrastruktur, antara lain masalah konektivitas dan aksesibilitas (akses keterhubungan wilayah sebesar 71,12% dengan tingkat kemantapan jalan sebesar 41,63%), akses rumah layak huni (35,98% Rumah Tidak Layak Huni, Akses Air Minum 71,62% dan Akses Sanitasi 79,17%) dan kawasan permukiman (Kawasan Pemukiman Kumuh Watdek–Ohoijangs–Langgur dan Elat), fasilitas bangunan gedung (10 Kantor Pemerintah Daerah masih menumpang di bangunan lain), dan infrastruktur kawasan termasuk infrastruktur di wilayah perbatasan negara, di Pulau Kei Besar.

Selanjutnya diuraikan dengan pendekatan sebagai berikut.

3.1.1. Permasalahan Daerah pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.1.1.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat diukur dengan sejumlah aspek dan indikator. Aspek pembangunan manusia yang diukur dengan nilai indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 sebesar 67,57 masih berada di bawah IPM Provinsi Maluku sebesar 70,94 dan IPM Nasional sebesar 73,55.

Secara pemeringkatan, Tahun 2023, IPM Maluku Tenggara berada di posisi ke-5 tertinggi di antara 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Adapun pemeringkatan secara nasional, Tahun 2022, IPM Kab. Maluku Tenggara berada di peringkat 408 secara nasional di antara 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Indikator pembentuk IPM di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, laju pertumbuhan indikator pembentuk IPM yang meliputi, Usia Harapan, Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan secara keseluruhan menunjukkan tren pertumbuhan fluktuatif.

Terjadinya perlambatan pertumbuhan pada tahun tahun 2016 s.d 2021, selain dipengaruhi oleh faktor eksternal (Covid-19, perang dagang internasional, kebijakan pemerintah pusat dan perubahan iklim), tetapi juga berakitan dengan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat yang harus dapat lebih ditingkatkan.

Kemiskinan masih menjadi momok bagi kesejahteraan masyarakat di Maluku Tenggara. Meskipun tren kemiskinan mampu ditekan dari posisi 36,75 persen di Tahun 2005, turun menjadi 21,19 persen tahun 2022 dan sedikit meningkat di Tahun 2023 menjadi 21,79 persen. Namun angka tersebut masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan kemiskinan Provinsi Maluku sebesar 16,42 persen di tahun 2023 maupun kemiskinan nasional sebesar 9,36 persen di tahun 2023.

Menurut BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 sebanyak 22.020 jiwa. Perbandingan dengan garis kemiskinan, maka di tahun 2023, terdapat 22.020 jiwa masyarakat Maluku Tenggara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang disterakan dengan Rp669.140,00 per bulan.

Dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 21.470 jiwa, maka Maluku Tenggara berkontribusi bagi kemiskinan Provinsi Maluku sebesar 7,21 persen. Secara peringkat, Maluku Tenggara berada di posisi ke-8 penyumbang terbesar kemiskinan Provinsi Maluku di antara 11 kabupaten dan kota.

Tingkat pengangguran masih menjadi masalah serius yang harus dihadapi oleh Kabupaten Maluku Tenggara. Tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 5,73 persen. Jumlah Angkatan Kerja yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan sebanyak 3.301 jiwa. Meskipun TPT Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 Lebih rendah dibanding TPT Maluku (6,31%), namun masih berada di urutan keempat, TPT Tertinggi dibanding 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. TPT Maluku Tenggara Tahun 2023 juga masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku.

Terhadap permasalahan pengangguran ini, maka upaya mendorong peningkatan kapasitas, kompetensi dan keterampilan pencari kerja harus menjadi perhatian, termasuk upaya mendorong akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang perlu lebih ditingkatkan. Di sisi

lainnya, upaya memperluas lapangan kerja perlu didorong dengan peningkatan investasi serta pengelolaan potensi sumber daya alam yang lebih berorientasi industri.

3.1.1.2. Permasalahan Daerah pada Kesejahteraan Sosial Budaya

Permasalahan kesejahteraan sosial budaya berkaitan dengan upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup keluarga. Dilaksanakan melalui upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengarusutamaan gender, pembangunan kepemudaan, serta pembangunan kebudayaan. Isu-isu pembangunan tersebut, juga berkaitan dengan tantangan serta dinamika pertumbuhan penduduk yang diproyeksikan untuk 20 tahun kedepan.

Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara diproyeksikan mencapai 151.719 jiwa pada tahun 2045. Terjadi kenaikan sebesar 27.520 jiwa dibanding tahun 2022. Kenaikan jumlah penduduk ini menjadi tantangan tersendiri dalam kaitan dengan upaya mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan keluarga, kesetaraan gender, pembangunan kepemudaan serta pembangunan kebudayaan.

Upaya besar dalam rangka menciptakan penduduk berkualitas menuju Indonesia emas, masih diperhadapkan dengan sejumlah permasalahan pembangunan sosial, yaitu: akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, masih minimnya lapangan pekerjaan, serta ketahanan sosial masyarakat yang perlu ditingkatkan dalam menghadapi perkembangan global.

Dalam hal peningkatan kualitas SDM, terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan, masih menjadi permasalahan. Sebaran fasilitas pelayanan yang tidak merata, kesulitan akses, kurangnya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, serta terbatasnya kapasitas sarana prasarana penunjang pelayanan adalah permasalahan mendasar yang harus ditangani.

Kualitas hidup keluarga masih perlu ditingkatkan. Selain indikator pembentukan Indeks Kualitas Keluarga, perlunya peningkatan kualitas hidup keluarga juga ditunjukkan dengan masih tingginya prevalensi stunting tahun 2023 sebesar 16,05 persen, pengendalian penduduk yang belum optimal, serta pembangunan kesetaraan gender yang masih perlu ditingkatkan.

3.1.2. Permasalahan Daerah pada Aspek Daya Saing

3.1.2.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Salah satu permasalahan konkret rendahnya daya saing daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah rendahnya daya saing ekonomi daerah. Rendahnya investasi merupakan kendala utama masih rendahnya daya saing ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh antara lain, kondisi kamtibmas yang masih sering tidak kondusif, persoalan legalitas lahan, masih sering terjadi konflik lahan, baik antar warga maupun antara warga dengan pemerintah. Selain itu, akibat lain dari rendahnya investasi adalah, pengelolaan potensi masih dilakukan secara tradisional, belum ada hilirisasi maupun industrialisasi. Menggunakan sarana dan prasarana sederhana, minim penggunaan teknologi, serta manajemen usaha dan aspek pemasaran yang tidak tertata baik.

Rendahnya daya saing ekonomi juga dipengaruhi oleh masih terjadinya ketimpangan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pelayanan perekonomian masih terpusat di wilayah perkotaan. Wilayah perdesaan belum mengalami perkembangan dari sisi ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang lebih terfokus di wilayah perkotaan menyebabkan daerah perdesaan tertinggal dalam mengakses peluang ekonomi. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi cenderung tidak merata di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara.

Pengelolaan potensi pariwisata yang menjadi salah satu potensi unggulan di Kabupaten Maluku Tenggara masih dijalankan secara tradisional. Investasi di sektor ini masih sangat rendah, yang mengakibatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih berada di kisaran 5 persen.

Di sisi lain, pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara (Kepulauan Kei), juga terkendala masalah kebijakan. Arah kebijakan sektor pariwisata dari pemerintah dan provinsi, belum mengakomodir Kabupaten Maluku Tenggara masuk sebagai daerah prioritas untuk pengembangan pariwisata.

Sektor potensial perikanan yang terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya belum secara optimal memberikan dampak bagi meningkatnya daya saing daerah. Pengelolaan perikanan tangkap oleh nelayan kecil dilaksanakan untuk memenuhi konsumsi lokal, dan sebagian kecil dipasarkan di perusahaan perikanan serta Pelabuhan perikanan dengan harga jual yang rendah.

Potensi perikanan budidaya adalah rumput laut, pengelolaan skala rumah tangga dengan pemasaran melalui pengumpul, mengakibatkan harga jual di level nelayan sangat fluktuatif. Di sisi lainnya, karena produk yang dijual adalah produk mentah, maka tidak ada nilai tambah yang diperoleh, dan rantai ekonomi terputus sampai di level nelayan pembudidaya.

Potensi ekonomi di sektor perkebunan adalah tanaman kelapa. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki areal tanam dan areal produksi kelapa yang cukup besar di Pulau Kei Besar. Pengelolaannya belum mampu mendorong daya saing ekonomi daerah. Pengelolaan skala rumah tangga dengan produk olahan yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi rendah. Belum adanya industrialisasi terhadap pengelolaan produksi kelapa mengakibatkan tidak terjadi nilai tambah ekonomi yang signifikan serta memberikan dampak bagi daya saing ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2.2. Permasalahan Daerah pada Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Maluku Tenggara diperhadapkan dengan rendahnya akses dan kualitas pelayanan. Permasalahan akses sangat berhubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, aspek keterjangkauan, serta aspek partisipasi yang sangat berkaitan dengan kondisi perekonomian keluarga dan pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan meskipun sudah mampu didorong di sebagian besar wilayah Maluku Tenggara, namun masih terdapat pula sebagian wilayah desa yang belum memiliki akses yang baik terhadap sarana dan prasarana pelayanan pendidikan.

Aspek keterjangkauan tidak hanya berkaitan dengan kesulitan akses yang disebabkan rendahnya kapasitas infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas, tetapi juga berkaitan dengan akses informasi

dan telekomunikasi. Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan cakupan pelayanan jaringan juga masih menjadi kendala di beberapa wilayah, terlebih di Pulau Kei Besar.

Di sisi lain, ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas masih terbatas dan belum tersebar merata. Hal ini turut berkontribusi terhadap rendahnya kualitas pelayanan yang dapat ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat literasi dan numerasi. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.

Daya saing sumber daya manusia Kabupaten Maluku Tenggara juga sangat berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja terampil dan berkompoten yang dapat diterima pasar kerja. Terjadinya tren kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Maluku Tenggara selain disebabkan oleh rendahnya lapangan kerja, juga dipengaruhi oleh karena tenaga kerja tersedia tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan pada pasar kerja. Hal ini tergambar dari tingkat partisipasi Angkatan kerja yang pada tahun 2023 hanya mencapai 43,42 persen.

Kurangnya pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar menyebabkan banyak lulusan menganggur atau bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang rendah. Olehnya itu, upaya strategis untuk meningkatkan kualitas, keterampilan dan kompetensi tenaga kerja menjadi syarat penting untuk mendorong daya saing sumber daya manusia ke depan.

Tantangan lainnya dalam upaya mendorong peningkatan daya saing sumber daya manusia adalah layanan akses kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih terbatas, terutama di wilayah perdesaan. Terbatasnya fasilitas kesehatan yang memadai, ketersediaan tenaga kesehatan yang tidak merata, serta kesulitan akses karena kondisi geografis wilayah dan terbatasnya infrastruktur, menjadi permasalahan utama pelayanan kesehatan belum optimal.

3.1.2.3. Permasalahan Daerah pada Daya Saing Infrastruktur Wilayah

Rendahnya kapasitas infrastruktur wilayah menjadi salah satu penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan dan pelayanan publik yang belum optimal. Infrastruktur juga menjadi prasyarat wajib bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerataan ekonomi wilayah hanya dapat terwujud jika persebaran infrastruktur dengan kapasitas yang baik merata di seluruh wilayah.

Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan kondisi dan karakteristik sebagai daerah kepulauan. Persoalan paling mendasar adalah konektivitas dan aksesibilitas. Keterhubungan wilayah antardesa dalam satu daratan, maupun keterhubungan antarpulau, menjadi permasalahan yang riil dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pemerataan.

Upaya untuk mendorong peningkatan pelayanan, maupun untuk mendorong pertumbuhan sangat terkendala dengan kondisi keterbatasan infrastruktur konektivitas. Indeks keterhubungan wilayah sampai tahun 2022 baru mencapai 82,18 persen. Artinya, dari total 190 Desa/Ohoi, masih terdapat 34 Desa/Ohoi yang belum memiliki akses keterhubungan yang baik. Adapun dari jumlah Desa/Ohoi terhubung, masih terdapat pula beberapa kekurangan, antara lain kondisi kemantapan jalan yang masih berada di angka 44,84 persen.

Di samping itu, kebutuhan infrastruktur wilayah yang berkaitan dengan upaya menghapus kantong-kantong kemiskinan, antara lain berkaitan dengan infrastruktur rumah, kawasan permukiman dan

kawasan kumuh, infrastruktur air bersih dan sanitasi, infrastruktur listrik serta jaringan telekomunikasi, belum tersebar secara merata.

Permasalahan infrastruktur lainnya yang masih terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara adalah rendahnya kapasitas infrastruktur bangunan dan gedung pemerintah daerah. Masih terdapat sejumlah Kantor Pemerintah Daerah yang tidak memiliki bangunan gedung kantor. Termasuk pula gedung kantor perangkat daerah yang rusak termakan usia. Kebutuhan terbesar yaitu, penyelesaian gedung Kantor Bupati Maluku Tenggara.

3.1.2.4. Permasalahan Daerah pada Daya Saing Iklim Investasi

Rendahnya investasi adalah salah satu permasalahan utama yang menyebabkan masih tingginya angka pengangguran, pendapatan masyarakat rendah, pengelolaan potensi sumber daya alam tidak optimal, serta pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat. Permasalahan umum rendahnya investasi di Kabupaten Maluku Tenggara antara lain berkaitan dengan belum optimalnya regulasi dan kepastian terhadap aspek ruang dan lahan.

Persoalan kepemilikan lahan yang belum jelas, mengakibatkan masih terjadinya konflik dan sengketa lahan. Selain itu, belum tersedianya dokumen tata ruang dengan cakupan sampai rencana detail mengakibatkan belum adanya kepastian terhadap pengelolaan ruang.

Iklim investasi yang terus didorong dengan sejumlah paket kebijakan kemudahan investasi, perlu juga didukung dengan kesiapan sumber daya manusia. Sumber daya manusia bukan hanya tenaga kerja termampil untuk mendukung investasi, tetapi juga sumber daya manusia yang mampu mendorong meningkatnya modal sosial masyarakat.

Gangguan kamtibmas masih sering terjadi. Konflik sosial antarwarga, antardesa maupun antarkelompok pemuda masih menjadi ancaman tersendiri bagi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

3.1.3. Aspek Pelayanan Umum sesuai Urusan dan Bidang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Rendahnya Akses dan Kualitas pelayanan pendidikan, hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan:

- (1) Partisipasi pendidikan belum optimal, hal-hal yang berpengaruh antara lain:
 - a. Sarana dan Prasarana Paud, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal Masih Kurang Memadai dan Kurang Merata;
 - b. Masalah ekonomi menyebabkan anak usia sekolah dari keluarga miskin kesulitan mengakses pendidikan;
 - c. Masih terjadi kasus putus sekolah;
 - d. Rendahnya motivasi dan kesadaran orang tua tentang urgensi pendidikan bagi anak;
 - e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendorong peningkatan partisipasi pendidikan;

- f. Akses sulit menuju lokasi sekolah, menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan di beberapa wilayah.
- (2) Kualitas pendidikan rendah, ini ditunjukkan dari nilai asesmen dan rata-rata nilai kelulusan yang masih rendah, termasuk angka literasi dan numerasi yang belum mencapai standar. hal-hal yang berpengaruh antara lain:
- a. Distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum merata;
 - b. Terdapat Tenaga Pendidik di satuan Paud, SD, SMP dan Non Formal yang belum bersertifikat serta dengan kualitas dan kualifikasi yang sesuai;
 - c. Satuan Paud, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal Belum Terakreditasi Seluruhnya atau Belum Sesuai Standar;
 - d. Penerapan Kurikulum Lokal Belum Optimal, hal-hal yang berpengaruh antara lain karena belum tersedia kurikulum lokal dan terbatasnya pengajar kurikulum lokal berkompeten.
- (3) Manajemen dan Tata Kelola, persoalan lemahnya manajemen di lingkungan sekolah disebabkan antara lain:
- a. Tenaga Kependidikan yang terbatas di sekolah
 - b. Penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah swasta yang relatif belum mandiri. Baik dari sisi tenaga pengajar maupun dari sisi penganggaran.
- (4) Literasi Masyarakat Rendah, hal-hal yang berpengaruh antara lain:
- a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan, terutama di wilayah desa dan perdesaan;
 - b. Minat dan daya baca masyarakat rendah, hal ini tergambar dari kurangnya jumlah anggota perpustakaan;
 - c. Cakupan pelayanan perpustakaan terbatas, salah satunya disebabkan tenaga perpustakaan yang terbatas;
 - d. Belum tersedia perpustakaan digital daerah;
 - e. Terbatasnya akses terhadap bahan bacaan berkualitas, termasuk dalam hal ini terbatasnya koleksi bahan bacaan.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, hal ini tergambar dari:

- (1) Belum Optimalnya pelayanan ibu hamil dan melahirkan, disebabkan oleh:
- a. Masih ada Ibu Hamil yang tidak melakukan Kunjungan K4 secara teratur dan lengkap;
 - b. Belum semua Persalinan ditangani tenaga kesehatan;
 - c. Kesulitan akses menuju Fasyankes;
 - d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan kelahiran di Fasyankes;
- (2) Belum Optimalnya pelayanan balita, disebabkan oleh:
- a. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap masih terbatas
 - b. Perawatan Balita yang tidak memenuhi standar pelayanan

- c. Rendahnya pemahaman orang tua
 - d. Keterbatasan sarana dan prasarana sanitasi layak rumah tangga
- (3) Belum Optimalnya pelayanan Gizi masyarakat, disebabkan oleh:
- a. Kasus Gizi Buruk dan Gizi Kurang masih terjadi karena pola konsumsi masyarakat yang kurang higienis
 - b. Kurangnya pengawasan terhadap produksi, distribusi dan peredaran obat dan makanan layak konsumsi
 - c. Rendahnya aspek pencegahan dan pendampingan terhadap balita rentan dan suspek
- (4) Belum optimalnya pelayanan untuk pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, disebabkan oleh:
- a. Kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat;
 - b. Kurangnya pemahaman dan informasi masyarakat terhadap ancaman penyakit;
- (5) Belum Maksimalnya Pengelolaan Fasilitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat, disebabkan oleh:
- a. Terjadi kerusakan bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu;
 - b. Obat, vaksin, bahan habis pakai dan perbekalan yang belum terdistribusi merata;
 - c. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan fasyankes masih terbatas dan tidak merata;
 - d. Sarana dan prasarana operasional pelayanan mengalami penurunan kualitas dan rusak karena termakan usia dan minim pemeliharaan;
 - e. Standar akreditasi puskesmas belum seluruhnya terpenuhi.
- (6) Kualitas sumberdaya kesehatan terbatas dan tidak merata, disebabkan oleh terbatasnya dokter dan tenaga kesehatan lainnya di Fasyankes, terbatasnya tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi memadai dan distribusi tenaga kesehatan belum merata.
- (7) Peran Serta Masyarakat dalam Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Belum Maksimal, disebabkan oleh: kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat; kurangnya kesadaran masyarakat dan masih ada warga yang buang air besar sembarangan.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kapasitas maupun kualitas Infrastruktur Dasar Belum Tersedia Merata, hal ini ditunjukkan dengan beberapa aspek pelayanan dasar infrastruktur yang belum tersedia secara memadai:

- (1) Cakupan pelayanan Air Bersih Layak untuk masyarakat masih rendah, disebabkan oleh, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) belum tersedia di beberapa lokasi, Lokasi sumber air jauh dari permukiman dan Terdapat SPAM yang tidak lagi berfungsi.
- (2) Pelayanan Perumda Tirta Evav Sejahtera sebagai pemasok utama Air Bersih di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya, perlu ditingkatkan. Kondisi jaringan pipa yang sudah termakan usia, perlu untuk diperbarui.

- (3) Cakupan pelayanan sanitasi masyarakat masih rendah, disebabkan oleh pengelolaan limbah rumah tangga belum memadai, masih terdapat rumah warga yang belum memiliki akses sanitasi layak dan terbatasnya IPAL di lingkungan permukiman, maupun di fasilitas publik.
- (4) Rendahnya Kapasitas Infrastruktur Konektivitas dan Aksesibilitas, ditandai dengan Indeks Keterhubungan Wilayah masih di bawah 85 persen. Masih ada wilayah yang belum terhubung Jalan dan Jembatan dan Rendahnya kondisi kemantapan jalan. Beberapa permasalahan mendasar antara lain:
 - a. Kesulitan akses karena kondisi alam, serta keterbatasan material di Pulau Kei Besar;
 - b. Terbatasnya anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan;
 - c. Kualitas jalan menurun karena struktur tanah yang tidak stabil, serta kondisi jalan yang termakan usia;
 - d. Ruas jalan belum disertai fasilitas dan bangunan pelengkap.
- (5) Rendahnya kapasitas infrastruktur bangunan dan gedung, ditandai dengan bangunan gedung untuk pelayanan perkantoran belum tersedia secara baik serta rendahnya kapasitas bangunan fasilitas publik, beberapa permasalahan mendasar antara lain
 - a. Pembangunan Gedung Kantor Bupati Maluku Tenggara belum rampung;
 - b. Masih terdapat sejumlah OPD yang belum memiliki gedung kantor;
 - c. Beberapa Gedung Kantor Pemerintah Daerah sudah mengalami kerusakan karena termakan usia;
 - d. Fasilitas Publik yang ada mengalami penurunan kualitas karena kurangnya perawatan/pemeliharaan;
 - e. Belum terpenuhinya kebutuhan untuk penyediaan ruang terbuka publik.
- (6) Belum Optimalnya Pelayanan Tata Ruang Wilayah dan Penatagunaan Tanah untuk Pembangunan, ditandai dengan masih terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang, yang disebabkan oleh belum tersedia dokumen rencana detil dan rencana rinci tata ruang, dokumen tata ruang yang ada belum mampu memberikan arah yang jelas terhadap fungsi ruang, serta pemberian Izin atas pemanfaatan ruang kurang memperhatikan aspek ketaatan terhadap aturan tata ruang.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Cakupan Rumah Layak Huni masih rendah, kawasan permukiman minim prasarana sarana utilitas umum (PSU), serta masih terdapat kawasan kumuh perkotaan, beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain: masih terdapat kerusakan rumah warga korban bencana alam dan/atau bencana sosial, rendahnya partisipasi masyarakat dalam ikut mendorong penanggulangan rumah tidak layak huni, terbatasnya PSU di lingkungan permukiman, serta masih terdapat kawasan permukiman kumuh di Wilayah Kota Langgur dan Kota Elat yang disebabkan oleh keengganan warga untuk direlokasi maupun terlibat dalam proses revitalisasi kawasan.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- (1) Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Penanggulangan Bencana masih perlu ditingkatkan. Hal ditunjukkan dengan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang masih sering terjadi, disebabkan antara lain karena pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pemuda belum memadai, peran dan fungsi linmas belum dioptimalkan, masih banyak warga/pemuda mengonsumsi minuman keras serta kebijakan penegakkan peraturan daerah masih rendah.
- (2) Rendahnya kapasitas daerah dalam pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana, disebabkan antara lain oleh rendahnya kapasitas dan pemahaman warga terhadap pencegahan maupun mitigasi bencana, rendahnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam hal pencegahan bencana dan rendahnya kapasitas infrastruktur pengamanan dan pengendali ancaman bencana.
- (3) Rendahnya Mitigasi dan kesadaran warga terhadap potensi kebakaran serta tingkat pelayanan kebakaran yang perlu dioptimalkan, beberapa hal yang masih menjadi permasalahan adalah kurangnya sosialisasi mengakibatkan rendahnya pemahaman dan kesadaran warga terhadap ancaman/potensi kebakaran, kompetensi SDM pemadam kebakaran masih rendah serta masih rendahnya kapasitas sarana dan prasarana fasilitas pelayanan bencana kebakaran.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Belum Optimalnya Cakupan Pelayanan Sosial, Rehabilitasi dan Pemberdayaan masyarakat miskin dan PMKS, beberapa permasalahan mendasar antara lain:

- (1) Cakupan perlindungan sosial belum optimal, dimana masih terdapat warga miskin yang belum terdata perlindungan sosial;
- (2) Pelayanan Sosial PMKS Belum Optimal, fasilitasi dan pelayanan PMKS belum menyentuh seluruh PMKS yang ada.
- (3) Data Keluarga Miskin dan PMKS kurang andal, perbedaan data kemiskinan dan penduduk miskin antarprogram, antarsektor dan antar lembaga masih terjadi sehingga masih terjadi salah sasaran dalam intervensi, termasuk belum tersedianya data dasar kemiskinan terpadu Kabupaten Maluku Tenggara
- (4) Pemberdayaan Ekonomi bagi PMKS belum berorientasi penumbuhan wirausaha. Pemberdayaan Sosial masih bersifat penyaluran bantuan semata. Belum ada konsep pendampingan, monitoring-evaluasi dan pengawasan berkala.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**7) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Tingginya Angka Pengangguran, disebabkan oleh:

- (1) Kualifikasi maupun keterampilan para pencari kerja belum menjawab kebutuhan pasar kerja, menyebabkan Partisipasi angkatan kerja rendah;
- (2) Cakupan Informasi Pasar Kerja rendah serta belum mampu diakses secara baik oleh para pencari kerja;

- (3) Perlu upaya peningkatan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan bidang pekerjaan yang banyak dicari di daerah;
- (4) Belum tersedia fasilitas pelatihan kerja.

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum Optimal, hal ini ditandai dengan beberapa permasalahan yang masih terjadi, yaitu:

- (1) Pengarusutamaan Gender Belum dilaksanakan secara optimal, beberapa hal yang mempengaruhi antara lain:
 - a. Sistem Data Gender Dan Anak Tidak Mutakhir
 - b. Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan
 - c. Masih terjadi pelanggaran terhadap Hak perempuan
 - d. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih rendah
 - e. Kurangnya Sosialisasi, Pendampingan dan jejaring kemitraan mengakibatkan Rendahnya Partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan
 - f. Cakupan pelayanan rendah karena masih bersifat menunggu laporan. Belum ada pos pengaduan di wilayah kecamatan
- (2) Masih Rendahnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan, hal yang mempengaruhi adalah belum tersedianya kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- (3) Maluku Tenggara belum termasuk dalam Kategori Daerah Ramah Anak, beberapa hal yang mempengaruhi antara lain:
 - a. Belum adanya jejaring kemitraan mengakibatkan rendahnya Partisipasi dan keterlibatan stakeholder dalam rangka perwujudan daerah layak anak
 - b. Regulasi terkait Daerah Layak Anak belum tersedia
 - c. Belum ada kelembagaan layak anak di daerah

9) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Rendahnya Ketahanan Pangan, beberapa permasalahan mendasar antara lain:

- (1) Ketergantungan Pangan yang berasal dari Luar daerah cukup tinggi, disebabkan oleh kurangnya produksi pangan lokal, rendahnya sosialisasi pemanfaatan dan konsumsi pangan lokal, masih rendahnya diversifikasi olahan pangan lokal, dan rendahnya kesadaran warga masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan guna budidaya tanaman pangan.
- (2) Pangan terjangkau, murah, aman, dan bermutu belum tersedia secara merata, disebabkan oleh produksi dan distribusi pangan terbatas, kecukupan gizi masyarakat belum optimal, pengawasan keamanan pangan belum dilakukan secara rutin, dan sistem logistik pangan masih terpusat di wilayah perkotaan;
- (3) Indeks Kerawanan Pangan Masih Cukup Tinggi, disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan pangan di wilayah ohoi, belum ada Kebijakan Pengelolaan Cadangan

Pangan di daerah, serta belum ada upaya konkret membangun kolaborasi lintas sektor untuk penanganan kerawanan pangan.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Masih terjadi masalah pertanian dalam pelaksanaan pembangunan, disebabkan oleh terdapat tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat serta rendahnya koordinasi perencanaan kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan fisik termasuk kurangnya sosialisasi aturan pemanfaatan tanah untuk pembangunan kepada masyarakat.

11) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Rendahnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup, hal ini ditandai dengan beberapa permasalahan antara lain:

- (1) Pengelolaan Persampahan Belum Optimal, disebabkan oleh: terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, kurangnya kesadaran warga dalam upaya menjaga kualitas lingkungan, cakupan pelayanan sampah masih terpusat di ibukota langgur dan masih rendahnya pengelolaan sampah di Kei Besar;
- (2) Kualitas Lingkungan Hidup Cenderung Menurun, disebabkan oleh pembangunan yang tidak berorientasi terhadap lingkungan, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, masih terjadi penambangan pohon yang meskipun dalam skala kecil namun dikhawatirkan berdampak pada wilayah tangkapan air, kerusakan lahan akibat penambangan galian c yang tidak ramah lingkungan, terbatasnya ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik dan kurangnya sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam program perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- (3) Rendahnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup disebabkan oleh kurangnya pelibatan dan jejaring mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

12) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- (1) Pelayanan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belum Optimal, ditandai dengan cakupan pelayanan adminduk capil belum mencapai 100 persen. Beberapa permasalahan mendasar antara lain, masih rendahnya minat dan kesadaran warga dalam pelaporan peristiwa sipil seperti pelaporan kematian, perkawinan dan kelahiran serta peristiwa kependudukan seperti pindah datang penduduk, termasuk lemahnya koordinasi lintas sektor dalam rangka mendukung kinerja pencatatan sipil yang andal dan berkualitas.
- (2) Pelayanan Adminduk dan Capil perlu ditingkatkan melalui pelayanan digital, yang memungkinkan cakupan pelayanan semakin luas dan memberi kemudahan warga mengakses pelayanan.

13) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa belum memberikan dampak bagi akselerasi pembangunan guna kemandirian desa, hal ini ditandai dengan masih rendahnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan desa. Hal ini disebabkan oleh:

- (1) Rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Ohoi;
- (2) APBDes belum berorientasi pada pemecahan masalah riil di Desa/Ohoi;

- (3) Kurangnya pendampingan dalam rangka integrasi kebijakan pembangunan Ohoi dengan kebijakan pembangunan daerah;
- (4) Pengelolaan Badan Usaha Milik Ohoi (Bumo) belum optimal.

14) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera Berkualitas Masih Perlu ditingkatkan. Beberapa permasalahan mendasar antara lain:

- (1) Pengendalian Kelahiran pada keluarga Prasejahtera Belum Optimal, disebabkan oleh:
 - a. Terbatasnya Cakupan Layanan Pemenuhan KB, mengakibatkan angka Unmeed Need masih tinggi
 - b. Rendahnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mengakibatkan tingginya angka *DO (Drop Out)* peserta KB
 - c. Cakupan pelayanan KB masih terbatas mengakibatkan angka *TFR (Total Fertility Rate)* masih tinggi
- (2) Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Belum Optimal, disebabkan oleh:
 - a. Kurangnya sosialisasi, rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat mengakibatkan kejadian pernikahan dini masih terjadi
 - b. Sinergi dan kolaborasi serta kemitraan untuk pelayanan kesehatan reproduksi belum terbangun.
 - c. Terbatasnya tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) umum dan medis (kebidanan), serta masih rendahnya kompetensi SDM PLKB;

15) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pelayanan Transportasi Belum Optimal, biaya tinggi, cakupan terbatas dan aspek keselamatan yang masih perlu ditingkatkan, hal ini ditandai dengan:

- (1) Masih terjadi kecelakaan transportasi perairan, disebabkan oleh Kurangnya pengawasan dan uji kelaikan serta Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta mengawasi dan mengantisipasi potensi kejadian kecelakaan;
- (2) Angka kecelakaan transportasi angkutan darat yang cukup tinggi, disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan uji kelaikan, rendahnya kapasitas dan kelengkapan rambu lalulintas, dan rendahnya kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan dan rambu-rambu lalulintas;
- (3) Pelayanan Transportasi yang Kurang Memadai, disebabkan oleh:
 - a. Belum tersedia sistem jaringan Konektivitas Antarmoda
 - b. Jalur trayek belum diatur secara optimal untuk meningkatkan cakupan pelayanan angkutan
 - c. Terbatasnya moda darat pelayanan antarhoi di Pulau Kei Besar sebagai sarana menekan biaya transportasi tinggi
 - d. Belum tersedia terminal yang memadai, baik di Ibukota Langgur, Elat maupun Ibukota kecamatan yang menjadi simpul dan jaringan angkutan darat
 - e. Pelabuhan penumpang dan dermaga penyeberangan belum tersedia dengan kualitas yang baik di simpul-simpul penyeberangan

16) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Belum dilaksanakan secara baik, ditunjukkan dengan belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik dan pemerintahan, ini disebabkan oleh:

- (1) Belum adanya regulasi skala daerah yang mengatur penerapan Digitalisasi Pelayanan;
- (2) Terbatasnya Aparatur yang berkompeten dalam pengelolaan sistem informasi;
- (3) Belum adanya sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi untuk berbagai jenis pelayanan;
- (4) Kebutuhan sarana, prasarana dan infrastruktur pelayanan digital yang belum memadai.

17) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

- (1) Rendahnya Pelayanan Pembinaan Koperasi, hal ini dipengaruhi oleh lemahnya aspek kelembagaan koperasi disebabkan, terbatasnya SDM koperasi berkompeten, terbatasnya SDM pengawas koperasi, kinerja pengelolaan dan manajemen koperasi belum optimal, yang mengakibatkan pertumbuhan koperasi menjadi lambat.
- (2) Pengelolaan dan Pelayanan UMKM Belum Optimal, hal ini dipengaruhi oleh
 - a. Manajemen usaha mikro masih rendah;
 - b. Ketergantungan modal usaha dari pemerintah masih tinggi;
 - c. Askes modal usaha mikro masih terbatas;
 - d. Kurang Maksimalnya Promosi Dan Pemasaran Produk Lokal UMKM;
 - e. Pemanfaatan media informasi dan teknologi belum maksimal;
 - f. Literasi keuangan rendah dan akses informasi lemah.

18) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Rendahnya Investasi di Daerah, disebabkan oleh kemudahan investasi masih rendah terutama pada aspek ruang dan lahan, iklim investasi dan penanaman modal belum kondusif, masih sering terjadi gangguan kemitras, belum tersedianya digitalisasi sistem perijinan yang terintegrasi dan belum tersedianya rencana investasi daerah;

19) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Pelayanan Kepemudaan dan Keolahragaan belum optimal, beberapa permasalahan mendasar antara lain:

- (1) Masih Rendahnya Kepeloporan Pemuda, disebabkan oleh kualitas kaderisasi pemuda rendah, masih tingginya perilaku berisiko pemuda, masih rendahnya pembinaan mental dan disiplin serta Pembentukan Karakter Pemuda serta kurangnya pembinaan dalam rangka mendorong wirausaha pemuda;
- (2) Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan Olahraga Prestasi belum optimal, disebabkan oleh pembinaan olahraga belum dilakukan secara rutin dan belum ada desain pengembangan olahraga daerah, fasilitas kompetisi olahraga masih terbatas, serta terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan;
- (3) Budaya hidup sehat dengan berolahraga belum tersosialisasi kepada masyarakat yang disebabkan kurangnya pembudayaan olahraga masyarakat.

20) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Data Statistik Sektorial Pemerintah Daerah belum menjadi referensi aktual untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah, hal ini turut disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah. Beberapa hal yang mempengaruhi antara lain:

- (1) Belum adanya kelembagaan pengelolaan statistik sektoral daerah,
- (2) Rendahnya pemahaman dan kepatuhan pelaporan data statistik sektoral melalui stau pintu pusat informasi dan statistik sektoral daerah;
- (3) Terbatasnya Aparatur berkompeten pengelola data statistik.

21) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Keamanan informasi publik masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten.

22) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Nilai dan kearifan lokal budaya Kei mengalami kemerosotan, hal ini dipengaruhi oleh Tergerusnya nilai-nilai budaya, prosesi dan aktivitas adat, serta beberapa permasalahan mendasar meliputi:

- (1) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Kebudayaan belum dilaksanakan secara optimal
- (2) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kesenian Tradisional belum dilaksanakan secara optimal;
- (3) Kurangnya sosialisasi dan revitalisasi budaya melalui pagelaran Prosesi adat budaya yang dikemas secara menarik
- (4) Kurangnya pelaksanaan pagelaran seni budaya yang melibatkan kelompok seni budaya masyarakat

23) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Belum optimalnya pelayanan perpustakaan daerah.

24) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja Pengelolaan Arsip Belum Optimal, ini disebabkan oleh belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip. Beberapa hal yang mempengaruhi adalah manajemen sistem kearsipan OPD belum terintegrasi, rendahnya kepatuhan penyelenggaraan kearsipan, kompetensi sumber daya kearsipan kurang optimal (kuantitas maupun kualitas), belum adanya sistem informasi arsip digital dan belum adanya pelayanan arsip publik dan masyarakat.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

25) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- (1) Pengelolaan potensi ekonomi riil dari sektor perikanan belum optimal mendorong naiknya pendapatan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh:
 - a. Rendahnya kapasitas sumberdaya manusia perikanan;
 - b. Rendahnya kapasitas kelembagaan nelayan;
 - c. Cakupan pemberdayaan berbasis kelembagaan nelayan belum menjangkau keluarga miskin;

- d. Kurangnya pengawasan, pembinaan, pelatihan dan pendampingan;
 - e. Rendahnya kapasitas kelembagaan petani;
 - f. Cakupan pemberdayaan berbasis kelembagaan petani belum menjangkau keluarga miskin;
 - g. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan sampai pasca panen;
 - h. Rendahnya kuantitas maupun kualitas SDM Pertanian.
- (2) Pengelolaan Potensi perikanan belum mampu mendorong ekonomi daerah, disebabkan oleh:
- a. Kurangnya infrastruktur perikanan,
 - b. belum Tersedianya Pangkalan Pendaratan Ikan
 - c. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia Perikanan
 - d. Rendahnya Investasi di sektor perikanan
 - e. Belum tersedia fasilitas pengelolaan hasil perikanan
 - f. Kurangnya pengawasan, pembinaan, pelatihan dan pendampingan
 - g. Fasilitasi Pemasaran Hasil Perikanan Belum Maksimal
- (3) Pengelolaan Potensi Budidaya Rumput Laut belum memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi daerah dan masyarakat, disebabkan oleh:
- a. Tingginya Fluktuasi harga jual rumput laut di level pembudidaya
 - b. Produksi menghasilkan bahan mentah yang bernilai ekonomi rendah
 - c. Belum tersedia fasilitas pengolahan pasca panen
 - d. Terbatasnya akses bibit unggul disebabkan tidak tersedianya kebun bibit
 - e. kurangnya penelitian dan pengembangan
 - f. Fasilitasi Pemasaran Hasil Budidaya Rumput Laut Belum Maksimal

26) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pengelolaan potensi pariwisata belum berdampak signifikan bagi perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat, maupun untuk secara optimal menjadi pendorong berkembangnya sektor riil lainnya. Permasalahan mendasar adalah pengelolaan pariwisata belum berorientasi industri, dengan konsep dan kemasan yang masih konvensional. Beberapa faktor penyebab antara lain:

- (1) Belum ada regulasi yang jelas mengenai konsep pengembangan pariwisata lokal daerah, termasuk kebijakan pengembangan pariwisata dalam konteks spasial. Dalam periode pelaksanaan RPJPD, sangat diperlukan penyusunan dan penetapan regulasi pengembangan obyek dan destinasi pariwisata.
- (2) Terbatasnya sarana dan prasarana destinasi, amenities belum memadai;
- (3) Masih rendahnya dukungan kelompok ekonomi kreatif, dengan atraksi wisata yang sangat terbatas;
- (4) Pengelolaan pariwisata belum terintegrasi;
- (5) Kesadaran masyarakat terhadap jasa pelayanan dan tata kelola objek wisata masih rendah, disebabkan rendahnya kualitas SDM Pariwisata;

- (6) Belum ada kebijakan makro terhadap jalur dan akses transportasi pariwisata, di kawasan timur Indonesia.

27) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pengelolaan Pertanian untuk mendorong produktivitas perlu ditingkatkan, beberapa permasalahan mendasar antara lain:

- (1) Adanya anomali iklim, bencana alam (kekeringan), serangan OPT dan turunnya kualitas lahan belum diikuti dengan teknologi yang memadai;
- (2) Kelembagaan petani kurang optimal, rendahnya regenerasi petani serta terbatasnya akses modal;
- (3) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan agropolitan (Klaster);
- (4) Daya saing produk pertanian relatif rendah (kualitas);
- (5) Fungsi penyuluhan cenderung menurun.

28) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pelayanan Perdagangan belum ramah konsumen, serta belum memberikan dampak ekonomi bagi daerah, beberapa permasalahan mendasar antara lain:

- (1) Perlindungan konsumen masih rendah, ditandai dengan ditemukannya penjualan barang kadaluarsa dan belum optimalnya pelaksanaan tera-tera ulang
- (2) Kurang maksimalnya pelaksanaan dan pengawasan metrologi ditandai dengan masih terdapat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang tidak standar
- (3) Kurang optimalnya koordinasi dan pengawasan ketersediaan barang kebutuhan pokok
- (4) Sarana distribusi perdagangan terbatas, belum terbangun pusat-pusat distribusi baru yang mendorong pertumbuhan wilayah di luar perkotaan. Terhadap hal ini, dapat dikembangkan platform marketplace yang mendukung distribusi perdagangan dan transaksi guna memangkas kendala transportasi warga.
- (5) Fasilitasi Pemasaran dalam rangka proteksi perdagangan produk lokal daerah dan UMKM belum memadai;
- (6) Maluku Tenggara belum menjadi pintu ekspor

29) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- (1) Belum adanya akselerasi pengelolaan Industri daerah, hal ini ditandai dengan aktivitas Industri masih berskala rumahan dengan manajemen pengelolaan konvensional, sektor potensial daerah belum diarahkan untuk pengelolaan skala industri;
- (2) Dalam konteks spasial, aktivitas industri belum diarahkan untuk pengembangan kawasan industri. Dalam jangka panjang, pengembangan kawasan industri perlu dilakukan guna pengelolaan terintegrasi yang mampu menekan biaya, memudahkan alur produksi dan termasuk kemudahan akses pasar.
- (3) Masih rendahnya kreativitas dan inovasi sektor perindustrian, komoditi industri lokal masih dalam bentuk bahan mentah dan bahan setengah jadi
- (4) Belum optimalnya pemanfaatan media informasi dan teknologi dalam upaya pengembangan industri daerah.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Pengoordinasian kebijakan daerah, pengoordinasian dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah belum efektif, hal ini disebabkan oleh:

- a. Efektifitas manajemen penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah belum didukung sepenuhnya dengan kualitas telaah berbagai alternatif kebijakan yang inovatif.
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah oleh perangkat daerah belum optimal meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan pelayanan public penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Rendahnya tingkat kepatuhan standarisasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Ketepatan waktu pembentukan produk hukum daerah dalam implementasi kebijakan kepala daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2) Sekretariat DPRD

Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD dan fasilitasi kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD belum optimal, hal ini disebabkan oleh:

- a. Sinergitas hubungan kemitraan pemerintahan daerah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) sedapat mungkin lebih harmonis.
- b. Ketepatan waktu pembahasan Ranperda yang akan ditetapkan menjadi Perda belum optimal.
- c. Kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD belum optimal mengakomodir pengadministrasian umum serta dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.
- d. Peningkatan kualitas DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi media penyaluran aspirasi demokrasi serta produk hukum berkualitas.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

(5) Perencanaan Pembangunan Daerah yang berimplikasi pada alokasi kebijakan anggaran belum optimal, disebabkan antara lain oleh:

- a. Usulan Riil Masyarakat dalam forum partisipasi belum menjadi substansi perumusan kebijakan
- b. Fungsi Pengendalian dan Asistensi Belum Optimal
- c. Koordinasi untuk Sinergi Perencanaan Lintas Sektor belum memadai
- d. Kualitas dan Kompetensi Aparatur Perencana belum merata

(6) Monitoring dan Evaluasi belum menjadi landasan konkret perumusan kebijakan, disebabkan antara lain oleh:

- a. Model Monitoring dan Evaluasi masih berorientasi pada capaian Output

- b. Data teknis dan capaian bidang urusan kurang termutakhir serta tidak tersedia sebagai bahan evaluasi

2) Keuangan

- (1) Kebijakan Anggaran Belum berdasar pada permasalahan, isu maupun prioritas daerah. Disebabkan oleh Pengalokasian anggaran belum konsisten dengan rumusan permasalahan, isu dan prioritas daerah serta masih terjadi penambahan belanja yang tidak sesuai atau tidak diakomodir di dalam dokumen perencanaan.
- (2) Kinerja Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Belum Memadai, disebabkan antara lain oleh:
 - a. Pentahapan pada proses pembahasan anggaran belum sesuai dengan jadwal dan mekanisme sesuai ketentuan
 - b. Target belanja dari sumber PAD ditetapkan jauh lebih tinggi dibanding kemampuan penyerapan PAD
 - c. Belum adanya pemahaman aparatur perencana keuangan yang seragam terhadap jenis dan fungsi rekening belanja
 - d. Masih terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan sumber dana dalam mekanisme pengelolaan kas daerah.
- (3) Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebabkan antara lain oleh Belum Optimalnya Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan BMD dan Sistem Informasi Pengelolaan BMD belum terimplementasi secara optimal.
- (4) Kinerja Pendapatan Asli Daerah rendah, disebabkan oleh:
 - a. Data Wajib Pajak dan Retribusi kurang andal, kurang mutakhir dan cenderung tidak valid.
 - b. Sistem Informasi Pajak dan Retribusi belum optimal dilaksanakan.
 - c. Rendahnya Pengawasan penarikan pajak dan retribusi daerah.
 - d. Belum ada sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi terhadap kewajiban pajak dan retribusi atas proyek fisik yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara.
 - e. Rendahnya penerimaan pajak pada sektor lainnya.
 - f. Aset Pemerintah Daerah belum dioptimalkan untuk mendorong peningkatan PAD
 - g. Belum adanya Badan Usaha Milik Daerah yang secara langsung mengatur dan mengelola hasil alam.

3) Kepegawaian

- (1) Rendahnya Profesionalitas ASN, disebabkan oleh Pemenuhan formasi jabatan belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan belum tersedianya SDM berkualitas yang berkompeten sesuai tuntutan jabatan;
- (2) Pengelolaan Data ASN Belum Optimal, disebabkan oleh Pelayanan Kepegawaian yang belum terintegrasi dan akuntabel;

4) Pendidikan dan Pelatihan

Rendahnya Kualitas ASN, disebabkan oleh Terbatasnya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Umum, Inti dan Pilihan serta terbatasnya Akses Pelatihan Fungsional.

5) Penelitian dan Pengembangan

- (1) Penelitian, Pengembangan dan Inovasi belum menjadi landasan perumusan kebijakan pembangunan, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kinerja penelitian dan pengembangan belum optimal, ini disebabkan oleh Kurangnya Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan berdasar isu dan potensi daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur peneliti belum terlaksana secara baik.
- (2) Rendahnya Inovasi Daerah, disebabkan oleh Inovasi belum secara optimal menjadi jawaban atas permasalahan riil, rendahnya pemanfaatan Iptek serta kebijakan penganggaran belum mampu didorong untuk pengembangan atau implementasi inovasi secara berkelanjutan.

6) Pengelolaan Perbatasan

Pertumbuhan Wilayah Perbatasan cenderung lambat, hal ini disebabkan oleh Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam rangka pengembangan wilayah perbatasan. Beberapa permasalahan mendasar antara lain:

- (1) Belum ada rencana yang jelas terhadap arah pengembangan wilayah perbatasan
- (2) Belum ada forum pembangunan wilayah perbatasan
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan belum mampu mendorong akselerasi pembangunan kawasan perbatasan
- (4) Kurangnya monitoring dan evaluasi

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pengawasan Belum Optimal, ditunjukkan dengan Tingkat Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP yang rendah sehingga masih perlu ditingkatkan serta Perbandingan APIP dengan obyek pengawasan jauh dari kondisi ideal. Selain itu, manajemen risiko belum diterapkan secara optimal, hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman aparatur terhadap urgensi penerapan manajemen risiko serta belum ada regulasi skala daerah untuk penerapan manajemen risiko.

7. Unsur Kewilayahan

Kecamatan

Pelayanan kecamatan belum mampu mendorong akselerasi pembangunan dan pemberdayaan di wilayah kerja kecamatan, hal ini dipengaruhi oleh:

- (1) Pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan ohoi perlu ditingkatkan;
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkup wilayah kerja kecamatan perlu ditingkatkan
- (3) Koordinasi dan konsolidasi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan perlu ditingkatkan.

8. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Belum Optimalnya upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan. Beberapa permasalahan strategis antara lain pengendalian, pengawasan dan deteksi dini gangguan kamtibmas belum optimal, potensi

gangguan cukup tinggi namun belum terlayani pembinaan kelembagaan pemuda serta rendahnya pemahaman dan pembelajaran politik masyarakat.

3.1.4. Permasalahan Daerah Jangka Panjang sesuai Analisa dalam KLHS

1. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

IKLH Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2021 adalah 51,61 dan tahun 2022 adalah 51,83. Tahun 2023 IKLH mengalami peningkatan yang pesat yaitu sebesar 74,13. Meskipun IKLH cenderung meningkat secara konsisten, namun potensi kerusakan ekosistem masih cukup tinggi. Kerusakan ekosistem terutama diakibatkan oleh penambangan liar (pasir, batu, tanah putih) dan penebangan liar. Di samping pula, masih terjadi praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (utamanya perikanan) yang tidak ramah lingkungan, eksploitatif, dan cenderung destruktif.

2. Kerawanan Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2023 sebesar 172,06, meningkat dari tahun 2020 sebesar 169. Naiknya IRB menunjukkan tingkat kerentanan yang meningkat karena kapasitas daerah yang cenderung turun. Potensi kerawanan bencana yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius adalah yang berkaitan dengan bencana kekeringan, tiupan angin kencang, bajir rob dan abrasi pantai, serta gempa bumi dan banjir bandang.

3. Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Kurang Memadai

Kapasitas infrastruktur wilayah masih kurang memadai. Infrastruktur Jalan dan jembatan masih menjadi relatif terbatas pada wilayah-wilayah tertentu yang belum terhubung jalan dengan kondisi yang baik. Sebagai daerah berciri kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara masih cukup terbatas dengan prasarana dan sarana transportasi perairan.

4. Rendahnya Kualitas SDM

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 sebesar 69,91 lebih rendah dari rata-rata IPM Provinsi Maluku sebesar 72,75 dan IPM Nasiona sebesar 74,40.

5. Kerentanan dan Kerawanan Pangan

Hasil analisa daya dukung dan daya tampung ketahanan pangan menunjukkan kondisi daya dukung dan daya tampung yang sudah terlampaui. Kategori telah terlampaui ini disebabkan oleh kurang maksimalnya nilai produktivitas di berbagai komoditas.

Hal-hal yang berpengaruh antara lain, kondisi lahan yang mengalami degradasi, rendahnya kapasitas infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian, terbatasnya cakupan jaringan pengairan dan irigasi, kurangnya penerapan teknologi dan inovasi pertanian, serta budaya pengelolaan SDA yang kurang ramah lingkungan.

6. Belum optimalnya pengelolaan ekonomi wilayah

Permasalahan ini ditinjau dari indikator pendapatan perKapita, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor ekonomi riil di wilayah.

7. Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, Tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara mencapai 21,79 persen. Meskipun sudah mampu ditekan dari angka 35,98 (2008), namun tingkat kemiskinan sebesar 21,79 persen masih jauh lebih tinggi dibanding tingkat

kemiskinan Provinsi Maluku (2023=16,42%), maupun tingkat kemiskinan nasional (2023=9,36%). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi masalah utama di Kabupaten Maluku Tenggara. TPT tahun 2023 sebesar 5,73 persen menunjukkan tren kenaikan TPT pasca Pandemi Covid-19 (2020).

3.2. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu Strategis memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

Isu strategis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara disusun dengan mengacu serta mempedomani Isu Strategis Daerah Provinsi Maluku dan Isu Strategis Lingkungan Hidup sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagai suatu kesatuan yang integral dengan Isu Strategis Nasional.

Tabel 3.1
Megatren Global, Isu Strategis Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Tahun 2025–2045

MEGATREN GLOBAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI MALUKU	ISU STRATEGIS JANGKA PANJANG KABUPATEN MALUKU TENGGARA
<p>Pertumbuhan Kelas Menengah Jumlah <i>middle</i> dan <i>upper income class</i> lebih dari 90%</p> <p>Demografi Global Penduduk dunia menjadi 9,45 milyar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%)</p> <p>Urbanisasi Dunia Penduduk perkotaan 65% dan peranana PDB 70%</p>	<p>Transformasi Sosial membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing</p>	<p>Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Terbatas transformasi pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang kompetitif</p>	<p>Kualitas Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing Terbatas Membangun manusia Maluku Tenggara yang sehat, cerdas dan berdaya saing, terampil dan berkompeten terhadap terhadap kebutuhan pasar kerja</p>
<p>Geopolitik dan Geoekonomi Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan baru</p> <p>Konstelasi perdagangan global Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun</p>			<p>Transformasi Ekonomi meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.</p>
		<p>IPTEKIN dan Riset Lemah Ekosistem riset, IPTEK dan inovasi yang lemah berakibat pada kurangnya hasil-hasil riset berkualitas dan aplikatif.</p>	

MEGATREN GLOBAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI MALUKU	ISU STRATEGIS JANGKA PANJANG KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	<p>Transformasi Tata Kelola membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.</p>	<p>Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah pembangunan infrastruktur layanan dasar termasuk pembangunan infrastruktur ketahanan bencana dan pengembangan literasi</p>	<p>Kapasitas Infrastruktur Wilayah Rendah Penyediaan sarana dan prasarana wilayah termasuk infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan guna memperkuat aksesibilitas dan konektivitas</p>
	<p>Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.</p>		
<p>Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan perebutan SDA</p>	<p>Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.</p>	<p>Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial memperkuat modal sosial untuk meningkatkan stabilitas kemandirian</p>	<p>Pelestarian Budaya untuk Peningkatan Modal Sosial Belum Optimal Pembangunan karakter dan modal sosial masyarakat, kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan peningkatan nilai-nilai kerukunan beragama</p>
<p>Perkembangan teknologi Teknologi berpotensi menggantikan 40% pekerjaan manusia</p>	<p>Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda</p>	<p>Kesenjangan Antar Wilayah Disparitas ekonomi antar kabupaten/kota, antara perkotaan dan perdesaan</p>	

MEGATREN GLOBAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS PROVINSI MALUKU	ISU STRATEGIS JANGKA PANJANG KABUPATEN MALUKU TENGGARA
	transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi		
Perubahan Iklim Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana	Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.	Risiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah Adaptasi perubahan iklim dengan turut mempertimbangkan risiko bencana diperlukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mengurangi kerentanan (mitigasi) dan meningkatkan kapasitas (kesiapsiagaan).	Ketahanan Ekologi, Risiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah Rendah Mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekologi,
Tata Kelola Keuangan Global Pergeseran kebijakan fiskal, CBDB dan Fintech	Kesinambungan Pembangunan mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan	Kemitraan Dalam Pembangunan Belum Optimal kerjasama kolaboratif dan inovatif	Tata Kelola Pemerintahan Daerah Belum Optimal Membangun birokrasi yang bersih, efektif, ramah dan cepat, pelayanan publik yang prima, regulasi yang adaptif.

3.2.1. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional dalam rencana pembangunan jangka panjang meliputi:

1. Transformasi Sosial

Isu ini bertujuan membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing

2. Transformasi Ekonomi

Isu ini bertujuan meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Transformasi Tata Kelola

Isu ini bertujuan membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Isu ini bertujuan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Isu ini bertujuan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

6. Pembagunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi

7. Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8. Kestinambungan Pembangunan

mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan

3.2.2. Isu Strategis Provinsi Maluku

Menghadapi dinamika pembangunan tahun 2025–2045, Provinsi Maluku perlu mengatasi permasalahan yang ada dengan strategi dan kebijakan yang tepat, isu – isu strategis harus menjadi fokus dalam upaya memanfaatkan potensi yang dimiliki dan menghadapi tantangan yang muncul sehingga Provinsi Maluku dapat mencapai perkembangan dan kemajuan yang berkelanjutan.

1. **Tingkat Perekonomian Daerah Rendah.** Perekonomian Maluku yang cenderung bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan menjadi tantangan dalam peningkatan ekonomi daerah dimana masyarakat hanya dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan ekonomi. Upaya pemerintah untuk mengatasi ketergantungan tersebut adalah melalui hilirisasi dan diversifikasi ekonomi, hal ini diperlukan untuk menciptakan nilai tambah dan ketahanan ekonomi.
2. **Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Terbatas.** Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui transformasi pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang kompetitif. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan melalui pengembangan pengelolaan sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
3. **Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah.** Kondisi daerah Maluku yang berciri kepulauan merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur layanan dasar selama kurun waktu 10 tahun terakhir hanya berfokus pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan minimnya pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar yang bersumber dari APBD maupun APBN. Kurangnya pendanaan dalam pembangunan juga berdampak pada kebijakan pembangunan infrastruktur digital khususnya di wilayah 3T di Provinsi Maluku. Untuk itu dalam tahapan pembangunan jangka panjang pemerataan pembangunan infrastruktur layanan dasar termasuk pembangunan infrastruktur ketahanan bencana dan pengembangan literasi digital melalui perluasan akses telekomunikasi menjadi bagian dari tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku.
4. **Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial.** Pendidikan dan kesadaran budaya menjadi bagian dalam pembangunan kebudayaan yang kuat dan berkelanjutan di Provinsi Maluku. penguatan kebudayaan dapat mencakup pengembangan kurikulum pendidikan yang memasukkan aspek budaya, pelatihan guru, dan program kesadaran budaya yang melibatkan masyarakat dan generasi muda. Permasalahan pembangunan budaya di Provinsi Maluku yang dihadapkan dengan masih diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam rangka mengembangkan nilai – nilai budaya lokal serta memperkuat modal sosial untuk meningkatkan stabilitas kemandirian merupakan tantangan kedepan untuk dapat diwujudkan dalam kebijakan pembangunan daerah yang adaptif dan berkelanjutan.
5. **Kesenjangan Antar Wilayah.** Bersamaan dengan percepatan pembangunan di Provinsi Maluku, perlu dilakukan pemerataan pembangunan karena masih terdapat ketimpangan antar wilayah tercermin dari perbedaan PDRB per Kapita antar kabupaten/kota. Disparitas ekonomi antar kabupaten/kota, antara perkotaan dan perdesaan turut menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar, peluang kerja dan kesejahteraan sosial. Pemerataan faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi perlu dilakukan. Percepatan pembangunan pada wilayah-wilayah yang relatif tertinggal diharapkan dapat mendorong konvergensi pembangunan antar wilayah.

6. **IPTEKIN dan Riset Lemah.** Produktivitas pemanfaatan sumber daya alam unggulan masih relatif rendah karena belum didukung teknologi, inovasi dan riset yang memadai serta sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas. Ekosistem riset, IPTEK dan inovasi yang lemah berakibat pada kurangnya hasil-hasil riset berkualitas dan aplikatif.
7. **Kemitraan Dalam Pembangunan Belum Optimal.** Kemitraan memungkinkan kesempatan baru untuk melakukan pembangunan dengan cara lebih baik dengan mengidentifikasi kualitas dan kompetensi masing-masing sektor dan menemukan mekanisme baru untuk kebaikan bersama. Dengan kemitraan dalam pembangunan melalui kerjasama kolaboratif dan inovatif dapat menghasilkan metode/inovasi dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan termasuk akses kepada sumber daya (teknis, manusia, pengetahuan, maupun anggaran). Terbangunnya jejaring kemitraan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, donor, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat binaan), akan menciptakan mekanisme yang lebih kaya akan kapasitas spesifik yang dapat disumbangkan atau diperankan oleh pihak-pihak yang terlibat.
8. **Risiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah.** Integrasi adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana merupakan tantangan yang perlu disinergikan dalam sistem pembangunan. Kebijakan adaptasi perubahan iklim dengan turut mempertimbangkan risiko bencana diperlukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mengurangi kerentanan (mitigasi) dan meningkatkan kapasitas (kesiapsiagaan).

3.2.3. Isu Strategis Kabupaten Maluku Tenggara

Atas dasar analisis permasalahan pembangunan daerah yang diuraikan sebelumnya, serta dengan mengacu dan mempedomani isu strategis Provinsi Maluku, maka dalam menghadapi dinamika pembangunan dan tantang perubahan lingkungan strategis Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2045, ditetapkan isu-isu strategis yang memuat kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang, sebagai berikut:

1. Kinerja Ekonomi dan Daya Saing Daerah Rendah

Rendahnya akselerasi pertumbuhan serta distribusi ekonomi yang tidak merata yang ditandai dengan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi yang rendah disebabkan produktivitas ekonomi belum memiliki nilai tambah dan kurangnya investasi. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mendorong pengelolaan potensi sektor unggulan melalui hilirisasi dan pengolahan pasca panen dengan pengembangan industri termasuk industri kreatif berikut aspek pemasaran yang didukung pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan riset;

2. Kualitas Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing Terbatas

Membangun manusia Maluku Tenggara yang sehat, cerdas dan berdaya saing, terampil dan berkompeten terhadap kebutuhan pasar kerja dengan kecakapan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengimplementasikan sistem perlindungan sosial yang

adaptif. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan pendapatan untuk mendorong daya beli masyarakat.

3. Kapasitas Infrastruktur Wilayah Rendah

Penyediaan sarana dan prasarana wilayah termasuk infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur antara lain konektivitas dan aksesibilitas, fasilitas bangunan gedung dan infrastruktur kawasan termasuk wilayah perbatasan negara di Pulau Kei besar guna memperkuat aksesibilitas dan konektivitas termasuk meningkatkan perluasan dan pemerataan cakupan layanan akses infrastruktur dasar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

4. Angka Kemiskinan Tinggi

Mengentaskan kemiskinan dengan fokus pada strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu: 1) meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya keluarga pra-sejahtera sesuai karakteristik dan potensi sumber daya yang dimiliki, pemberian bantuan sosial rehabilitasi serta pendampingan usaha; 2) mengurangi beban pengeluaran, dilaksanakan melalui penyaluran bantuan sosial pangan dan non pangan, pelayanan jaminan sosial dan kesehatan, bantuan subsidi pendidikan, serta dukungan penyediaan energi baru dan terbarukan untuk rumah tangga; 3) mengurangi kantong-kantong kemiskinan, dilakukan melalui pembangunan kawasan, berupa aksesibilitas dan konektivitas, akses rumah layak huni, air bersih dan sanitasi, listrik serta jaringan telekomunikasi, termasuk penanganan Kawasan kumuh. Penguatan data penduduk miskin yang valid dan terverifikasi secara berjenjang serta diperbarui secara berkala.

5. Pelestarian Budaya untuk Peningkatan Modal Sosial Belum Optimal

Ketahanan sosial, budaya dan ekologi mengalami penurunan yang ditandai dengan tergerusnya nilai-nilai budaya masyarakat serta rendahnya penerapan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Upaya pelestarian budaya untuk peningkatan modal sosial dilakukan melalui pembangunan karakter, penguatan modal sosial masyarakat, mengoptimalkan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan peningkatan nilai-nilai kerukunan beragama, serta melestarikan dan mempromosikan keragaman budaya, adat istiadat dan warisan sejarah Maluku untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Iptek dan Inovasi untuk Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal

Pemanfaatan dan penerapan Iptek serta Inovasi berbasis kelitbangan dalam rangka perwujudan e-government yang belum optimal menyebabkan pelayanan publik serta pertumbuhan dan distribusi perekonomian relatif rendah. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain, kapasitas infrastruktur digital, kualitas SDM dan literasi digital yang relatif rendah di masyarakat. Pemanfaatan Iptek dalam pelayanan publik dilakukan melalui pengembangan integrasi layanan berbasis sistem informasi dari Kabupaten sampai ke desa. Didukung dengan peningkatan SDM dan inovasi pelayanan sesuai kondisi dan perubahan lingkungan.

7. Ketahanan Ekologi, Risiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah Rendah

Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah, yang ditandai dengan belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana, baik dari aspek pencegahan, mitigasi, penanganan tanggap darurat dan korban, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan adalah penguatan kapasitas daerah untuk penanggulangan bencana, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Menjaga keseimbangan ekologi, melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, mengembangkan keberdayaan masyarakat (termasuk memperkuat kearifan lokal dan norma adat yang potensial dalam pembangunan berkelanjutan) dan menyiapkan landasan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim secara berkelanjutan.

8. Tata Kelola Pemerintahan Daerah Belum Optimal

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal, reformasi birokrasi belum terlaksana secara baik, khususnya pada aspek kelembagaan dan kualitas SDM. Termasuk upaya peningkatan yang perlu dilakukan pada aspek kualitas layanan, standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan aduan, penilaian kepuasan layanan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selain itu, aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu ditingkatkan mencakup, akuntabilitas kinerja, konsistensi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam konteks pelayanan langsung ke masyarakat tantangan geografis dan rentang kendali menyebabkan kinerja pelayanan publik kurang optimal, khususnya di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan. Hal ini turut dipengaruhi oleh keterbatasan akses pelayanan berbasis digital.

Atas dasar analisis permasalahan pembangunan daerah yang sudah diuraikan sebelumnya, serta dengan mengacu dan mempedomani isu strategis Provinsi Maluku, maka dalam menghadapi dinamika pembangunan dan tantang perubahan lingkungan strategis Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2045, ditetapkan isu-isu strategis yang memuat kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang, sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Mendorong pengelolaan potensi sektor unggulan melalui hilirisasi dan pengolahan pasca panen dengan pengembangan industri termasuk industri kreatif berikut aspek pemasaran yang didukung pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan riset;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia produktif dan berdaya saing

Membangun manusia Maluku Tenggara yang sehat, cerdas dan berdaya saing, terampil dan berkompeten terhadap terhadap kebutuhan pasar kerja dengan kecakapan pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta mengimplementasikan sistem perlindungan sosial yang adaptif.

3. Peningkatan kapasitas Infrastruktur Wilayah

Penyediaan sarana dan prasarana wilayah termasuk infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan guna memperkuat aksesibilitas dan konektivitas termasuk meningkatkan perluasan dan pemerataan cakupan layanan akses infrastruktur dasar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

4. Pengentasan kemiskinan

Mengentaskan kemiskinan dengan fokus pada strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu: 1) meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya keluarga pra-sejahtera sesuai karakteristik dan potensi sumber daya yang dimiliki, pemberian bantuan sosial rehabilitasi serta pendampingan usaha; 2) mengurangi beban pengeluaran, dilaksanakan melalui penyaluran bantuan sosial pangan dan non pangan, pelayanan jaminan sosial dan kesehatan, bantuan subsidi pendidikan, serta dukungan penyediaan energi baru dan terbarukan untuk rumah tangga; 3) mengurangi kantong-kantong kemiskinan, dilakukan melalui pembangunan Kawasan, berupa aksesibilitas dan konektivitas, akses rumah layak huni, air bersih dan sanitasi, listrik serta jaringan telekomunikasi, termasuk penanganan Kawasan kumuh. Penguatan data penduduk miskin yang valid dan terverifikasi secara berjenjang serta diperbarui secara berkala.

5. Pelestarian budaya untuk peningkatan modal sosial

Pembangunan karakter, penguatan modal sosial masyarakat, mengoptimalkan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan peningkatan nilai-nilai kerukunan beragama, serta melestarikan dan mempromosikan keragaman budaya, adat istiadat dan warisan sejarah Maluku untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Penguatan lptek dan Inovasi untuk pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi

Peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah akan lebih cepat terwujud apabila didorong dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan lptek dalam pelayanan publik dilakukan melalui pengembangan integrasi layanan berbasis sistem informasi dari Kabupaten sampai ke desa. Didukung dengan peningkatan SDM dan inovasi pelayanan sesuai kondisi dan perubahan lingkungan.

7. Peningkatan Ketahanan Ekologi, Risiko bencana, ancaman perubahan iklim dan kerentanan daya dukung wilayah.

Mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekologi, melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, mengembangkan keberdayaan masyarakat (termasuk memperkuat kearifan lokal dan norma adat yang potensial dalam pembangunan berkelanjutan) dan menyiapkan landasan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim secara berkelanjutan.

8. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Membangun birokrasi yang bersih, efektif, ramah dan cepat, pelayanan publik yang prima, regulasi yang adaptif. Pengembangan inovasi dan perluasan pemanfaatan teknologi digital guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Memperkuat kemitraan dalam pembangunan melalui kerja sama kolaboratif dan inovatif dengan pemerintah pusat, daerah lain serta para pemangku kepentingan lainnya baik di dalam negeri maupun dengan mitra internasional dalam berbagai sektor.

3.2.4. Isu Strategis KLHS Kabupaten Maluku Tenggara

Isu Strategis KLHS sesuai analisis yang dilakukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan jangka panjang Tahun 2025–2045 sebagai berikut:

1. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sasaran pokok yang didorong antara lain:

- 1) Membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat
- 2) Meningkatkan jumlah produk ramah lingkungan dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah
- 3) Meningkatkan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan (IKTL) dan ruang terbuka hijau (RTH)
- 4) Meningkatkan proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi
- 5) Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati

2. Kerawanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran pokok yang didorong adalah meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana guna menurunkan dampak/risiko bencana.

3. Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Kurang Memadai

Sasaran pokok yang didorong antara lain:

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan
- 2) Meningkatkan persentase rumah tangga pengguna listrik baik PLN/Non-PLN
- 3) Meningkatkan akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
- 4) Meningkatkan akses sanitasi layak dan berkelanjutan
- 5) Membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat
- 6) Membangun sistem instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT)
- 7) Meningkatkan jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM)
- 8) Sertifikasi pejabat PPID
- 9) Meningkatkan proporsi penduduk yang terlayani mobil broadband

4. Rendahnya Kualitas SDM

Sasaran pokok yang didorong antara lain:

- 1) Meningkatkan tingkat kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan, dan termasuk tenaga pendidik dan kependidikan.
- 2) Meningkatkan persentase guru TK,SD, SMP yang bersertifikasi pendidik.
- 3) Meningkatkan proporsi layanan jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
- 4) Meningkatkan proporsi SJSN Bidang Ketenagakerjaan
- 5) Meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun
- 6) Meningkatkan angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ sederajat
- 7) Meningkatkan angka partisipasi murni (APM) SMP/MTSs/ sederajat
- 8) Penurunan prevalensi anemia pada ibu hamil
- 9) Peningkatan persentase ASI eksklusif pada bayi kurang dari 6 bulan
- 10) Eliminasi Malaria
- 11) Menurunkan angka kesakitan akibat kusta
- 12) Menurunkan angka kesakitan akibat filariasis
- 13) Menurunkan persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun
- 14) Menurunkan prevalensi tekanan darah tinggi
- 15) Menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba
- 16) Menurunkan prevalensi penggunaan minuman keras
- 17) Menurunkan angka kelahiran pada perempuan umur 15-19
- 18) Meningkatkan proporsi layanan jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
- 19) Meningkatkan persentase SD/MI berakreditasi B
- 20) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Sederajat
- 21) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Sederajat
- 22) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini (PAUD)
- 23) Menurunkan jumlah kekerasan fisik pada perempuan
- 24) Menurunkan persentase korban kekerasan terhadap perempuan
- 25) Menurunkan angka unemt need KB
- 26) Meningkatkan proporsi perempuan dalam posisi managerial
- 27) Menurunkan jumlah kasus kejahatan pembunuhan
- 28) Menurunkan prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan,
- 29) Menurunkan prevalensi kekerasan terhadap anak.
- 30) Meningkatkan nilai indeks reformasi birokrasi
- 31) Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik
- 32) Meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD

5. Kerentanan dan Kerawanan Pangan

Sasaran pokok yang didorong antara lain:

- 1) Peningkatan gizi balita
- 2) Peningkatan proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah 1400 kkal/Kapita/hari

- 3) Penurunan prevalensi stunting pada balita
- 4) Peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- 5) Peningkatan nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian/perikanan/ perkebunan

6. Belum optimalnya pengelolaan ekonomi wilayah

Sasaran pokok yang didorong antara lain:

- 1) Peningkatan laju pertumbuhan PDRB per Kapita
- 2) Meningkatkan akses UMKM ke layanan keuangan (perbank-an)
- 3) Meningkatkan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB dengan target 8 % pada tahun 2045
- 4) Meningkatkan laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur
- 5) Meningkatkan proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur
- 6) Meningkatkan proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB
- 7) Meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDRB
- 8) Meningkatkan jumlah proyek pemerintah yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Usaha

7. Kemiskinan dan Pengangguran

Sasaran pokok yang didorong antara lain:

- 1) Menurunkan persentase kemiskinan menjadi 4 persen pada tahun 2045
- 2) Menurunkan angka penerima bantuan tunai (PKH)
- 3) Meningkatkan persentase tenaga kerja formal
- 4) Meningkatkan proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur
- 5) Meningkatkan proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

3.2.5. Rekomendasi Arah Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara sesuai KLHS

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) memberikan sejumlah rekomendasi arah pembangunan dalam bentuk Rumusan Isu Strategis KLHS RPJPD Tahun 2025-2025. Isu Strategis KLHS memungkinkan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan hidup akan menjadi bagian dari keseluruhan upaya pembangunan jangka panjang di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045. Berikut disajikan korelasi dan kesesuaian Isu Strategis jangka Panjang Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 terhadap Isu Strategis KLHS RPJPD Tahun 2025-2029.

Tabel 3.2

Keterkaitan Isu Strategis RPJPD 2025-2045 dengan Isu Strategis KLHS RPJPD 2025-2045

No.	Isu Strategis Kabupaten Maluku Tenggara	Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara
1	<p>Kinerja Ekonomi dan Daya Saing Daerah Rendah</p> <p>Rendahnya akselerasi pertumbuhan serta distribusi ekonomi yang tidak merata yang ditandai dengan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi yang rendah disebabkan produktivitas ekonomi belum memiliki nilai tambah dan kurangnya investasi. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mendorong pengelolaan potensi sektor unggulan melalui hilirisasi dan pengolahan pasca panen dengan pengembangan industri termasuk industri kreatif berikut aspek pemasaran yang didukung pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan riset.</p>	<p>Kerentanan dan Kerawanan Pangan</p> <p>Sasaran pokok yang didorong antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan gizi balita 2) Peningkatan proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah 1400 kkal/Kapita/hari 3) Penurunan prevalensi stunting pada balita 4) Peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) 5) Peningkatan nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian/perikanan/perkebunan <p>Belum optimalnya pengelolaan ekonomi wilayah</p> <p>Sasaran pokok yang didorong antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan laju pertumbuhan PDRB per Kapita 2) Meningkatkan akses UMKM ke layanan keuangan (perbankan) 3) Meningkatkan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB dengan target 8 % pada tahun 2045 4) Meningkatkan laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur 5) Meningkatkan proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur 6) Meningkatkan proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB

No.	Isu Strategis Kabupaten Maluku Tenggara	Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara
		7) Meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDRB 8) Meningkatkan jumlah proyek pemerintah yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Usaha
2	<p>Kualitas Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing Terbatas</p> <p>Membangun manusia Maluku Tenggara yang sehat, cerdas dan berdaya saing, terampil dan berkompeten terhadap terhadap kebutuhan pasar kerja dengan kecakapan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengimplementasikan sistem perlindungan sosial yang adaptif. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan pendapatan untuk mendorong daya beli masyarakat.</p>	1) Rendahnya Kualitas SDM 2) Sasaran pokok yang didorong antara lain: 3) Meningkatkan tingkat kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan, dan termasuk tenaga pendidik dan kependidikan. 4) Meningkatkan persentase guru TK,SD, SMP yang bersertifikasi pendidik. 5) Meningkatkan proporsi layanan jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 6) Meningkatkan proporsi SJSN Bidang Ketenagakerjaan 7) Meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun 8) Meningkatkan angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ sederajat 9) Meningkatkan angka partisipasi murni (APM) SMP/MTSs/ sederajat 10) Penurunan prevalensi anemia pada ibu hamil 11) Peningkatan persentase ASI eksklusif pada bayi kurang dari 6 bulan 12) Eliminasi Malaria 13) Menurunkan angka kesakitan akibat kusta 14) Menurunkan angka kesakitan akibat filariasis 15) Menurunkan persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun 16) Menurunkan prevalensi tekanan darah tinggi 17) Menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba 18) Menurunkan prevalensi penggunaan minuman keras

No.	Isu Strategis Kabupaten Maluku Tenggara	Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara
		19) Menurunkan angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 20) Meningkatkan proporsi layanan jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 21) Meningkatkan persentase SD/MI berakreditasi B 22) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat 23) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat 24) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini (PAUD) 25) Menurunkan jumlah kekerasan fisik pada perempuan 26) Menurunkan persentase korban kekerasan terhadap perempuan 27) Menurunkan angka unemt need KB 28) Meningkatkan proporsi perempuan dalam posisi managerial 29) Menurunkan jumlah kasus kejahatan pembunuhan 30) Menurunkan prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan, 31) Menurunkan prevalensi kekerasan terhadap anak. 32) Meningkatkan nilai indeks reformasi birokrasi 33) Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik 34) Meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD
3	Kapasitas Infrastruktur Wilayah Rendah Penyediaan sarana dan prasarana wilayah termasuk infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur antara lain konektivitas dan aksesibilitas, fasilitas bangunan gedung dan infrastruktur kawasan termasuk	Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Kurang Memadai Sasaran pokok yang didorong antara lain: 1) Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan 2) Meningkatkan persentase rumah tangga pengguna listrik baik PLN/Non-PLN

No.	Isu Strategis Kabupaten Maluku Tenggara	Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara
	<p>wilayah perbatasan negara di Pulau Kei besar guna memperkuat aksesibilitas dan konektivitas termasuk meningkatkan perluasan dan pemerataan cakupan layanan akses infrastruktur dasar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3) Meningkatkan akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan 4) Meningkatkan akses sanitasi layak dan berkelanjutan 5) Membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat 6) Membangun sistem instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) 7) Meningkatkan jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) 8) Sertifikasi pejabat PPID 9) Meningkatkan proporsi penduduk yang terlayani mobil broadband
4	<p>Angka Kemiskinan Tinggi</p> <p>Mengentaskan kemiskinan dengan fokus pada strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu: 1) meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya keluarga pra-sejahtera sesuai karakteristik dan potensi sumber daya yang dimiliki, pemberian bantuan sosial rehabilitasi serta pendampingan usaha; 2) mengurangi beban pengeluaran, dilaksanakan melalui penyaluran bantuan sosial pangan dan non pangan, pelayanan jaminan sosial dan kesehatan, bantuan subsidi pendidikan, serta dukungan penyediaan energi baru dan terbarukan untuk rumah tangga; 3) mengurangi kantong-kantong kemiskinan, dilakukan melalui pembangunan kawasan, berupa aksesibilitas dan konektivitas, akses rumah layak huni, air bersih dan sanitasi, listrik serta jaringan telekomunikasi, termasuk penanganan Kawasan kumuh.</p>	<p>Kemiskinan dan Pengangguran</p> <p>Sasaran pokok yang didorong antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menurunkan persentase kemiskinan menjadi 4 persen pada tahun 2045 2) Menurunkan angka penerima bantuan tunai (PKH) 3) Meningkatkan persentase tenaga kerja formal 4) Meningkatkan proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur 5) Meningkatkan proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

No.	Isu Strategis Kabupaten Maluku Tenggara	Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara
	Penguatan data penduduk miskin yang valid dan terverifikasi secara berjenjang serta diperbarui secara berkala.	
5	<p>Pelestarian Budaya untuk Peningkatan Modal Sosial Belum Optimal</p> <p>Ketahanan sosial, budaya dan ekologi mengalami penurunan yang ditandai dengan tergerusnya nilai-nilai budaya masyarakat serta rendahnya penerapan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Upaya pelestarian budaya untuk peningkatan modal sosial dilakukan melalui pembangunan karakter, penguatan modal sosial masyarakat, mengoptimalkan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan peningkatan nilai-nilai kerukunan beragama, serta melestarikan dan mempromosikan keragaman budaya, adat istiadat dan warisan sejarah Maluku untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.</p>	
6	<p>Iptek dan Inovasi untuk Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Rendah</p> <p>Peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah akan lebih cepat terwujud apabila didorong dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan Iptek dalam pelayanan publik dilakukan melalui pengembangan integrasi layanan berbasis sistem informasi dari Kabupaten sampai ke desa. Didukung dengan peningkatan SDM dan inovasi pelayanan sesuai kondisi dan perubahan lingkungan.</p>	
7	<p>Ketahanan Ekologi, Risiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah Rendah</p>	<p>Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p> <p>Sasaran pokok yang didorong antara lain:</p>

No.	Isu Strategis Kabupaten Maluku Tenggara	Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara
	<p>Risiko bencana daerah masih tinggi yang ditandai dengan kekeringan, gempa bumi dan cuaca ekstrim. Upaya yang dilakukan adalah mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekologi, melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, mengembangkan keberdayaan masyarakat (termasuk memperkuat kearifan lokal dan norma adat yang potensial dalam pembangunan berkelanjutan) dan menyiapkan landasan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim secara berkelanjutan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat 2) Meningkatkan jumlah produk ramah lingkungan dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah 3) Meningkatkan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan (IKTL) dan ruang terbuka hijau (RTH) 4) Meningkatkan proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi 5) Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati <p>Kerawatan Bencana dan Perubahan Iklim</p> <p>Sasaran pokok yang didorong adalah meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana guna menurunkan dampak/risiko bencana.</p>
8	<p>Tata Kelola Pemerintahan Daerah Belum Optimal</p> <p>Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah membangun birokrasi yang bersih, efektif, ramah dan cepat, pelayanan publik yang prima, regulasi yang adaptif. Pengembangan inovasi dan perluasan pemanfaatan teknologi digital guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Memperkuat kemitraan dalam pembangunan melalui kerja sama kolaboratif dan inovatif dengan pemerintah pusat, daerah lain serta para pemangku kepentingan lainnya baik di dalam negeri maupun dengan mitra internasional dalam berbagai sektor.</p>	

BAB IV

VISI DAN MISI

Perumusan visi dan misi pembangunan daerah merupakan tahapan penting dalam penyusunan perencanaan strategis daerah, yang menggambarkan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perumusan visi dan misi pembangunan daerah harus merefleksikan cita-cita bersama seluruh masyarakat untuk diwujudkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya dan kekhasan daerah yang dimiliki sebagai langkah strategis merespon permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang dihadapi.

4.1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dirumuskan berdasarkan kondisi dan karakteristik daerah, isu strategis, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dirumuskan dan disepakati sebagai berikut.

“Kabupaten Maluku Tenggara Maju, Inklusif, Berbudaya dan Berkelanjutan”

Konteks **Maju** dan **Berkelanjutan**, merupakan penyelarasan visi dengan konteks pembangunan jangka panjang di tingkat provinsi dan nasional. Ini untuk memastikan bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara 2025-2045 searah dengan provinsi dan nasional.

Konteks **Berbudaya** dan **Berkelanjutan** merupakan manifestasi keinginan dan harapan yang kuat dari masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara untuk melestarikan nilai-nilai budaya daerah dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berorientasi lingkungan. Empat kata kunci dalam visi diuraikan sebagai berikut.

MAJU	INKLUSIF	BERBUDAYA	BERKELANJUTAN
<ul style="list-style-type: none"> • Dimaknai sebagai kondisi masyarakat Maluku Tenggara yang berkualitas, inovatif dan adaptif terhadap IPTEK, Perekonomian daerah yang tumbuh berbasis potensi lokal, infrastruktur yang handal serta Tatakelola Pemerintahan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimaknai sebagai kondisi dimana hasil-hasil pembangunan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara secara adil dan merata 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimaknai sebagai kondisi kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Kei yang terus dipelihara dan dilestarikan sebagai bagian dari khasanah budaya bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimaknai sebagai kondisi kehidupan masyarakat yang berorientasi lingkungan dan keruangan serta memiliki daya tahan yang Tangguh terhadap kebencanaan dan perubahan iklim

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Maluku Tenggara telah diselaraskan dengan Visi RPJPD Provinsi Maluku dan RPJPN Tahun 2025-2045. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2025–2045 mendukung cita-cita yang ingin dicapai sesuai RPJMN 2025–2045.



4.2. Sasaran Visi

Kondisi yang diinginkan terwujud pada tahun 2045 sebagai cerminan keberhasilan pelaksanaan visi pembangunan jangka panjang daerah dan mendukung capaian visi pembangunan jangka panjang Provinsi Maluku dan Nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.1
Sasaran Visi, Indikator dan Target 2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Base line 2025	Target 2045
1	Manusia Maluku Tenggara yang Berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	71,08	81,13
		Prevalensi Stunting	%	14,59	2,5
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan	%	20,17	1,30
		Indeks Gini	Nilai	0,248	0,220
		Kontribusi PDRB Kabupaten	%	6,97	8,00
3	Infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	62,00	94,00
4	Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif	PDRB Per kapita (juta)	Rp	36,54	66,90
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50	8,00
		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1,32	6,32
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,18	2,01
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,41	4,5
		Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Nilai	51,10/CC	>93,00/AA
6	Lingkungan hidup berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	76,63	85,26

No	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Base line 2025	Target 2045
7	Kabupaten Maluku Tenggara yang aman, damai, harmonis dan demokratis	Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum (Nilai)	Nilai	66,5	95,00
8	Ketahanan Sosial dan Budaya meningkat	Indeks Kerukunan Hidup antarumat beragama	Nilai	100	100
		Indeks Pembangunan Budaya	Nilai	60,00	90,00

Sasaran Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045 harus memberikan kontribusi terhadap pencapaian Target Kinerja Sasaran Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045. Hubungan Sasaran Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Hubungan Sasaran Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025–2045 dengan Sasaran Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025–2045

RPJP Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1. Peningkatan pendapatan per Kapita	(1) PDRB perKapita (RpJuta)	33,11-33,26	146,98–219,94	1. Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif	(1) PDRB Per Kapita (juta)	36,54	66,90
	(2) Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	55,18	98,28		(2) Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	8,00
	(3) Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	6,50-6,64	8,14-8,95		(3) Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	1,29	6,32
			(4) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		5,18	2,01	
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	(4) Tingkat Kemiskinan (%)	13,01–13,51	0,32-0,82	2. Kemiskinan dan ketimpangan menurun	(5) Tingkat Kemiskinan(%)	20,17	1,30
	(5) Rasio gini (Indeks)	0,282-0,287	0,220–0,243		(6) Indeks Gini (poin)	0,248	0,220
	(6) Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,28	0,24		(7) Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	6,97	8,00
3. Daya Saing Daerah di Tingkat Nasional Meningkat	(7) Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (kategori)	Sedang	Sangat Tinggi	3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing	(8) Indeks Daya Saing Daerah	3,41	4,50
	(8) Indeks Daya saing Daerah	20 besar (2023)	15 besar				
					(9) Indeks Reformasi Birokrasi	51,10	93,00

RPJP Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
4. Daya Saing Sumber daya manusia meningkat	(9) Indeks Pembangunan Manusia	74,72	Di atas 85,00	4. Manusia Maluku Tenggara yang Berdaya saing	(10) Indeks Pembangunan Manusia	71,08	81,13
					(11) Prevalensi Stunting	14,59	2,50
	(10) Indeks Modal Manusia	0,48	0,62	-	-	-	-
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju <i>net zero emission</i>	(11) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	42,88	100	5. Lingkungan hidup berkelanjutan			
				(12) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,63	85,26	
				6. Infrastruktur yang merata dan berkualitas	(13) Indeks Infrastruktur Daerah	62	94
				7. Kabupaten Maluku Tenggara yang aman, damai, harmonis dan demokratis	(14) Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum (poin)	66,50	95,00
				8. Ketahanan Sosial dan Budaya meningkat	(15) Indeks Pembangunan Budaya	60,00	90,00
	(16) Indeks Kerukunan Umat Beragama	100	100				
	(12) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	82,43	88,72				

4.3. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJP Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045. Perumusan misi RPJP Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025- 2045 dan Misi RPJP Daerah Provinsi Maluku tahun 2025-2045. Misi pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2045 adalah.

1. Mewujudkan Manusia Maluku Tenggara yang Berdaya saing .

Meningkatkan kualitas manusia Kabupaten Maluku Tenggara yang sehat, cerdas, trampil dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar didukung dengan implementasi perlindungan sosial yang adaptif untuk menghadirkan keadilan bagi semua.

2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Inklusif.

Meningkatkan perekonomian daerah yang maju dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Perekonomian daerah yang maju ditandai dengan meningkatnya produktivitas daerah yang didukung oleh peningkatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, hilirisasi sektor unggulan, pengembangan industri berbasis sumberdaya lokal, pariwisata dan ekonomi kreatif, usaha mikro dan koperasi serta pelibatan multipihak yang didukung ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan riset.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Berdaya Saing Daerah.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas kelembagaan, penerapan meritokrasi, penataan regulasi, digitalisasi, pengelolaan keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan siap bersaing dengan daerah lain sekaligus mendukung daya saing provinsi dan nasional.

4. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian alam melalui konservasi, pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA yang bersifat ramah lingkungan. Konservasi SDA dilakukan baik melalui cara-cara modern, maupun sesuai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat hukum adat, yang ditujukan untuk menjaga ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan air, menerapkan manajemen pengelolaan lingkungan yang sirkular, meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan krisis iklim, serta penataan ruang. Selain itu juga menjalankan target global dan nasional untuk penurunan Gas Rumah Kaca (GRK).

5. Mewujudkan Kabupaten Maluku Tenggara yang aman, damai, harmonis dan demokratis.

Menciptakan kerukunan hidup masyarakat. Jauh dari sikap intoleransi dan diskriminasi. Mengantisipasi dan mencegah potensi konflik masyarakat sedini mungkin, menangani konflik secara kolaboratif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat , tokoh masyarakat dan tokoh perempuan.

6. Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Budaya.

Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang tangguh melalui pembentukan karakter masyarakat yang agamis dan berbudaya, menciptakan keluarga berkualitas, pemuda tangguh berprestasi dan

kaum perempuan yang memiliki kesempatan yang setara dalam pembangunan serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai upaya dini menghadirkan generasi yang berkualitas.

7. Mewujudkan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas.

Menyediakan prasarana dan sarana wilayah, terutama infrastruktur dasar yang berkualitas, ramah lingkungan dan merata di seluruh kecamatan guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Perumusan 7 (tujuh) misi RPJPD Tahun 2025-2045 di atas merujuk pada permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Rumusan Misi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2025-2045

Permasalahan	Isu Strategis	Misi
<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas sumber daya manusia produktif dan berdaya saing terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan manusia Maluku Tenggara yang berdaya saing
<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya akselerasi pertumbuhan, serta distribusi ekonomi yang tidak merata 	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja ekonomi dan daya saing daerah rendah Iptek dan inovasi untuk pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif
<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kinerja tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Tata kelola pemerintahan daerah belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketahanan ekologi, risiko bencana, ancaman perubahan iklim dan kerentanan daya dukung wilayah rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan
<ul style="list-style-type: none"> Stabilitas politik dan keamanan yang cenderung menurun 	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian budaya untuk peningkatan modal sosial budaya belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan Kabupaten Maluku Tenggara yang aman, damai, harmonis dan demokratis
<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya ketahanan sosial dan budaya yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Angka kemiskinan tinggi Pelestarian budaya untuk peningkatan modal sosial budaya belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya
<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelayanan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas infrastruktur wilayah rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas

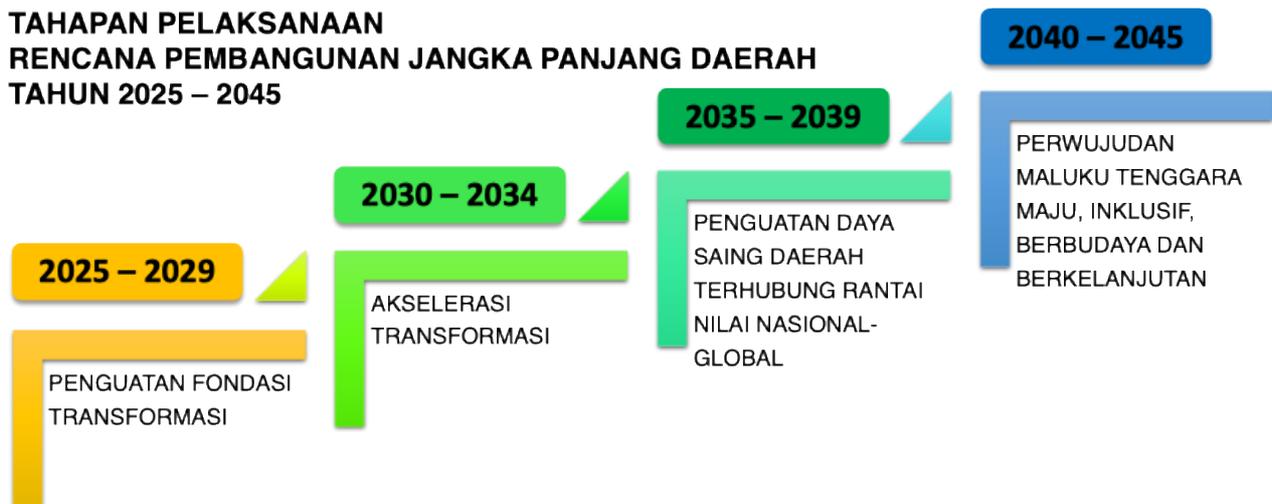
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dirumuskan dengan berdasar pada tujuh Misi Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan Misi Pembangunan tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan periode pembangunan lima tahunan sehingga terbagi menjadi empat tahapan dengan tema pembangunan yang spesifik sesuai dengan misi yang ditetapkan, sekaligus menjadi arah kebijakan prioritas.

Tema pembangunan ditetapkan dalam empat tahapan periodisasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara yang dirumuskan dengan mengacu pada penahapan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045.

Gambar 5.1
Tahapan dan Periodisasi Pelaksanaan Pembangunan
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045



Gambar 5.2
Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara

MISI	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI	AKSELERASI TRANSFORMASI	PENGUATAN DAYA SAING DAERAH TERHUBUNG RANTAI NILAI NASIONAL-GLOBAL	PERWUJUDAN MALUKU TENGGARA MAJU, INKLUSIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN
Misi 1. Mewujudkan Manusia Maluku Tenggara yang Berdaya saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembangunan Manusia Berkarakter, Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing	Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Perwujudan Manusia Maluku Tenggara yang Berdaya Saing
Misi 2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Inklusif	Penciptaan Lapangan Pekerjaan pada Sektor Unggulan Daerah	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Perekonomian Daerah	Keterhubungan Industri Berskala Besar dengan Industri/Usaha Mikro	Perwujudan Perekonomian Daerah Maju dan Inklusif
Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah, Regulasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pemerintah Daerah berbasis IT	Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Adaptif dan ASN Kompetitif	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Misi 4. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sirkular	Pemulihan, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Penguatan Pemulihan, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Perwujudan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Misi 5. Mewujudkan Kabupaten Maluku Tenggara yang Aman, Damai, Harmonis dan Demokratis	Penciptaan Kerukunan Hidup Masyarakat, Aman, Damai Harmonis dan Demokratis	Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Masyarakat	Penguatan Keamanan, Kedamaian, dan Keharmonisan Hidup Masyarakat yang Demokratis	Perwujudan Kabupaten Maluku Tenggara yang Aman, Damai, Harmonis dan Demokratis
Misi 6. Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Budaya	Penciptaan Kehidupan Sosial dan Budaya yang Tangguh	Pengaktualisasian nilai-nilai Sosial dan Budaya dalam Kehidupan Bermasyarakat	Penguatan Aktualisasi nilai-nilai Sosial dan Budaya mengantisipasi Infiltrasi Budaya Asing	Perwujudan Ketahanan Sosial dan Budaya
Misi 7. Mewujudkan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur Berkualitas	Optimalisasi Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas	Penguatan Kapasitas Infrastruktur yang Berkualitas	Perwujudan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas

5.2. SASARAN POKOK

Sasaran Pokok RPJPD tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Sasaran Pokok RPJPD memuat Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah dan Indikator Utama Pembangunan. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2045 diuraikan sebagai berikut.

Misi 1. Mewujudkan Manusia Maluku Tenggara yang Berdaya saing, dengan 3 (tiga) sasaran pokok:

- 1) Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat
- 2) Meningkatnya Akses dan kualitas Pendidikan
- 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Misi 2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Inklusif, dengan 1 (satu) sasaran pokok:

- 1) Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah

Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan 1 (satu) sasaran pokok:

- 1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah

Misi 4. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, dengan 3 (tiga) sasaran pokok:

- 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup
- 2) Meningkatnya Kemandirian Pangan, dan ketersediaan air bersih
- 3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim

Misi 5. Mewujudkan Kabupaten Maluku Tenggara yang Aman, Damai, Harmonis dan Demokratis, dengan 1 (satu) sasaran pokok, yaitu.

- 1) Meningkatnya kondisi daerah yang aman, damai, harmonis dan demokratis

Misi 6. Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Budaya, dengan 1 (satu) sasaran pokok:

- 1) Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya

Misi 7. Mewujudkan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas, dengan 1 (satu) sasaran pokok:

- 1) Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang yang merata dan berkualitas

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang nasional yang disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Maluku Tenggara. Arah Pembangunan yang dijabarkan menurut Misi Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut.

Tabel. 5.1
Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1. Mewujudkan Manusia Maluku Tenggara yang Berdaya saing	1) Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Untuk Semua
	2) Meningkatnya Akses dan kualitas Pendidikan	Pendidikan Kualitas Yang Merata
	3) Meningkatnya kesejahteraan Sosial	Perlindungan Sosial yang Adaptif Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Inklusif	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah	Produktivitas Ekonomi Daerah
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
4. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas
	2) Meningkatnya Kemandirian Pangan, dan ketersediaan air bersih	Berketahanan Pangan dan ketersediaan air bersih
	3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	Tangguh terhadap bencana
5. Mewujudkan Kabupaten Maluku Tenggara yang Aman, Damai, Harmonis dan Demokratis	Meningkatnya kondisi daerah yang aman, damai, harmonis dan demokratis	Daerah Aman, Damai, Harmonis dan Demokratis
6. Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
7. Mewujudkan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang yang merata dan berkualitas	Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Ruang

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah disesuaikan dengan karakteristik daerah serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Arah kebijakan transformasi pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2045 diuraikan sebagai berikut.

Tabel. 5.3
Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2025–2045

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
1	Mewujudkan Manusia Maluku Tenggara yang Berdaya saing	1) Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Untuk Semua	(1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
				(2) Percepatan penurunan stunting terutama dengan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, serta percepatan eliminasi malaria.
				(3) Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses
				(4) Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis.
				(5) Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antarpulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan kesehatan
				(6) Perluasan akses pelayanan kesehatan terjangkau didukung digitalisasi TIK dan SDM yang profesional, serta peningkatan status dan kualitas RSUD Karel Sadsuitubun sebagai rumah sakit rujukan di kawasan Maluku Tenggara
		2) Meningkatnya Akses dan kualitas Pendidikan	Pendidikan Kualitas Yang Merata	(1) Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar)
				(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau seluruh SD/MI – SMP/Mts.
				(3) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas tenaga dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.
				(4) Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antarpulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan pendidikan

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Perlindungan Sosial yang Adaptif	<p>(1) Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif terintegrasi.</p> <p>(2) Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.</p> <p>(3) Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial</p> <p>(4) Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.</p> <p>(5) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pension bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas</p> <p>(6) Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.</p>
2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Inklusif	1) Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	<p>(1) Pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan perikanan tangkap, perikanan budidaya (rumput laut), pertanian dan perkebunan serta pengembangan kawasan pariwisata yang berkelanjutan.</p> <p>Catatan:</p>

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
				<p>a. Perikanan tangkap diarahkan untuk perwujudan dan optimalisasi kawasan sebagai zona produksi perikanan yang menjawab kebutuhan konsumsi masyarakat dan komoditas unggulan ekspor TCT.</p> <p>b. Perikanan budidaya melalui hilirisasi produk Rumput Laut dalam skala Industri, didukung pengelolaan kawasan budidaya rumput laut pada 11 klaster budidaya.</p> <p>c. Pertanian skala kawasan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi dengan komoditi unggulan sayur-sayuran, buah, cabai, dan bawang.</p> <p>d. Perkebunan diarahkan pada pengelolaan kelapa di Pulau Kei Besar, dengan luasan areal tanam dan areal produksi tertinggi di Provinsi Maluku, maka Pengelolaan Kelapa didorong untuk mencapai skala industri dalam 20 tahun ke depan.</p> <p>e. Kekayaan alam pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara didorong untuk berkembang menuju skala industri, dengan lokasi pengembangan pada kawasan sebelah barat Pulau Kei Kecil.</p> <p>(2) Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan vokasional yang <i>link and match</i> dengan pasar tenaga kerja terutama di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri.</p> <p>(3) Pemberian dukungan percepatan pengembangan lumbung ikan nasional termasuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan</p> <p>(4) Pengembangan industri pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis seni musik, kriya (tenun), serta seni pahat dan ukir kayu melalui penguatan strategi pemasaran serta peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat pelaku usaha.</p> <p>(5) Penguatan pengendalian inflasi daerah</p>

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
				<p>(6) Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan yang didukung penerapan blue dan green economy, digitalisasi dan kemajuan teknologi</p> <p>(7) Peningkatan keterkaitan IKM dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p> <p>(8) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi</p> <p>(9) Peningkatan produktivitas BUMD</p> <p>(10) Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata dan industri</p>
		2) Terwujudnya Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penguatan pasokan energi ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
		3) Terwujudnya Ekosistem Digital di seluruh sektor	Transformasi Digital	<p>(1) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok</p> <p>(2) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran)</p>
		4) Meningkatnya ketangguhan daerah wilayah perbatasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	Peningkatan kualitas pembangunan daerah di wilayah perbatasan negara termasuk penguatan karakter dan memperkokoh jati diri bangsa
		5) Meningkatnya integrasi ekonomi domestik	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Peningkatan akses pasar nasional dan global untuk meningkatkan segmentasi pasar komoditi unggulan daerah

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		6) Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi perkotaan dan perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan eksisting melalui peningkatan investasi dan pengembangan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sebagai pusat pertumbuhan wilayah.
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing	1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> (1) Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah (2) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (3) Penguatan integritas partai politik (4) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan public masyarakat (5) Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan asset daerah (6) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan daerah (7) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi, mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi (8) Penyusunan kebijakan afirmatif mengedepankan kontekstual kewilayahan untuk mendorong pembangunan wilayah (9) Penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen resiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai <i>end user</i> (10) Penguatan manajemen talenta (<i>talent pool</i>) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya (11) Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran (12) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah (13) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
				<p>(14) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional</p> <p>(15) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen resiko</p> <p>(16) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan</p> <p>(17) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i></p> <p>(18) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan jasa jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital</p> <p>(19) Penguatan system pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel</p>
4	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	<p>1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>2) Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan</p>	<p>Lingkungan Hidup yang Berkualitas</p> <p>Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan</p>	<p>(1) Peningkatan penjagaan kualitas air, lahan dan udara melalui riset dan inovasi termasuk pelibatan komunitas pecinta lingkungan dan masyarakat hukum adat</p> <p>(2) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir</p> <p>(3) Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum</p> <p>(4) Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang) 10 persen residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan 100 persen sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal 35 persen melalui daur ulang)</p> <p>(1) Penguatan kemandirian pangan, Ketahanan energi dan ketahanan air melalui perlindungan rehabilitasi wilayah tangkapan air, riset dan inovasi sistem, dan teknologi pertanian rendah karbon, serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan pemanfaatan energi surya, panas bumi, angin, air, dan biomassa/biofuel dengan mengembangkan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik</p> <p>(2) Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan energy baru dan energy terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik ; Pengembangan</p>

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
				<p>Sistem Ketenagalistrikan skala kecil (<i>Isolated Mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas ; Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi</p> <p>(3) Mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu: (i) pembangunan tampungan air serbaguna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari hari masyarakat. (ii) pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung kemandirian pangan lokal</p>
		<p>3) Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang resiliens terhadap bencana dan perubahan iklim</p>	<p>Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</p>	<p>(1) Peningkatan pencegahan dan adaptasi perubahan iklim (diantaranya sea level rise di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) melalui pengadaan sarana prasarana (<i>green infrastructure</i> dan <i>nature-based solutions</i> dan tata kelola resiko serta mitigasi bencana</p> <p>(2) Pengurangan resiko kebencanaan antara lain melalui sistem peringatan dini kebencanaan</p> <p>(3) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal</p>
<p>5</p>	<p>Mewujudkan Kabupaten Maluku Tenggara yang Aman, Damai, Harmonis dan Demokratis</p>	<p>Meningkatnya kualitas penegakan hokum yang berkeadilan, kamani daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial</p>	<p>Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional dan Demokrasi Substansial</p>	<p>(1) Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.</p> <p>(2) Penguatan karakter dan jati diri bangsa</p>

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
6	Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Budaya	1) Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	(1) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama (2) Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat melalui penguatan ikatan antarkelompok masyarakat, pelibatan tokoh adat/agama sebagai mitra utama pemerintah.
		2) Terbentuknya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	(1) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi dan tokoh adat dan agama. (2) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan (3) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi dan tokoh adat dan agama (4) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
7	Mewujudkan Infrastruktur yang Meratadan Berkualitas	1) Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang yang merata dan berkualitas	Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Ruang	1) Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan dan jembatan) terutama di wilayah kesulitan geografis tinggi seperti di Pulau Kei Besar 2) Pengembangan infrastruktur irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian pada klaster pertanian di pulau Kei Kecil dengan pemanfaatan Sumber Air Evu 3) Pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif serta pengelolaan sampah yang terpadu 4) Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan 5) Eliminasi praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
				<ul style="list-style-type: none"> 6) Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah 7) Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal 8) Peningkatan kualitas penataan ruang melalui penyediaan RDTR Kota Langgur dan Ibu Kota Kecamatan serta pengelolaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup serta resiko bencana 9) Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi darat dan air kewenangan kabupaten untuk meningkatkan kualitas mobilitas orang dan barang 10) Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standard keandalan bangunan 11) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja. 12) Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan termasuk peningkatan koordinasi pembangunan jalan untuk penyelesaian koridor konektivitas Trans Maluku dan Trans Kei Besar sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh kecamatan 13) Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim 14) Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau dan berkelanjutan 15) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau dan sesuai dengan karakteristik wilayah 16) Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
				17) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup serta resiko bencana

Tabel. 5.4
Pelaksanaan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Dalam Tahapan RPJPD Tahun 2025–2045

Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan	Periode	TAHAP PELAKSANAAN			
		I	II	III	IV
MISI 1: Mewujudkan Manusia Maluku Tenggara yang Berdaya saing					
Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat					
<ul style="list-style-type: none"> Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Percepatan penurunan stunting terutama dengan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, serta percepatan eliminasi malaria. 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis. 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antarpulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan kesehatan 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Perluasan akses pelayanan kesehatan terjangkau didukung digitalisasi TIK dan SDM yang profesional, serta peningkatan status dan kualitas RSUD Karel Sadsuitubun sebagai rumah sakit rujukan di kawasan Maluku Tenggara 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya Akses dan kualitas Pendidikan					
<ul style="list-style-type: none"> Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar) 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau seluruh SD/MI – SMP/Mts. 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas tenaga dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antarpulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan pendidikan 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓

Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan	Periode	TAHAP PELAKSANAAN			
		I	II	III	IV
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat					
<ul style="list-style-type: none"> Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif terintegrasi. 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pension bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
MISI 2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Inklusif					
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah					
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan perikanan tangkap, perikanan budidaya (rumput laut), pertanian dan perkebunan serta pengembangan kawasan pariwisata yang berkelanjutan. 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan vokasional yang link and match dengan pasar tenaga 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑

Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan	Periode	TAHAP PELAKSANAAN			
		I	II	III	IV
kerja terutama di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri.					
<ul style="list-style-type: none"> Pemberian dukungan percepatan pengembangan lumbung ikan nasional termasuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan industri pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis seni musik, kriya (tenun), serta seni pahat dan ukir kayu melalui penguatan strategi pemasaran serta peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat pelaku usaha. 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pengendalian inflasi daerah 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan yang didukung penerapan blue dan green economy, digitalisasi dan kemajuan teknologi 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keterkaitan IKM dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha. 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produktivitas BUMD 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata dan industri 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pasokan energi ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses pasar nasional dan global untuk meningkatkan segmentasi pasar komoditi unggulan daerah 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan eksisting melalui peningkatan investasi dan pengembangan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sebagai pusat pertumbuhan wilayah 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
Terwujudnya Ekosistem Digital di seluruh sektor					
<ul style="list-style-type: none"> Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓

Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan	Periode	TAHAP PELAKSANAAN			
		I	II	III	IV
jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok					
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran) 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
Meningkatnya ketangguhan daerah wilayah perbatasan					
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pembangunan daerah di wilayah perbatasan negara termasuk penguatan karakter dan memperkokoh jati diri bangsa 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan berdaya saing					
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah					
<ul style="list-style-type: none"> Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan integritas partai politik 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan asset daerah 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan daerah 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan proses pengembangan karier, promosi, mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kebijakan afirmatif mengedepankan kontekstual kewilayahan untuk mendorong pembangunan wilayah 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen resiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai end user 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan manajemen talenta (talent pool) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑

Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan	Periode	TAHAP PELAKSANAAN			
		I	II	III	IV
<ul style="list-style-type: none"> • Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan jasa jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan system pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
MISI 4: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan					
Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup					
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penjagaan kualitas air, lahan dan udara melalui riset dan inovasi termasuk pelibatan komunitas pecinta lingkungan dan masyarakat hukum adat 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang) 10 persen residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan 100 persen sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal 35 persen melalui daur ulang) 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
Meningkatnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan					

Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan	Periode	TAHAP PELAKSANAAN			
		I	II	III	IV
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kemandirian pangan, Ketahanan energi dan ketahanan air melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air, riset dan inovasi sistem, dan teknologi pertanian rendah karbon, serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan dan pemanfaatan energi surya, panas bumi, angin, air, dan biomassa/biofuel dengan mengembangkan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang resiliens terhadap bencana dan perubahan iklim					
<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan energy baru dan energy terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik ; Pengembangan Sistem Ketenagalistrikan skala kecil (Isolated Mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu : (i) pembangunan tampungan air serbaguna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari hari masyarakat. (ii) pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung kemandirian pangan lokal 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pencegahan dan adaptasi perubahan iklim (diantaranya sea level rise di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) melalui pengadaan sarana prasarana (green infrastructure dan nature-based solutions dan tata kelola resiko serta mitigasi bencana 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan risiko kebencanaan antara lain melalui sistem peringatan dini kebencanaan 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
MISI 5: Mewujudkan Kabupatenn Maluku Tenggara yang Aman, Damai, Harmonis dan Demokratis					
Meningkatnya kualitas penegakkan hukum yang bekeadilan, keamanan daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial					
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal. 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan karakter dan jati diri bangsa 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
MISI 6: Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Budaya					

Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan	Periode	TAHAP PELAKSANAAN			
		I	II	III	IV
Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya					
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat melalui penguatan ikatan antarkelompok masyarakat, pelibatan tokoh adat/agama sebagai mitra utama pemerintah 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
Terbentuknya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif					
<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi dan tokoh adat dan agama 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi dan tokoh adat dan agama 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
MISI 7: Mewujudkan Infrastruktur yang Merata dan berkualitas					
Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang yang merata dan berkualitas					
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan dan jembatan) terutama di wilayah kesulitan geografis tinggi seperti di Pulau Kei Besar 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian pada klaster pertanian di pulau Kei Kecil dengan pemanfaatan Sumber Air Evu 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif serta pengelolaan sampah yang terpadu 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓

Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan	Periode	TAHAP PELAKSANAAN			
		I	II	III	IV
<ul style="list-style-type: none"> Eliminasi praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas penataan ruang melalui penyediaan RDTR Kota Langgur dan Ibu Kota Kecamatan serta pengelolaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup serta resiko bencana 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi darat dan air kewenangan kabupaten untuk meningkatkan kualitas mobilitas orang dan barang 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standard keandalan bangunan 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan termasuk peningkatan koordinasi pembangunan jalan untuk penyelesaian koridor konektivitas Trans Maluku dan Trans Kei Besar sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh kecamatan 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau dan berkelanjutan 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau dan sesuai dengan karakteristik wilayah 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan 	2025 - 2045	✓	✓	✓	✓

Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan	Periode	TAHAP PELAKSANAAN			
		I	II	III	IV
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup serta resiko bencana 	2025 - 2045	☑	☑	☑	☑

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

IUP merupakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan Provinsi Maluku dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Terdapat 45 (empat puluh lima) IUP yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045 sebagai penjabaran terhadap 12 (duabelas) Arah Pembangunan Daerah. Masing-masing IUP memiliki angka baseline sebagai dasar penghitungan awal pada tahun 2025 serta target periodik yang ditetapkan selama empat periode RPJMD. IUP Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025–2045 ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 5.5
Indikator Utama Pembangunan Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup	Tahun	71,14	71,99	73,05	74,11	75,39
		2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	2	1	1	1	1
		3. Prevalensi Stunting	%	14,59	10,53	6,49	3,47	2,5
		4. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	85,00	100	100	100	100
		5. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	82,00	84,00	100	100	100
		6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	97,72	100	100	100	99,50
Meningkatnya Akses dan kualitas Pendidikan	Pendidikan Kualitas Yang Merata	7. Kemampuan Literasi SD/MI	Nilai	1,40	2,5 – 3,00	2,5 – 3,00	2,5 – 3,00	2,5 – 3,00
		8. Kemampuan Numerasi SD/MI	Nilai	1,48	2,5 – 3,00	2,5 – 3,00	2,5 – 3,00	2,5 – 3,00
		9. Kemampuan Literasi SMP/MTs	Nilai	1,35	2,5 – 3,00	2,5 – 3,00	2,5 – 3,00	2,5 – 3,00
		10. Kemampuan Numerasi SMP/MTs	Nilai	1,56	2,5 – 3,00	2,5 – 3,00	2,5 – 3,00	2,5 – 3,00
		11. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	10,82	11,71	12,60	13,49
		12. Harapan lama Sekolah	Tahun	12,94	13,13	13,92	14,71	15,50
Meningkatnya kesejahteraan Sosial	Perlindungan Sosial yang Adaptif	13. Tingkat Kemiskinan	%	20,17	15,95	12,75	6,39	1,30
		14. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,18	3,18	2,78	2,39	2,01
		15. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota	%	45,59	90,00	100	100	100
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	16. Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	63,88	70,00	75,00	80,00	85,00
		17. Indeks Pembangunan Gender	Nilai	96,79	97,10	97,25	97,50	98,00
		18. Indeks Kabupaten Layak Anak (Nilai)	Nilai	615	666,25	717,5	768,75	820

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah	Produktivitas Ekonomi Daerah	19. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1,32	2,57	3,82	5,07	6,32
		20. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,97	2,18	2,62	3,06	3,5
		21. Kontribusi PDRB Kabupaten	%	6,97	7,00	7,2	7,5	8,0
		22. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	Angka	1.017	1.512	2.008	2.504	3.000
		23. Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,9	2,8	3,45	4,2	5,0
		24. PDRB Perkapita (juta)	Rp	36,54	42,00	50,3	58,6	66,9
		25. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50	6,50	7,0	7,5	8,00
		26. Pertumbuhan Nilai Investasi	%	0,9	1,38	2,08	2,78	3,5
		27. Proporsi PDRB sektor Sekunder dan tersier terhadap Total Nilai PDRB	%	69,84	71,13	72,42	73,31	75,00
28. Tingkat Inflasi	%	2,0-2,5	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	29. Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,41	3,97	4,14	4,32	4,5
		30. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	51,10/ CC	70,50/BB	85/A	90/A	93,00/AA
		31. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,25	3,00	3,25	3,50	3,75
		32. Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,10	4,10	4,32	4,54	4,78
		33. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	72,01	79,32	81,21	83,10	85,00
		34. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Nilai	3,50	4,50	4,66	4,82	>5,0/Anti Korupsi
		35. Indeks Inovasi Daerah	Nilai	35,18	45,00	50,02	55,04	> 60,06/ Sangat Inovatif
Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup	Lingkungan Hidup Berkualitas	36. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	76,63	83,17	83,86	84,82	85,26

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Meningkatnya ketahanan pangan, dan ketersediaan air bersih	Berketahanan Pangan dan ketersediaan air bersih	37. Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	49,53	50,38	53,4	56,8	60,2
		38. Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum	%	96	100	100	100	100
Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	Tangguh terhadap bencana	39. Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	172,11	171,91	162,27	152,64	143,00
Meningkatnya kondisi daerah yang aman, damai, harmonis dan demokratis	Daerah Aman, Damai, Harmonis dan Demokratis	40. Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum	Nilai	66,5	75	85	90	95,00
Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	41. Indeks Kerukunan Hidup antarumat beragama	Nilai	100	100	100	100	100
		42. Indeks Pembangunan Budaya	Nilai	60,0	71,0	76,33	82,66	90
Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang yang merata dan berkualitas	Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Ruang	43. Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	62,00	70,00	78,00	86,00	94,00
		44. Luasan Kawasan Pemukiman Sehat	Ha	11,00	18	23	28	33
		45. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	74,00	82,00	88	94	100

BAB VI PENUTUP

Bagian terakhir dari dokumen RPJPD adalah penutup, yang memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

6.1 Kaidah Pelaksanaan dan Pembiayaan Pembangunan

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Dalam upaya menjawab dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2045, maka dokumen RPJPD menjadi rujukan dan pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan di bawahnya, meliputi kebijakan pembangunan jangka menengah (5 tahunan) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kebijakan pembangunan tahunan di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD yang disusun setiap tahun memuat arah kebijakan yang selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD yang dijabarkan di dalam RPJMD. RKPD yang memuat substansi arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi dasar untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD.

Mekanisme berkesinambungan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, akan mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Upaya untuk mendorong konsistensi diperkuat dengan mekanisme pengendalian perencanaan anggaran, agar benar-benar selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah untuk mewujudkan Visi dan Misi.

6.1.2 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan dalam periode jangka panjang, tahun 2025 s.d 2045 dijabarkan dalam 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah, masing-masing: 1) Tahap I Tahun 2025-2029; 2) Tahap II Tahun 2030-2034; 3) Tahap III Tahun 2035-2039 dan 4) Tahap IV Tahun 2040-2045. Setiap tahapan pembangunan jangka menengah merupakan proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD 2025–2045).

Kebijakan pembangunan jangka menengah yang disusun setiap 5 (lima) tahun adalah ruang pengendalian terhadap arah pembangunan jangka menengah untuk menuju dan mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka panjang. Di samping itu, pada setiap akhir dari pelaksanaan perencanaan jangka menengah, dilakukan evaluasi capaian kinerja 5 (lima) tahunan. Evaluasi ini

sekaligus menjadi gambaran evaluasi terhadap kinerja pembangunan jangka panjang dalam upaya menuju dan mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2045.

6.1.3 Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada.

Dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045, manajemen risiko diperlukan dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dan berpotensi memberikan dampak negative terhadap upaya pencapaian dan/atau perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Maluku Tenggara 2025–2045.

Manajemen Risiko terhadap pencapaian RPJPD 2025-2045 dilaksanakan secara berkala dalam setiap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

6.2 Mekanisme Perubahan

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342, perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Adapun dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

6.3 Kerja Sama Wajib Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka daerah kabupaten/kota yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi, diamanatkan untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib Antardaerah. Sehubungan dengan itu, posisi Kabupaten Maluku Tenggara yang berbatasan dengan Kota Tual dalam wilayah Provinsi Maluku melaksanakan Kerjasama Wajib Antardaerah, yang berfokus pada:

1. Mendukung pelaksanaan dan implementasi kebijakan pembangunan nasional sentra industri berbasis komoditas TCT (Tuna Cakalang Tongkol) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tenggara bertindak selaku daerah pemasok;
2. Kerjasama dalam bidang perdagangan, komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rangka memenuhi permintaan pasar, serta dalam upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga untuk pengendalian inflasi.
3. Kerjasama dalam pengelolaan potensi Rumput Laut sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN di wilayah Kepulauan Kei.
4. Kerjasama wajib dalam mendukung kelancaran pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan.

6.4 Komunikasi Publik

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif maka dibutuhkan komunikasi publik. Apabila hal tersebut dilakukan dengan baik maka diharapkan publik dapat memahami program dan kebijakan pemerintah sehingga dapat berpartisipasi pada setiap tahapan pembangunan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pembangunan.

Dalam komunikasi publik terdapat tiga prinsip dasar sebagai pokok utama untuk diperhatikan yaitu (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah, murah serta (iii) keterlibatan semua komponen masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi publik yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2025-2045 memiliki prinsip “tidak ada yang tertinggal” dan partisipasi yang bermakna. Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah provinsi/pusat, dan masyarakat. Komunikasi kepada OPD dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi untuk mendapat masukan OPD terhadap prioritas pembangunan, komunikasi kepada pemerintah provinsi/pusat dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat nasional untuk mendapatkan dukungan pembiayaan pembangunan daerah. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui metode-metode komunikasi yang dapat dijangkau masyarakat dan memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik atau dukungan.

Komunikasi publik yang dilakukan dengan terbuka, jelas, cepat, tepat dan objektif akan mampu mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan

6.4.1 Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Publik

Demi mewujudkan visi Kabupaten Maluku Tenggara Maju, Inklusif, Berbudaya dan Berkelanjutan pada tahun 2045 diperlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik di Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan melalui perluasan sumber-sumber pembiayaan dalam desentralisasi dan pengembangan inovasi skema pembiayaan daerah. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang dapat ditingkatkan antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui optimalisasi terhadap hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

6.4.2 peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Non Publik

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (seperti dana pensiun, asuransi) (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil (iii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru, dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (blended financing) melalui pemanfaatan dana bersifat katalitik seperti dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan daerah.

6.4.3 Manajemen Investasi

Kapasitas pembiayaan dapat digunakan secara optimal apabila terdapat manajemen investasi dalam rangka peningkatan kapasitas pembiayaan baik sektor publik maupun sektor non publik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penguatan manajemen investasi yaitu; 1) ketepatan melakukan identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah, 2) penyiapan dan penilaian proyek investasi publik, 3) penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah dan provinsi, 4) pengembangan inovasi dalam aspek pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik, 5) penyempurnaan regulasi tata kelola dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik, 6) peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap seluruh aspek investasi publik.

Demikian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2045 disusun sebagai pedoman kebijakan pembangunan dalam periode jangka panjang tahun 2025–2045.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN



Sesuai Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEBBIE P. J. BUNGA, SH